

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

2023



PEMERINTAH
KABUPATEN GOWA



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 1⁸ TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2023 yakni untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

RKPD disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan :

- a. rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023
- b. rencana strategis ke dalam rencana operasional Daerah;
- c. perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Daerah;
- d. rencana kerja (Renja) perangkat Daerah;
- e. kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan penunjang pelayanan urusan pemerintahan Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- f. laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD; dan
- g. informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

BAB III

RKPD

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang berlaku untuk periode waktu satu tahun.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

A. BAB I : PENDAHULUAN.

- B. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
- C. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
- D. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
- E. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
- F. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.
- G. BAB VII : PENUTUP.

- (3) Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan RKPD untuk Pelaksanaan Program Pembangunan sebagaimana yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dengan tujuan mempercepat penyelesaian masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2023 serta masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2023;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap kelima dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD atau laporan kinerja semester dan tahunan atas pelaksanaan RKA yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya semester yang berkenaan.

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.

Pasal 7

Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah, wajib memperhatikan RKPD Tahun 2023 dalam merencanakan RKA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

PERUBAHAN RKPD

Pasal 8

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



KAMSINA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-13
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-14
1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD	I-15
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Gowa.....	II-1
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana	II-9
2.1.3 Kondisi Demografi.....	II-13
2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah	II-16
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-30
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-30
2.2.2 Seni, Budaya, dan Olahraga	II-66
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-66
2.3.1 Pelayanan Dasar	II-66
2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-120
2.3.3 Layanan Pilihan.....	II-188
2.3.4 Penunjang Urusan.....	II-194
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-209
2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ...	II-209
2.4.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita	II-210

2.4.3	Nilai Tukar Petani	II-210
2.4.4	Presentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa.....	II-211
2.4.5	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB/PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	II-211
2.4.6	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	II-212
2.4.7	Angka kriminalitas yang Tertangani.....	II-212
2.5	Capaian Indikator Pembangunan Daerah	II-213
2.5.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-213
2.5.2	Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-217
2.5.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-251
2.5.4	Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021.....	II-307
2.5.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	II-311
2.6	Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan.....	II-364
2.6.1	Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-364
2.6.2	Evaluasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-364
2.6.3	Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).....	II-367
2.7	Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Tahun 2021	II-368
2.7.1	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun 2021.....	II-388
2.7.2	Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun Berjalan	II-388
2.8	Permasalahan Pembangunan.....	II-390
2.8.1	Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran pembangunan daerah.....	II-390

2.8.2	Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-405	
2.9	Isu Strategis	II-405	
2.9.1	Isu Strategis Global.....	II-406	
2.9.2	Isu Strategis Nasional.....	II-411	
2.9.3	Isu Strategis Pembangunan Daerah	II-416	
2.10	Inovasi Pembangunan Tahun 2023	II-418	
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH			III-1
3.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1	
3.1.1	Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah	III-2	
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2023	III-9	
3.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-11	
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-11	
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-14	
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-30	
3.2.4	Pendanaan Pembangunan lainnya.....	III-33	
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023.....			IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1	
4.2.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023	IV-29	
4.2.1	Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi	IV-30	
4.2.2	Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Maksimal	IV-60	
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....			V-1
5.1.	Kerangka Pendanaan Tahun 2023.....	V-2	
5.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	V-3	
5.3	Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	V-18	
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			VI-1
6.1.	Indikator Makro Pembangunan	VI-1	
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-3	

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VI-6
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	VI-12
6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	VI-18
BAB VII PENUTUP.....	VII-1
7.1. Kaidah Pelaksanaan	VII-1
7.2 Kesimpulan	VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD	I-4
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen Rencana	I-4
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Gowa.....	II-1
Gambar 3.1	Tema, Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	II-10
Gambar 3.2	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	II-11

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Gowa.....	II-2
Tabel 2. 2.	Ibukota kecamatan, luas total area, persentase luas Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021s wilayah & Jarak ke Ibukota Kabupaten Gowa.....	II-3
Tabel 2. 3.	Luas Daerah Menurut Ketinggian Daerah per Kecamatan di Kabupaten Gowa	II-5
Tabel 2. 4.	Panjang Sungai Utama dan Luas Daerah Alirannya di Kabupaten Gowa Tahun 2020	II-7
Tabel 2. 5.	Keadaan Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Gowa Tahun 2021.....	II-8
Tabel 2. 6.	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Gowa Tahun 2021	II-9
Tabel 2. 7	Data Kejadian Bencana di Kabupaten Gowa Tahun 2021	II-12
Tabel 2. 8.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2021	II-13
Tabel 2. 9.	Sex Rasio Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.....	II-15
Tabel 2. 10.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa, 2021	II-15
Tabel 2. 11.	Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Gowa	II-17
Tabel 2. 12.	Lokasi Kawasan Tanaman Pertanian Pangan Kabupaten Gowa.....	II-18
Tabel 2. 13.	Lokasi Kawasan Tanaman Perkebunan Kabupaten Gowa....	II-19
Tabel 2. 14.	Lokasi Kawasan Perikanan Darat Kabupaten Gowa	II-20
Tabel 2. 15.	Kawasan Lindung Lainnya Di Kabupaten Gowa	II-27
Tabel 2. 16.	Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021	II-32
Tabel 2. 17.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 (%).....	II-35
Tabel 2.18.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021	II-36
Tabel 2. 19.	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021	II-37
Tabel 2. 20.	Perbandingan Nilai Inflasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021.....	II-40

Tabel 2. 21.	Perbandingan Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-42
Tabel 2. 22	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gowa, 2017–2021	II-43
Tabel 2. 23.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-43
Tabel 2. 24.	Perbandingan IPM Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2017-2021	II-45
Tabel 2. 25.	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-47
Tabel 2. 26.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-47
Tabel 2. 27.	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-48
Tabel 2. 28.	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) Tahun 2017-2021	II-51
Tabel 2. 29.	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-52
Tabel 2. 30.	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Gowa Tahun 2017–2021	II-53
Tabel 2. 31.	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa Tahun 2021	II-54
Tabel 2. 32.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-54
Tabel 2. 33.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-55
Tabel 2. 34.	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-56
Tabel 2. 35.	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-57
Tabel 2. 36.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-57
Tabel 2. 37.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021	II-58
Tabel 2. 38.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-58
Tabel 2. 39.	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-59
Tabel 2. 40.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-60

Tabel 2. 41.	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-60
Tabel 2. 42.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-61
Tabel 2. 43.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-62
Tabel 2. 44.	Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021 (Persen).....	II-62
Tabel 2. 45.	Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-63
Tabel 2. 46.	Status Perkembangan Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.....	II-63
Tabel 2. 47.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-66
Tabel 2. 48.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-67
Tabel 2. 49	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-68
Tabel 2. 50	Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-69
Tabel 2. 51	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-69
Tabel 2. 52	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-70
Tabel 2. 53.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-71
Tabel 2. 54	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-71
Tabel 2. 55	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran (Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-72
Tabel 2. 56	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-72
Tabel 2. 57	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-73
Tabel 2. 58	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-73
Tabel 2. 59	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-74
Tabel 2. 60	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-75
Tabel 2. 61	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-75

Tabel 2. 62	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-76
Tabel 2. 63	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-76
Tabel 2. 64	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-77
Tabel 2. 65	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-77
Tabel 2. 66	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-78
Tabel 2. 67	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Gowa Tahun 2017- 2021	II-79
Tabel 2. 68	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-79
Tabel 2. 69	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-80
Tabel 2. 70	Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-81
Tabel 2. 71	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-81
Tabel 2. 72	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-82
Tabel 2. 73	Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-82
Tabel 2. 74	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-83
Tabel 2. 75	Prevelensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-84
Tabel 2. 76	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-85
Tabel 2. 77	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-85
Tabel 2. 78	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-86
Tabel 2. 79	Cakupan Puskesmas Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-87
Tabel 2. 80	Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-88
Tabel 2. 81	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-88

Tabel 2. 82	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-89
Tabel 2. 83	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-90
Tabel 2. 84	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-91
Tabel 2. 85	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-92
Tabel 2. 86	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-92
Tabel 2. 87	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-93
Tabel 2. 88	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-94
Tabel 2. 89	Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-95
Tabel 2. 90	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-95
Tabel 2. 91	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-96
Tabel 2. 92	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-97
Tabel 2. 93	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021.....	II-98
Tabel 2. 94	Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-98
Tabel 2. 95	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-99
Tabel 2. 96	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-99
Tabel 2. 97	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-100
Tabel 2. 98	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-100
Tabel 2. 99	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-101

Tabel 2. 100	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-102
Tabel 2. 101	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-102
Tabel 2. 102	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-103
Tabel 2. 103	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB.....	II-104
Tabel 2. 104	Luasan RTH Publik Seputar 20% Dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2017–2021 .	II-104
Tabel 2. 105	Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-105
Tabel 2. 106	Rasio Ruang Publik yang berubah peruntukannya Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-105
Tabel 2. 107	Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-106
Tabel 2. 108	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-106
Tabel 2. 109	Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-107
Tabel 2. 110	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-107
Tabel 2. 111	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-108
Tabel 2. 112	Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-109
Tabel 2. 113	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-109
Tabel 2. 114	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-110
Tabel 2. 115	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-110
Tabel 2. 116	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-111
Tabel 2. 117	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-112
Tabel 2. 118	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – II-2021.....	II-112
Tabel 2. 119	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-113

Tabel 2. 120	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-114
Tabel 2. 121	Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-114
Tabel 2. 122	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-115
Tabel 2. 123	Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-115
Tabel 2. 124	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-116
Tabel 2. 125	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-117
Tabel 2. 126	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-117
Tabel 2. 127	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-118
Tabel 2. 128	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-119
Tabel 2. 129	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-120
Tabel 2. 130	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-120
Tabel 2. 131	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-121
Tabel 2. 132	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-122
Tabel 2. 133	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-123
Tabel 2. 134	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-124
Tabel 2. 135	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-124

Tabel 2. 136	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-125
Tabel 2. 137	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	II-125
Tabel 2. 138	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-126
Tabel 2. 139	Rasio KDRT Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-127
Tabel 2. 140	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-127
Tabel 2. 141	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-128
Tabel 2. 142	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-129
Tabel 2. 143	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-130
Tabel 2. 144	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-131
Tabel 2. 145	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-131
Tabel 2. 146	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021 ..	II-132
Tabel 2. 147	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-133
Tabel 2. 148	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD.....	133
Tabel 2. 149	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-134
Tabel 2. 150	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-134
Tabel 2. 151	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-135
Tabel 2. 152	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-136

Tabel 2. 153	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-136
Tabel 2. 154	Terselenggaranya KLHS Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-138
Tabel 2. 155	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-139
Tabel 2. 156	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-139
Tabel 2. 157	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-139
Tabel 2. 158	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-140
Tabel 2. 159	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-141
Tabel 2. 160	Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-141
Tabel 2. 161	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-142
Tabel 2. 162	Pengaduan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-143
Tabel 2. 163	Timbulan Sampah Yang Ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-143
Tabel 2. 164	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-144
Tabel 2. 165	Persentase Cakupan Area Pelayanan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-144
Tabel 2. 166	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-145
Tabel 2. 167	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-146
Tabel 2. 168	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-146
Tabel 2. 169	Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-147
Tabel 2. 170	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-148
Tabel 2. 171	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-150

Tabel 2. 172	Pesentase LSM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-151
Tabel 2. 173	Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-151
Tabel 2. 174	Persentase PKK Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-152
Tabel 2. 175	Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-152
Tabel 2. 176	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-153
Tabel 2. 177	Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-154
Tabel 2. 178	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-154
Tabel 2. 179	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-155
Tabel 2. 180	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-156
Tabel 2. 181	Rasio Akseptor KB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021 ..	II-156
Tabel 2. 182	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-157
Tabel 2. 183	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-158
Tabel 2. 184	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021 ..	II-158
Tabel 2. 185	Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-159
Tabel 2. 186	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-160
Tabel 2. 187	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-160
Tabel 2. 188	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-161
Tabel 2. 189	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB.....	II-161
Tabel 2. 190	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-162

Tabel 2. 191	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-163
Tabel 2. 192	Cakupan PKB/PKLB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-164
Tabel 2. 193	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-164
Tabel 2. 194	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-165
Tabel 2. 195	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-166
Tabel 2. 196	Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-166
Tabel 2. 197	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-167
Tabel 2. 198	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-168
Tabel 2. 199	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-168
Tabel 2. 200	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Gowa Tahun	II-169
Tabel 2. 201	Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-170
Tabel 2. 202	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-171
Tabel 2. 203	Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-171
Tabel 2. 204	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-172
Tabel 2. 205	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-173
Tabel 2. 206	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-173
Tabel 2. 207	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-174

Tabel 2. 208	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-174
Tabel 2. 209	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-175
Tabel 2. 210	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-175
Tabel 2. 211	Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-176
Tabel 2. 212	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-176
Tabel 2. 213	Jumlah Investor Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-177
Tabel 2. 214	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-177
Tabel 2. 215	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021	II-178
Tabel 2. 216	Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-179
Tabel 2. 217	Cakupan Pembinaan Olah Raga Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-179
Tabel 2. 218	Pelatih yang Bersertifikat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-180
Tabel 2. 219	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-180
Tabel 2. 220	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-181
Tabel 2. 221	Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-181
Tabel 2. 222	Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-182
Tabel 2. 223	Buku PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-182
Tabel 2.224	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-183
Tabel 2. 225	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-183
Tabel 2. 226	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-184
Tabel 2. 227	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-184
Tabel 2. 228	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-184
Tabel 2. 229	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-185

Tabel 2. 230	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-185
Tabel 2. 231	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-186
Tabel 2. 232	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-186
Tabel 2. 233	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-186
Tabel 2. 234	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-187
Tabel 2. 235	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-188
Tabel 2. 236	Kunjungan Wisata Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021 ..	II-188
Tabel 2. 237	Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-189
Tabel 2. 238	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar.....	II-189
Tabel 2. 239	Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-190
Tabel 2. 240	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-190
Tabel 2. 241	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-191
Tabel 2. 242	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-191
Tabel 2. 243	Produksi Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-192
Tabel 2. 244	Konsumsi Ikan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-192
Tabel 2. 245	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-193
Tabel 2. 246	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-193
Tabel 2. 247	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yg Aman Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-194
Tabel 2. 248	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-194
Tabel 2. 249	Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-195
Tabel 2. 250	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan Kabupaten Gowa tahun 2017-2021.....	II-195

Tabel 2. 251	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran.....	II-196
Tabel 2. 252	Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021.....	II-196
Tabel 2. 253	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Gowa 2017-2021.....	II-196
Tabel 2. 254	Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-197
Tabel 2. 255	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-197
Tabel 2. 256	Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021.....	II-197
Tabel 2. 257	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-198
Tabel 2. 258	Persentase PROLEGDA yang Terealisasi Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-198
Tabel 2. 259	Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-198
Tabel 2. 260	Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021.....	II-199
Tabel 2. 261	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-199
Tabel 2. 262	Persentase peningkatan capaian kinerja program di Kabupaten Gowa 2017-2021.....	II-200
Tabel 2. 263	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-200
Tabel 2. 264	Persentase SiLPA Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-201
Tabel 2. 265	Persentase Program yang tidak Terlaksana di Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-201
Tabel 2. 266	Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-201
Tabel 2. 267	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-202
Tabel 2. 268	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-202
Tabel 2. 269	Persentase Belanja Langsung Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-203
Tabel 2. 270	Persentase Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-203

Tabel 2. 271	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-204
Tabel 2. 272	Penetapan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-204
Tabel 2. 273	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-205
Tabel 2. 274	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-205
Tabel 2. 275	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-206
Tabel 2. 276	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-206
Tabel 2. 277	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-207
Tabel 2. 278	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-207
Tabel 2. 279	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-208
Tabel 2. 280	Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-208
Tabel 2. 281	Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-209
Tabel 2. 282	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-209
Tabel 2. 283	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-210
Tabel 2. 284	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-210
Tabel 2. 285	Nilai Tukar Petani Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-211
Tabel 2. 286	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-211
Tabel 2. 287	Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-211
Tabel 2. 288	Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-213
Tabel 2. 289	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-214
Tabel 2. 290	Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-218
Tabel 2. 291	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-252

Tabel 2. 292	Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gowa Tahun 2020-2021 (Permendagri No. 100 Tahun 2018)	II-307
Tabel 2. 293	Tingkat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-311
Tabel 2. 294	Capaian Target Indikator SDGs/TPB Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-314
Tabel 2. 295	Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	II-369
Tabel 2. 296	Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2021	II-377
Tabel 2. 297	Capaian Kegiatan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2021	II-384
Tabel 2. 298	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	II-388
Tabel 2. 299	Komposisi Program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022	II-389
Tabel 2. 300	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa	II-394
Tabel 3. 1	Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Gowa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 Tahun Dasar 2010 (persen)	III-6
Tabel 3. 2	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019	III-13
Tabel 3. 3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2020-2024	III-14
Tabel 3. 4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019	III-18
Tabel 3. 5	Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja Terhadap Urusan Wajib Mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2023	III-19
Tabel 3. 6	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	III-22
Tabel 3. 7	Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023	III-29
Tabel 3. 8	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020- 2024.....	III-32
Tabel 4. 1	Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.....	IV-7
Tabel 4. 2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-9
Tabel 4. 3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Misi RPJMD untuk Tahun 2023	IV-11
Tabel 4. 4	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gowa dan Target Kinerja Tahun 2023	IV-26
Tabel 4. 5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2022 dengan Prioritas Nasional Tahun 2022.....	IV-31

Tabel 4. 6	Keterkaitan Kegiatan Prioritas (KP) Pada Prioritas Nasional (PN) RKP 2023 dengan Program Daerah (PD) RKPD 2023	IV-32
Tabel 4. 7	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa dengan Tujuan SDGs.....	IV-49
Tabel 4. 8	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	IV-51
Tabel 4. 9	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023.....	IV-53
Tabel 4. 10	Prioritas Pembangunan Daerah Dijabarkan dalam Satu Kesatuan Wilayah (Spasial)	IV-63
Tabel 5. 1	Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2023	V-3
Tabel 5. 2	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023.....	V-5
Tabel 5. 3	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2023	V-18
Tabel 6. 1	Target Indikator Makro Kabupaten Gowa Tahun 2022-2023.....	VI-2
Tabel 6. 2	Capaian Indikator Kinerja Utama 2021, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gowa Tahun 2023.....	VI- 5
Tabel 6. 3	Asumsi Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Gowa	VI- 7
Tabel 6. 4	Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Gowa 2023 (Persen)	VI-14
Tabel 6. 5	Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Gowa Tahun 2023.....	VI-19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-38
Grafik 2. 2.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021	II-39
Grafik 2. 3.	Perbandingan Nilai Inflasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021.....	II-41
Grafik 2. 4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021	II-44
Grafik 2. 5.	Perbandingan IPM Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2017-2021	II-45
Grafik 2. 6.	IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2021.....	II-46
Grafik 2. 7.	Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-49
Grafik 2. 8.	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-50
Grafik 2. 9.	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021.....	II-51
Grafik 2. 10.	Status Perkembangan Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021	II-64
Grafik 2. 11.	Perbandingan IPG Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021	II-65
Grafik 2. 12.	Perbandingan IDG Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021	II-66
Grafik 2. 13	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 (Persen) ...	II-212
Grafik 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi Gowa, Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2021, Perkiraan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023	III-5
Grafik 3. 2	PDRB Perkapita Kabupaten Gowa, Capaian 2021, Perkiraan 2022 dan Target 2023	III-7
Grafik 3. 3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gowa Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023.....	III-7
Grafik 3. 4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa , Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023	III-8
Grafik 3. 5	Gini Rasio Kabupaten Gowa Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023 (Priode Maret)	III-9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Proses perencanaan daerah merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana kerja pemerintah (RKP), program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 dan target akhir (tahun kelima) dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Disamping itu, RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan RPJMD pada tahun ke 2 dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Seluruh kebijakan, baik strategi dan program maupun kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kabupaten Gowa difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023 yaitu “Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan di Dukung Penguatan SDM, Pemanfaatan Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Daerah” serta pencapaian target akhir Visi Misi Kepala Daerah dalam RPJMD dengan memperhatikan kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD mempertimbangkan sinergitas antarsektor dan antar wilayah,serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Gowa juga mengacu pada RKP dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Salah satu focus RKPD Provinsi SulSel adalah pemulihan ekonomi dari dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) serta target akhir RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, kebijakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Gowa juga menyesuaikan dengan target RKPD provinsi Sulsel. Sehingga seluruh kebijakan pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023 akan fokus pada upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 serta pencapaian target Visi Misi Kepala Daerah yang

tertuang Dalam RPJMD dengan fokus pada pemantapan kesejahteraan melalui terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Sebagai gambaran awal mengenai capaian indikator ekonomi makro Kabupaten Gowa yaitu, nilai pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan yang signifikan dari 1,76 di tahun 2020 menjadi 7,26 di tahun 2021. Untuk tingkat kemiskinan sebesar 7,54% , tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30%, Gini Rasio sebesar 0,36. Untuk nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,29, sedangkan PDRB Per kapita (ADHB) sebesar 23.536.840 juta/rupiah. Selain memperhatikan capaian indikator makro ekonomi dalam penyusunannya, RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Adapun Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan antara lain dari unsur Pemerintah Daerah bersama jajarannya unsur DPRD Kabupaten Gowa, Kelompok Ahli Pembangunan Kabupaten Gowa sebagai perwakilan/delegasi Perguruan Tinggi. Disamping itu melibatkan juga kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sampai dengan Musrenbang Kabupaten Gowa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2023, ditempuh pendekatan yang dikembangkan dalam penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional. Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan Tematik Holistik Integratif dan Spasial (THIS) yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 9. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1
Bagan Alur Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.1 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. penyusunan Rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan awal RKPD

Penyusunan Rancangan awal RKPD melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

- a. Tahap penyusunan Rancangan RKPD, mencakup:
 - 1) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - 2) analisis Rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - 3) analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - 4) penelaahan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - 6) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - 11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- b. Dalam penyusunan Rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- c. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik

- untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbang dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
3. Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:
 - a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas Rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.
 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perwal RKPD.
 6. Penetapan Rancangan RKPD Rancangan Perwal tentang Rancangan RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappelitbang kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang Rancangan RKPD dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan

- keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub

- Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

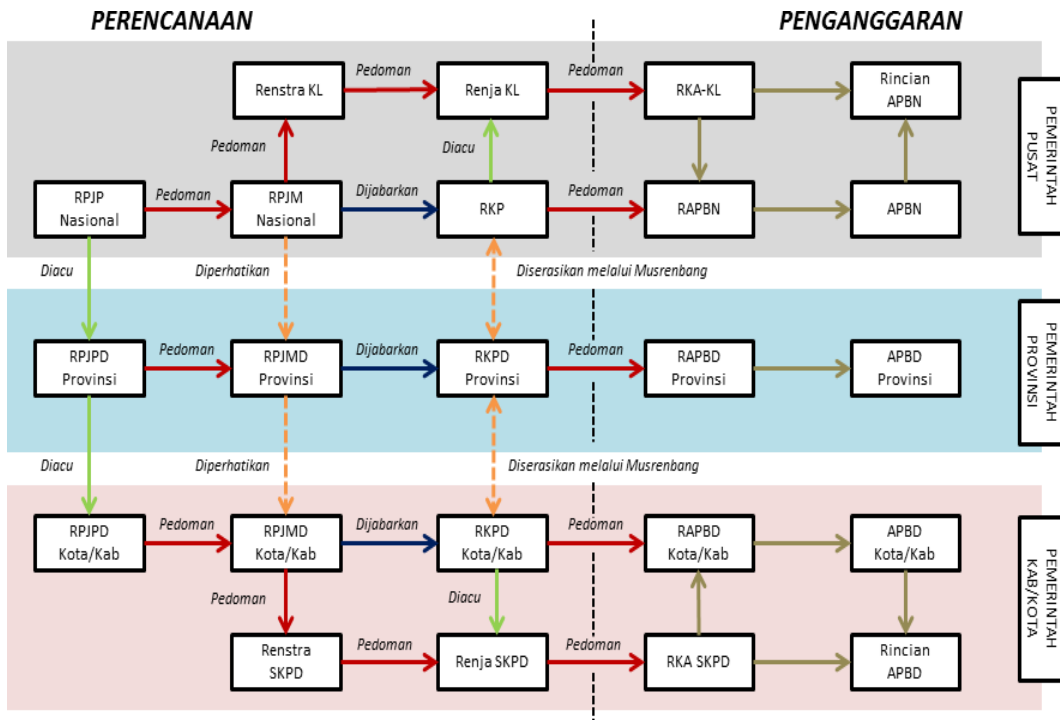
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
52. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
55. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
56. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
57. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).

58. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
59. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2017;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 merupakan penjabaran taktis rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025) dan jangka menengah (RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026), sehingga keberadaannya tidak dapat terpisahkan. Penyusunan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, serta RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Agar RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Rencana



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah bahwa RKPD Kabupaten Gowa disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, dan juga untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Gowa dengan Bupati Gowa yang selanjutnya akan dijabarkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023;

2. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana kerja (Renja) perangkat daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, yang memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP, kebijakan ekonomi dalam dokumen RPJMD; (2) Arah kebijakan keuangan

daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2023

Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan kedudukan kinerja tahun 2023 dalam RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023.

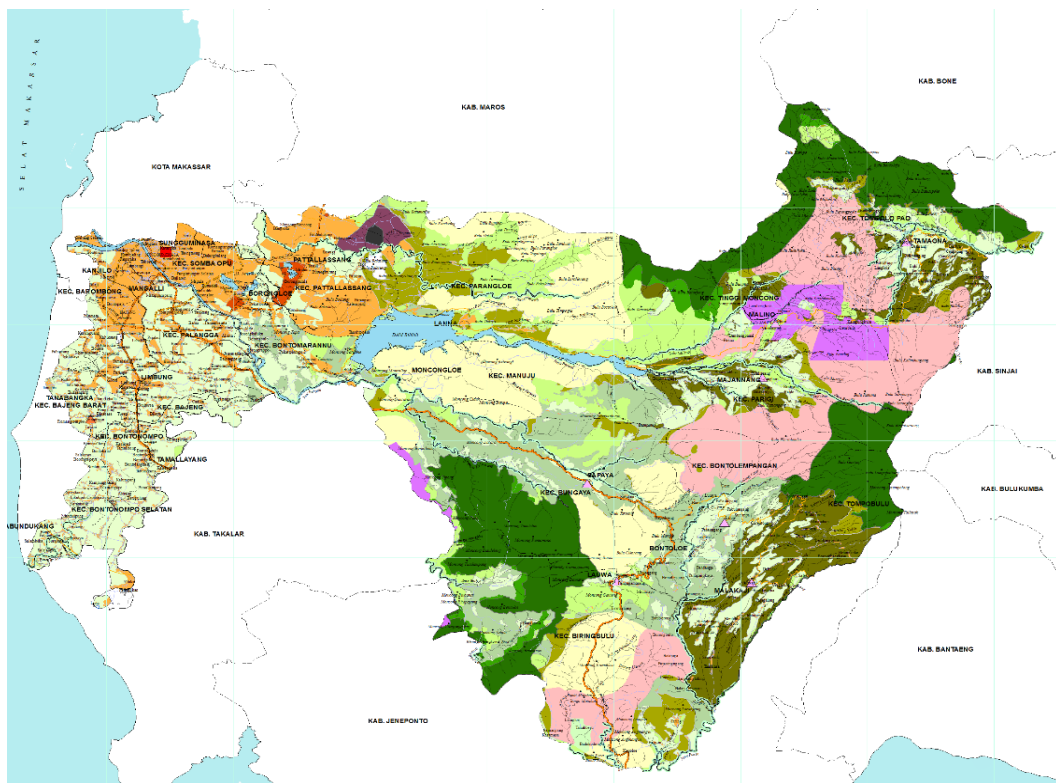
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Gowa

2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau 3.01% dari total keseluruhan luas wilayah Sulawesi Selatan (46.717 km²) dengan ibukota kabupaten berada di Kota Sungguminasa.



Gambar 2. 1.
Peta Administrasi Kabupaten Gowa

Secara administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 122 desa, 45 kelurahan dan 674 dusun/lingkungan berbatasan dengan 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu :

- **Sebelah utara** berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;

- **Sebelah Timur** dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;
- **Sebelah Selatan** dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Tabel 2. 1.
Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Gowa

NO	KECAMATAN	JUMLAH		
		KELURAHAN	DESA	LINGKUNGAN/ DUSUN
1	Bontonompo	2	12	50
2	Bontonompo Selatan	1	8	41
3	Bajeng	4	10	62
4	Bajeng Barat	-	7	32
5	Pallangga	4	12	60
6	Barombong	2	5	30
7	Somba Opu	14	-	28
8	Bontomarannu	3	6	25
9	Pattalassang	-	8	36
10	Parangloe	2	5	20
11	Manuju	-	7	28
12	Tinggimoncong	5	2	24
13	Tombolo Pao	1	8	49
14	Parigi	-	5	20
15	Bungaya	1	6	32
16	Bontolempangan	2	6	29
17	Tompobulu	2	6	43
18	Biringbulu	2	9	66
Total		45	122	674

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2022

Kabupaten Gowa yang ibukota kabupaten berada di Kecamatan Sombaopu dengan total luas wilayah 1.883,33 km² terbagi atas 18 kecamatan ini, dengan kecamatan parangloe yang beribukota kelurahan lanna sebagai daerah dengan wilayah terluas di Kabupaten Gowa luas daerahnya mencapai 221,26 km² atau 11,75 persen dari total luas Kabupaten Gowa , sedangkan

Kecamatan Bontomarannu dengan total luas hanya 2,8 persen dari total luas kabupaten atau sekitar 52,63 km² dengan ibukota kecamatan berada pada Desa Borongloe serta berjarak tempuh ke ibukota kabupaten sejauh 9 km menjadi daerah luas wilayah terkecil. Untuk memberi gambaran terhadap luas wilayah perkecamatan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 2.
Ibukota kecamatan, luas total area, persentase luas wilayah & Jarak ke Ibukota Kabupaten Gowa

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (Km ²)	Persentase thd Luas Wilayah	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Bontonompo	Tamallayang	30,39	1,61	16
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	29,24	1,55	30
3	Bajeng	Kalebajeng	60,09	3,19	12
4	Bajeng Barat	Borimatangkasa	19,04	1,01	15,8
5	Pallangga	Mangalli	48,24	2,56	2,45
6	Barombong	Kanjilo	20,67	1,1	6,5
7	Sombaopu	Sungguminasa	28,09	1,49	0
8	Bontomarannu	Borongloe	52,63	2,8	9
9	Pattallassang	Pattallassang	84,96	4,51	13
10	Parangloe	Lanna	221,26	11,75	27
11	Manuju	Moncongloe	91,9	4,88	20
12	Tinggimoncong	Malino	142,87	7,59	59
13	Tombolopao	Tamaona	251,82	13,37	90
14	Parigi	Majannang	132,76	7,05	70
15	Bungaya	Sapaya	175,53	9,32	46
16	Botolempangan	Bontoloe	142,46	7,56	63
17	Tompobulu	Malakaji	132,54	7,04	125
18	Biringbulu	Lauwa	218,84	11,62	140
Kabupaten Gowa			1 883,33	100	

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2022

2.1.1.2 Aspek Geografi

a. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Gowa terletak di antara 5°33' - 5°34'

Lintang Selatan dan 120°38 - 120°33 Bujur Timur. Letak Kabupaten Gowa dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 – 2800 meter diatas permukaanair laut.

b. Posisi Geostrategis

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan nusantara. Bahkan kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia.

Dikutip dari halaman Wikipedia Kerajaan Gowa memang pada akhirnya takluk kepada Belanda lewat perjanjian Bungaya, namun meskipun sebagai kerajaan tidak lagi Berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu pelabuhan Makassar. Pelabuhan ini yang kemudian berkembang menjadi kota makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih menjadi ibu bagi Kota Makassar. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota. mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari waduk Bili-bili.

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 km² ini memiliki enam gunung, dimana tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang didaerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-Bili. Kondisi alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, disamping tanahnya yang subur.

2.1.1.3 Aspek Topografi

a. Kemiringan Lahan

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan lahan diatas 40 derajat yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Sementara itu produktif pada lahan yang tersedia meliputi kondisi kemiringan lahan sekitar 64,70% dari total luas wilayah berada pada kemiringan 0-400.

b. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Gowa berada pada elevasi 0-2.800 m dari permukaan laut. Elevasi 0-100 m diatas permukaan laut adalah dominan (24% atau 43,146 ha), daerah Kecamatan Tompobulu dan Tinggimoncong bagian timur dan selatan serta wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai serta Kabupaten Bantaeng merupakan daerah dengan elevasi antara 2.600-2.800 m dari permukaan laut. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3.
Luas Daerah Menurut Ketinggian Daerah per Kecamatan di Kabupaten Gowa

Kecamatan	Luas	KETINGGIAN DAERAH									
		0 - 25 M		25 - 100 m		100 - 500 m		500-1.000 m		1.000 +	
		Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%
Bajeng	60,09	60,09	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajeng Barat	19,04	19,04	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Barombong	20,67	20,67	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Biringbulu	218,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontolempangan	142,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontomarannu	52,63	52,5	99,76	0,13	0,24	-	-	-	-	-	-
Bontonompo	30,39	30,39	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontonompo Sel	29,24	29,24	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Bungaya	175,53	-	-	-	-	43,43	24,74	94,61	53,9	37,49	21,36
Manuju	91,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pallangga	48,24	48,24	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Parangloe	221,26	51,02	23,06	48,83	22,07	129,99	58,75	35,67	16,12	-	-
Parigi	132,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pattallassang	84,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Somba Opu	28,09	28,09	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Tinggimoncong	142,87	-	-	-	-	6,56	4,59	34,7	24,29	101,59	71,11
Tombolo Pao	251,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tompobulu	132,54	-	-	2,73	2,06	68,64	51,79	26,81	20,23	37,08	27,98

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2022

2.1.1.4 Aspek Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Penyelidikan geologi lingkungan regional Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa. Secara geologi daerah ini tersusun oleh batuan-batuan sedimen dan terobosan formasi camba yang berumur tersier, batuan gunung api dan terobosan yang termasuk dalam kelompok batuan gunung api Baturappe-Cindako berumur

tersier, batuan gunung api Lompobatang yang berumur kuarter, serta endapan alluvial.

Daerah dataran yang merupakan daerah terendah di atas permukaan laut, umumnya ditempati oleh endapan alluvial. Kelompok batuan formasi camba dan batuan gunung api tersier umumnya menempati daerah perbukitan dan hanya sebagian kecil yang berada didaerah dataran serta didaerah dataran bergelombang; sedangkan daerah pegunungan yang merupakan bagian tertinggi dalam wilayah Kabupaten Gowa tersusun oleh batuan gunung api kuarter.

Daerah dataran yang umumnya tersusun oleh endapan alluvial merupakan wilayah air tanah produktivitas sedang-rendah. Sedangkan daerah yang tersusun oleh batuan sedimen formasi camba dan batuan gunung api termasuk batuan terobosan berumur tersier merupakan wilayah air tanah dengan produktivitas sangat rendah hingga langka air tanah. Daerah pegunungan termasuk wilayah air tanah produktivitas sedangkecuali sebagian daerah disekitar puncak merupakan wilayah air tanah langka.

b. Potensi kandungan

Bahan galian berupa pasir dan lempung banyak ditambang di daerah dataran terutama di daerah Bajeng, sedangkan sirtu di daerah lembah sungai Jeneberang di bagian hulu bendung Bili-Bili. Daerah bergelombang sering dibuat menjadi lebih landai bahkan datar dengan menggalnya sebagai tanah urug dan batu belah terutama didaerah yang tersusun oleh endapan gunung api tersier. Formasi camba oleh para peneliti sebelumnya diinformasikan mengandung lapisan tipis batubara, sedangkan intrusi batuan gunungapi Baturappe-Cindako antara lain menghasilkan mineralisasi logam mulia. Dari segi kebencanaan, daerah Kabupaten Gowa ini tidak termasuk daerah yang rawan gempa bumi karena kondisi geologi lokal dan posisi tektoniknya yang jauh dari zona-zona sumber gempa bumi. Daerah ini juga aman dari bencana gunung api karena gunung api terdekat yaitu Lompobatang sudah termasuk kategori padam.

Namun beberapa tempat termasuk sangat rawan terhadap bencana gerakan tanah seperti di sebagian lereng gunung Bawakaraeng dan sebagian daerah perbukitan yang terjal. Selain itu daerah lembah sungai Jeneberang juga rawan terhadap bencana banjir bandang. Analisis Geologi Lingkungan dan skoring setiap komponen geologi lingkungan yang dimiliki oleh semua daerah dan dianggap berpengaruh terhadap pengembangan wilayah menunjukkan nilainya berkisar antara 33-62 atau kurang leluasa hingga cukup leluasa untuk dikembangkan, kecuali daerah tertentu yang tersisihkan merupakan daerah yang tidak layak kembang. Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan direkomendasikan sebagai kawasan budidaya umum

utamanya pertanian tanaman pangan semusim dan pengembangan kawasan non pertanian seperti pemukiman, perkantoran dan perdagangan. Sedangkan sebagian besar daerah yang agak leluasa lainnya dan daerah yang kurang leluasa untuk dikembangkan merupakan daerah yang direkomendasikan sebagai kawasan budidaya terbatas umumnya pertanian (termasuk hutan). Adapun daerah yang tidak layak kembang maka direkomendasikan sebagai kawasan lindung. Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian besar terletak di dataran Sungguminasa-Takalar, sedangkan yang tidak layak menempati daerah di sekitar puncak perbukitan dan pegunungan terjal, sempadan sungai, waduk/danau dan mata air.

2.1.1.5 Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Gowa memiliki daerah aliran Sungai dengan luas daerah aliran terbesar yakni seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

b. Sungai, Danau dan Bendungan

Sungai yang terdapat di Kabupaten Gowa ada 15 sungai dimana yang terbesar dikenal dengan Sungai Je’neberang. Sedangkan danau hanya ada 1 (satu) dikenal dengan nama Danau Mawang yang letaknya berada di Kecamatan Somba Opu. Sedangkan bendungan yang dimiliki Kabupaten Gowa dikenal dengan nama Bendungan Bili-Bili yang terletak di Kecamatan Parangloe, seperti tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2. 4.
Panjang Sungai Utama dan Luas Daerah Alirannya di Kabupaten Gowa Tahun 2020

NAMA SUNGAI	PANJANG SUNGAI (Km)	LUAS DAERAH ALIRAN SUNGAI (Km ²)
Batang Kaliki	12	18,5
Bikampang	12	6,4
Cadika	48	36
Je’neberang	90	881
Je’nelata	30	226
Koccikang	21	4,25
Lembaya	30	6,1
Malino	45	36
Pa’bundukang	60	38
Pallappakang	23	28
Passosokia	19	17,5
Sapaya	21	9
Sicini	7	8,4
Tanru Rusa	12	15,6
Takapala	12	6,1

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2021

2.1.1.6 Klimatologi

Keadaan yang mempengaruhi iklim suatu daerah adalah suhu, kelembaban, arah angin dan kondisi cuaca pada saat tertentu. Pada umumnya Kabupaten Gowa mempunyai iklim tropis basah. Curah hujan dan hari hujan menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500–1.000 mm/tahun sedangkan untuk daerah hulu (pegunungan) berkisar antara 1.000 – 2.000 mm/tahun, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 5.
Keadaan Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Gowa Tahun 2021

No	Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembaban (%)		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Januari	22,8	27,2	31,2	68,8	87,7	99,0
2	Februari	23,2	27,5	31,9	67,0	86,9	99,0
3	Maret	22,7	27,8	32,6	69,0	85,9	98,0
4	April	23,2	28,5	32,2	55,0	79,0	99,0
5	Mei	23,4	29,4	34,0	51,0	74,7	98,0
6	Juni	22,4	28,8	34,5	47,0	76,8	97,0
7	Juli	20,5	28,3	34,0	40,0	76,7	97,0
8	Agustus	22,7	29,5	34,3	43,0	69,4	98,0
9	September	22,3	29,4	34,6	44,0	71,4	97,0
10	Oktober	23,6	29,0	33,5	54,0	78,5	98,0
11	November	23,6	28,3	32,6	63,0	82,4	98,0
12	Desember	23,0	27,7	32,6	58,0	84,5	99,0

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Menurut Tipe Iklim (Oldeman dan Sjarifuddin, 1997) wilayah Kabupaten Gowa termasuk dalam :

- C2; daerah yang dapat ditanami tanaman padi terutama palawija dua kali dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia,
- C3; daerah tersebut dapat ditanami padi secara terus menerus dengan jadwal tanam yang tepat sehingga panen jatuh pada saat curah hujan kurang,
- D3; daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan tanaman palawija dua kali setahun dengan jumlah air yang tersedia cukup,
- D4; daerah tersebut dapat ditanami tanaman padi satu kali dan tanaman palawija dua kali dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia.

Tabel 2. 6.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
Di Kabupaten Gowa Tahun 2021

BULAN	CURAH HUJAN (mm ³)	HARI HUJAN	PENYINARAN MATAHARI
Januari	839,9	30	25,0
Februari	397,0	20	34,5
Maret	626,3	23	44,5
April	294,0	11	50,9
Mei	78,1	11	58,2
Juni	87,0	14	63,8
Juli	77,3	9	48,1
Agustus	104,2	8	68,4
September	82,5	11	57,2
Oktober	245,4	17	66,2
November	542,0	26	43,3
Desember	860,3	28	28,8

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis Kabupaten Gowa berada pada kawasan yang rawan bencana alam, bencana alam yang paling sering terjadi adalah tanah longsor dan banjir. Selain faktor curah hujan yang cukup tinggi gangguan geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng juga sangat berpengaruh. Meskipun longsor merupakan gejala fisik alami, namun beberapa hasil akitifitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kestabilan lereng. Faktor-faktor aktifitas manusia ini antara lain pola tanam, pemotongan lereng untuk aktifitas pertambangan, pencetakan kolam dan sawah baru, drainase, konstruksi bangunan dan kepadatan penduduk. Dengan demikian dalam upaya pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan keseimbangan lingkungan diperlukan penataan ruang dan kawasan. Kabupaten Gowa menetapkan beberapa kawasan yang rawan bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan gerakan tanah.
- 2) Kawasan rawan abrasi meliputi pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan;
- 3) Kawasan rawan gerakan tanah meliputi kawasan yang rawan terhadap gerakan tanah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, dan sebagian wilayah Kecamatan Parigi.

Kawasan rawan bencana alam ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

1) Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan di Desa Je'nemadingin, Desa Borongpa'lala dan Desa Panaikang di Kecamatan Pattallassang, Desa Borisallo, Desa Belapunranga, dan Desa Bontokassi di Kecamatan Parangloe, Desa Mata Allo, Desa Bili-bili, Desa Sokkolia dan Desa Romanglompoa di Kecamatan Bontomarannu, Kelurahan Samata, Kelurahan Paccinongan, Kelurahan Romangpolong, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Mawang, dan Kelurahan Bontoramba di Kecamatan Somba Opu, Desa Pallangga, Kelurahan Pangkabinanga, Desa Bontoala, Kelurahan Tetebatu, Desa Kampili dan Desa Parangbanoa di Kecamatan Pallangga, dan Desa Pattalikang, Desa Tassese dan Desa Tanakaraeng di Kecamatan Manuju.

2) Kawasan rawan tanah longsor.

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di Kelurahan Garassi, Kelurahan Bontolerung dan Kelurahan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong, Desa Bilangrengei, Desa Manimbahoi, Desa Majannang dan Desa Jonjo di Kecamatan Parigi, Desa Moncongloe dan Desa Tamalatea di Kecamatan Manuju, Desa Pao, Desa Kanreapia, Desa Ballasuka, Desa Erelembang dan Desa Bolaromang di Kecamatan Tombolo Pao, Desa Berutallasa, Desa Taring, Desa Borimasunggu dan Desa Julukanaya di Kecamatan Biringbulu, dan Kelurahan Je'nebatu, Kelurahan Sapaya, Desa Buakkang dan Desa Rannaloe di Kecamatan Bungaya.

Adapun kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Gowa dalam rentang waktu tahun 2018-2020 adalah :

- a. Pada tahun 2018 terjadi bencana alam yaitu :
 - Banjir terjadi di Kecamatan Somba Opu (12 kelurahan), Kecamatan Bontomarannu (Kelurahan Bontomanai, Borongloe dan Desa Romang Loe), Kecamatan Pattallassang (Desa Pallantikang, Borong Palala dan Sunggumanai), Kecamatan Parangloe (Desa BelapunrangaLonjoboko dan Kelurahan Bontoparang), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Pao dan Desa Mamampang), Kecamatan Biringbulu (Desa Rappoala).
 - Banjir Bandang terjadi di Kecamatan Pallangga (Kelurahan Pangkabinanga, Tete Batu, Mangngalli, Desa Panakkukang, Kampili dan Taeng), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Ballasuka), Kecamatan Manuju (Desa Bilalang, Moncongloe, Pattalikang, Manuju dan Tana Karaeng), Kecamatan Parigi (Desa Manimbahoi), Kecamatan Biringbulu (Desa

- Taring) dan Kecamatan Bontolempangan (Desa Paranglompoa, Bontolempangan, Ulujangang, Bontoloe dan Julumate'ne).
- Angin kencang terjadi di Kecamatan Bontonompo Selatan (Desa Tanrara), Kecamatan Manuju (Desa Tassese dan Tamalatea),
 - Longsor terjadi di Kecamatan Tombolo Pao (Desa Tabinjai, Kanreapia dan Bola Romang), Kecamatan Manuju (Desa Pattalikang, Tassese, Manuju dan Tamalatea), Kecamatan Tompo Bulu (Desa Datara), Kecamatan Parigi (Desa Bilanrengi, Jonjo dan Majannang), Kecamatan Tinggimoncong (Kelurahan Malino, Pattapang, Garassi, Buluttana, Gantarang, Bontolerung dan Desa Parigi), Kecamatan Biringbulu (Desa Baturappe, Berutallasa, Julukanaya, Parangloe, Lembangloe, Borimasunggu dan Kelurahan Lauwa), Kecamatan Bontolempangan (Desa Lassa-Lassa dan Pa'ladingan).
- b. Pada tahun 2019 terjadi bencana alam besar melanda Kabupaten Gowa yaitu tanah longsor yang menelan korban meninggal dunia lebih dari 50 orang korban jiwa serta bencana alam lain.
- Tanah Longsor yang terjadi di Kecamatan Bungaya (Kelurahan Sapaya, Desa Bontomanai, Mangempang dan Rannaloe), Kecamatan Parangloe (Desa Lonjoboko dan Bontokassi), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Tabbinjai, Kanreapia, Bolaromang dan Mamampang), Kecamatan Manuju (Desa Desa Pattalikang, Tassese, Manuju dan Tamalatea) Kecamatan Tompobulu (Desa Datara), Kecamatan Parigi (Desa Bilanrengi, Jonjo dan Majannang) Kecamatan Tinggimoncong (Kelurahan Malino, Garassi, Buluttana, Gantarang, Bontolerung dan Desa Parigi), Kecamatan Biringbulu (Desa Baturappe, Berutallasa, Julukanaya, Parangloe, Lembangloe, Borimasunggu dan Kelurahan Lauwa) dan Kecamatan Bontolempangan (Desa Lassa-Lassa dan Pa'ladingan).
 - Banjir yang terjadi di Kecamatan Somba Opu (12 kelurahan) Kecamatan Bontomarannu (Kelurahan Bontomanai dan Desa Romang Loe), Kecamatan Bungaya (Desa Bontomanai), Kecamatan Pattalassang (Desa Pallantikang, Borong Palala, Sunggumanai, Belapunranga dan Kelurahan Bontoparang) Kecamatan Parangloe (Desa Belapunranga, Lonjoboko dan Kelurahan Bontoparang), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Pao dan Mamampang), Kecamatan Biringbulu (Desa Rapoala).
 - Banjir Bandang yang terjadi di Kecamatan Pallangga (Kelurahan Pangkabinanga, Tete Batu, Mangngalli, Desa Panakkukang, Kampili, Taeng dan Tanrara), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Ballasuka), Kecamatan Manuju (Desa Bilalang, Pattalikang, Manuju, Tana Karaeng dan Moncongloe) Kecamatan Parigi (Desa Manimbahoi), Kecamatan Biringbulu (Desa Taring) dan Kecamatan Bontolempangan (Desa

- Paranglompoa, Bontolempangan, Ulujangang, Bontoloe dan Julumate'ne)
- Angin kencang yang terjadi di Kecamatan Bajeng (Dusun Doja), Kecamatan Bajeng Barat (Desa Tana Bangka, Kecamatan Pallangga (Desa Taeng), Kecamatan Bontonompo Selatan (Desa Tanrara), Kecamatan Manuju (Desa Tassese dan Tamalatea) dan Kecamatan Tinggimoncong (Kelurahan Pattapang)
 - c. Pada tahun 2020 terjadi bencana alam banjir yang melanda 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu (Kelurahan Tamarunang) dan Kecamatan Pallangga (Desa Panakkukang).

Untuk tahun 2021 ada 4 (Empat) Kecamatan yang terdampak bencana sepanjang tahun 2021, yaitu Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Pattallassang, dan Kecamatan Pallangga. Untuk Kecamatan Somba Opu, terdampak bencana sebanyak 3 kali di tahun 2021 yaitu pada bulan April, Maret, dan Agustus dengan bencana berupa angin kencang dan banjir. Bencana yang paling banyak terjadi adalah di bulan April dengan total sebanyak 5 lokasi bencana yang disebabkan oleh banjir dan angin kencang dan terjadi secara bersamaan di tanggal 2 April 2021. Total kerugian disebabkan karena bencana di tahun 2021 di seluruh Kabupaten Gowa sebesar Rp. 562.500.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Data Kejadian Bencana di Kabupaten Gowa Tahun 2021

No	Kecamatan/ Lokasi	Jenis Bencana	Tanggal Kejadian	Area Terdamp ak	Jumlah Korban			Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Men gun gsi	Lu ka	Menin ggal	
1.	Bontolempangan							
	- Desa Paladingan	Angin Kencang	19 Januari 2021	1 rumah	7			15.000.000
	- Desa Bontotangnga	Tanah Lonsor	19 Januari 2021	Irigasi,pipa air bersih dan sawah				80.000.000
2	Somba Opu							
	- Kelurahan Kelegowa	Angin Kencang dan banjir	02 April 2021	13 Pohon Tumbang & 19 rumah				19.000.000
				14 rumah Tergenang Air				7.000.000
	- Kelurahan Mawang	Angin Kencang	02 April 2021	6 rumah				8.000.000
3	Pattallassang							
	- Desa Sunggumanai	Angin Kencang	02 April 2021	2 rumah				6.000.000
	- Desa Pallassang	Angin Kencang	02 April 2021	2 rumah				4.000.000

No	Kecamatan/ Lokasi	Jenis Bencana	Tanggal Kejadian	Area Terdamp ak	Jumlah Korban			Perkiraan Kerugian (Rp.)
					Men gun gsi	Lu ka	Menin ggal	
4	- Desa Jenemadinging Somba Opu	Angin Kencang	02 April 2021	2 rumah				3.500.000
	- Kel. Tamarunang Pallangga	Banjir	10 Maret 2021	350 rumah	15			350.000.000
5	- Desa Panakkukang Somba Opu	Banjir	10 Maret 2021	45 rumah				45.000.000
	- Kelurahan Katangka	Angin Kencang	25 Agustus 2021	22 rumah	0	0	0	25.000.000
Total					22	0	0	562.500.000

Sumber: Badan Pengendalian Bencana Daerah Kabupaten Gowa, 2022

2.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 tercatat sebanyak 773.315 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,3%, terdiri dari 383.630 laki-laki dan 389.685 perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Somba Opu sebanyak 157.826 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Parigi dengan jumlah penduduk 13.222 jiwa. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten
Gowa Tahun 2021

No	Kecamatan	2021 (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
			2020-2021		
1	Bontonompo	45.294	0,88	5,86	1.490
2	Bontonompo Selatan	32.283	0,69	4,17	1.104
3	Bajeng	72.608	1,00	9,39	1.208
4	Bajeng Barat	26.853	1,07	3,47	1.410
5	Pallangga	130.219	2,49	16,84	2.699
6	Barombong	46.082	2,63	5,96	2.299
7	SombaOpu	157.826	1,47	20,41	5.619
8	Bontomarannu	41.835	2,67	5,41	795
9	Pattallassang	31.014	3,36	4,01	365

No	Kecamatan	2021 (jiwa)	Laju	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
			Pertumbuhan Penduduk (%) 2020-2021		
10	Parangloe	18.718	0,64	2,42	85
11	Manuju	14.545	-0,42	1,88	158
12	Tinggimoncong	23.298	-0,19	3,01	163
13	Tombolopao	29.880	0,45	3,86	119
14	Parigi	13.222	-0,67	1,71	100
15	Bungaya	16.721	-0,17	2,16	95
16	Bontolempangan	14.832	0,46	1,92	104
17	Tompobulu	28.208	-0,87	3,65	213
18	Biringbulu	29.877	-0,87	3,86	137
Jumlah		773.315	1,30	100,00	411

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya, maka tantangan Kabupaten Gowa dalam pembangunan ke depan menjadi lebih besar pula. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak.

Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 1.883,33 km², sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2020 adalah 407 jiwa per km². Dalam tataran regional Sulawesi Selatan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gowa merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dari tabel terlihat bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Gowa terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan.

Komposisi penduduk Kabupaten Gowa menurut jenis kelamin selama periode tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Perempuan cenderung lebih banyak daripada penduduk Laki-Laki sebagai berikut :

Tabel 2. 9.
Sex Rasio Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jenis Kelamin				Sex Ratio (%)
		Laki-Laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%	
1	2016	361.814	49,19	373.679	50,81	96,80
2	2017	368.234	49,22	379.966	50,78	96,91
3	2018	374.425	49,23	386.182	50,77	96,96
4	2019	380.488	49,24	392.196	50,76	97,02
5	2020	379.874	49,60	385.962	50,39	98,42
6	2021	383.630	49,60	389.685	50,39	98,45

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Diolah)

Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di kabupaten Gowa, menunjukkan jumlah terbanyak di kelompok umur 20-24 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan paling sedikit berada di kelompok umur 70-74 baik laki-laki maupun perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2. 10.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa, 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	31.740	30.620	62.360
5-9	31.162	29.632	60.794
10-14	34.344	32.732	67.076
15-19	34.568	32.787	67.355
20-24	35.248	33.605	68.853
25-29	33.556	33.658	67.214
30-34	29.746	31.126	60.872
35-39	27.799	29.637	57.436
40-44	26.552	28.380	54.932
45-49	24.676	26.207	50.883
50-54	21.253	22.459	43.712
55-59	17.808	18.933	36.741
60-64	13.574	14.044	27.618
65-69	9.508	10.460	19.968
70-74	5.780	6.647	12.427
75+	6.316	8.758	15.074
Jumlah	383.630	389.685	773.315

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (human capital investment) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Gowa diarahkan dengan mengacu pada RTRW yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa pasal 31 dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.1.4.1 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

- 1) Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu seluas kurang lebih 20.287 Ha (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh hektar).
- 2) Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Biringbulu, Bontolempangan, Bungaya, Manuju, Parangloe, Pattallassang, Tinggi Moncong, dan Tombolo Pao seluas kurang lebih 23.102 Ha (dua puluh tiga ribu seratus dua hektar).
- 3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Biringbulu seluas kurang lebih 309.76 Ha (tiga ratus sembilan ribu tujuh puluh enam hektar).

Tabel 2. 11.
Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Gowa

Kecamatan	Hutan Produksi Terbatas	%	Hutan Produksi Tetap	%	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	%
Biringbulu	3747.75	18.47	4235.78	18.33	309.76	100
Bontolempangan	3775.15	18.61	139.46	0.60	-	-
Bungaya	12.78	0.06	5082.21	22.00	-	-
Manuju	-	0.00	5851.15	25.33	-	-
Parangloe	-	0.00	7392.09	32.00	-	-
Parigi	2007.31	9.89	-	0.00	-	-
Pattallassang	-	0.00	4.19	0.02	-	-
Tinggimoncong	4432.98	21.85	318.76	1.38	-	-
Tombolo Pao	6246.24	30.79	78.58	0.34	-	-
Tompobulu	65.01	0.32	-	0.00	-	-
Jumlah	20.287.22	100.00	23.102.22	100.00	309.76	100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Gowa, terdiri atas:

- 1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 36.089,77 Ha (tiga puluh enam ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Gowa yang beririgasi teknis ditetapkan sebagian sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
 - Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 16.409 Ha (enam belas ribu empat ratus sembilan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu,

sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas 12.386 Ha (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Tabel 2. 12.
Lokasi Kawasan Tanaman Pertanian Pangan Kabupaten Gowa

No.	Penggunaan	Pertanian Lahan Basah		Hortikultura		Pertanian Lahan Kering	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1	Bajeng	3.541,68	10,64			103,49	0,63
2	Bajeng Barat	1.545,96	4,64			29,85	0,18
3	Barombong	1.184,21	3,56			1,42	0,01
4	Biring Bulu	1.359,73	4,08	348,21	2,81	3.515,20	21,42
5	Bontolempangan	1.872,04	5,62			3.140,60	19,14
6	Bontomarannu	2.051,77	6,16			1.061,18	6,47
7	Bontonompo	3.324,38	9,99				
8	Bontonompo Selatan	2.764,42	8,3			21,9	0,13
9	Bungaya	1.602,60	4,81			6.531,46	39,8
10	Manuju	479,02	1,44			1.747,68	10,65
11	Pallangga	3.471,90	10,43			105,2	0,64
12	Parangloe	410,22	1,23			149,49	0,91
13	Parigi	1.643,72	4,94	1.387,45	11,2		
14	Pattallassang	1.921,89	5,77				
15	Somba Opu	199,87	0,6			0,32	0
16	Tinggimoncong	1.043,11	3,13	1.418,13	11,45		
17	Tombolo Pao	2.700,28	8,11	2.393,92	19,33		
18	Tompobulu	2.171,53	6,52	6.838,78	55,21	1,6	0,01
Jumlah		33.288,33	100	12.386,49	100	16.409,39	100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

c. Kawasan peruntukan perkebunan;

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 11.029 Ha (sebelas ribu dua puluh sembilan hektar) ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju,

sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

Tabel 2. 13.
Lokasi Kawasan Tanaman Perkebunan Kabupaten Gowa

No.	Kecamatan	Luas (ha)	%
1	Biringbulu	2.225,25	20,18
2	Bontolempangan	140,35	1,27
3	Bontomarannu	504,47	4,57
4	Bontonompo	42,72	0,39
5	Bontonompo Selatan	6,17	0,06
6	Bungaya	1.174,35	10,65
7	Manuju	82,88	0,75
8	Parangloe	1.153,50	10,46
9	Parigi	312,02	2,83
10	Pattallassang	5,16	0,05
11	Tinggimoncong	4.069,01	36,89
12	Tombolo Pao	1.237,68	11,22
13	Tompobulu	75,2	0,68
Jumlah		11.028,77	100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

d. Kawasan peruntukan peternakan;

Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, dan sebagian wilayah Kecamatan Manuju;

e. Kawasan peruntukan perikanan;

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

- 1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada Sungai Je'neberang, Danau Mawang, Danau Tonjong, dan Danau Kalaborang.
- 2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan;
Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud, merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar, terdiri dari:

- Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di kawasan waduk Bili-bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe; dan
- Kawasan budidaya minapadi dan budidaya kolam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
- Kawasan pengembangan minapolitan; merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga. Kawasan pengembangan minapolitan ini direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan Pelabuhan Perikanan (PPI) Barombong di Kecamatan Barombong;
- Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).
- Pengembangan BBI akan dikembangkan di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bontomarannu, dan Kecamatan Tinggimoncong.

Tabel 2. 14.

Lokasi Kawasan Perikanan Darat Kabupaten Gowa

No.	LOKASI
1.	Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Barombong, Pallangga.
2.	Pembangunan PPI Barombong (\pm 16 ha).
3.	Pengembangan perikanan kolam dan sawah tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Manuju dan Pattallassang.
4.	Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bajeng, Bontomarannu dan Tinggimoncong.
5.	Pengembangan perikanan air tawar di Waduk Bili-Bili.

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.1.4.2 Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:

- a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam meliputi timah hitam dan tembaga yang terletak di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Tinggimoncong, dan Kecamatan Bungaya;
- b. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa: zeolit, bentonit, oker, trass, kaolin, sulfur (belerang) yang tersebar di Kecamatan Bungaya, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Biringbulu;
- c. Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan meliputi: batu kali, batu gunung, tanah urug atau timbunan, pasir, kerikil, dan serti, terdapat di Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Manuju, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Pallangga, serta di DAS Jeneberang terutama di Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Tinggimoncong; Kecamatan Bungaya, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Bontolempangan dan; tanah urug, batu kali, dan kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong.

2.1.4.3 Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri, meliputi:

- a. **Kawasan peruntukan industri besar** merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan persampahan ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
- b. **Kawasan peruntukan industri sedang** merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas pertanian dan penduduk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gowa ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
- c. **Kawasan peruntukan industri rumah tangga** berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah

Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

2.1.4.4 Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:

- a. Kawasan pariwisata budaya** sebagaimana dimaksud meliputi:
 - Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;
 - Wisata Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin, Mesjid Tua Katangka dan Obyek Wisata Balla Lompoa; dan
 - Wisata budaya lokal lainnya meliputi Accera' Kalompoang, Appalili, Maudu' Kalompoang, Pa'dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena, dan Songka Bala.
- b. Kawasan pariwisata alam** meliputi:
 - Pengembangan ruang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) yang terpadu dengan Taman Wisata Alam Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
 - Wisata Alam Bendungan Bili-Bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe;
 - Wisata Danau Mawang di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu; dan
 - Wisata Air Terjun Parangloe di Kecamatan Parangloe.
- c. Kawasan pariwisata buatan** meliputi:
 - Obyek wisata dan olahraga Golf Padivalley di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang;
 - Pusat rekreasi Gowa Discovery Park (GDP) di Kompleks Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa;
 - Kawasan wisata Ekopolis Pattallassang-Parangloe Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Pattallassang; dan;
 - Kawasan wisata kuliner di Perkotaan Sungguminasa dan Kota Baru Pattallassang.

2.1.4.5 Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan;**

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah

perkotaan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luas 5.983 Ha (lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga hektar) ditetapkan di:

- Kawasan Permukiman Perkotaan Baru Gowa-Maros yang merupakan Kota Satelit Mamminasata bagian timur ditetapkan di Desa Panaikang dan Desa Paclekang Kecamatan Pattallassang;
- Kawasan peruntukan permukiman Kota Baru Satelit Pattallassang terpadu dengan lapangan Golf Padivalley ditetapkan di Kecamatan Pattallassang;
- Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Parangloe ditetapkan di Kelurahan Parang Kecamatan Parangloe;
- Rencana pengembangan kawasan permukiman ditetapkan bagian selatan Mamminasata meliputi Desa Kanjilo, Desa Tamanyelleng, Kelurahan Lembangparang di Kecamatan Barombong, Desa Taeng di Kecamatan Pallangga, Desa Panciro di Kecamatan Bajeng serta Kelurahan Bone dan Desa Bontosunggu di Kecamatan Bajeng;
- Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor Jalan Tun Abdul Razak di Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Pattallassang;
- Kawasan permukiman di pusat kegiatan PKN, dan PPK

b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan luas 216 Ha (dua ratus enam belas hektar) ditetapkan di kawasan permukiman di pusat kegiatan PPL disebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, dan sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao.

2.1.4.6 Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas

a. Kawasan peruntukan perkantoran;

Kawasan peruntukan perkantoran meliputi:

- Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan skala regional dan kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu dan sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

- Kawasan peruntukan pemerintahan skala kecamatan ditetapkan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
 - Kawasan peruntukan perkantoran swasta. Kawasan peruntukan perkantoran swasta ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bajeng.
- b. **Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;** Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi :
- 1) Kawasan peruntukan pasar tradisional** ditetapkan di:
- Kawasan perdagangan tradisional terpadu dengan terminal tipe A di Kecamatan Pattallassang;
 - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malino Kecamatan Tinggimoncong;
 - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao;
 - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Majannang Kecamatan Parigi;
 - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Sapaya Kecamatan Bungaya;
 - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Parang Lompoa Kecamatan Bontolempangan;
 - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malakaji Kecamatan Tompobulu;
 - Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Lauwa Kecamatan Biringbulu;
 - Kawasan perdagangan Limbung di Kecamatan Bajeng;
 - Kawasan perdagangan Tamallayang di Kecamatan Bontonompo;

- Kawasan perdagangan Pabundukang di Bontonompo Selatan;
- Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat;
- Kawasan perdagangan Kanjilo di Kecamatan Barombong;
- Kawasan perdagangan Borongloe di Kecamatan Bontomarannu;
- Kawasan perdagangan Lanna di Kecamatan Parangloe;
- Kawasan perdagangan Moncongloe di Kecamatan Manuju;
- Kawasan perdagangan Bontoloe di Kecamatan Bontolempangan;
- Kawasan perdagangan Cappa Bungaya di Kecamatan Pallangga; dan
- Kawasan perdagangan Panaikang di Kecamatan Pattallassang.

2) Kawasan peruntukan pusat perbelanjaan ditetapkan di:

- Pasar Induk Regional Mamminasata di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu.
- Kawasan pusat perdagangan regional terpadu Kota Baru Mamminasata di Kecamatan Pattallassang.
- Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat.
- Kawasan perdagangan di Kawasan Kota Baru Satelit Pattallassang di Desa Panaikang dan Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang.

3) Kawasan peruntukan pertokoan modern ditetapkan di:

- Kawasan perdagangan di Kecamatan Somba Opu;
- Kawasan perdagangan di Kecamatan Barombong;
- Kawasan perdagangan di Kecamatan Pallangga,
- Kawasan perdagangan di Kecamatan Pattallassang; dan
- Kawasan perdagangan di Kecamatan Bajeng.

2.1.4.7 Kawasan peruntukan pelayanan umum, meliputi

a. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga;

- 1) Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu.
- 2) Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kecamatan ditetapkan pada kawasan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) secara proporsional.

b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri atas:

- 1) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu.
- 2) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.

c. Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang,

sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga;

d. Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum, merupakan kawasan peruntukan pemakaman umum skala regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang.

2.1.4.8 Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi :

- Kawasan Komando Distrik Militer 1409 Gowa di Kecamatan Somba Opu;
- Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu;
- Kawasan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VII Hasanuddin Pakkatto di Kecamatan Bontomarannu;
- Kawasan Komando Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) Bela Negara, Sekolah Calon Tamtama dan Sekolah Calon Bintara Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
- Kepolisian Resort Gowa di Kecamatan Somba Opu; dan
- Kepolisian Sektor di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu.

2.1.4.9 Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan. gambar tabel dibawah ini memberi gambaran kawasan lindung dan luas areanya di Kabupaten Gowa:

Tabel 2. 15.
Kawasan Lindung Lainnya Di Kabupaten Gowa

NO.	KECAMATAN	LUAS (HA)	%
1	Kecamatan Biringbulu	646.73	36.83
2	Kecamatan Bontolempangan	3.18	0.18
3	Kecamatan Bungaya	156.8	8.79
4	Kecamatan Tinggimoncong	678.99	43.68
5	Kecamatan Tombolopao	150.32	7.87
6	Kecamatan Tompobulu	57.22	2.65
	Jumlah	1693.24	100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

Kawasan lindung meliputi:

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan terdiri atas:

a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.350 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu dengan luas 4.034 (empat ribu tiga puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan dengan luas 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya dengan luas 5.288 (lima ribu dua delapan puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe dengan luas 5 (lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parigi dengan luas 2.617 (dua ribu enam ratus tujuhbelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong dengan luas 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 6.784 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas 2.919 (dua ribu sembilan ratus Sembilan belas) hektar.

b. Kawasan resapan air.

Kawasan resapan air ditetapkan di bagian hulu DAS Jeneberang di Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parangloe, dan Kecamatan Manuju serta bagian hulu Sungai Lata di Kecamatan Pallangga.

c. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, danau

atau waduk, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

d. Kawasan sempadan pantai;

Meliputi daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat ditetapkan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Gowa di Kecamatan Bontonompo Selatan.

e. Kawasan sempadan sungai;

Kawasan sempadan sungai meliputi:

- 1) Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- 2) Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- 3) Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ditetapkan pada jenis-jenis sungai:
- 4) Sungai-sungai yang bermuara ke danau dan waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di danau dan waduk.
- 5) Sungai-sungai yang bermuara ke lautan. Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Je'neberang, Sungai Je'nelata, Sungai Malino, Sungai Cadika, Sungai Pa'bundukang, dan Sungai Pallappakang.

f. Kawasan sekitar danau atau waduk.

Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud, meliputi daratan dengan jarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi. Kawasan sekitar danau atau waduk, ditetapkan di Danau Mawang di sebagian wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Waduk Bili-Bili di sebagian wilayah Desa Bili-Bili dan Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe, Danau Tonjong di sebagian wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, dan Danau Kalaborang di sebagian wilayah Desa Bili-bili Kecamatan Parangloe.

6) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dimaksud, terdiri atas RTH Publik yang meliputi lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan lahan didominasi komunitas tumbuhan, dan RTH privat. Kawasan RTH kawasan perkotaan ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:

1) RTH publik minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 42.096 Ha (empat puluh dua ribu sembilan puluh enam hektar) dilaksanakan melalui pengembangan:

- Hutan perkotaan dengan luasan 112 Ha (seratus dua belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, dan sebagian wilayah Kecamatan Barombong;
- Kawasan sempadan pantai dengan luasan 8 Ha (delapan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonombo Selatan;
- Kawasan sempadan sungai dengan luasan 43 Ha (empat puluh tiga hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu;
- Kawasan sempadan danau atau waduk dengan luasan 46 Ha (empat puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu;
- TPU dengan luasan 15 Ha (lima belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu;
- Lapangan olah raga dengan luasan 90 Ha (sembilan puluh hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

2) RTH privat minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 21.046 Ha (dua puluh satu ribu empat puluh enam hektar). Rencana pemenuhan RTH privat yang dimaksud meliputi:

- RTH di kawasan permukiman perkotaan dan di kawasan permukiman perdesaan; dan
- Pekarangan rumah, serta halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha yang tersebar di kawasan perkotaan PKN, PPK, dan PPL.

7) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, terdiri atas:

- 1) Kawasan taman wisata alam; Kawasan taman wisata alam merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Malino dengan luas kurang lebih 3.286 Ha (tiga ribu dua ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kelurahan Malino, sebagian wilayah Kelurahan Bulutanah, dan sebagian wilayah Desa Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong;
- 2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di:
 - Benteng Balla Lompoa Sungguminasa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu;
 - Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombu Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;
 - Masjid Tua Katangka di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu;
 - Makam Syech Yusuf di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu; dan
 - Makam Sultan Hasanuddin di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu.
- 3) Kawasan taman buru luas kurang lebih 402 Ha (empat ratus dua hektar) terletak di Bissoloro Kecamatan Bungaya;
- 4) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d luas kurang lebih 41 Ha (empat puluh satu hektar) terletak di Kecamatan Biringbulu.

8) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan sempadan mata air meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dan merupakan wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan ekonomi dapat diukur dengan salah satu indikator perekonomian secara makro yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu di dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. PDRB terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Harga Konstan dan PDRB Atas Harga Berlaku. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini

karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga sehingga perubahan yang di ukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

Nilai dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Gowa sejak tahun 2016-2020, khususnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK Tahun 2010) Kabupaten Gowa senantiasa mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2020 tumbuh sebesar 14.025,76 milyar rupiah yang relatif jauh lebih besar bila dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 11.166,021 milyar rupiah. Berikut tabel PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2016–2020 di Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 16.
Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,173,375.05	30.09	5,550,014.31	29.11	5,655,580.00	27.01	5,943,990.00	27.61	6.764.230	28,74
2	Pertambangan dan Penggalian	752,070.39	4.37	871,126.21	4.57	1,009,870.00	4.82	1,043,470.00	4.85	1.096.880	4,66
3	Industri Pengolahan	1,154,818.64	6.72	1,240,118.53	6.51	1,420,320.00	6.78	1,353,250.00	6.28	1.518.820	6,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22,557.70	0.13	24,975.39	0.13	26,140,00	0.12	27,250,00	0.13	29.260	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,494.15	0.11	21,802.76	0.11	23,150.00	0.11	24,630.00	0.11	26.090	0,11
6	Konstruksi	1,834,924.22	10.67	2,148,126.11	11.27	2,487,300.00	11.88	2,503,090.00	11.63	2.711.800	11,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,116,438.90	12.31	2,425,495.00	12.72	2,745,920.00	13.11	2,714,680.00	12.61	2.943.550	12,51
8	Transportasi dan Pergudangan	282,193.34	1.64	309,871.95	1.63	351,200.00	1.68	343,250.00	1.59	395.160	1,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	417,351.01	2.43	467,965.85	2.45	517,150.00	2.47	476,020.00	2.21	500.490	2,13
10	Informasi dan Komunikasi	1,351,284.61	7.86	1,524,248.04	8	1,718,640.00	8.21	1,910,640.00	8.87	2.068.580	8,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	440,643.18	2.56	476,987.54	2.5	503,290.00	2.40	522,860.00	2.42	579.690	2,46
12	Real Estate	1,446,363.57	8.41	1,580,466.24	8.29	1,712,990.00	8.18	1,801,610.00	8.37	1.850.200	7,86

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
13	Jasa Perusahaan	19,581.66	0.11	22,258.47	0.12	25,020.00	0.12	22,790.00	0.11	24.480	0,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	918,469.62	5.34	995,955.48	5.22	1,200,770.00	5.73	1,218,530.00	5.66	1.302.500	5,53
15	Jasa Pendidikan	678,719.03	3.95	763,379.72	4	828,210.00	3.96	885,000.00	4.11	914.150	3,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	314,559.79	1.83	352,811.83	1.85	390,880.00	1.87	448,890.00	2.08	492.680	2,09
17	Jasa lainnya	248,813.24	1.45	288,284.48	1.51	322,440.00	1.54	291,920.00	1.36	318.290	1,35
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17,192,660,0	100	19,063,888.90	100	20,939,000.00	100	21,531,880.00	100	23,536,840	100

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022 (diolah)

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gowa pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,74 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,51 persen, lapangan usaha Konstruksi 11,52 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,79 persen, lapangan usaha Real Estate 7,86 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,45 persen serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,53 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Disamping itu terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan di tahun terakhir dimana diantaranya yaitu sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan serta jasa lainnya. Adapun penurunan yang terjadi diakibatkan terjadinya Pandemi COVID-19 yang sangat berimbas kepada perekonomian global khususnya Kabupaten Gowa. Sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah pada industri pengolahan, disusul kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara kontribusi sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa pendidikan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain.

Tabel 2. 17.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2021 (%)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,09	29,14	27,01	27,61	28,74
B	Pertambangan dan Penggalian	4,37	4,57	4,82	4,85	4,66
C	Industri Pengolahan	6,72	6,50	6,78	6,28	6,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	10,67	11,26	11,88	11,63	11,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,31	12,72	13,11	12,61	12,51
H	Transportasi dan Pergudangan	1,64	1,62	1,68	1,59	1,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,43	2,45	2,47	2,21	2,13
J	Informasi dan Komunikasi	7,86	7,99	8,21	8,87	8,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,56	2,50	2,40	2,43	2,46
L	Real Estate	8,41	8,29	8,18	8,37	7,86
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,11	0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,34	5,22	5,73	5,66	5,53
P	Jasa Pendidikan	3,95	4,00	3,96	4,11	3,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,83	1,85	1,87	2,08	2,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,45	1,51	1,54	1,36	1,35
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Tabel 2. 18.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,53	4,4	1,08	2,69	11,34
B	Pertambangan dan Penggalian	13,4	12,65	15,67	1,12	4,00
C	Industri Pengolahan	8,61	4,04	12,37	-6,36	9,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,87	5,44	4,13	4,82	5,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,77	10,09	5,01	8,87	4,00
F	Konstruksi	8,43	8,51	10,01	0,38	4,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,99	9,82	9,27	-2,14	6,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,71	8,92	12,3	-5,13	8,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,13	11,85	7,58	-10,57	3,89
J	Informasi dan Komunikasi	9,87	10,39	11,08	10,87	7,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,63	3,8	2,41	4,06	7,28
L	Real Estate	7,43	5,86	6,37	4,53	2,50
M,N	Jasa Perusahaan	8,2	9,28	10,34	-10,79	5,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,64	3,61	17,23	-0,29	5,89
P	Jasa Pendidikan	8,61	9,92	6,76	6,16	3,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,01	8,49	8,2	10,38	7,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,25	12,81	9,61	-10,44	7,50
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK		7,21	7,14	7,46	1,76	7,26

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.17 terlihat adanya penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020, dimana laju pertumbuhannya mengalami defisit sebesar -5,7 dari 7,46 persen menjadi 1,76 persen saja. Adanya penurunan diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya penurunan pendapatan dari berbagai sektor. Adapun sektor yang paling mengalami penurunan adalah sector jasa perusahaan sebesar -10,79, disusul oleh penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar -10,57, sector jasa lainnya sebesar -10,44, sector industri pengolahan sebesar -6,36 persen,

sector transportasi dan pergudangan sebesar -5,13 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -2,14 persen.

Akan tetapi, meskipun di tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB ADHK mengalami defisit yang cukup drastis, di tahun 2021 PDRB ADHK Kembali mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan menjadi 7,26 persen. Sektor-sektor yang sebelumnya mengalami minus kembali menjadi positif meskipun tidak sebesar di tahun 2019. Sektor yang masih memberikan kontribusi paling besar masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan laju pertumbuhan sebesar 11,34 persen. Disusul oleh sector industry pengolahan sebesar 9,37 persen, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,43 persen.

PDRB Per kapita ADHK menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk dan menggambarkan pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita pun merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat dipakai sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk.

PDRB perkapita Kabupaten Gowa, dengan perhitungan tahun dasar 2010, juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2021. Untuk PDRB ADHB mengalami peningkatan rata-rata 8 persen tiap tahunnya. Begitupun dengan PDRB ADHK mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6 persen.

Berikut adalah tabel PDRB perkapita tahun 2017–2021 di Kabupaten Gowa sebagai berikut :

Tabel 2. 19.
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

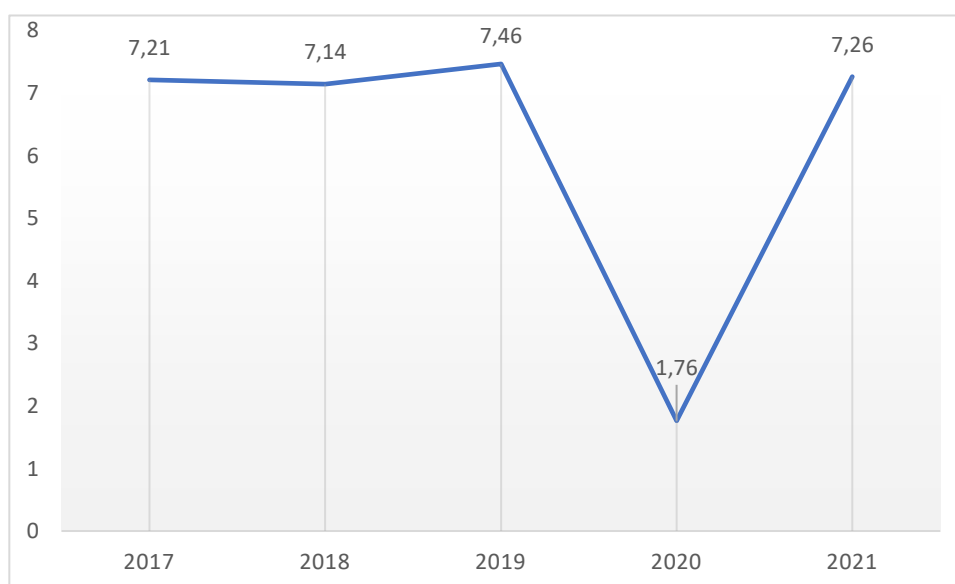
Tahun	PDRB Perkapita ADHB (Milyar Rp)	PDRB Perkapita ADHK (Milyar Rp)
2017	17.192,66	11.971,36
2018	19.063,89	12.822,68
2019	20.938,87	13.783,11
2020	21.531,88	14.025,76
2021	23.536,84	15.043,70

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa untuk selanjutnya disajikan dalam grafik 2.1.

Grafik 2. 1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

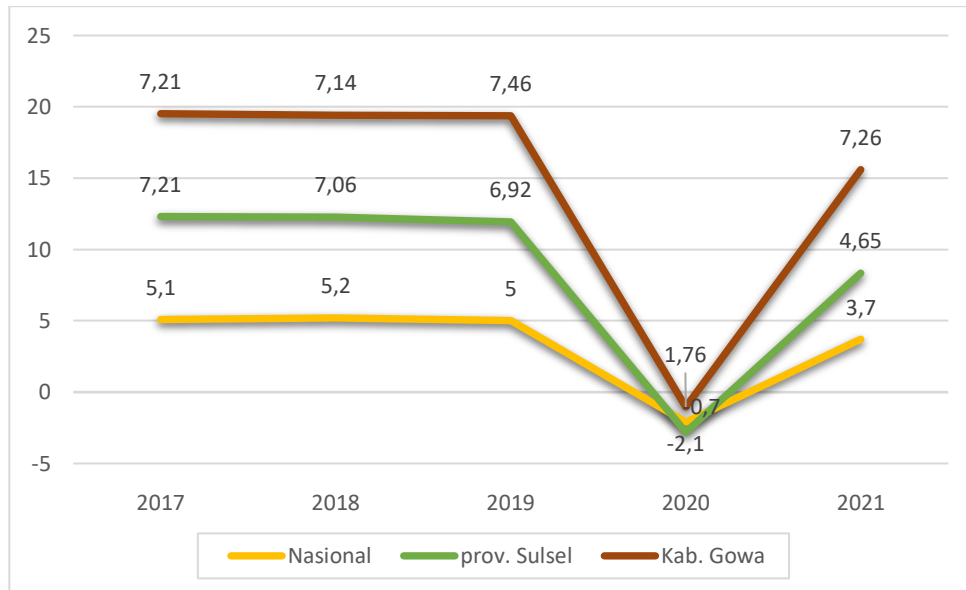


Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022 (diolah)

Grafik 2.1 memperlihatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa selama 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2021. Selama tahun 2017 sampai tahun 2019 laju pertumbuhannya cukup stabil. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan cukup drastis ke angka 1,76 persen saja. Di tahun 2021, ekonomi Kabupaten Gowa kembali mengalami penguatan di angka 7,26 persen. Hal ini menandakan mulai pulihnya perekonomian setelah mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Adapun Perbandingan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021 disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 2. 2.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021



Tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPE Sulawesi Selatan dan Nasional di tahun 2020 dan 2021, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara nasional.

Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Gowa dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang,

peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau *forward looking*.

Laju inflasi Kabupaten Gowa tertinggi terjadi pada saat menjelang perayaan hari besar, hari besar keagamaan dan musim liburan sekolah yang menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan barang/jasa jenis tertentu. Selain itu laju inflasi ini dipengaruhi juga faktor cuaca ekstrem sehingga terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa komoditas yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang selanjutnya akan memacu dan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.

Perhitungan laju Inflasi Kabupaten Gowa, terhitung berdasarkan wilayah bagian atau Region Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini, BPS Kabupaten Gowa menyatakan bahwa Laju Inflasi Kabupaten Gowa berdasarkan Region Kota Makassar.

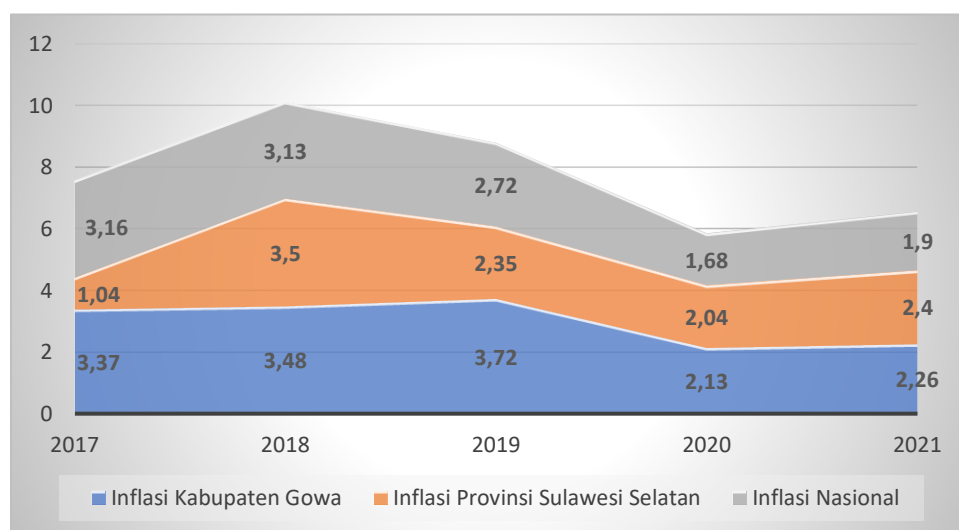
Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan nilai Inflasi Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017–2021 pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 20.
Perbandingan Nilai Inflasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Laju Inflasi (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Inflasi Kabupaten Gowa	3.37	3.48	3.72	2.13	2,26*)
2	Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan	1.04	3.50	2.35	2.04	2,40
3	Inflasi Nasional	3.61	3.13	2.72	1.68	1,9

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Grafik 2. 3.
Perbandingan Nilai Inflasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Gowa Tahun 2017 – 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022 (diolah)

Pada grafik diatas menunjukkan jika nilai inflasi Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi disbanding nilai inflasi Kabupaten Gowa. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa cenderung lebih tinggi untuk cakupan wilayah diseluruh Sulawesi Selatan disbanding di Kabupaten Gowa sendiri.

2.2.1.3 Indeks Gini

Salah satu ukuran distribusi pendapatan yang sering kali digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dapat menggunakan gini rasio dan kurva Lorenz. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kriteria klasifikasi ketimpangan berdasar indeks gini sebagai berikut:

1. Indeks Gini < 0,3 = Ketimpangan rendah
2. $0,3 \leq$ Indeks Gini \leq 0,5 = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini \geq 0,5 = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Gowa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan berada dikategori kelompok ketimpangan “moderat” karena nilai indeks Gini bernilai angkanya di bawah 0,4. Kondisi ini apabila

dicermati lebih dalam, terlihat bahwa jika ditarik garis trendnya menunjukkan adanya tendensi semakin menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin membaik, di mana pada tahun 2015 sebesar 0,38 menurun menjadi 0,34 di tahun 2016 dan meningkat menjadi 0,35 di tahun 2018, akan tetapi meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 0,37 dan di tahun 2019 menurun menjadi 0,35.

Tabel 2. 21.
Perbandingan Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Gini Kabupaten Gowa	0,395	0,384	0,354	0,345	0,358
2	Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan	0,407	0,397	0,389	0,389	0,382
3	Indeks Gini Nasional	0,393	0,389	0,382	0,381	0,381
4	Kriteria Ketimpangan Kabupaten Gowa	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sulsel Triwulan IV 2020

Pada Tabel 2.20, dapat dilihat bahwa tahun 2021 terjadi peningkatan angka indeks gini sebesar 0,017 dari 0,345 menjadi 0,362. Meskipun peningkatannya kurang signifikan, namun tetap menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan dan diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang sifatnya prospektif, protektif, *pro poor*, *pro job* dan *pro invorement*.

2.2.1.4 Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Gowa selama periode 2017 – 2021 mengalami

peningkatan. Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kabupaten Gowa tercatat sebesar 333.002 Rupiah/Kapita/Bulan, sedangkan tahun 2018 365.503 Rupiah/Kapita/Bulan, tahun 2019 menjadi 385.820 Rupiah/Kapita/Bulan, untuk tahun 2020 menjadi 390.917 Rupiah/Kapita/Bulan, sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 408.435 Rupiah/Kapita/Bulan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2. 22
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gowa, 2017–2021

No	Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kapita/bulan	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin
1	2017	333.002	62,77	8,42
2	2018	365.503	59,34	7,83
3	2019	385.820	57,98	7,53
4	2020	390.917	57,68	7,38
5	2021	408.435	58,66	7,54

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2017 – 2021 mengalami fluktuasi. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di tahun 2017 sebesar 1,42 dan tahun 2018 menurun menjadi 1,25 kemudian tahun 2019 turun menjadi 0,92 akan tetapi mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 1,18. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,39 pada tahun 2017, di tahun 2018 menurun menjadi 0,31, di tahun 2019 menurun kembali menjadi 0,17. Namun di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,30, kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,06 menjadi 0,36.

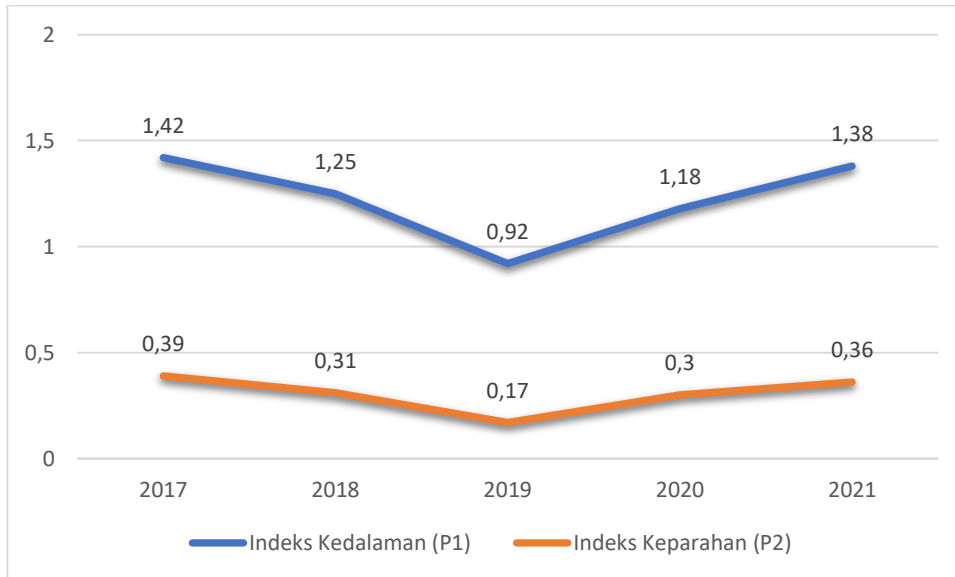
Tabel 2. 23.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
1	2017	1,42	0,39
2	2018	1,25	0,31
3	2019	0,92	0,17
4	2020	1,18	0,30
5	2021	1,38	0,36

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

Laju perkembangan indeks kedalaman Kemiskinan selanjutnya disajikan dalam grafik 2.4. Terlihat adanya penurunan indeks di tahun 2019, namun diakhir 2021 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Grafik 2. 4.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021



Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2022 (diolah)

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, pada tahun 2017 capaian IPM Kabupaten Gowa sebesar 68,33, mengalami peningkatan sebesar 0,63 dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 70,29.

Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang juga sama sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti terlihat pada Tabel 2.23.

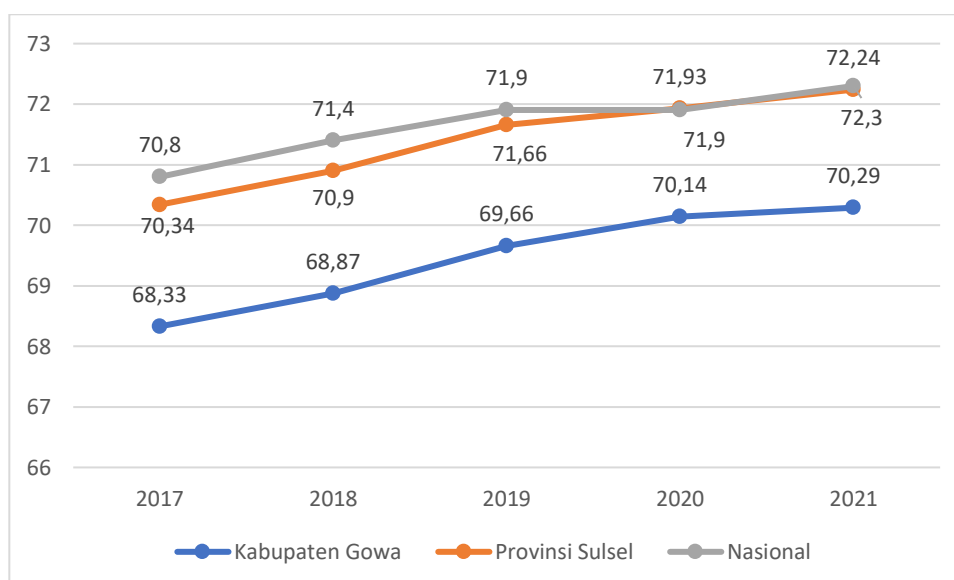
Tabel 2. 24.
Perbandingan IPM Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, dan Nasional
Tahun 2017-2021

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Gowa	68,33	68,87	69,66	70,14	70,29
Provinsi Sulsel	70,34	70,9	71,66	71,93	72,24
Nasional	70,80	71,4	71,9	71,90	72,30

Sumber : Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2022, Statistik Indonesia 2022 (diolah)

Dari tabel terlihat bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia Nasional lebih tinggi dibanding Provinsi Sulsel dan Kabupaten Gowa.

Grafik 2. 5.
Perbandingan IPM Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, dan Nasional
Tahun 2017-2021

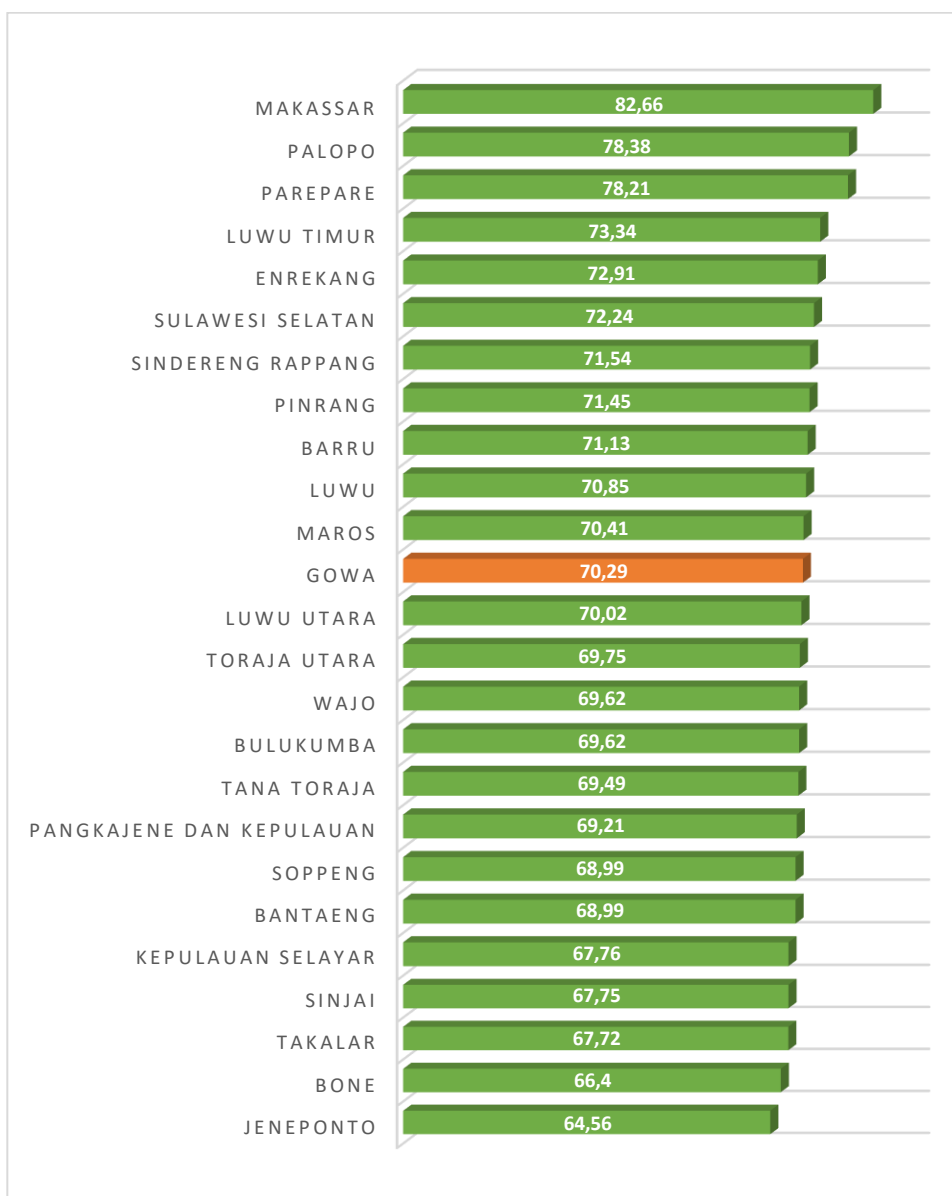


Sumber : Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2022, Statistik Indonesia 2022 (diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Sulawesi Selatan paling tinggi diduduki oleh Kota Makassar dengan nilai 82,66. Paling rendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan nilai 64,56. Sedangkan untuk Kabupaten Gowa sendiri menduduki urutan ke 12 untuk nilai IPM sebesar 70,29 di tahun 2021. Lebih jelasnya untuk perbandingan IPM antar Kabupaten/Kota di

Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Grafik 2.6.

Grafik 2. 6.
IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2021



Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2022 (diolah)

2.2.1.6 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bias menulis semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 25.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Gowa Tahun 2017
- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk (usia 15 tahun keatas) yang bisa menulis	483.497	484.547	535.244	570.441	570.941
2	Jumlah penduduk (usia 15 tahun keatas)	523.114	523.114	556.954	590.342	590.342
3	Angka Melek Huruf	92,43%	92,63%	96,10%	96,63%	96,71%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu komponen Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gowa ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Gowa yang lebih baik. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 2.25 dibawah.

Tabel 2. 26.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Rata - Rata Lama Sekolah
1	2017	7,74
2	2018	7,75
3	2019	7,97
4	2020	8,19
5	2021	8,20
Rerata Pertumbuhan		1,46%

Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. SulSel 2022

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa untuk Tahun 2017-2021 yang Nampak pada Tabel 2.25 menggambarkan adanya peningkatan tiap tahunnya. Untuk Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,01 atau sebesar 0,12 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhannya tiap tahun adalah sebesar 1,46 persen.

2.2.1.8 Angka Usia Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor

kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan memengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik.

Berdasarkan angka usia harapan hidup di Kabupaten Gowa di mana selama kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi peningkatan angka usia harapan hidup yaitu dari 69.88 tahun di tahun 2016 dan tahun 2020 meningkat menjadi 70,43.

Tabel 2. 27.
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Usia Harapan Hidup (Thn)	69,94	69,98	70,01	70,43	70,45

Sumber : LLPD Kabupaten Gowa, Tahun 2021

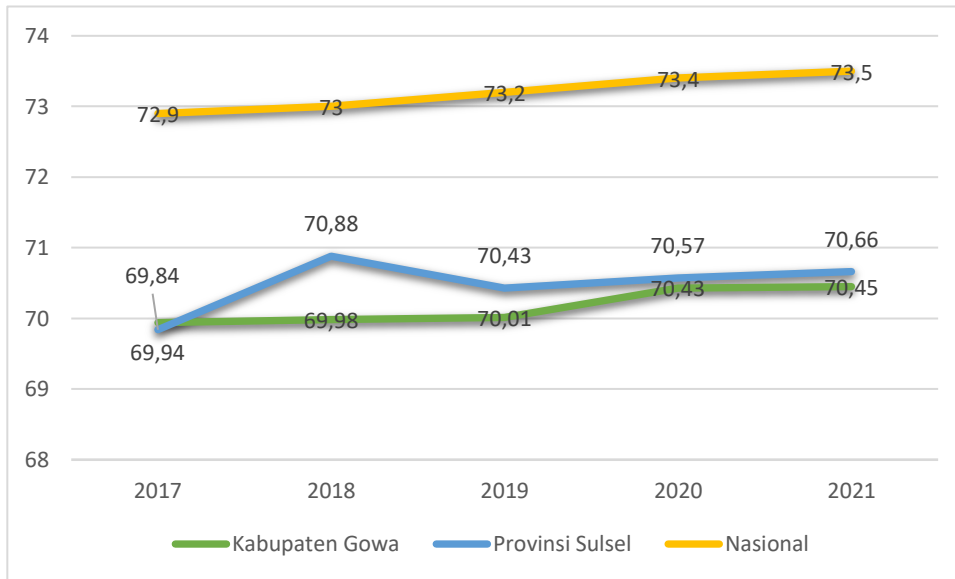
Semakin meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa kualitas kesehatan yang semakin baik yang ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan, adanya berbagai seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan BPJS Kesehatan.

Akan tetapi dengan adanya peningkatan angka usia harapan hidup, maka berarti juga harus meningkatkan pelayanan dan penjaminan hidup yang layak untuk lansia dan panti jompo sehingga memberikan kemungkinan para lansia untuk tetap beraktivitas dan mendapat pelayanan yang baik dan ke depan diharapkan menjadi kota yang ramah untuk lansia.

Dalam meningkatkan angka usia harapan hidup diperlukan tenaga medis dan kesehatan lainnya seperti angka kesakitan yang menurun, akses ke sarana kesehatan semakin dekat, akses tempat tinggal yang layak huni, kondisi air bersih yang baik, serta meningkatnya pola hidup sehat masyarakat.

Untuk perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021 selanjutnya dapat dilihat pada Grafik 2.7 dibawah ini.

Grafik 2. 7.
Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel
dan Nasional Tahun 2017-2021



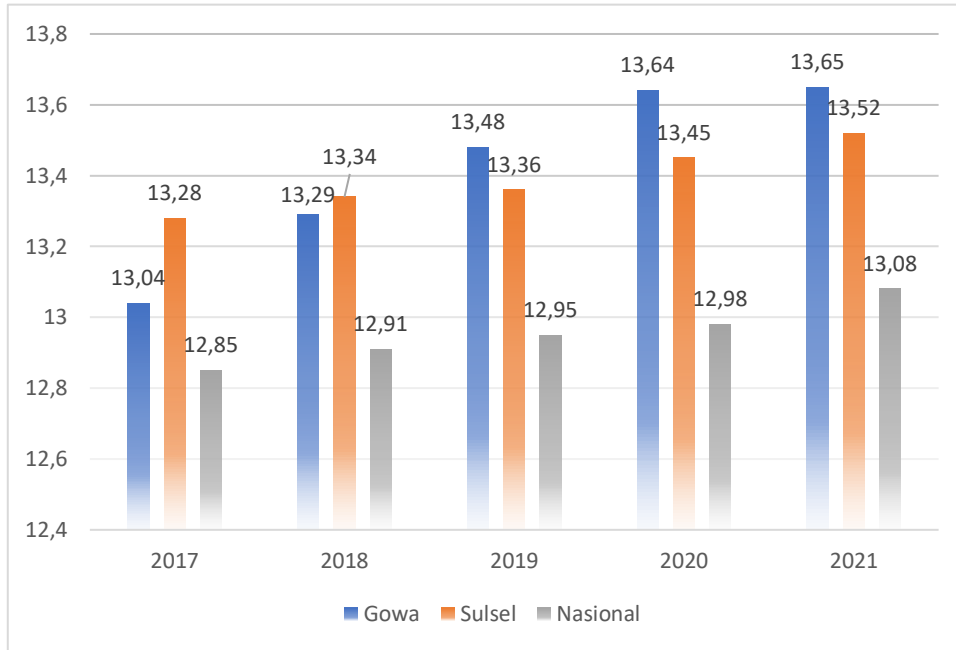
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.2.1.9 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga merupakan salah satu tren komponen IPM. Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa akan datang, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan dibidang pendidikan diberbagai jenjang terutama jenjang pendidikan dasar sebagai langkah nyata dalam pelaksanaan kewenangan yang diserahkan ke kabupaten yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) diharapkan dicapai setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 sendiri Angka HLS tumbuh sebesar 0,01 persen dari 13,64 menjadi 13,65. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapny dapat dilihat pada grafik 2.8 berikut ini.

Grafik 2. 8.
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021



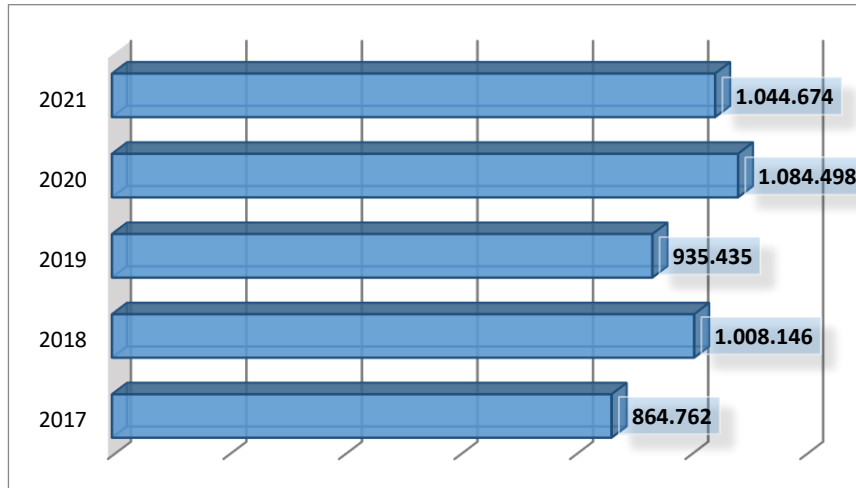
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Grafik diatas dapat diketahui bahwa angka HLS Kabupaten Gowa sejak Tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan LHS Provinsi Sulsel dan LHS Nasional. Hal ini menandakan bahwa harapan lamanya sekolah untuk penduduk Kabupaten Gowa sendiri lebih baik dibandingkan dengan rata-rata harapan lama sekolah di seluruh wilayah Sulsel maupun Nasional.

2.2.1.10 Pengeluaran Perkapita

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Gowa selama 5 tahun terakhir (2017-2021) bersifat fluktuatif. Untuk tahun 2021 sendiri mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4 persen atau setara 39.824 rupiah, dimana total rata-rata pengeluaran per kapita sebelumnya sebesar 1.084.498 rupiah menjadi 1.044.674 rupiah. Perkembangan pengeluaran per Kapita Kabupaten Gowa dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik 2.9.

Grafik 2. 9.
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Gowa tahun 2021 untuk kelompok komoditas makanan dan bukan makanan sebesar 1.044.674 rupiah. Jika dipisahkan, pengeluaran untuk kelompok komoditas makanan adalah sebesar 541.937 dimana pengeluaran terbesar untuk jenis makanan dan minuman jadi sebesar 158.315 rupiah dan paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 6.239 rupiah. Sedangkan komoditas bukan makanan sebesar 502.737 dengan pengeluaran terbesar untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 275.886 rupiah, dan paling sedikit adalah untuk keperluan pesta dan upacara sebesar 13.565 rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.27.

Tabel 2. 28.
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) Tahun 2017-2021

Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
2017	437.025	427.737	864.762
2018	478.322	529.824	1.008.146
2019	457.037	478.399	935.436
2020	557.950	526.548	1.084.498
2021	541.937	502.737	1.044.674

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

2.2.1.11 Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 2017-2021 selalu mengalami fluktuasi. Pada di tahun 2017 terdapat 7 kasus atau 0.022% dari 32,020 balita. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan 7 kasus yaitu 0,022% dari 32,020 balita, pada tahun 2019 terdapat kenaikan yang signifikan jumlah balita gizi buruk sebanyak 38 kasus yaitu 0,07%, di tahun 2020 jumlah balita gizi buruk naik menjadi 57 orang dari 55.880 jumlah balita, sedangkan di tahun 2021 jumlah. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya Aplikasi Eppgbm yang memudahkan surveilans gizi dalam menyasar masalah status gizi, sedangkan di tahun-tahun sebelumnya pendataan dilakukan hanya berdasarkan pada buku antropometri.

Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 29.
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita gizi buruk	5	7	38	57	64
2	Jumlah balita	32.401	32.020	53.821	55.880	48.967
	Persentase balita gizi buruk	0,02%	0,02%	0,07%	0,10%	0,13%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.12 Prevelansi Balita Gizi Kurang

Perkembangan prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 2017-2021 selalu mengalami fluktuasi. Di mana pada tahun 2017 meningkat menjadi 2.238 kasus atau 6.907% dari 32.401 balita, tahun 2018 turun menjadi 554 kasus atau 1.730% dari 32.020 balita, tahun 2019 menjadi 3.135 kasus dari 53,821 balita atau sebesar 5,82% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2.583 kasus dari 55,880 balita atau sebesar 4,62%.

Tabel 2. 30.
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Gowa Tahun 2017–2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya balita gizi kurang	2.238	554	3.135	2.583	2677
2	Jumlah balita	32.401	32.020	53.821	55.880	48.967
3.	Prevalensi balita gizi kurang	6,90%	1,73%	5,82%	4,62%	5,47%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.1.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dalam mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun.

Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu jumlah penduduk angkatan kerja dibagi seluruh penduduk usia kerja (berumur 15-64 tahun).

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Gowa sebesar 591.593 Jiwa atau sebesar 76,50 persen dari total penduduk di Kabupaten Gowa. Angkatan Kerja terdiri dari 407.545 jiwa sedangkan Angkatan bukan kerja terdiri dari 184.048 jiwa. Untuk Angkatan kerja sendiri terbagi menjadi Angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran terbuka, dengan jumlah yang bekerja sebesar 390.040 jiwa, dan pengangguran terbuka sebesar 17.505 jiwa. Dari jumlah yang bekerja, laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan total

Angkatan kerja yang bekerja untuk laki-laki sebesar 233.025, sedangkan perempuan sebesar 157.015 jiwa. Dengan demikian, tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Gowa adalah 407.545 jiwa dari total 591.593 jiwa, atau setara dengan 65,93 persen dari total penduduk usia kerja.

Tabel 2. 31.
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa Tahun 2021

Kegiatan Utama		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Angkatan kerja		243.087	164.458	407.545
1.	Bekerja	233.025	157.015	390.040
2.	Pengangguran Terbuka	10.062	7.443	17.505
Bukan Angkatan Kerja		45.853	138.195	184.048
1.	Sekolah	17.224	19.144	36.368
2.	Mengurus Rumah Tangga	12.841	110.006	122.847
3.	Lainnya	15.788	9.045	24.833
Jumlah/Total		288.940	302.653	591.593

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2021

Dari tahun 2017 sampai 2021, jumlah penduduk Angkatan kerja mengalami peningkatan. Tingkat partisipasinya fluktuatif, namun ditahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen dari tahun sebelumnya, seperti yang terlihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2. 32.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	Penduduk yang Bekerja (jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2017	535.919	312.726	58,35%
2018	546.497	350.784	64,19%
2019	556.954	347.773	62,44%
2020	582.646	368.615	63,27%
2021	591.593	390.040	65,93%

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

2.2.1.14 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka dihitung dari banyaknya jumlah penduduk yang tidak bekerja dalam angkatan kerja terhadap total angkatan kerja dalam wilayah Kabupaten Gowa. Nampak pada Tabel 2.30, jumlah pengangguran terbuka adalah sebanyak 17.505 jiwa dengan total laki-laki sebesar 10.062 jiwa, sedangkan perempuan sebesar 7.443 jiwa. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gowa tahun 2021 adalah sebesar 4,30 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2. 33.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	Pengangguran Terbuka (jiwa)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2017	333.179	20.453	6,14%
2018	368.466	17.682	4,80%
2019	365.559	17.786	4,87%
2020	394.000	25.385	6,44%
2021	407.545	17.505	4,30%

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

2.2.1.15 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah $= (1 - \text{angka pengangguran})$. Besaran penduduk yang bekerja pada kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sendiri, jumlah penduduk yang bekerja meningkat sebesar 21.425 jiwa dari tahun sebelumnya (2020). Presentase penduduk yang bekerja terhadap total angkatan kerja sangat diharapkan untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka, namun tak kalah pentingnya kualitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Tabel 2. 34.
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	Penduduk yang Bekerja (jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2017	333.179	312.726	93,86
2018	368.466	350.784	95,20
2019	365.559	347.773	95,13
2020	394.000	368.615	93,56
2021	407.545	390.040	95,70

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

2.2.1.16 Laju Pertumbuhan PDRB/PDB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.40
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produk Domestik Bruto (PDB)	11.971	12.826	13.782	14.025	15.043
2	Jumlah tenaga kerja	312.726	350.780	347.773	368.615	390.040
Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)		3,83%	3,66%	3,96%	3,80%	3,86%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.17 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator yang digunakan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal.

Tabel 2. 35.
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas
Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	114.451	129.219	127.699	160.226	167.547
2	Total kesempatan kerja	312.726	350.784	347.773	368.615	390.040
	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	36,60%	36,84%	36,72%	43,47%	42,95

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa Tahun 2022

2.2.1.18 Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 36.
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
IKM Tahun 2016-2020	75,9%	79,46%	83,86%	83,13%	84,85%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.19 Presentase PAD Terhadap Pendapatan

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang salah satu komponennya adalah pajak daerah. Persentase PAD terhadap

pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi PAD pada pendapatan daerah, hal tersebut juga menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah. Adapun persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37.
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Tahun	Uraian		
	Jumlah Pendapatan Daerah	Jumlah PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan
2017	1.790.263.499.730,15	268.339.203.299,15	14,99%
2018	1.781.396.471.000,37	217.112.642.503,37	12,19%
2019	1.870.608.908.440,64	238.239.570.974,67	12,74%
2020	1.883.818.352.305,74	241.470.562.565,34	12,82%
2021	1.872.136.404.847,22	256.759.755.064,22	13,71%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Dari data pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Gowa masih rendah karena proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2017-2021 baru mencapai rata-rata dibawah 15 persen. Akan tetapi pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar presentase PAD terhadap pendapan sebesar 0,9 persen disbanding tahun lalu.

2.2.1.20 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertanian

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,6%	89,7%	89,8%	89,9%	90,0%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Berdasarkan Hasil Analisis Konsumsi Pangan pada tahun 2017-2021, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Gowa yang ditunjukkan oleh skor PPH mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 ketersediaan pangan di Kabupaten Gowa sudah cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis pangan yang sudah mencapai skor maksimum, diantaranya umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak serta sayur dan buah, sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimum selama empat tahun terakhir adalah buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

2.2.1.21 Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB

Dengan luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi, Kabupaten Gowa mempunyai potensi perkebunan yang besar. Maka dari itu sektor perkebunan berpengaruh terhadap jumlah PDRB Kabupaten Gowa. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 39.
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Kontribusi Perkebunan (Tanaman Keras)	Jumlah PDRB sektor Pertanian/ Perkebunan	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
2017	180.512,83	5.173.375,05	3,49%
2018	183.901,90	5.558.315,76	3,31%
2019	184.798,33	5.655.581,95	3,27%
2020	291.238,72	5.943.990,00	4,90%
2021	321.819,09	5.781.169,81	5,57%

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.22 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang disebabkan berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB pada kurun waktu 2017-2019 mengalami kenaikan, akan tetapi di sejak tahun 2020 kian mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena terjadinya Pandemi Covid-19. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40.
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sektor Pariwisata (Rp)	Jumlah PDRB (Rp)	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
2017	667.164.2000	17.192.664.100	3,88%
2018	756.250.3000	19.071.982.700	3,97%
2019	839.586.700	20.938.874.400	4,01%
2020	767.940.000	21.531.880.000	3,57%
2021	500.490,000	23.536.837,73	2,13%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.23 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Bila dilihat dari kondisi perairan di Kabupaten Gowa, pada dasarnya pengembangan budidaya perikanan yang dikembangkan adalah perikanan air tawar. Sedangkan perikanan air laut di Kabupaten Gowa tidak terlalu berpengaruh besar, hal ini dikarenakan garis pantai Kabupaten Gowa hanya sepanjang 800 m, sehingga Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun terakhir dibawah 6 persen. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 41.
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sektor Kelautan dan Perikanan (Rp)	Jumlah PDRB (Rp)	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
2017	929.758,63	17.192.664,10	5,41%
2018	1.024.957,42	19.071.982,68	5,37%
2019	1.115.367,75	20.938.874,38	5,33%
2020	1.032.615,62	21.531.877,32	4,80%
2021	1.129.768,21	23.536.837,73	4,80%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.1.24 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan

eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan. Untuk beberapa tahun kedepan kontribusi sektor perdagangan diharapkan semakin meningkat khususnya di Kabupaten Gowa sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Di tahun 2021 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB berangsur membaik dibandingkan dengan tahun 2021 yang mengalami penurunan yang signifikan akibat adanya pandemi Covid-19. Adanya peningkatan sebesar 4,64 persen menandakan mulai pulihnya perekonomian Kabupaten Gowa. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sektor Perdagangan (Rp)	Jumlah PDRB (Rp)	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
2017	2.116.438,90	17.192.664,10	12,31%
2018	2.425.945,00	19.071.982,68	12,71%
2019	2.745.923,50	20.938.874,38	13,11%
2020	2.714.680,00	21.531.880,00	7,87%
2021	2.943.550,00	23.536.837,73	12,51%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.25 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan dapat terus menerus meningkatkan PDRB-nya khususnya sektor industri yang memiliki prospek potensial untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sektor industri merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Pada Tahun 2021, meskipun ada peningkatan sebesar 0,17 persen, kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Gowa tidak jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menandakan kontribusinya cukup stabil. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.42 dibawah.

Tabel 2. 43.
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sektor Industri (Rp)	Jumlah PDRB (Rp)	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
2017	1.154.818,64	17.192.664,10	6,72%
2018	1.240.118,53	19.071.982,68	6,50%
2019	1.420.321,90	20.938.874,38	6,78%
2020	1.353.250,00	21.531.880,00	6,28%
2021	1.518.820,00	23.536.837,73	6,45%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.26 Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan

Pertumbuhan PDRB sector transportasi dan pergudangan di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2021 sendiri hanya tumbuh sebesar 0,08 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table 2.44 dibawah.

Tabel 2. 44.
Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan Kabupaten
Gowa Tahun 2017 - 2021 (Persen)

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan Kabupaten (Persen)	1,64%	1,62%	1,68%	1,59%	1,68%

Sumber : Gowa Dalam Angka, Tahun 2022

2.2.1.27 Penguatan Cadangan Pangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Penguatan cadangan pangan di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan oleh SKPD yang bersangkutan, sedangkan penguatan cadangan pangan pada empat tahun terakhir adalah sebesar 2 ton. penguatan cadangan pangan Kabupaten Gowa

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 45.
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Cadangan Pangan (Lumbung Pangan Masyarakat)	Penguatan Cadangan Pangan (di Lumbung Pangan Masyarakat)
2017	2	2 Ton
2018	2	2 Ton
2019	2	2 Ton
2020	2	2 Ton
2021	2	2 Ton

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.2.1.28 Indeks Perkembangan Desa

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan salah satu indikator dalam prioritas Nasional dalam rangka mengurangi desa tertinggal yang ada di Indonesia, dimana output dari Penyusunan IPD ini adalah terpetakannya desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD ke dalam 3 (Tiga) Klasifikasi yaitu; Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal.

Tabel 2. 46.
Status Perkembangan Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021

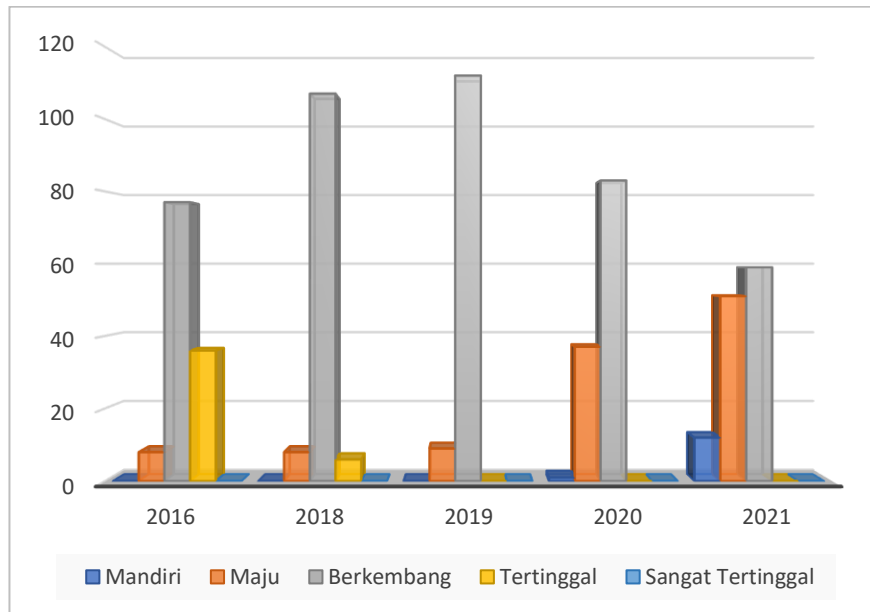
No	Status Desa	Jumlah Desa				
		2016	2018	2019	2020	2021
1	Mandiri	0	0	0	1	12
2	Maju	8	8	9	37	51
3	Berkembang	77	107	112	83	59
4	Tertinggal	36	6	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun 2022

Dari Tabel 2.45 diatas dapat dilihat perkembangan desa di Kabupaten Gowa yang makin baik. Sejak Tahun 2019 sudah tidak ada lagi desa tertinggal, sementara di tahun 2021 perkembangannya makin pesat dimana sudah terbentuk 12 desa mandiri, 51 desa maju, dan 59 desa berkembang. Desa berkembang makin berkurang karena berubah menjadi desa maju dan mandiri. Sedangkan untuk tahun 2017 sendiri tidak ada data yang tersaji karena tidak dilakukan pendataan.

Secara grafik, perkembangan desa sejak tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah.

Grafik 2. 10.
Status Perkembangan Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021



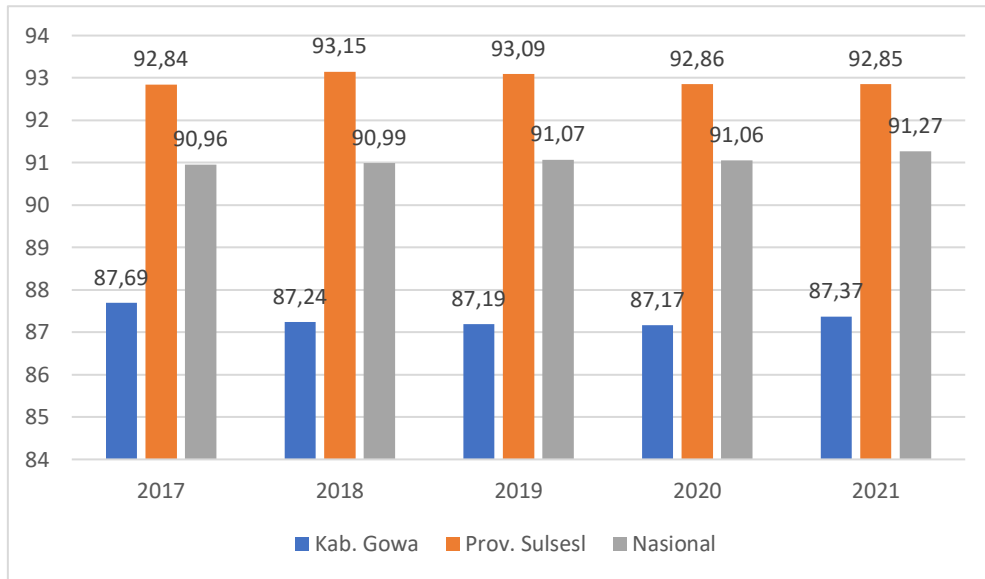
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun 2022

2.2.1.29 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

IPG Kabupaten Gowa Tahun 2021 sebesar 87,37 dengan capaian sebesar 91,35 persen dari target yang ditetapkan yaitu 91,14. IPG kabupaten gowa lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Selatan yang bernilai 92,85 maupun nasional dengan nilai 91,27.

Grafik 2. 11.
Perbandingan IPG Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel dan Nasional
Tahun 2017-2021

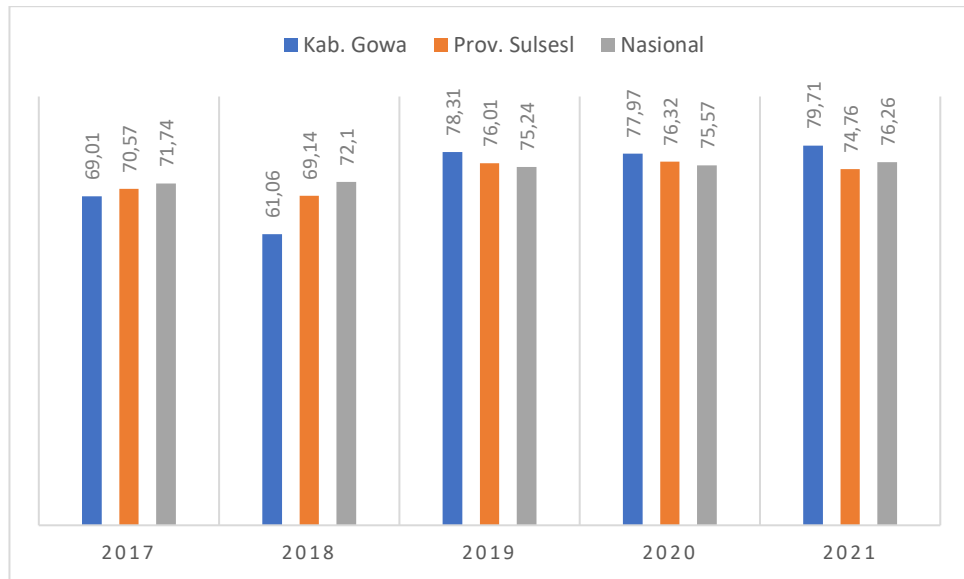


Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Adapun untuk IDG Kabupaten Gowa berada di nilai 79,71 di Tahun 2021 berada diatas IDG Provinsi Sulsel dengan nilai 74,46, dan IDG Nasional dengan nilai 76,26. Artinya, partisipasi perempuan di Kabupaten Gowa lebih banyak dibandingkan rata-rata partisipasi perempuan di wilayah Provinsi Sulsel dan Nasional.

Grafik 2. 12.
Perbandingan IDG Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsei dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

2.2.2 Seni, Budaya, dan Olahraga

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 47.
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	APK SD/MI	APK SMP/MTs	APK SMA/MA/SMK
2017	113,26	79,58	64,44
2018	110,61	92,85	80,61
2019	104,51	104,25	89,99
2020	105,88	86,23	90,32
2021	107,00	84,31	88,95

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Capaian tingkat APK Kabupaten Gowa pada tahun 2021 telah melampaui 100 persen, yaitu 107,00 untuk APK SD/MI. Namun untuk APK SMP/MTs sebesar 99,20 persen dan SMA/SMK/MA sebesar 89,95 persen. Hal ini tidak terlepas oleh adanya kebijakan penguatan Pendidikan selama ini telah dilakukan dengan baik.

Hal ini memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah. APK pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, walaupun terdapat penurunan pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di tahun 2021.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM Kabupaten Gowa Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.47 dibawah ini.

Tabel 2. 48.
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gowa Tahun
2017 – 2021

Tahun	APM SD/MI	APM SMP/MTs	APM SMA/MA/SMK
2017	99,50	68,21	63,88
2018	97,92	72,22	59,70
2019	95,82	73,57	59,04
2020	97,01	74,27	60,50
2021	97,62	76,94	60,34

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan Badan Pusat Statistik Tahun 2022

APM Kabupaten Gowa untuk SD/MI dan SMP/MTs mengalami kenaikan di Tahun 2021. Namun untuk APK SMA/MA/SMK mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing

jenjang pendidikan.

c. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Selengkapnya dapat dilihat pada beberapa tingkat pendidikan berikut :

Tabel 2. 49
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jenjang Pendidikan	
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B
2017	0,26 %	0,0092 %
2018	0,26 %	0,0045 %
2019	0,27 %	0,0055 %
2020	0,29 %	0,0078 %
2021	0,00 %	0,0000 %

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbudristek 2022 (Diolah)

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Gowa pada periode 2017 sampai dengan 2021 cukup rendah (dibawah 1 persen), namun demikian untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B menunjukkan kecenderungan peningkatan. Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya kebijakan program pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah periode 2016-2021.

d. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Semakin baik proses belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. Selengkapnya dapat dilihat pada beberapa tingkat pendidikan berikut.

Tabel 2. 50
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Angka Kelulusan	
	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B
2017	100 %	100 %
2018	100 %	100 %
2019	100 %	100 %
2020	100 %	100 %
2021	100 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2022

Capaian angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B secara konsisten mencapai 100 persen, keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa program strategis daerah dibidang pendidikan seperti Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

e. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia sekolah menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Selengkapny dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 51
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya	Angka Melanjutkan(AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
2017	12.312	12.945	95,11%
2018	12.945	12.945	100,00%
2019	13.101	13.101	100,00%
2020	11.762	12.375	95,05%
2021	12.967	12.967	100,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Angka Melanjutkan Kabupaten Gowa dari SD/MI ke SMP/MTs berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2017-2021, bahkan cenderung menurun pada tahun 2017, capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa SD yang tamat namun tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang

pendidikan menengah. Beberapa faktor yang menghambat pencapaian target angka melanjutkan di Kabupaten Gowa adalah kemiskinan yang menyebabkan masih terdapat beberapa siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang harus membantu perekonomian.

f. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Sekolah (SD/MI+SMP/MTs)	Jumlah Penduduk Usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
2017	667	125.783	53,03
2018	671	113.655	59,04
2019	674	128.089	52,62
2020	674	130.726	51,56
2021	674	130.497	51,65

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Gowa Dalam Angka Tahun 2022

Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Gowa menurun dalam jangka waktu dua tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh semakin bertambah jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sedangkan jumlah sekolah tidak bertambah.

g. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Adapun kondisi Pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 53.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/ RA/Penitipan Anak	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2017	30.843	43.852	70,34%
2018	36.008	36.779	97,90%
2019	43.969	44.851	98,03%
2020	22.436	25.646	87,48 %
2021	25.952	27.999	92,96%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan kecenderungan peningkatan persentase jumlah anak usia 4-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jenjang TK/ RA/Penitipan Anak mengindikasikan perkembangan PAUD di Kabupaten Gowa sangat baik baik yang difasilitasi oleh pemerintah dan prakarsa masyarakat.

2.3.1.2 Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, sehingga program-program kesehatan banyak yang menitikberatkan pada upaya penurunan AKB, dimana AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal antara fase kelahiran hingga bayi umur < 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Distribusi angka kematian bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 54
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup
(Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Bayi Usia 0-11 bulan yang Meninggal di Suatu Wilayah Pada Kurun Waktu Tertentu	Jumlah Kelahiran Hidup di Wilayah dan Pada Kurun Waktu Yang Sama	Angka Kematian Bayi (AKB)
2017	75	12.652	6
2018	42	13.051	3
2019	47	13.555	3
2020	41	13.515	3
2021	65	12.526	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

AKB di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan yang signifikan hal ini dikarenakan adanya beberapa perbaikan, diantaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu semasa hamil serta penanganan dan pemantauan bayi baru lahir secara adekuat, dengan adanya program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran

Angka Kelangsungan Hidup Bayi merupakan peluang bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan, masih perlunya kerja keras stakeholder terkait untuk terus meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 55
 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran
 (Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	941	997	997	997	995

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Angka Kematian Balita di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 56
 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (kasus)
 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	9	11	5	1	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Angka Kematian Balita di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 57
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (kasus)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	9	11	5	1	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan Angka kematian ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran, Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Kasus)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Ibu Hamil Yang Meninggal Karena Hamil, Bersalin dan Nifas di Wilayah Tertentu selama 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup di Wilayah Tersebut dan Pada Kurun Waktu Yang Sama	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
2017	13	12.655	103
2018	17	13.051	130
2019	14	13.555	103
2020	15	13.515	111
2021	16	12.526	128

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Data kematian ibu selama tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini diantaranya kondisi fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana di beberapa kabupaten untuk penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal masih belum optimal dan distribusi SDM kesehatan yang kompeten untuk kasus kegawat darurat belum merata ditingkat puskesmas. Selain itu sistem rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar ke fasilitas rujukan belum seluruhnya berjalan optimal. Kebijakan Sistem Rujukan yang belum efektif untuk kasus-kasus darurat sehingga terlambat mencapai fasilitas kesehatan.

6) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan posyandu antara lain menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

Rasio posyandu di Kabupaten Gowa meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Gowa. Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 59
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Gowa
Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu Per Satuan Balita
2017	734	61.153	12,00
2018	765	57.023	13,42
2019	776	59.201	13,12
2020	782	55.880	13,9
2021	783	48.967	15,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

7) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan

dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 60
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
2017	189	748.200	0,25
2018	189	760.607	0,25
2019	158	772.684	0,20
2020	151	765.836	0,19
2021	145	773.315	0,18

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2022

8) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit terhadap jumlah penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
2017	1	748.200	0,0013
2018	2	760.607	0,0026
2019	2	772.684	0,0026
2020	3	765.836	0,0039
2021	3	773.315	0,0038

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

9) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk ini menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter memperlihatkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, salah satu penyebabnya adalah adanya pengangkatan CPNS tenaga medis khususnya dokter di Kabupaten Gowa. Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 62
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Dokter	Jumlah Penduduk	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
2017	95	748.200	0,127
2018	153	760.607	0,201
2019	178	772.684	0,230
2020	204	765.836	0,266
2021	217	773.315	0,280

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD, Tahun 2022

10) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Gowa berkurang secara signifikan di tahun 2020 namun Kembali mengalami peningkatan di tahun 2021. Rasio tenaga medis di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 63
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
2017	260	748.200	0,348
2018	352	760.607	0,463
2019	354	772.684	0,458
2020	205	765.836	0,268
2021	217	773.315	0,280

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD, Tahun 2021

11) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan

terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSU). Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 64
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Difinitif di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu	Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Yang Sama	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
2017	2.038	2.780	73,31%
2018	2.130	2.757	77,26%
2019	2.187	3.021	72,39%
2020	1.546	3.021	51,18%
2021	1.502	2.671	56,23%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

12) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 65
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu Yang Sama	Cakupan Pertolongan
2017	13.318	13.898	95,83%
2018	13.016	13.179	98,76%
2019	13.304	13.304	100,00%
2020	13.456	14.488	92,88%
2021	12.594	12.734	98,90%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

13) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya Universal Child Immunization (UCI) ialah cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Gowa turun di tahun 2021 mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya menjadi 86,82%, hal ini dipengaruhi oleh terjadinya Pandemi COVID-19 sehingga tidak dilaksanakan sweeping imunisasi.

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kontak fisik selama masa pandemik. Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir telah mencapai 100% seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 66
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Desa/ Kelurahan UCI	Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
2017	167	167	100%
2018	167	167	100%
2019	167	167	100%
2020	151	167	90,42%
2021	145	167	86,82%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

14) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang di temukan dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 67
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten
Gowa Tahun 2017- 2021

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu	Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk Yang Ditemukan di Satu Wilayah Kerja Dalam Waktu Yang Sama	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
2017	4	4	100,00%
2018	7	7	100,00%
2019	38	38	100,00%
2020	57	57	100,00%
2021	64	64	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum diindikasikan oleh masih tingginya prevalensi stunting yang disebabkan oleh kurang asupan gizi dalam waktu cukup lama. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 68
Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat
Konsumsi Minimum Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Tahun	Banyaknya Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah dari 2.100 Kkal/Kapita/Hari	Jumlah Balita	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum
2017	660 Jiwa (1.883,0 Kkal)	60.153	3,00%
2018	660 Jiwa (1.817,6 Kkal)	57.023	3,19%
2019	659.512 Jiwa (1.777,2 Kkal)	59.201	3,00%
2020	772.684 Jiwa (1.896,2 Kkal)	55.880	3,39%
2021	784.511 Jiwa (1.847,4 Kkal)	-	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2022

15) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan pasien baru TB BTA Positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis) harian. Sedangkan penanganan/pengobatan adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB BTA positif dengan OAT selama 6 bulan.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan cakupan dari jumlah penderita TBC/BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC/BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 69
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati di Satu Wilayah Kerja Selama 1 Tahun	Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+) Dalam Kurun Waktu Yang Sama	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
2017	633	1.513	41,84%
2018	769	1.860	41,34%
2019	1.039	2.290	45,37%
2020	635	1.359	46,72%
2021	945	1.497	63,12%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

16) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan merupakan salah satu penyebab kematian dengan jumlah yang tinggi. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Gowa dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 70
Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Banyaknya Kasus Penderita TBC (baru dan lama)	Jumlah Penduduk pada Kurun Waktu Yang Sama	Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
2017	1.464	748.200	195,67
2018	1.578	760.607	207,47
2019	1.731	772.684	224,02
2020	949	765.836	123,92
2021	1.266	773.315	163,71

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

17) Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat kematian karena tuberculosi dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pasien TB yang meninggal terhadap jumlah penduduk per 100.000 jiwa. Tingkat Kematian karena Tuberculosi di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 71
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten
Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Pasien TB Yang Meninggal	Jumlah Penduduk Pada Kurun Waktu Yang Sama	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis
2017	16	748.200	2
2018	28	760.607	4
2019	12	772.684	2
2020	30	765.836	4
2021	84	773.315	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

18) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD merupakan persentase atas jumlah penderita DBD yang ditemukan dengan jumlah penderita DBD yang ditangani. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 72
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penderita DBD yang Ditangani Sesuai SOP di Satu Wilayah Kerja Selama 1 Tahun	Jumlah Penderita DBD yang Ditemukan di Satu Wilayah Dalam Kurun Waktu Yang Sama	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
2017	147	147	100,00%
2018	196	196	100,00%
2019	473	473	100,00%
2020	439	439	100,00%
2021	335	335	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2021 di Kabupaten Gowa sebanyak 335 ini berarti menurun dibanding tahun 2020 yang hanya terdapat 439 Kasus namun masih tergolong tinggi. Permasalahan dalam upaya pengendalian DBD antara lain : masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk secara terus menerus sebagai upaya yang efektif dalam pencegahan penyakit DBD dan belum optimalnya penggunaan analisa data dalam perencanaan kegiatan Pengendalian DBD oleh petugas Puskesmas.

19) Penderita Diare yang ditangani

Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Penderita diare yang ditangani merupakan persentase penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader disuatu wilayah dalam waktu satu tahun terhadap jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu wilayah tertentu pada waktu yang sama dimana 10% dari angka kesakitan dikalikan jumlah penduduk. Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 73
Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)
2017	20.234	14.705
2018	8.469	20.303
2019	7.139	20.862
2020	3.478	20.678
2021	2.294	20.880

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Pada tahun 2020 kasus diare pada semua umur sebanyak 20.678 kasus dan tahun 2021 sebanyak 20.868 kasus. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang dikarenakan meningkatkan jumlah desa ODF di Kabupaten Gowa dan kondisi pandemi covid-19 dimana masyarakat memilih untuk melakukan pengobatan sendiri di rumah terlebih dahulu.

20) Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria merupakan indikator untuk mengetahui insiden penyakit malaria pada satu daerah tertentu selama satu tahun. Jumlah penduduk yang menderita di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Angka kejadian malaria di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74
Angka Kejadian Malaria Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	Angka Kejadian Malaria	Tingkat Kematian Akibat Malaria
2017	10	748.200	1,34	0
2018	7	760.607	0,92	0
2019	9	764.970	1,18	0
2020	4	765.836	5,22	0
2021	6	773.315	7,75	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Pada tahun 2020, di Kabupaten Gowa ditemukan 4 kasus positif malaria. Sementara di Tahun 2021 ditemukan 6 kasus, yang artinya meningkat dibanding tahun 2020. Tingkat kematian akibat Malaria tahun 2017-2021 sebanyak 0 kasus.

Penegakan diagnosa malaria yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan mikroskopis. Semua kasus positif malaria mendapat pengobatan ACT. Dalam hal pengobatan malaria, dilakukan pemantauan minum obat malaria oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten bersama dengan puskesmas. Tujuannya untuk memastikan obat malaria yang diberikan diminum dengan teratur dan tepat, untuk mencegah terjadinya kegagalan pengobatan yang bisa berakibat terjadinya kekambuhan dan resistensi obat.

Dilakukan penyelidikan epidemiologi pada semua kasus malaria untuk mengetahui kronologis riwayat sakit dan pengobatan untuk menentukan klasifikasi kasus, mencari kasus atau tersangka lain di sekitar penderita, dan pengamatan vektor di lingkungan tempat tinggal penderita.

21) Prevelensi HIV/AIDS (persen)

HIV dan AIDS merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sering dikaitkan dengan kesehatan reproduksi terutama perempuan. Persentase Prevalensi HIV/AIDS merupakan jumlah pasien HIV dan AIDS terhadap total populasi penduduk. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75
Prevelensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	Prevelensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi
2017	0	0	0
2018	55	751.981	0,007%
2019	103	772.684	0,013%
2020	20	765.836	0,0026%
2021	60	773.315	0,0077%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 40 kasus dari total 773.315 penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Gowa karena resiko penularannya yang bisa makin banyak di tahun berikutnya. Tingkat prevelensinya pun mengalami kenaikan sebesar 0,0051 persen.

22) Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir

Salah satu kegiatan penanggulangan HIV adalah mengupayakan peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko. Jumlah penduduk Kabupaten Gowa usia 15-24 tahun yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 76
 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi
 Terakhir Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir
2017	86	75	1,15
2018	113	99	1,14
2019	209	195	1,07
2020	205	222	0,9
2021	Tidak ada data di Dinas Kesehatan (data di Dinas KB)		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

23) Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 77
 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS
2017	0	0	0
2018	40	124.155	0,03%
2019	65	133.275	0,05%
2020	115	135.887	0,08%
2021	305	136.208	0,22%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Jumlah pasien HIV dan AIDS di Kabupaten Gowa dari tahun 2017 ke tahun 2021 kian mengalami kenaikan (sesuai dengan tabel 2.76). Tingkat pengetahuan mengenai HIV dan AIDS di antara penduduk kebanyakan di usia 15-24 tahun di Kabupaten Gowa masih berkisar 0,22% di tahun 2021.

24) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah. Di Kabupaten Gowa cakupan kunjungan bayi tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, dan di tahun 2021 capaian cakupan kunjungan bayi melebihi 100 persen yakni 100,21%

Hal ini di karenakan pelayanan kesehatan dasarpada anak bayi salah satunya adalah pemberi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), hal Ini yang menarik ibu atau keluarga untuk datang berkunjung ke Posyandu sehingga anak bayi mendapatkan pelayanan berkualitas dan terstandar sampai usia satu tahun.

Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Gowa pada Tahun 2021 sebesar 100,21 persen Dari jumlah bayi 12.256 yang mendapatkan pelayanan bayi sesuai standar adalah 12.553 bayi mengalami peningkatan dari tahun 2020, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 78
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Cakupan Kunjungan Bayi
2017	12.019	12.736	94,37%
2018	12.893	13.051	98,79%
2019	13.027	13.733	94,86%
2020	13.082	13.515	96,40%
2021	12.553	12.526	100,21%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi : Pemberian imunisasi dasar lengkap, Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi, Pemberian Vitamin A 100.000 IU, Konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda -tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA dan penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

25) Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di kawasan perkotaan. Tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas serta penempatan pejabat/petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi kesehatan menurut Permenkes 75 Tahun 2014. Cakupan Puskesmas Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. 79
Cakupan Puskesmas Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Puskesmas	Jumlah seluruh kecamatan	Cakupan Puskesmas
2017	26	18	144,44%
2018	26	18	144,44%
2019	26	18	144,44%
2020	26	18	144,44%
2021	26	18	144,44%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Cakupan Puskesmas per-kecamatan di Kabupaten Gowa sejak tahun 2017 sudah terpenuhi diatas 100 persen. Permasalahan terkait capaian cakupan Puskesmas adalah :distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tidak merata di seluruh puskesmas dan tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi puskesmas.

26) Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Puskesmas pembantu memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dan kecanggihhan yang lebih rendah daripada puskesmas. Cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 80
Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Puskesmas Pembantu	Jumlah Seluruh Desa	Cakupan Puskesmas Pembantu
2017	115	121	95,04%
2018	115	121	95,04%
2019	115	121	95,04%
2020	125	121	103,31%
2021	119	121	98,34%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Cakupan Puskesmas Pembantu per-Desa di Kabupaten Gowa tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4,97 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Ketersediaan sarana kesehatan merupakan komponen yang penting dalam sumber daya kesehatan. Sarana kesehatan harus memadai, baik dalam jumlah maupun kualitas bangunan yang merupakan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu, baik bangunan utama, sarana pendukung maupun sanitasi lingkungannya.

27) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. 81
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
2017	13.238	13.898	95,25%
2018	13.538	13.786	98,20%
2019	14.249	15.107	94,32%
2020	13.962	15.106	92,43%
2021	12.666	13.353	94,85%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir berada diatas 90%, dan pada tahun 2021 berada pada capaian 94,85%. Kondisi grografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya yang mempunyai kompotensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya . Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan.

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) adalah: belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan dan adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sasmpai persalinannya.

28) Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu nifas mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas, diperlukan pemantauan pemeriksaan ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 6 jam - 3 hari setelah persalinan, 4–28 hari setelah persalinan, 29–42 hari setelah persalinan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain : pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pemberian vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali. Cakupan Kunjungan Nifas di Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 82
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Cakupan Pelayanan Nifas
2017	12.579	13.318	94,45%
2018	12.876	13.179	97,70%
2019	13.277	14.418	92,09%
2020	13.044	14.488	90,03%
2021	12.148	12.734	95,39%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Pada Tahun 2021 pencapaian Cakupan pelayanan Nifas (KF) sebesar 95,39 persen Pencapaian Cakupan pelayanan nifas yang dimaksud jika sudah melakukan kunjungan nifas lengkap, jadi masih ada ibu nifas yang belum bisa mencapai kunjungan nifas lengkap karena masih mendapatkan kunjungan nifas pertama atau kedua, dan juga adanya kematian maternal di masa nifas. Selain itu dengan adanya masa pandemi ada ibu nifas yang tidak memeriksakan kesehatannya atau bidan desa memang belum melakukan kunjungan nifas.

29) Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian, seperti asfiksia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir dan BBLR. Yang dimaksud penanganan neonatus dengan komplikasi adalah neonatus sakit dan atau dengan kelainan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan baik di rumah maupun di sarana pelayanan kesehatan.

Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus di Kabupaten Gowa dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 83
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
2017	1.242	1.883	65,96%
2018	1.263	1.958	64,50%
2019	1.436	1.996	71,94%
2020	1.085	1.085	100,00%
2021	265	265	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan neonatus komplikasi tahun 2021 di Kabupaten Gowa sebesar 100,00 persen. Angka ini masih sudah sesuai dengan target dari sasaran neonatus komplikasi dari sasaran bayi. Walaupun ditahun sebelumnya masih rendahnya cakupan pelayanan neonatal komplikasi dapat disebabkan oleh sistem pencatatan dan pelaporan atau tidak ditemukannya neonatus yang komplikasi dan juga kualitas dari kunjungan neonatus yang kurang maksimal.

30) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 84
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Cakupan Pelayanan Anak Balita
2017	45.817	52.194	87,78%
2018	51.853	51.853	100,00%
2019	51.260	68.240	75,12%
2020	49.110	55.880	87,88%
2021	42.369	48.967	86,52%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Berdasarkan data capaian pelayanan anak balita dari tahun 2017-2021 terjadi fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya karena kegiatan posyandu yang monoton sehingga mengurangi minat ibu untuk datang membawa balitanya berkunjung ke posyandu. Demikian pula keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan di posyandu yang masih kurang maksimal, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam memantau tumbuh kembang anak balita menurun.

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Gowa pada Tahun 2021 sebesar 86,52 persen. Dari sasaran balita 48.967 yang mendapatkan pelayanan kesehatan anak balita sejumlah 42.369 balita. Hal ini disebabkan banyaknya balita yang sudah sekolah di PAUD sehingga tidak datang ke posyandu dan dengan adanya pandemi COVID 19 posyandu banyak yang ditiadakan.

31) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Untuk itu pemberian MP-ASI pada bayi usia 6-24 bulan untuk keluarga miskin perlu dilakukan karena adanya keterbatasan dalam penyediaan pangan di rumah

tangga. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 85
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin
2017	1.965	1.965	100,00%
2018	910	910	100,00%
2019	7.512	6.146	81,82%
2020	2.957	3.127	94,56%
2021	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin tahun 2017-2018 sudah mencapai 100 persen namun di tahun 2019 sampai 2020 kembali dibawah 100 persen. Sedangkan untuk tahun 2021 tidak ada data.

32) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD/MI yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 86
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
2017	69.650	80.132	86,92%
2018	70.847	84.907	83,44%
2019	62.470	79.914	78,17%
2020	24.509	52.771	46,44%
2021	39.922	56.778	70,31%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Jumlah seluruh anak siswa SD kelas 1 Tahun 2020 sebanyak 52.771, target penjarangan tercapai hanya 46,44 persen karena adanya pandemi covid-19, anak sekolah belajar dengan cara daring / kegiatan di rumah, sehingga kegiatan penjarangan (skrining kesehatan) anak sekolah terhambat dan banyak yang tidak melakukan kegiatan tersebut. Namun di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebanyak 70,31 persen karena mulai menurunnya kasus Covid-19 dan kebijakan ke sekolah mulai dilaksanakan.

Anak usia sekolah merupakan sasaran strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik yaitu berada di sekolah/madrasah. Program pelayanan kesehatan di sekolah diutamakan pada upaya peningkatan kesehatan (upaya promotif) dan upaya pencegahan penyakit (upaya preventif). Upaya preventif antara lain dilaksanakan melalui kegiatan penjarangan kesehatan (skrining kesehatan) anak sekolah dilakukan terhadap seluruh peserta didik baru pada tahun ajaran baru.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

1) Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi panjang jaringan jalan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 87
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	Panjang Jalan Seluruhnya (km)	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)
2017	1.783	2.396,53	74,40
2018	2.010	2.396,53	83,87
2019	2.122	2.396,53	88,54
2020	2.181	2.396,53	91,01
2021	2.217	2.396,53	92,53

Sumber :Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Jumlah panjang jalan kondisi baik meningkat secara signifikan. Pembangunan transportasi jalan di

Kabupaten Gowa, kondisi jalan mengalami perubahan panjang jalan dimana kondisi jalan baik tahun 2017 adalah 74,40 persen meningkat pada tahun 2021 sebesar 92,53 persen.

2) Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh adalah panjang jalan (km) dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 88
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Panjang Jalan	Jumlah Penduduk	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (km/jiwa)
2017	2.396,53	748.200	0,0032
2018	2.396,53	760.607	0,0032
2019	2.396,53	772.684	0,0031
2020	2.396,53	765.836	0,0031
2021	2.396,53	786.932	0,0031

Sumber : Dinas Pudan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Gowa dari tahun 2017 hingga 2021 tidak mengalami perubahan. Nampak adanya penambahan jumlah penduduk tiap tahun, namu jumlah panjang jalan tidak mengalami peningkatan.

3) Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 adalah perbandingan antara jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 dengan jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk yang dinyatakan dalam persen. Pada tahun 2017 kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 di Kabupaten Gowa sebesar 3,9 persen dan semakin mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun, sehingga di tahun 2021 sebesar 2,6 persen seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 89
 Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan
 Roda 4 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4
2017	21	545	3,9%
2018	20	545	3,7%
2019	18	545	3,3%
2020	N/A	N/A	N/A
2021	14	545	2,6%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40 km/jam tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 90
 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) Kabupaten
 Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)
2017	1.575	2.396,53	65,7%
2018	1.709	2.396,53	71,3%
2019	1.783	2.396,53	74,4%
2020	1.825	2.396,53	76,2%
2021	1.861	2.396,53	77,7%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Pada tahun 2017 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) di Kabupaten Gowa sebesar 65,7 persen dan semakin mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun, sehingga di tahun 2021 meningkat menjadi 77,7 persen.

5) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5m)

Saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Selama tahun 2017-2018 persentase jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Gowa masih sangat kecil (<1%), baru ditahun 2019-2021 mengalami peningkatan sedikit menjadi 1,06%, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 91

Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranese (Km)	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)
2017	23,46	2.396,53	0,98%
2018	23,46	2.396,53	0,98%
2019	25,46	2.396,53	1,06%
2020	25,46	2.396,53	1,06%
2021	25,46	2.396,53	1,06%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 92
 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Gowa
 Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah rumah tangga bersanitasi	Jumlah rumah tangga	Persentase rumah tangga bersanitasi
2017	83.793	171.913	50,46%
2018	84.913	190.152	51,04%
2019	85.263	193.171	51,23%
2020	85.813	196.128	51,51%
2021	169.280**	230.911*	73,31%

Sumber : * CAPIL dan Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

7) Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Garis sempa dan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kabupaten Gowa selama lima tahun masih dibawah 1%, akan tetapi tetap harus diwaspadai karena terdapat kenaikan setiap tahunnya walaupun sedikit seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.117
 Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
 Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)	Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
2017	25,71	5.672,43	0,45%
2018	26,66	5.672,43	0,47%
2019	26,66	5.672,43	0,47%
2020	26,66	5.672,43	0,47%
2021	26,66	5.672,43	0,47%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase jalan mengandung pengertian membuang atau mengalirkan air (air hujan, air limbah, atau air tanah) ke tempat pembuangan yang telah ditentukan dengan cara gravitasi atau menggunakan sistem pemompaan. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Untuk drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Gowa selama lima tahun cenderung mengalami peningkatan rata-

rata 0,86% seperti terlihat pada berikut:

Tabel 2. 93
 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

Tahun	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
2017	140,9	372,4	62,2%
2018	138,8	372,4	62,7%
2019	136,0	372,4	63,5%
2020	136,0	372,4	63,5%
2021	135,7	372,4	64,5%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

9) Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun

Permasalahan tentang genangan atau banjir sudah sangat umum terjadi di kawasan perkotaan. Namun, kurangnya perhatian dalam pengelolaan sistem drainase, diikuti pesatnya perkembangan Kabupaten Gowa mengakibatkan berubahnya karakteristik fisik kota. Perubahan ini juga diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di setiap kecamatan khususnya daerah perkotaan yang menyebabkan semakin banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi tempat permukiman. Semakin berkurangnya lahan resapan yang ada menyebabkan debit air meluap menggenangi sebagian lahan. Tidak terjadi genangan >2 kali setahun di Kabupaten Gowa selama empat tahun stagnan berada pada kisaran dibawah 45%, peningkatan baru terjadi di tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 94
 Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Luasan daerah yang tergenang (ha)	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (ha)	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun
2017	50,82	115,49	44,01%
2018	50,53	115,49	43,75%
2019	50,24	115,49	43,50%
2020	50,24	115,49	43,50%
2021	45,24	115,49	60,83%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

10) Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Turap adalah susunan batu kali yang memiliki fungsi untuk penahan tekanan pada tanah, sehingga berguna untuk mencegah tanah longsor. Pembangunan turap berfungsi untuk pemeliharaan bantaran sungai baik di kawasan permukiman maupun kawasan pertanian serta perkebunan masyarakat. Pembangunan turap di wilayah Kabupaten Gowa masih tergolong rendah, di tahun 2021 pembangunan turap baru mencapai 2,2 pesen.

Tabel 2. 95
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Lokasi Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (lokasi)	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (desa)	Persentase Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
2017	2	45	4,4%
2018	2	45	4,4%
2019	3	45	6,7%
2020	3	45	6,7%
2021	1	45	2,2%

Sumber : Dinas Pu dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

11) Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Irigasi atau penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pengaliran air menggunakan sistem, saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan dan perikanan. Irigasi Kabupaten Gowa dalam kondisi baik semakin meningkat dalam lima tahun terakhir, dari 84,00% di tahun 2017 meningkat menjadi 86,91% di tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 96
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	Luas irigasi kabupaten (ha)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
2017	23.357	27.806	84,00%
2018	24.391	27.806	87,72%
2019	25.159	27.806	90,48%
2020	25.250	27.806	90,81%
2021	24.167	27.806	86,91%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

12) Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dari 0,0052 di tahun 2017 meningkat menjadi 0,0090 di tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 97
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Panjang saluran irigasi (Km)	Luas lahan budidaya pertanian (Ha)	Rasio jaringan irigasi
2017	176,32	34.125	0,0052
2018	195,03	34.125	0,0057
2019	200,10	34.125	0,0059
2020	206,40	34.125	0,0060
2021	308,6	34.125	0,0090

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

13) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Sedangkan persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 98
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk	Persentase penduduk berakses air minum
2017	522.018	748.200	69,77%
2018	535.446	760.607	70,40%
2019	536.402	772.684	69,42%
2020	541.602	765.836	70,72%
2021	656.124	786.932	83,4%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

14) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dengan jumlah penduduk seluruhnya, dinyatakan dalam persen. Di Kabupaten Gowa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan pada tahun 2021 adalah sebesar 27,54%. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 99

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jumlah penduduk seluruhnya	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan
2017	428.940	748.200	57,33%
2018	414.952	760.607	54,56%
2019	468.092	772.684	60,58%
2020	593.643	765.836	77,52%
2021	214.851	780.138	27,54%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

15) Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengurangan sampah adalah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pengurangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Di Kabupaten Gowa proses pengurangan sampah melalui guna ulang/daur ulang sebelum masuk ke TPA baru dimulai pada tahun 2019 melalui Bank Sampah yang dimulai dibentuk di Pasar Minasamaupa

Sungguminasa sebagai Bank Sampah Pusat, dan saat ini telah terbentuk 1 (satu) Bank Sampah Pusat dan 22 (dua puluh dua) Bank Sampah Unit di seluruh Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 100
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (m ³)	Total volume sampah (m ³)	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (Bank Sampah)
2017	96.725	134.227,47	72,06%
2018	100.010	136.546,50	73,24%
2019	100.923	138.908,78	72,65%
2020	NA	NA	NA
2021	NA	NA	NA

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

16) Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa. Penyediaan TPU di Kabupaten Gowa masih sedikit sekali, jumlah daya tampung pemakaman umum selama lima tahun terakhir stagnan dan tidak mengalami peningkatan , seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 101
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum (Orang)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
2017	134.067	748.200	179,19
2018	134.067	760.607	176,26
2019	134.067	772.684	173,51
2020	134.067	765.836	175,06
2021	37.650	773.315	48,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

17) Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Berdasarkan buku Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2020, sarana peribadahan yang tidak ada di Kabupaten Gowa adalah pura dan vihara, walaupun ada penduduk yang beragama Hindu sejumlah 98 orang dan beragama Budha sebanyak 98 orang. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 102
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Tempat Ibadah	Jumlah penduduk	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
2017	1.441 Unit	748.200	1,93
2018	1.351 Unit	760.607	1,78
2019	1.324 Unit	772.684	1,71
2020	1.829 Unit	765.836	2,39
2021	1801 Unit	773.315	0,17

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka , Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

18) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 menyatakan bahwa Hak pengelolaan (HPL) tidak ada batas waktu, hanya diberikan atas tanah Negara yang dikausai oleh BUMN dan BUMD sedangkan Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diberikan atas tanah Negara, tanah hak pengelolaan oleh pemerintah atau tanah milik oleh pemegang hak milik dengan jangka waktu selama-lamanya 30 tahun dan diperpanjang paling lama 20 tahun, HPL/HGB dapat dialihkan ke pihak lain dan dijadikan jaminan hutang dan jaminan kredit di perbankan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.

Rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu lima tahun terakhir semakin menurun, hal ini dikarenakan luas ruang terbuka hijau yang tetap akan tetapi luas wilayah ber-HPL/HGB semakin bertambah, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 103
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Tahun	Luas Ruang Terbuka Hijau	Luas Wilayah Ber-HPL/HGB	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
2017	135,59	1.750	7,7%
2018	135,59	4.128	3,3%
2019	135,59	4.966	2,7%
2020	135,59	4.966	2,7%
2021	135,59	4.966	2,7%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

19) Luasan RTH Publik Seputar 20% Dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Luasan RTH Publik 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 104
Luasan RTH Publik Seputar 20% Dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan	Luasan RTH publik seputar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
2017	314	42.096	0.75%
2018	314	42.096	0,75%
2019	536,5	42.096	1,27%
2020	536,5	42.096	1,27%
2021	536,5	42.096	1,27%

Sumber :Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa , Tahun 2022

20) Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai

dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 105
Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Bangunan ber-IMB	Jumlah Bangunan	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
2017	5.904	171.913	0,034
2018	4.779	190.152	0,025
2019	5.000	193.171	0,026
2020	5.194	177.770	0,029
2021	5.987	177.770	0,034

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa , Tahun 2022

Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 mengalami penurunan dimana tahun 2017 sebesar 0,034 dan tahun 2021 sebesar 0,034

21) Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Dalam dokumen ini ruang publik yang dimaksud adalah ruang publik dalam dunia nyata. Ruang publik yang berubah peruntukannya di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 106
Rasio Ruang Publik yang berubah peruntukannya Kabupaten
Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)	Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya
2017	0,075	316,7	0,02%
2018	0,075	539,24	0,01%
2019	0,075	539,24	0,01%
2020	0,075	539,24	0,01%
2021	0,075	536,5	0,01%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

22) Ketaatan Terhadap RTRW

Penataan Ruang, Untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang, antara lain adalah ketaatan terhadap RTRW serta rasio bangunan ber IMB. Realisasi kinerja pembangunan di bidang penataan ruang bidang ketaatan terhadap RTRW dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2. 107
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Ketaatan Terhadap RTRW	Realisasi Rencana Peruntukan RTRW
2017	74,2%	68,67%
2018	69,6%	74,6%
2019	72,3%	77,21%
2020	75%	79,5%
2021	76,5%	93,91%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2021 sebesar 75 persen mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan realisasi peryuntukan RTRW hingga tahun 2020 sebesar 79,50 persen.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 108
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah rumah layak huni	Jumlah penduduk	Rasio rumah layak huni
2017	112.230	748.200	15,00
2018	115.805	760.607	15,23
2019	116.615	772.684	15,09
2020	117.432	765.836	15,33
2021	140.139	768.868	18,23

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Rumah Layak Huni persatuan penduduk Tahun 2021 jumlah rumah layak huni sebanyak 140.139 unit dengan rasio 18,23 % terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017.

2) Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman yang layak huni di Kabupaten Gowa di tahun 2021 sebesar 0,82 mengalami peningkatan dimana ditahun 2017 capaiannya sebesar 0,73 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 109
Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	Luas Wilayah Permukiman (Ha)	Rasio Permukiman Layak Huni
2017	4.526	6.200	0,73
2018	4.650	6.200	0,75
2019	4.800	6.200	0,77
2020	4.924	6.200	0,79
2021	5.084	6.200	0,82

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 110
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
2017	112,23	149.640	75,00%
2018	115,81	150.396	77,00%
2019	116,62	151.146	77,15%
2020	117,43	151.963	77,28%
2021	140.139	175.173	80,00%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya dimana capaian tahun 2021 sebesar 80,00 persen dan tahun 2017 capainnya sebesar 75,00 persen.

4) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 111
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
2017	3.235	4.431	73,01%
2018	5.657	7.542	75,01%
2019	6.467	8.398	77,01%
2020	7.284	9.215	79,05%
2021	7.784	9.715	80,12%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Persentase Permukiman yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir telah mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Di tahun 2021 persentase permukiman yang tertata masih berada pada 35,23 persen seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 112
 Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Gowa
 Tahun 2017 – 2021

Tahun	Luas area permukiman tertata (Ha)	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	Persentase permukiman yang tertata
2017	1.736,4	6.199	28,01%
2018	1.824,4	6.199	29,43%
2019	1.904,4	6.199	30,72%
2020	1.984,4	6.199	32,01%
2021	2.184	6.199	35,23%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

6) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.

Persentase lingkungan permukiman kumuh adalah luas lingkungan permukiman kumuh dibagi luas wilayah dan disajikan dalam bentuk persen. Adapun persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa semakin menurun setiap tahunnya seperti dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 113
 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten
 Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	Luas wilayah (ha)	Persentase lingkungan permukiman kumuh
2017	415,96	7.633	5,45%
2018	323,96	7.633	4,24%
2019	231,96	7.633	3,04%
2020	190,96	7.633	2,50%
2021	180,96	7.633	2,37%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa menunjukkan kecenderungan penurunan dimana di tahun 2020 sebesar 2,50 persen turun menjadi 2,37 persen di tahun 2021.

7) Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah luasan permukiman kumuh yang tertangani dibagi luas permukiman kumuh dan disajikan dalam bentuk persen. Persentase luasan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa pada tahun 2017 adalah sebesar 25,97 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 36,39 persen seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 114
 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Luasan Permukiman Kumuh yang Tertangani (Ha)	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan
2017	60	231,03	25,97%
2018	64,07	231,03	27,73%
2019	69,07	231,03	29,90%
2020	74,07	231,03	32,06%
2021	84,07	231,03	36,39%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh perkotaan dengan jumlah rumah seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen. Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7,2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 sebesar 8,12 persen dan turun menjadi 7,30 persen di tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 115
 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Gowa
 Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	Jumlah seluruh rumah	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
2017	9.485	121.778	7,79%
2018	9.335	122.592	7,61%
2019	9.178	123.092	7,46%
2020	9.021	123.592	7,30%
2021	8.973	123.792	7,24%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di Kabupaten Gowa mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar 7,79 persen hingga tahun 2021 menyisakan 7,24 persen.

9) Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi salah satu aspek yang menentukan suatu perumahan layak huni atau tidak.

Lingkup perumahan dapat dilihat dari jenis pelayanan dasar perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu: rumah layak huni dan terjangkau; serta lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 116
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
2017	4	70	5,71%
2018	5	79	6,33%
2019	8	30	26,67%
2020	12	50	24,00%
2021	19	55	34,55%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yakni 100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 117
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten
Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru	1 Wilayah kerja kabupaten /kota	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
2017	23,40	1.170	2,00%
2018	23,40	1.170	2,00%
2019	42,84	2.142	2,00%
2020	28,60	1.430	2,00%
2021	28,60	1.430	2,00%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2022

Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan, dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah.

2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 118
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
2017	95	95	100,00%
2018	72	72	100,00%
2019	730	730	100,00%
2020	68	68	100,00%
2021	46	46	100,00%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2022

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun Tingkat Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Gowa tahun 2021 sebanyak 46 kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 46 kasus pelanggaran atau 100%. Capaiannya konsiten 100 persen sejak tahun 2017.

3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Data Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021 meningkat sejak tahun 2019 sebesar 59,58 persen konsiten hingga tahun 2021.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 119
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (km ²)	Luas wilayah kabupaten/kota (km ²)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran
2017	455,85	1.883,33	24,20%
2018	594,61	1.883,33	31,57%
2019	1.122,06	1.883,33	59,58%
2020	1.122,06	1.883,33	59,58%
2021	1.122,06	1.883,33	59,58%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Gowa, Tahun 2022

4) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan kebakaran merupakan hal yang diataranya memerlukan keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan kebakaran sangat menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam setiap kasus kebakaran. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit terhadap Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK yang dinyatakan dalam persen. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 120
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	Tingkat Waktu Tanggap
2017	29	46	63,04%
2018	64	68	94,12%
2019	66	105	62,89%
2020	24	43	55,81%
2021	31	37	83,78

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2022

5) Persentase Penegakan PERDA

Penegakan PERDA merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dimana setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Gowa menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam penegakannya. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 121
Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	Jumlah pelanggaran PERDA	Persentase penegakan PERDA
2017	26	423	6,15%
2018	168	170	98,82%
2019	175	181	96,69%
2020	2.107	2.116	99,57%
2021	1.753	1.753	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2022

Tingkat persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Gowa Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami Peningkatan. Dari tabel diatas menunjukkan tingkat persentasi penegakan PERDA di tahun 2017 hanya mencapai 6,15 persen, akan tetapi di tahun 2021 mampu mencapai 100 persen. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gowa dalam mensosialisasikan peraturan daerah sudah cukup optimal, namun masih perlu ditingkatkan agar peraturan daerah yang berlaku di taati dan dipatuhi oleh seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Gowa.

2.3.1.6 Sosial

1) Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Gowa sebesar 100 persen setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 122

Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2017	37.636	37.636	100,00%
2018	34.234	34.234	100,00%
2019	44.525	44.525	100,00%
2020	137.208	137.208	100,00%
2021	125.402	125.402	100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2022

2) Persentase PMKS Yang Tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 123

Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang ada	Persentase PMKS yang tertangani
2017	37.636	37.636	100,00%
2018	34.234	34.234	100,00%
2019	44.525	44.525	100,00%
2020	149.733	149.733	100,00%
2021	149.978	149.978	100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2022

Jumlah PMKS yang selesai ditangani dibandingkan jumlah PMKS keseluruhan memiliki persentase peningkatan dari tahun 2016 sampai 2021 konsisten 100 persen. Demi meningkatkan pemecahan masalah sosial di

Kabupaten Gowa, Penanganan PMKS dsudah menerapkan keterpaduan berbagai Perangkat Daerah dalam menyelesaikan maslaah-masalah sosial yang muncul. Hal tersebut tentunya menekankan pada sisi koordinasi berbagai lintas sektor juga termasuk dari masyarakat untuk berperan aktif meningkatkan penanganan masalah sosial.

3) Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah perbandingan antara jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial yang dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Gowa sejak tahun 2016 hingga 2020 konsisten 100 persen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 124

Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
2017	37.636	37.636	100,00%
2018	34.234	34.234	100,00%
2019	44.525	44.525	100,00%
2020	115.865	115.865	100,00%
2021	121.774	121.774	100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2022

4) Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial adalah perbandingan antara jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dengan jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial yang dinyatakan dalam persen. Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan kesehatan sosial di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir adalah 100,00 persen seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 125
 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
2017	30	30	100,00%
2018	29	29	100,00%
2019	30	30	100,00%
2020	30	30	100,00%
2021	34	34	100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2022

5) Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) adalah sistem kerjasama antar keperangkatatan pelayanan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 126
 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah WKBSM Dalam 1 (Satu) Tahun yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesos	Jumlah WKBSM Dalam 1 (Satu) Tahun yang Seharusnya Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos Skala	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos
2017	9	13	69,23%
2018	11	13	84,61%
2019	12	13	92,30%
2020	12	13	92,30%
2021	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2022

Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB) di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tingginya partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola WKSMB dan kebermanfaatannya WKSMB bagi masyarakat sehingga tertarik dan ikut bergabung dalam kegiatan WKSMB. Manfaat secara berkelanjutan adalah tersalurkannya program pemerintah melalui bantuan sosial. Akan tetapi WKSMB ini sudah tidak adanya dukungan Anggaran dari kementerian sosial untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial.

6) Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Sedangkan Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Sementara itu, masa tanggap darurat bencana meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan. Korban bencana yang menerima bantuan sosial di tahun 2020 meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terjadinya Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh Negara di dunia, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 127
 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
2017	643	643	100,00%
2018	1.930	1.930	100,00%
2019	1.392	1.392	100,00%
2020	115.865	115.865	100,00%
2021	23.863	23.863	100,00%

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2022

Pada pengukuran capaian kinerja indikator Persentase korban Bencana yang menerima bantuan sosial sudah sangat maksimal dengan adanya bantuan distribusi Logistik dari Kementerian sosial yang sangat mendukung penanganan korban bencana selama masa tanggap darurat. Akan tetapi masih belum ada pengadaan bantuan logistik yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kabupaten Gowa dalam rangka penanganan korban bencana selama masa tanggap darurat.

7) Persentase Korban Bencana Yang dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Pada lima tahun terakhir, jumlah korban bencana yang terjadi di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya khususnya di tahun 2021 jumlah korban bencana mencapai 1.625 orang, hal ini diakibatkan terjadinya bencana banjir yang menimpa beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun terakhir tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2. 128
 Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
2017	30	30	100,00%
2018	140	140	100,00%
2019	514	514	100,00%
2020	514	514	100,00%
2021	853	853	100,00%

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental. Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang

tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Di Kabupaten Gowa persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial semakin meningkat setiap tahunnya, dari 61,85% di tahun 2017 meningkat menjadi 100% di tahun 2020, namun di tahun 2021 belum ada pendataan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 129
 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
2017	1.853	2.996	61,85%
2018	1.105	1.172	94,28%
2019	9.583	9.587	99,96%
2020	20.829	20.829	100,00%
2021	1.625	1.625	100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2022

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa pengusaha pekerja di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 130
 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Jumlah perusahaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
2017	5	763	0,66
2018	14	718	1,95
2019	6	718	0,84
2020	7	607	1,15
2021	10	475	2,10

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa , Tahun 2022

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahunnya kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 0,66 persen dengan jumlah perusahaan sebesar 5 perusahaan, pada tahun 2017 meningkat sebesar 1,95 persen dan pada tahun 2018 menurun sebesar 0,84 persen, pada tahun 2020 meningkat lagi sebesar 1,15 persen dengan jumlah perusahaan sebesar 7 perusahaan, sedangkan di tahun 2021 jumlah perusahaan berkurang menjadi 475 perusahaan namun jumlah sengketa meningkat menjadi 10. Ada beberapa hal yang menyebabkan sengketa pengusaha dan pekerja meningkat antara lain adalah meningkatnya wawasan pekerja dan buruh dan era transparansi sementara sebagian perusahaan masih belum melaksanakan secara maksimal aturan yang berlaku.

2) Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama berfluktuatif. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan Perjanjian Bersama. Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 131
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Σ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	Σ kasus yang dicatatkan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
2017	3	5	60,00%
2018	13	14	92,86%
2019	2	6	33,33%
2020	3	7	42,86%
2021	10	10	100,00%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama berfluktuatif, tahun 2017 kasus yang terselesaikan sebesar 60 persen, kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 92,86 persen dan tahun 2019 menurun kembali menjadi sebesar 33,33 persen, dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi sebesar 42,86 persen, sedangkan di tahun 2021 besaran kasus yang diselesaikan mencapai 100 perseb. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan

penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan sosial ekonomi perusahaan.

3) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. :

Tabel 2. 132

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Σ pencari kerja yang ditempatkan	Σ pencari kerja yang terdaftar	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
2017	166	2.899	5,73%
2018	445	2.047	21,74%
2019	533	2.412	22,10%
2020	2.249	2.532	88,82%
2021	700	2.439	28,70%

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa , Tahun 2022

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 5,73 persen, dan pada tahun 2018 meningkat lagi sebesar 21,74 persen dan tahun 2018 turun meningkat menjadi 88.82 persen. Pada tahun 2021 besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan menurun drastis dengan kisaran hanya 28,70 persen saja.

4) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Selama lima tahun terakhir belum ada perselisihan antara buruh dan pengusaha dengan pemerintah daerah terkait kebijakan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Gowa belum mempunyai/membuat kebijakan terkait ketenagakerjaan.

5) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2. 133
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Σ tenaga kerja yang dilatih	Σ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
2017	16	50	32,00%
2018	160	372	42,67%
2019	304	515	59,03%
2020	48	532	9,02%
2021	240	456	52,63%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2017 sebesar 32 persen, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi sebesar 42,67 persen dan tahun 2019 naik sebesar 59,03 persen dan menurun sebesar 9,02 persen pada tahun 2020. Di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan pesat sebesar 52,63 persen. Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja.

6) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Sampai dengan saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa belum pernah melakukan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat.

7) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan pelatihan berbasis kewirausahaan yang tersebar di 18 kecamatan, akan tetapi di tahun 2019 dan 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa tidak melaksanakan pelatihan berbasis kewirausahaan. Selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel 2. 134
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Σ tenaga kerja yang dilatih	Σ pendaftar pelatihan kewirausahaan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
2017	20	43	46,51%
2018	40	77	51,95%
2019	Tidak ada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan		
2020	Tidak ada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan		
2021	Tidak ada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan		

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa , Tahun 2022

8) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja lulusan S1/S2/S3 dibagi jumlah penduduk. Penilaian ini secara tidak langsung menunjukkan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Gowa. Kualitas SDM ini sangat berkaitan erat dengan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Gowa menunjukkan peningkatan yang pesat pada tahun 2021, yaitu sebesar 1.102 per 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 135
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Pencari Kerja Lulusan S1/S2	Jumlah lulusan S1/S2/S3 (org)	Jumlah penduduk (org)	Rasio lulusan S1/S2/S3
2017	728	39.577	748.200	529
2018	740	45.626	760.607	600
2019	843	52.910	772.684	685
2020	787	84.408	765.836	1.102
2021	434		773.315	

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa , Tahun 2022

2.3.2.2 Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 136
 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)	Jumlah pekerja perempuan (org)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
2017	4668	81.833	5,70%
2018	4621	81.792	5,65%
2019	4735	81.347	5,82%
2020	4735	81.300	5,82%
2021	4735	81.300	5,82%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Selama tahun 2017 sampai tahun 2021, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (eksekutif) di Kabupaten Gowa relative stabil, dimana pada tahun 2017 sebanyak 5,70 persen dan tahun 2021 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 5,82 persen.

2) Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 2 (dua) periode pemilu, yaitu periode 2015-2018 dan periode 2019-2024 di Kabupaten Gowa cukup bervariasi, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislatif periode 2015-2018 sebanyak 17,78 persen, kemudian pada periode 2019-2024 jumlah anggota dewan perempuan meningkat menjadi 28,89 persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 137
 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD

Tahun	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
2017	8	45	17,78%
2018	8	45	17,78%
2019	13	45	28,89%
2020	13	45	28,89%
2021	13	45	28,89%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 2 (dua) periode pemilu, yaitu periode 2015-2018 dan periode 2019-2024 di Kabupaten Gowa cukup bervariasi, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislatif periode 2015-2018 sebanyak 17,78 persen, kemudian pada periode 2019-2024 jumlah anggota dewan perempuan meningkat menjadi 28,89 persen dari. Meskipun belum mencapai kuota 30 persen, namun pencapaian perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Gowa sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah perbandingan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta dengan jumlah pekerja perempuan yang dinyatakan dalam persen. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 138
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Pekerja perempuan di lembaga swasta (org)	Jumlah pekerja perempuan (org)	Partisipasi perempuan di lembaga swasta
2017	413	81.833	0,50%
2018	726	81.792	0,89%
2019	763	81.347	0,94%
2020	785	81.300	0,97%
2021	807	81.253	0,96%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Kabupaten Gowa. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan meningkat yaitu tahun 2017 sebesar 0,50 persen meningkat menjadi 0,96 persen pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan atau pabrik sudah terbuka secara luas.

4) Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam

periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 139
Rasio KDRT Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
2017	13	171.913	0,01%
2018	23	190.152	0,01%
2019	30	193.171	0,02%
2020	19	196.128	0,01%
2021	12	388,304	0,01%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Rasio KDRT yang dinyatakan dalam persen memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2017 sebesar 0,01 persen sampai dengan 2021 sebesar 0,01 persen, ranah yang paling beresiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi).

5) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah perbandingan jumlah perempuan yang bekerja dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam persen. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 140
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (org)	Jumlah angkatan kerja perempuan (org)	Partisipasi angkatan kerja perempuan
2017	5.081	81.833	6,21%
2018	5.347	81.792	6,54%
2019	5.498	81.347	6,76%
2020	5.520	81.300	6,79%
2021	5,498	81,253	6,76%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki kecenderungan meningkat dimana tahun 2017 sebesar 6,21 persen meningkat di tahun 2021 sebesar 6,76 persen.

6) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Perempuan dan anak korban kekerasan berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum berupa penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 141

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (laporan)	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu (laporan)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
2017	49	95	51,58%
2018	87	87	100,00%
2019	97	103	94,17%
2020	71	71	100,00%
2021	59	59	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Dalam rangka penanganan perempuan korban kekerasan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah membentuk unit-unit layanan di beberapa lembaga pemerintahan, yang berpengaruh terhadap Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu kabupaten hingga tahun 2021 semua tertangani.

7) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan di tingkat pelayanan dasar yaitu di Puskesmas dan tingkat pelayanan rujukan di Rumah Sakit melalui pelayanan terpadu. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran tenaga kesehatan sangatlah besar, yaitu mulai dari identifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan rujukan baik medis, hukum, maupun sosial, serta melakukan upaya pencegahannya. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 142

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu (org)	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu (org)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
2017	66	66	100,00 %
2018	54	54	100,00 %
2019	50	50	100,00 %
2020	60	60	100,00 %
2021	16	16	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

8) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Gowa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 konsiten 100 persen dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 2. 143

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos (org)	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos (org)	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
2017	10	10	100,00 %
2018	6	6	100,00 %
2019	4	4	100,00 %
2020	3	3	100,00 %
2021	2	2	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

9) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 konsisten 100 persen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 144
Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2017	10	10	100,00 %
2018	6	6	100,00 %
2019	3	3	100,00 %
2020	2	2	100,00 %
2021	3	3	100,00 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

10) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 konsiten 100 persen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 145
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum (org)	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum (org)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
2017	10	10	100,00 %
2018	6	6	100,00 %
2019	3	3	100,00 %
2020	2	2	100,00 %
2021	3	3	100,00 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Layanan-layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan juga pendampingan tokoh agama

11) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entn/point, atau dari daerah penerima ke daerah asal. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 146
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan (org)	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT (org)	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
2017	49	95	51,58%
2018	87	87	100,00%
2019	97	103	94,17%
2020	71	71	100,00%
2021	10	59	16,94 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terus mengalami peningkatan dimana tahun 2017 sebesar 51,58 persen, kemudian naik lagi ditahun 2018 sebesar 100 persen, kemudian turun menjadi 94,17 persen di tahun 2019 dan naik kembali menjadi 100 persen di tahun 2020. Namun di tahun 2021 mengalami penurunan drastis sebanyak 83,06 persen menjadi hanya 16,94 persen saja.

12) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 konsisten 100 persen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 147
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya (org)	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial (org)	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
2017	49	49	100,00%
2018	87	87	100,00%
2019	97	97	100,00%
2020	71	71	100,00%
2021	10	10	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

13) Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat SD adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap APM murid laki-laki pada setiap jenjang pendidikan SD yang dinyatakan dalam persen. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 148
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD

Tahun	APM-SD Perempuan	APM-SD Laki-Laki	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD
2017	36.171	38.723	93,41
2018	35.947	38.309	93,83
2019	35.498	38.242	92,82
2020	35.043	37.962	92,31
2021	35,498	38.242	92,82

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD tahun 2017 sebesar 93,41 persen, tahun 2018 dan 2019 masing-masing 92,83 persen dan 92,82 persen, sebesar 92,31 di tahun 2020, dan 92,82 persen di tahun 2021.

14) Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di SMP adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap APM

murid laki-laki pada jenjang pendidikan SMP yang dinyatakan dalam persen. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 149
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	APM-SMP Perempuan	APM-SMP Laki-Laki	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP
2017	15.823	15.866	100
2018	15.254	15.028	102
2019	14.668	14.938	98
2020	14.420	14.524	99
2021	14.668	14.938	98

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP tahun 2017 sebesar 100 persen kemudian naik menjadi 102 persen di tahun 2018, tahun 2019 dan 2020 masing-masing 98 persen dan 99 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 98 persen.

15) Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Angka melek huruf merupakan ukuran persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 150
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	AMH15-24 perempuan	AMH15-24 laki-laki	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun
2017	55,45	36,97	1,5
2018	55,57	37,05	1,5
2019	57,85	38,57	1,5
2020	57,97	38,65	1,5
2021	57,85	38,57	1,5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2022

2.3.2.3 Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2004 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui kebutuhan, produksi, dan luas panen. Pangan utama di Kabupaten Gowa adalah beras, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 151
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Rata-Rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	Jumlah penduduk	Ketersediaan pangan utama
2017	247.380	748.200	33,06%
2018	251.563	760.607	33,07%
2019	249.997	772.684	32,35%
2020	262.033	765.836	34,22%
2020	250.067	763.387	32,76%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa , Tahun 2022

Persentase ketersediaan pangan utama yaitu beras, jagung dan kedelai di Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 Ketersediaan beras Kabupaten Gowa Sebesar 33,06 persen, mengalami peningkatan menjadi 33,07 persen pada tahun 2018, kembali menurun 33,25 persen tahun 2019 dan kembali meningkat 34,22 % di tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 sebesar 32,76 persen.

2) Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Per Kapita

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi, protein dan lemak. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 152
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten
Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Energi (Kkal/th)	Protein (Gr/th)	Lemak (Gr/th)
2017	5.562	178,91	66,26
2018	6.067	191,70	71,58
2019	4.878	159,12	101,70
2020	5.540	163,91	81,23
2021	7.799	172,82	103,80

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa , Tahun 2022

Kondisi Ketersediaan energy, protein perkapita dan lemak Kabupaten Gowa pada tahun 2017 masing-masing sebesar 5.562 kkal/kapita/hari, sedangkan di tahun 2021 menjadi 7.799 Kkal/tahun, 172,82 Gr/tahun dan 103,80 Gr/tahun.

3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 153
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten
Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
2017	3	5	60%
2018	20	20	100%
2019	7	8	87,5%
2020	8	8	100 %
2021	Tidak ada pengujian sample		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa , Tahun 2022

Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pada tahun 2017 sebesar 60 persen dan telah mencapai 100 persen di tahun 2018 kembali menurun di tahun 2019 menjadi 87,5 persen dan kembali mencapai 100 persen di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 tidak ada pengujian sample.

2.3.2.4 Lingkungan Hidup

1) Tersusunnya RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Pada kurun waktu tahun 2016-2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa belum pernah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

2) Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan

RPPLH merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan perencanaan yang memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Pada tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa belum pernah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Sehingga belum ada pula integrasi RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten Gowa.

3) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memasukkan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi :

- a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta Rencana Rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan;
- b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gowa, antara lain:

- KLHS RPJMD (Tahun 2016)
- KLHS Kota Baru Pattallassang (Tahun 2018)

- KLHS Jasa Perdagangan Sungguminasa (Tahun 2018)
- KLHS Tun Abdul Razak (Tahun 2019)
- KLHS Cambayya-Sungguminasa (Tahun 2020)
- KLHS RPJMD (Tahun 2020)
- KLHS RPJMD (Tahun 2021)

Terselenggaranya KLHS dalam pengambilan kebijakan maupun penyusunan dokumen yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 154
Terselenggaranya KLHS Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Terselenggaranya KLHS	Tidak Ada	Ada (2)	Ada (1)	Ada (2)	Ada (2)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Gowa telah disusun pada tahun 2020. Adapun kajian yang termuat dalam KLHS RPJMD adalah terkait Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

4) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air. Pemantauan kualitas air perlu dilakukan pada air sungai, air laut, air danau, air rawa dan air tanah sehingga air dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.

Pengukuran Indeks Kualitas Air baru dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2018 dengan Capaian tahun 2017 sebesar 65 menurun di tahun 2018 sebesar 56 dan meningkat 71,08 di tahun 2020, namun Kembali menurun di tahun 2021 sebesar 50 . Adapun hasil pengukuran indeks kualitas air Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 155
 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2016	2017	2018	2020	2021
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	-	65	56	71,08	50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Pengukuran Indeks Kualitas Udara baru dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2018. Adapun hasil pengukuran indeks kualitas udara Kabupaten Gowa sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 156
 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gowa
 Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	-	83	83	83,85	85,58

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

6) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Perhitungan Indeks Tutupan Lahan dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Gowa. Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan baru dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2018. Adapun hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 157
 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten
 Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	52	52,5	53	43,51

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

7) Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan perbandingan antara Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditangani dengan total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang dinyatakan dalam persen seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 158

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
2017	25	25	100,00%
2018	25	25	100,00%
2019	24	25	96,00%
2020	24	27	88,89%
2021	32	36	88,89%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki latar belakang sejarah serta kebudayaan yang lama (tua). Keberadaan MHA sudah ada jauh sebelum ada atau terbentuknya negara ini. Menurut Ter Haar di dalam bukunya *Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht (1939)* mengatakan diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat bawah, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami

kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan gaib, golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.

Pengakuan MHA telah dilakukan sejak Indonesia berdiri. Pasal 18 UUD merupakan pengakuan gelombang pertama dalam konteks Nasional Indonesia. Pengakuan gelombang kedua dilakukan melalui UU nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pengakuan ketiga adalah yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Pengakuan gelombang keempat dilakukan setelah Amandemen UUD dengan memunculkan beberapa undang-undang. Masing-masing pengakuan ini dimaknai bervariasi sesuai dengan selera penguasa yang sedang menjabat di Indonesia. Pengakuan atas keberadaan MHA dalam UUD sebelum amandemen adalah mengakui masyarakat yang sudah ada dengan segala sistem yang berlaku didalamnya.

Tabel 2. 159
Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	1	7	4	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Dalam hal fasilitasi pendampingan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Gowa telah dilakukan pendampingan selama 5 (lima) tahun terakhir kepada 9 (sembilan) kelompok MHA yang ada di Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 160
Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	1	7	4	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Terkait dengan penetapan hak Masyarakat Hukum Adat, termasuk kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penyediaan sarana/prasarana untuk Masyarakat Hukum sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan Adat di Kabupaten Gowa.

9) Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Ketika individu atau kolompok berkontribusi dan berprestasi dalam bidang lingkungan hidup, pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan sebagai salah satu rangkaian. Penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup ini, antara lain Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata. Ketiganya memiliki persamaan, yakni diberikan kepada individu atau kelompok sebagai apresiasi terhadap capaian bidang lingkungan hidup pada kategori masing-masing. Penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh Kabupaten Gowa adalah Piagam Sekolah Adiwiyata, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 161
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

10) Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah dapat diketahui dari jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi dengan total jumlah pengaduan yang teregistrasi yang dinyatakan dalam persen. Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, lokasi usaha dan dampaknya di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 162
Pengaduan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Pengaduan masyarakat yang ditangani	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah
2017	2	2	100,00%
2018	3	3	100,00%
2019	2	2	100,00%
2020	7	7	100,00%
2021	5	5	100,00%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

11) Timbulan sampah yang ditangani

Timbulan sampah yang tertangani yaitu volume timbulan sampah yang di tangani di bagi dengan total timbulan sampah yang dinyatakan dalam persen. Persentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 163
Timbulan Sampah Yang Ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Volume timbulan sampah yang ditangani (ton/th)	Volume timbulan sampah yang ditangani (ton/th)	Timbulan sampah yang ditangani
2017	72.478,88	136.546,50	53,08%
2018	83.355,87	138.810,78	60,05%
2019	85.243,46	141.014,83	60,45%
2020	131.400,00	141.008,26	93,19%
2021	124.830,00	140.160,00	89,06%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

12) Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R

Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 164
 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R
 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R	4,68%	4,61%	4,54%	4,56%	4,61%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

13) Persentase Cakupan Area Pelayanan

Cakupan area pelayanan yaitu luas area pelayanan pengelolaan sampah di bagi dengan luas wilayah yang dinyatakan dalam persen. Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa baru dilaksanakan di seluruh Kecamatan Somba Opu, sebagian Kecamatan Palangga, sebagian Kecamatan Bontomarannu, sebagian Kecamatan Bajeng, sebagian Kecamatan Pattallassang, sebagian Kecamatan Tinggimoncong dan sebagian Kecamatan Barombong, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 165
 Persentase Cakupan Area Pelayanan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ²)	Luas wilayah (km ²)	Persentase cakupan area pelayanan
2017	120,88	1.833,00	6,42%
2018	120,88	1.833,00	6,42%
2019	1.833,00	1.833,00	100,00%
2020	1.883,00	1.883,00	100,00%
2021	1.883,00	1.883,00	100,00%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

14) Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani yaitu volume sampah yang tertangani dibagi dengan total jumlah timbulan sampah yang dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 166
 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Gowa
 Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	Total jumlah timbulan sampah (ton)	Persentase cakupan area pelayanan
2017	72.478,88	136.546,50	53,08%
2018	83.355,87	138.810,78	60,05%
2019	85.243,46	141.014,83	60,45%
2020	131.400,00	141.008,26	93,19%
2021	124.830,00	140.160,00	89,06%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2022

15) Operasionalisasi TPA/TPST/SPA

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah menacapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari pertama kali sampah dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dikelola dan dibuang. Sampai dengan saat ini baru ada 1 (satu) unit TPA yang digunakan oleh Kabupaten Gowa yaitu TPA Pa' bentengan yang terletak di Kecamatan Bajeng.

2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Gowa terus menunjukkan tren positif. Terkait kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2020 menunjukkan angka 0,99 meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 0,97. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 167
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
2017	473.342	540.242	0,88
2018	459.310	533.615	0,86
2019	513.339	526.581	0,97
2020	530.643	537.202	0,99
2021	543.515	535.713	0,99

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan paspor. Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi berakte kelahiran dibanding dengan jumlah bayi. Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 168
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Gowa Tahun
2017 – 2021

Tahun	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jumlah bayi	Rasio bayi berakte kelahiran
2017	154.385	244.875	0,63
2018	244.076	234.930	1,04
2019	251.963	253.043	0,99
2020	271.907	272.524	0,99
2021	241.686	243.260	0,99

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi berakte kelahiran dibanding dengan jumlah bayi. Untuk tahun 2017, jumlah bayi berakte kelahiran di Kabupaten Gowa mencapai 154.385 jiwa dari jumlah bayi di Kabupaten Gowa sebanyak 244.875 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2021 jumlah bayi berakte kelahiran di Kabupaten Gowa mencapai 241.686 jiwa dari jumlah bayi di Kabupaten Gowa sebanyak 243.260 jiwa.

3) Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah merupakan jumlah pasangan nikah berakte nikah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 169
Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Rasio pasangan berakte nikah
2017	65.732	377.714	0,17
2018	74.525	380.609	0,20
2019	80.473	378.609	0,21
2020	81.170	373.342	0,22
2021	84.261	373.482	0,22

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Rasio pasangan berakte nikah merupakan jumlah pasangan nikah berakte nikah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Untuk tahun 2016, jumlah pasangan nikah berakte nikah di Kabupaten Gowa mencapai 58.774 jiwa dari total keseluruhan pasangan nikah di Kabupaten Gowa sebanyak 374.906 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah pasangan nikah berakte nikah di Sulawesi Selatan mencapai 81.170 jiwa dari total keseluruhan pasangan nikah di Sulawesi Selatan sebanyak 373.342 jiwa.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional Percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/ akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK.

Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya

terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK).

4) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 170
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Jumlah penduduk wajib KTP	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk
2017	473.342	540.242	87,62%
2018	459.310	533.615	86,08%
2019	513.339	526.581	97,49%
2020	530.643	537.202	98,78%
2021	534.515	535.713	99,77%

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya memiliki kecenderungan meningkat dimana Capaian di tahun 2020 sebesar 98,78 persen Lebih baik disbanding capaian tahun 2016 sebesar 80,77 persen.

2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, memperlihatkan peningkatan angka capaian yang cukup baik setiap tahun. Pada tahun 2021 jumlah kantor masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 121 kantor yang terdapat di setiap desa yang juga berjumlah 121 pemerintahan desa. Ini menandakan bahwa setia pemerintahan desa sudah memiliki kantor masing-masing, sehingga cakupannya sudah mencapai 100 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.201.

Tabel 2.201
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan
Desa Yang Baik Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
2017	102	121	84,30%
2018	109	121	90,08%
2019	110	121	90,91%
2020	121	121	100,00%
2021	121	121	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017-2021 tidak mengalami perubahan yaitu masing-masing hanya 3 kelompok. Kondisi ini dikarenakan jumlah kelompok binaan dan jumlah LPM tidak mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.202
Kelompok Binaan LPM Kabupaten Gowa Tahun 2016– 2020

Tahun	Jumlah Kelompok Binaan LPM	Jumlah LPM	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2017	501	167	3
2018	501	167	3
2019	501	167	3
2020	501	167	3
2021	501	167	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sedangkan kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2017-2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 5.423 kelompok, sedangkan di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 5.517 kelompok. Untuk tahun 2021 sendiri tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya seperti terlihat pada tabel berikut 2.173.

Tabel 2. 171
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
2017	5.423	167	32,47%
2018	5.423	167	32,47%
2019	5.423	167	32,47%
2020	5.517	167	33,04%
2021	5.517	167	33,04%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Persentase LSM aktif dan terdaftar pada tahun 2017–2021 di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan yaitu dari 23 LSM di tahun 2017 menjadi 71 LSM di tahun 2021, dengan persentase LSM aktif dan terdaftar sebesar 100 persen, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 172
 Pesentase LSM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah LSM aktif	Jumlah LSM Terdaftar	Persentase LSM aktif
2017	23	23	100,00%
2018	33	33	100,00%
2019	33	33	100,00%
2020	33	33	100,00%
2021	71	71	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Persentase LPM Berprestasi

Jumlah LPM berprestasi yaitu Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan dibagi jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi dikali seratus. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Gowa dari tahun 2017-2021 masih rendah, yaitu pada tahun 2017 dari 167 LPM yang ada di Kabupaten Gowa hanya 18 LPM berprestasi atau hanya 10,78 persen. Jumlah LPM berprestasi meningkat terus jumlahnya sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 28 LPM, akan tetapi jumlah LPM berprestasi ini berkurang jumlahnya di tahun 2021 yaitu sebanyak 18 LPM. Kondisi ini membutuhkan pembinaan terhadap tugas dan fungsi LPM dalam pembangunan di desa. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 173
 Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah LPM Berprestasi	Jumlah LPM	Persentase LPM Berprestasi
2017	21	167	12,57%
2018	24	167	14,37%
2019	28	167	16,77%
2020	18	167	10,78%
2021	18	167	10,78%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2022

6) Persentase PKK aktif

PKK aktif yaitu jumlah PKK yang memiliki pengurus dan sekretariat dan memiliki program kerja. Jumlah PKK dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim Penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai

politik, Lembaga atau instansi, berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali gerakan PKK. Hingga tahun 2021 tercatat memiliki Tim Penggerak PKK dengan persentase aktif 100 persen dengan jumlah PKK aktif sebanyak 167.

Tabel 2. 174
 Persentase PKK Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PKK Aktif	Jumlah PKK	Persentase PKK Aktif
2017	167	167	100,00%
2018	167	167	100,00%
2019	167	167	100,00%
2020	167	167	100,00%
2021	167	167	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2022

7) Persentase Posyandu aktif

Posyandu berperan penting dalam memperbaiki kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Oleh karena itu keaktifan posyandu di setiap daerah sangat penting untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Selama tahun 2017 sampai 2021, jumlah posyandu aktif di Kabupaten Gowa sebesar 100 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 175
 Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu	Persentase Posyandu Aktif
2017	704	704	100,00%
2018	765	765	100,00%
2019	779	779	100,00%
2020	785	785	100,00%
2021	795	795	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Swadaya Masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat bisa berupa ide, gagasan, pikiran dan bisa pula berupa bantuan finansial. Selama lima tahun terakhir di Kabupaten Gowa belum ada swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat.

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Gowa dari tahun 2017-2021 cenderung menurun. LPP Kabupaten Gowa tahun 2017 sejumlah 1,77 terus menurun setiap tahunnya dan menjadi sebesar 1,59 di tahun 2021. Kebijakan pemerintah untuk menekan LPP dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) yang diluncurkan sejak tahun 1980-an semakin nyata hasilnya. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) jika tidak dikendalikan akan berakibat pada ledakan penduduk, yang akan memberi pengaruh terhadap sumberdaya makanan dan energi yang salah satunya akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Tabel 2. 176
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Laju pertumbuhan penduduk	1,77	1,73	1,66	1,59	1,59

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Faktor-faktor ini pula yang mempengaruhi TFR di Kabupaten Gowa. Total fertility rate (TFR) Kabupaten Gowa tersajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 177
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Total Fertility Rate (TFR)	2,47	2,47	2,00	2,39	2,39

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Di Kabupaten Gowa angka TFR dari tahun 2017-2021 cenderung konstan, pada tahun 2021 tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka TFR sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan sosial ekonomi, keberhasilan program KB, peningkatan rata-rata usia kawin, peningkatan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta pengembangan program penurunan tingkat kelahiran. Bila program-program ini berjalan baik, angka TFR dapat ditekan dan berdampak pada Penurunan atau perlambatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Di tahun 2021 TFR di Kabupaten Gowa telah menyentuh angka 2,39.

3) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kampung KB di Kabupaten Gowa baru di canangkan pertama kali pada tahun 2017. Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB setiap tahunnya meningkat, hal ini dikarenakan adanya Memorandum of Understanding (MOU) antara SKPD terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Distric Working Group (DWG) yang merupakan suatu pertemuan kordinasi lintas sektor bidang kependudukan.

Tabel 2. 178
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	Jumlah semua perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB
2017	10	36	27,78%
2018	17	36	47,22%
2019	18	36	50,00%
2020	18	36	50,00%
2021	24	36	67,67%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rancangan induk pengendalian penduduk diharapkan bisa menjadi acuan penyusunan rancangan pembangunan daerah. Rancangan induk pengendalian penduduk ini sangat penting untuk disinergikan dengan rencana pembangunan pemerintah, karena laju pertumbuhan penduduk akan berkorelasi dengan laju pergerakan pembangunan.

Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk adalah perbandingan jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan jumlah semua perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 179
 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	Jumlah semua perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk
2017	10	36	27,78%
2018	17	36	47,22%
2019	18	36	50,00%
2020	18	36	50,00%
2021	18	36	50,00%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Jumlah anak per keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anak dalam keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Pemenuhan hak dasar anak akan lebih maksimal, demikian juga kualitas pengasuhan kedua orangtuanya diasumsikan akan jauh lebih baik.

Tabel 2. 180
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Anak	Jumlah Keluarga	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
2017	326.514	216.687	1,507
2018	332.286	221.478	1,500
2019	338.679	224.424	1,509
2020	328.067	225.276	1,456
2021	238.632	193.760	1,230

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Rata-rata jumlah anak adalah perbandingan antara jumlah anak dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Gowa. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun 2019–2021 rata-rata jumlah anak per-keluarga di Kabupaten Gowa cenderung mengalami penurunan. Hal ini merupakan indikasi bahwa Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berjalan baik.

Diharapkan untuk tahun berikutnya angka ini tetap atau cenderung menurun, sehingga secara umum akan mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan penduduk dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas generasi.

6) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 181
Rasio Akseptor KB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
2017	83.968	121.540	69,09%
2018	83.416	121.419	68,70%
2019	86.053	122.581	70,20%
2020	86.691	121.007	71,64%
2021	85.134	122.160	69,69%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

7) Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

CPR adalah perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang ditanyakan dalam persen. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 182
 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah
 Usia 15-49 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah peserta KB aktif perempuan	Jumlah keseluruhan akseptor KB aktif	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
2017	83.408	83.968	99,33%
2018	83.020	83.416	99,53%
2019	85.678	86.053	99,56%
2020	83.979	86.691	96,87%
2021	84.491	85.134	99,24%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Pernikahan dini, hamil, dan melahirkan di usia remaja masih menjadi ancaman bagi kemajuan perempuan Indonesia. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dipublikasikan di tahun 2018 menunjukkan 36 dari 1.000 perempuan melahirkan di usia remaja atau 15 tahun hingga 19 tahun, angka ini memprihatinkan karena mereka penyumbang tingginya angka balita pendek atau stunting, kematian ibu dan bayi di Indonesia.

Tingginya angka ASFR mengindikasikan pernikahan dini, dan perilaku seks bebas atau seks pra nikah di kalangan remaja masih tinggi. Selain itu juga dikarenakan faktor ekonomi dan budaya. Terkait budaya, menurutnya, di sejumlah daerah perempuan yang belum menikah di usia 15 tahun dianggap tidak laku dan perawan tua. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)

per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 183
 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	24,06	25,19	46,60	28,04	28,04

Sumber : BPS, Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

9) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental/psikologi. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional yang diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin dari 16 menjadi 19 tahun dapat menekan/menurunkan angka pernikahan dini. Adapun Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 184
 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun	Jumlah pasangan usia subur	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
2017	2.428	121.540	2,00%
2018	2.033	121.419	1,67%
2019	1.294	122.581	1,06%
2020	1.294	122.160	1,06 %
2021	30.552	122.160	2,90%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

10) Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Unmeet need adalah kondisi dimana keinginan Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, menggambarkan bahwa cakupan PUS yang ingin ber-KB masih dibawah dua puluh persen, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 185
Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlyani	Jumlah pasangan usia subur	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi
2017	22.065	121.540	18,15%
2018	21.788	121.419	17,94%
2019	20.135	122.581	16,43%
2020	14.934	121.007	12,34%
2021	16.960	122.160	13,88%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

11) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pemakaian metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) baik berupa implant, IUD dan kontrasepsi mantap (kontak) adalah metode kontrasepsi yang tepat dalam mencegah atau merencanakan kehamilan. Hal ini di karenakan pada beberapa kasus seringkali kehamilan yang tidak diinginkan dikarenakan kegagalan dalam penggunaan alat/obat kontrasepsi.

Upaya Pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk guna menyongsong Bonus Demografi menuju Industri 4.0 melalui peningkatan kapasitas PPKBD/SUBPPKBD dalam melakukan KIE MKJP sehingga akseptor paham tentang apa, jenis, dan efek samping MKJP. Persentase pemakaian kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sebesar 15,94% menjadi 21,49% di tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 186
 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 20201

Tahun	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Jumlah akseptor KB	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
2017	13.384	83.968	15,94%
2018	15.469	83.416	18,54%
2019	17.495	86.053	20,33%
2020	17.063	86.691	19,68%
2021	18.292	85.134	21,49%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

12) Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Untuk meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, maka hal yang perlu disarankan adalah dorongan pemakaian MKJP, pendampingan PUS yang ber-KB yang mengalami komplikasi dan efek samping sehingga tetap konsisten menggunakan alat kontrasepsi, memperbanyak calon fasilitator KB yang dapat memberikan Advokasi dan KIE kepada akseptor KB untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi, dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakan teknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan komunikasi dan teknis. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 187
 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Jumlah akseptor KB	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
2017	16.053	83.968	19,12%
2018	12.563	83.416	15,06%
2019	11.880	86.053	13,81%
2020	14.188	86.691	16,37%
2021	14.856	93.654	15,86%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

13) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina

keluarga balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 188
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Jumlah anggota kelompok BKB	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB
2017	4.711	6.030	78,13%
2018	4.394	5.568	78,92%
2019	4.319	5.472	78,93%
2020	4.330	4.909	88,21%
2021	11.814	13.580	86,80%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

14) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah suatu kelompok/wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai anak remaja usia 10-14 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dalam mengikuti program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok.

Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKR yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 189
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Tahun	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Jumlah anggota kelompok BKR	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB
2017	3.051	4.653	65,57%
2018	3.274	4.937	66,32%
2019	3.320	4.993	66,49%
2020	2.896	3.543	81,74%
2021	7.102	8.374	84,58%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

15) Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lanjut usia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB adalah jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB dibagi jumlah anggota kelompok BKL yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 190
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Jumlah anggota kelompok BKL	Cakupan anggota bina kelompok BKL yang ber-KB
2017	1.992	4.068	48,97%
2018	2.541	4.299	59,11%
2019	2.847	4.799	59,32%
2020	2.118	2.596	81,59%
2021	3.947	4.863	81,15%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

16) Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa adalah suatu wadah kegiatan program gerakan Generasi Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Jumlah kelompok PIK R/M itu idealnya dibentuk satu pada tiap kecamatan. Akan tetapi kenyataannya terdapat lebih dari satu PIK R/M pada tiap-tiap kecamatan.

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah perbandingan jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Untuk mengetahui cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 191
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PIK R/M	Jumlah Kecamatan	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling R/M
2017	145	18	805,56%
2018	146	18	811,11%
2019	149	18	827,78%
2020	93	18	516,67%
2021	105	18	583,33%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

17) Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. Karena perannya yang penting, maka pelibatan PKB/PLKB dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan berkaitan dengan pengendalian penduduk menjadi penting.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Gowa sudah mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena PKB/PLKB adalah pegawai negeri sipil yang tentu saja terlibat langsung dalam semua proses perencanaan dan pelaksanaan bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Gowa seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 192

Cakupan PKB/PKLB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	PKB dan PLKB	Cakupan PKB/PLKB yg didayagunakan PD KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
2017	129	129	100,00%
2018	136	136	100,00%
2019	124	124	100,00%
2020	122	122	100,00%
2021	111	111	100,00%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

18) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 193

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri
2017	1.029	1.607	64,03%
2018	1.298	1.968	65,96%
2019	1.612	2.354	68,48%
2020	1.405	1.724	81,50%
2021	2.523	2.072	81,68%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

19) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan seseorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional ditingkat dusun RT/RW yang setara. Peran petugas pembantu dalam mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi pada tingkat desa dan kelurahan dapat secara langsung mempengaruhi perilaku penduduk dalam mengikuti program KB. Oleh karena itu keberadaan petugas pembantu harus disebar di semua desa.

Di Kabupaten Gowa, rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Gowa sudah mencapai angka 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa/kelurahan di Kabupaten Gowa yang tidak memiliki petugas pembantu Pembina KB.

Tabel 2. 194
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	Jumlah desa/ kelurahan	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kel
2017	167	167	100,00%
2018	167	167	100,00%
2019	167	167	100,00%
2020	167	167	100,00%
2021	167	167	100,00%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

20) Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon dengan perkiraan permintaan masyarakat yang dinyatakan persen. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 195
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi
Permintaan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang Alkon	Perkiraan permintaan masyarakat	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
2017	55.620	93.184	59,69%
2018	43.669	81.147	53,81%
2019	41.926	87.299	48,03%
2020	43.605	92.504	47,14%
2021	127.363	90.367	140,94%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

21) Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah perbandingan jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dengan jumlah faskes dan jejaring yang dinyatakan dalam persen. Persentase faskes dan jejaringnya di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 196
Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	Jumlah faskes dan jejaring	Persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
2017	32	32	100,00%
2018	31	31	100,00%
2019	31	31	100,00%
2020	31	31	100,00%
2021	31	31	100,00%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

22) Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Dalam membangun keluarga, ada 8(delapan) fungsi keluarga yang seharusnya menjadi perhatian semua keluarga di Indonesia karena dianggap sebagai acuan dan pondasi kehidupan oleh setiap keluarga. BKKBN menyebut bahwa kedelapan fungsi tersebut adalah fungsi agama, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi sosial dan budaya, fungsi perlindungan, fungsi kesehatan reproduksi, fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, dan fungsi sosialisasi pendidikan.

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya dan berada pada angka diatas 90%. Akan tetapi di Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 96,08%, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 197
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah kelompok kegiatan	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
2017	707	728	97,12%
2018	721	729	98,90%
2019	750	753	99,60%
2020	759	790	96,08%
2021	754	759	99,34%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

23) Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak adalah perbandingan antara jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang dengan jumlah keluarga mempunyai balita dan anak yang dinyatakan dalam persen. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 198

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
2017	2.112	5.568	37,93%
2018	2.450	6.409	38,23%
2019	2.781	6.030	46,12%
2020	2.183	5.560	39,26%
2021	14.813	22.090	67,06%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2.8 Perhubungan

1) Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Secara umum kinerja rasio ijin trayek tergolong kurang, hal ditunjukkan dengan rasio ijin trayek rata-rata terhadap jumlah penduduk yang semakin menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017 izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 365 namun terus menurun menjadi 16 di tahun 2021.

Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan beralih ke transportasi online yang mengedepankan kemudahan, kecepatan dan pelayanan 24 jam.

Tabel 2. 199

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio ijin trayek
2017	199	748.200	0,00027
2018	178	760.607	0,00023
2019	137	772.684	0,00018
2020	57	765.836	0,00007
2021	16	773.315	0,00002

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Jumlah uji KIR di Kabupaten Gowa terus meningkat selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 jumlah uji KIR sebanyak 806 dan menurun menjadi 378 di tahun 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dalam hal ini Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 telah mendapatkan AKREDITASI C dari Kementerian Perhubungan dan menjadi satu-satunya pengujian di Provinsi Sulawesi Selatan yang bisa melakukan pengujian kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR di Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa pada tahun 2021.

Namun perlu diingat bahwa pelaksanaan uji KIR tidak berlaku pada satu wilayah saja akan tetapi dapat dilaksanakan pada daerah lain apabila tenggang waktu KIR telah habis. Mobilitas mobil penumpang umum yang tinggi akan berdampak pada lokasi wilayah tempat pengujian karena kita tidak dapat untuk memobilisasi/mengarahkan angkutan umum untuk melakukan uji KIR di Kabupaten Gowa saja. Sehingga apabila sudah banyak daerah lain yang telah mendapatkan AKREDITASI dari Kementrian Perhubungan akan mempengaruhi jumlah uji KIR di Kabupaten Gowa. Maka dari itu untuk meningkatkan capaian kinerja diperlukan usaha mengoptimalkan kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor diantaranya pelaksanaan sosialisasi pentingnya Uji KIR kepada para pengusaha angkutan umum, operasi terpadu kelengkapan Uji KIR dengan pihak terkait, peningkatan SDM penguji dan inovasi-inovasi lainnya terkait pengujian.

Tabel 2. 200
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Gowa Tahun

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	806	961	1193	1707	378

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kabupaten Gowa tidak mempunyai fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Sedangkan untuk fasilitas naik turun penumpang yang ada

di Kabupaten Gowa adalah 1 (satu) Terminal Regional Cappa Bungaya dan 3 (tiga) Terminal Pembantu. Dimana Terminal Penumpang Tipe B hanya melayani Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKAP), Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

5) Persentase Layanan Angkutan Darat

Posisi Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi dengan semakin banyaknya pembangunan perumahan. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah kendaraan pribadi yang semakin bertambah dan mengakibatkan terjadinya kemacetan pada beberapa ruas jalan.

Kemacetan yang terjadi di Kabupaten Gowa rata-rata didominasi oleh kendaraan pribadi baik itu roda dua dan roda empat. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya jumlah angkutan darat dan jumlah penumpang angkutan darat, sedangkan persentase rata-rata layanan angkutan darat sebesar 20 persen.

Tabel 2. 201
 Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Gowa Tahun
 2017 – 2021

Tahun	Jumlah angkutan darat	Jumlah penumpang angkutan darat	Persentase layanan angkutan darat
2017	287	1.435	20,00%
2018	261	1.305	20,00%
2019	237	1.185	20,00%
2020	215	1.075	20,00%
2021			

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

6) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR di Kabupaten Gowa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu perlu ditingkatkannya pengawasan terhadap angkutan umum khususnya yang tidak memiliki KIR. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 202
 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten
 Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
2017	48	612	7,84%
2018	51	572	8,92%
2019	72	512	14,06%
2020	118	512	23,05%
2021			

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

7) Pemasangan Rambu-rambu

Secara umum pengertian rambu-rambu merupakan satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Selain itu rambu lalu lintas juga merupakan tanda yang sengaja dipasang untuk memberikan informasi kepada para pemakai jalan. Rambu tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistem jalan. Berdasarkan jenis pesan yang disampaikan, rambu lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi rambu-rambu berupa 1. Rambu peringatan, 2. Rambu petunjuk, 3. Rambu Larangan dan perintah, 4. Rambu tetap dan rambu tidak tetap. Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Gowa mengalami kenaikan tiap tahun seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 203
 Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Pemasangan Rambu-rambu
2017	70	1260	5,56%
2018	85	1260	6,75%
2019	100	1260	7,94%
2020	178	1260	14,13%
2021	198	1260	15,71

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

8) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di Kabupaten Gowa, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang semakin mengecil menunjukkan bahwa penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan meningkat setiap tahun, sedangkan panjang jalan setiap tahun tetap.

Tabel 2. 204
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Panjang Jalan	Jumlah kendaraan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
2017	2.396,53	256.970	0,009
2018	2.396,53	271.149	0,009
2019	2.396,53	271.149	0,009
2020	2.396,53	294.906	0,008
2021			

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2.9 Komunikasi dan Infomatika

1) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan komunitas masyarakat/mitra strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan dalam melengkapi mekanisme yang sedianya cepat, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat.

Pada tahun 2017 mulai adanya pengembangan dan pemberdayaan KIM yaitu sebanyak 9 kelompok dan untuk tahun 2020 sebanyak 10 kelompok. Selanjutnya di tahun 2018 sampai 2021 jumlah IKM sebanyak 10 Kelompok di 18 Kecamatan dengan cakupan sebesar 55,56%. Sejak tahun 2018 sampai 2021 belum ada penambahan kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 205
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah KIM	Jumlah Kecamatan	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan
2017	9	18	50,00%
2018	10	18	55,56%
2019	10	18	55,56%
2020	10	18	55,56%
2021	10	18	55,56%

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Perkembangan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) ini dipicu oleh perkembangan layanan telekomunikasi. Cakupan layanan telekomunikasi dapat kita ketahui dengan membandingkan antara luas wilayah yang terlayani (tercover) oleh layanan telekomunikasi dengan luas wilayah Kabupaten Gowa keseluruhan. Layanan telekomunikasi di Kabupaten Gowa selama lima tahun ini sudah mencakup di semua wilayah.

3) Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Menurut Statistik Telekomunikasi Indonesia Tahun 2018 selama lima tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Persentase penduduk di Kabupaten Gowa yang menggunakan telepon selular terus mengalami peningkatan, dari 33,33 persen di tahun 2017, terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun, hingga pada tahun 2020 mencapai 99,78 persen.

Tabel 2. 206
Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	Jumlah Penduduk	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
2017	249.400	748.200	33,33%
2018	480.393	760.607	63,16%
2019	680.303	772.684	88,04%
2020	764.031	765.836	99,76%
2021	768.050	766.286	99,78%

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Kebutuhan penduduk akan akses internet baik untuk keperluan pribadi, pekerjaan, belajar maupun berbelanja semakin meningkat. Dalam hal rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Gowa juga mengalami peningkatan setiap tahun, proporsi rumah tangga berakses internet pada tahun 2017 sebanyak 0,25 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 2,02.

Tabel 2. 207
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	Jumlah rumah tangga	Proporsi rumah tangga dengan akses internet
2017	42.978	171.913	0,25
2018	63.384	190.152	0,33
2019	77.587	193.171	0,40
2020	96.585	196.128	0,49
2021	97.696	198.030	2,02

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki perangkat komputer pribadi terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan, dinyatakan dalam persen. Kebutuhan masyarakat akan komputer pribadi semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan dalam pekerjaan, sekolah dan bisnis yang membutuhkan pemakaian komputer pribadi dalam pelaksanaannya khususnya jika dilaksanakan di rumah. Di Kabupaten Gowa proporsi rumah tangga yang memiliki komputer meningkat terus setiap tahun dari tahun 2017 sebesar 0,20 meningkat menjadi 2,02 di tahun 2021.

Tabel 2. 208
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Jumlah rumah tangga	Proporsi rumah tangga yg memiliki komputer pribadi
2017	35.298	171.913	0,20
2018	40.000	190.152	0,21
2019	68.875	193.171	0,36
2020	90.000	196.128	0,46
2021	98.000	198.130	2,02

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase koperasi aktif

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian dan pergerakan kegiatan perekonomian. Selain kegiatan jual beli, hal lain yang memberi pengaruh terhadap pergerakan perekonomian antara lain kegiatan perkoperasian, usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2017 jumlah koperasi aktif sebanyak 453,. Namun di tahun 2021 jumlah koperasi yang aktif mengalami penurunan secara signifikan menjadi 136 koperasi yang aktif dari total 558 koperasi yang ada, sehingga persentasenya menurun menjadi 24,37 persen, lebih lengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 209
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah koperasi aktif	Jumlah seluruh koperasi	Persentase koperasi aktif
2017	453	576	78,65%
2018	463	579	79,97%
2019	456	545	83,67%
2020	465	552	84,24%
2021	136	558	24,37%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Persentase UKM Non BPR/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang dinyatakan dalam persen. Pada tahun 2021 tidak ada data untuk BPR/LKM yang aktif, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 210
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Persentase UKM non BPR/LKM aktif
2017	10	23	43,48%
2018	25	30	83,33%
2019	28	37	75,68%
2020	32	35	91,43%
2021	-	-	-

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Persentase BPR/ Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif

Persentase BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang dinyatakan dengan persen. Persentase BPR/LKM aktif di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 211
Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah BPR/LKM aktif	Jumlah seluruh BPR/LKM	Persentase BPR/LKM aktif
2017	1	1	100,00%
2018	1	1	100,00%
2019	1	1	100,00%
2020	1	1	100,00%
2021	-	-	-

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah usaha mikro dan kecil artinya jumlah seluruh usaha yang mempunyai omzet maksimal 300 juta. Jumlah usaha mikro dan kecil merupakan akumulasi dari jumlah pelaku industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh UKM yang ada di Kabupaten Gowa dan dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Mulai tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi lonjakan jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Gowa, hal ini dikarenakan adanya pendataan ulang yang melibatkan unsur kecamatan dalam pelaksanaannya pendataannya. Persentase usaha mikro dan kecil di tahun 2021 menjadi 99,56 persen. Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 212
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah usaha mikro dan kecil	Jumlah seluruh UKM	Persentase usaha mikro dan kecil
2017	6.677	6.936	96,27%
2018	6.844	7.104	96,34%
2019	6.972	7.233	96,39%
2020	40.520	40.786	93,35%
2021	56.244	56.490	99,56%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2.11 Penanaman Modal dan Investasi

1) Jumlah Investor Berskala Nasional

Investor adalah orang perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan investor, peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh semakin kondusifnya iklim penanaman modal di Kabupaten Gowa dan juga adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Namun di tahun 2021 jumlah investor berkurang sebesar 227 investor disbanding tahun sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.215.

Tabel 2. 213
Jumlah Investor Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Investor	853	825	1618	2324	2097

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Jumlah nilai investasi berskala nasional

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi yang telah disetujui dinas terkait. Nilai investasi berskala nasional di Kabupaten Gowa terus mengalami kenaikan khususnya di tahun 2021 mengalami kenaikan tinggi sebesar 174 persen dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2. 214
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah investasi berskala nasional
2017	1.444.148.216.605
2018	1.960.011.456.993
2019	3.303.304.782.337
2020	4.602.657.814.081
2021	8.008.088.688.594

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pembangunan pemuda menjadi salah satu agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *The Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mendukung pembangunan pemuda telah melakukan pembinaan organisasi kepemudaan salah satunya dengan melaksanakan Musrenbang Pemuda, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 215
 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten
 Gowa Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Jumlah seluruh organisasi pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif
2017	36	36	100,00%
2018	35	36	97,22%
2019	59	59	100,00%
2020	62	62	100,00%
2021	62	62	100,00%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Gowa telah mencapai 100 persen, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 97 persen dan ditahun selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 100 persen. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pembinaan pemuda dilakukan melalui pembinaan organisasi kepemudaan, namun keberadaan dan kiprah organisasi pemuda di Kabupaten Gowa.

2) Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda adalah perbandingan antara jumlah wirausaha muda di bagi dengan jumlah seluruh wirausaha yang dinyatakan dalam persen.

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah wirausaha sangat drastis. Kenaikan jumlah tersebut disebabkan karena adanya hasil pendataan dinas koprosi dan UMKM serta dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Gowa yang di laksanakan pada awal tahun 2021 dalam rangka pemenuhan LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintah daerah) dan untuk menghitung presentase IPP (indeks pembangunan pemuda) tahun 2021. Akan tetapi, meskipun seluruh wirausaha telah terdata, tingkat persentase wirausaha muda hanya sebesar 11,16 persen dari jumlah seluruh wirausaha yang ada di Kabupaten Gowa.

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 216
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah wirausaha muda	Jumlah seluruh wirausaha	Persentase wirausaha muda
2017	4	8	50,00%
2018	4	10	40,00%
2019	16	20	80,00%
2020	15	20	75,00%
2021	4.169	37.341	11,16%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Cakupan Pembinaan Olah Raga

Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 217
Cakupan Pembinaan Olah Raga Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cakupan pembinaan olahraga
2017	28	28	100,00%
2018	29	29	100,00%
2019	48	48	100,00%
2020	49	49	100,00%
2021	49	49	100,00%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Cakupan Pelatih yang Bersertifikat

Cakupan pelatih yang bersertifikasi adalah perbandingan antara jumlah pelatih bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih yang dinyatakan dalam persen. Perbaikan kompetensi pelatih di Kabupaten Gowa juga bergerak naik dari tahun 2017 sampai 2021, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 218
Pelatih yang Bersertifikat Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah pelatih yang bersertifikat	Jumlah seluruh pelatih	Cakupan pelatih yang bersertifikat
2017	42	80	52,50%
2018	47	80	58,75%
2019	47	80	58,75%
2020	48	80	60,00%
2021	50	80	62,5

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda adalah perbandingan antara jumlah pembinaan atlet muda dengan jumlah seluruh pembinaan atlet muda yang dinyatakan dalam persen. Pembinaan atlet muda di Kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bergerak naik meskipun masih di bawah 50 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 219
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Jumlah seluruh atlet pelajar	Cakupan pembinaan atlet muda
2017	69	150	46,00%
2018	70	150	46,67%
2019	72	150	48,00%
2020	72	150	48,00%
2021	72	150	48,00%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2022

6) Jumlah Atlet Berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu pembinaan olahraga seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. Berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dalam satu tahun.

Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 220
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah atlet berprestasi	8	13	10	10	10

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2022

7) Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga adalah jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah prestasi cabang olahraga di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 221
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah prestasi olahraga	0	9	9	9	9

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2.13 Statistik

1) Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Buku Kabupaten dalam Angka merupakan salah satu sarana untuk menyediakan data statistik yang dapat menggambarkan indikator capaian

pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 222
Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Buku "PDRB"

Sedangkan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah buku yang memuat jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 223
Buku PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2.14 Persandian

1) Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Menurut Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan nir penyangkalan

atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh.

Tabel 2. 224
 Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah PD yg telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	Jumlah total PD	Persentase PD yg telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD
2017	54	54	100%
2018	54	54	100%
2019	54	54	100%
2020	54	54	100%
2021	54	54	100%

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2.15 Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai kerajaan besar di Indonesia pada jaman dahulu yaitu Kerajaan Gowa. Jejak-jejak peninggalan kebesarannya bukan hanya dapat dilihat dari megahnya Istana Balla Lompoa tapi juga dari keaneragaman kebudayaan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Secara umum penyelenggaraan festival seni dan budaya sejak tahun 2017-2021 cenderung meningkat, akan tetapi menurun mulai tahun 2020 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 225
 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	14	16	16	8	8

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan

Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan Sejarah, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam rangka pelestarian dan pengelolaannya diperlukan adanya upaya perlindungan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Gowa saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga implikasinya dapat mengancam Keberadaan Cagar Budaya, maka

diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya. Dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten Gowa mempunyai tujuan melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, dan mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat Nasional dan Internasional. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 226
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	102 BCB	493 BCB	493 BCB	493 BCB	493 BCB

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Karya budaya Sulawesi Selatan yang dimasukan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Terdapat 2 Kabupaten yang tercatat, salah satunya adalah Kabupaten Gowa. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dari tahun 2017 sampai hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 227
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	2	0	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu dari tahun 2017 sampai 2021 adalah kompleks istana dan museum Balla Lompoa yang merupakan salah satu situs peninggalan Kerajaan Gowa.

Tabel 2. 228
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten
Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.2.16 Perpustakaan

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per-Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 229
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Gowa
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.014	16.547	17.172	285	553

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan adalah jumlah buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 230
Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2017	4.376	8.764	0,50
2018	2.949	4.581	0,64
2019	3.562	6.389	0,56
2020	3.562	6.389	0,56
2021	3.686	6.471	0,57

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah dimana rasio perpustakaan persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan per 1.000

penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 231
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Penduduk	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
2017	23	748.200	0,030
2018	23	760.607	0,030
2019	23	772.684	0,029
2020	23	765.836	0,030
2021	26	768.682	0,003

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun adalah jumlah rata-rata orang yang mengunjungi perpustakaan dalam satu tahun. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 232
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	0,31	3,62	2,22	0,0003	46,08

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan adalah jumlah judul buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi judul buku yang tersediadi perpustakaan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 233
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	4.376	2.949	3.562	3.562	3686

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

6) Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat adalah perbandingan antara jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dengan Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang dinyatakan dalam persen. Perpustakaan di Kabupaten Gowa belum mempunyai pustakawan, tenaga teknis dan penilai.

2.3.2.17 Kearsipan

1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 234
 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	Jumlah Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
2017	43	54	79,62%
2018	54	54	100,00%
2019	54	54	100,00%
2020	54	54	100,00%
2021	54	54	100,00%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan arsip agar semua dokumen penting terkait dengan kegiatan pemerintah reliabel dan akurat untuk digunakan. Untuk itu, pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir terus menambah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 235
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Gowa Tahun
2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	79,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2022S

2.3.3 Layanan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan antara Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dengan jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten yang dinyatakan dalam persen. Jumlah kunjungan wisata setiap tahun mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, perbaikan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan, peningkatan promosi wisata oleh pemerintah daerah dan juga pelaksanaan event Beautiful Malino yang mulai digalakkan sejak tahun 2017.

Tabel 2. 236
Kunjungan Wisata Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan	Kunjungan wisata
2017	199.217	107.235	185,78%
2018	214.553	113.854	188,45%
2019	287.687	120.473	238,80%
2020	150.435	127.092	118,37%
2021	230.506	133.711	172,39%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Lama Kunjungan Wisata

Secara umum lama tinggal wisatawan pada suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang cukup tentang suatu destinasi wisata bagi wisatawan sehingga memutuskan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam destinasi tersebut. Rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Gowa yaitu pada yaitu 1-2 hari.

Tabel 2. 237
Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Lama Kunjungan Wisata (hari)	2	2	1,5	1,25	2

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.3.2 Pertanian

1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan perbandingan antara produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal yang dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan pangan lokal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 238
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Tahun		Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
2017	Padi	408.899	67.666,2	6,04
	Jagung	304.621	48.523,0	6,28
2018	Padi	412.964	62.397,6	6,62
	Jagung	337.174	47.677,0	7,07
2019	Padi	403.540	62.643,8	6,44
	Jagung	288.200	38.278,0	7,53
2020	Padi	416.778	69.144,4	5,9
	Jagung	296.846	53.455,1	6,1
2021	Padi	423.480	69.580	6,00
	Jagung	306.281	54.004,4	6,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Produktivitas padi per hektar di Kabupaten Gowa selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,76 ton pertahun.

2) Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani merupakan perbandingan antara jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda dengan jumlah kelompok tani yang dinyatakan dalam persen. Jumlah kelompok petani yang

mendapatkan bantuan Pemda semakin menurun setiap tahunnya, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran terkait pemberian bantuan kepada kelompok petani juga semakin berkurang. Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 239
Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	jumlah kelompok tani	Cakupan bina kelompok petani
2017	223	3659	6,09%
2018	103	3659	2,81%
2019	88	3659	2,41%
2020	68	3659	1,86%
2021	67	3659	1,83%

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.3.3 Perdagangan

1) Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Di Kabupaten Gowa dari tahun 2016-2021 belum ada nilai impor sehingga nilai ekspor masih mendominasi. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 240
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Ekspor Bersih Perdagangan	3.383.482,97	2.699.571,36	2.966.976,00	1.467.865,00	3.111.129,00

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 241
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
2017	2.487	2.949	84,33%
2018	2.580	3.151	81,88%
2019	2.868	3.384	84,75%
2020	2.768	3.597	82,99%
2021	3.247	3.785	85,79

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.3.4 Perindustrian

1) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemerintah Daerah dengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 242
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda Tahun n	Jumlah kelompok pengrajin	Cakupan bina kelompok pengrajin
2017	541	574	94,25%
2018	544	614	88,60%
2019	547	654	83,64%
2020	560	699	80,11%
2021	628	779	80,62

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.3.5 Transmigrasi

1) Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi swakarsa atau yang biasa disebut sebagai transmigrasi spontan adalah transmigrasi yang dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Di Kabupaten Gowa sampai saat ini belum ada transmigrasi swakarsa, yang ada di Kabupaten saat ini adalah transmigrasi lokal.

2.3.3.6 Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah banyaknya produksi perikanan yang diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Selama kurun waktu 2017-2021 produksi perikanan di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi Perikanan di dukung oleh berbagai faktor yakni diantaranya luas areal pemeliharaan ikan, alat penangkapan ikan, dan armada yang dipakai untuk menangkap ikan.

Sesuai data dalam tabel terlihat bahwa kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan yakni dari 101,86% tahun 2017 meningkat menjadi 107,89% di tahun 2021.

Tabel 2. 243
Produksi Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	Target Daerah (Ton)	Produksi perikanan
2017	727.7	721.5	100,86%
2018	781.5	762.2	102,53%
2019	840.3	805.4	104,33%
2020	974.1	839.1	116,09%
2021	971	900	107,89%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah konsumsi ikan dengan target daerah yang dinyatakan dalam persen. Konsumsi ikan di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir telah mencapai 100% (seratus persen), seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 244
Konsumsi Ikan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	Target Daerah (Kg)	Konsumsi Ikan
2017	47,06	47,06	100,00%
2018	47,22	47,22	100,00%
2019	47,45	47,45	100,00%
2020	47,57	47,57	100,00%
2021	47,76	47,67	100,19%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan perbandingan antara Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan target kelompok nelayan yang dinyatakan dalam persen. Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan selama 5 tahun terakhir baru berkisar pada angka 25% (dua puluh lima persen). Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan.

Tabel 2. 245

Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	Jumlah kelompok nelayan	Cakupan bina kelompok nelayan
2017	4	16	25,00%
2018	5	20	25,00%
2019	6	24	25,00%
2020	7	27	25,93%
2021	5	27	18,52%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan perbandingan jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dengan jumlah produksi ikan di daerah yang dinyatakan dalam persen. Kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun peningkatan tersebut masih sangat kecil, yakni dari 6,35% di tahun 2016 meningkat menjadi 9,99% di tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 246

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Jumlah produksi ikan di daerah	Produksi perikanan kelompok nelayan
2017	43,1	571	7,55%
2018	50,7	579,5	8,75%
2019	58,3	588,2	9,91%
2020	60,2	602,8	9,99%
2021	63.4	607	10.46%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama, dinyatakan dalam persen.

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 247
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yg Aman
Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah tangkapan ikan	80% dari tangkapan maksimum lestari	Proporsi tangkapan ikan yg berada dalam batasan biologis yg aman
2017	575,1	678,98	84,70%
2018	582,3	699,35	83,26%
2019	588,0	720,33	81,63%
2020	602,8	741,94	81,25%
2021	607	752,17	80,70 %

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.4 Penunjang Urusan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

1) Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah

Program prioritas RPJMD 2021-2026 sejumlah 63 program yang dilaksanakan oleh 40 perangkat daerah. Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah tahun 2019 hingga 2021 mencapai 100 persen.

Tabel 2. 248
Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Organisasi, Tahun 2022

2) Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi

Urusan pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi tahun 2017 hingga 2021 sejumlah 32 urusan dari 32 urusan pemerintahan, yaitu:

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial.
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal dan Investasi, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan.
- c. Urusan Pilihan: Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi, Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. 249

Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Presentase Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Tahun 2022

3) Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan

Tabel 2. 250

Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan Kabupaten Gowa tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2022

4) **Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran**

Tabel 2. 251
 Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara Al-Quran	%	99.80	99.8	100	100	100	100

Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2022

5) **Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan**

Tabel 2. 252
 Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase penurunan kasus kejahatan terhadap kesusilaan	%	85	85	85	90	100	90

Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2022

6) **Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Tabel 2. 253
 Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Gowa 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Hukum, Tahun 2022

7) **Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi**

Tabel 2. 254

Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Hukum, Tahun 2022

8) **Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan**

Tabel 2. 255

Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Rumusan Kebijakan bidang perekonomian yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Tahun 2022

9) **Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah**

Tabel 2. 256

Realisasi capaian program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Realisasi capaian program prioritas	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Tahun 2022

10) Persentase Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana pembangunan daerah

Tabel 2. 257

Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Rencana Pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun 2022

2.3.4.2 Sekretariat Dewan

1) Persentase PROLEGDA yang terealisasi

Tabel 2. 258

Persentase PROLEGDA yang Terealisasi Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase PROLEGDA yang Terealisasi	%	39	30	92	5	40	40

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD

Tabel 2. 259

Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya

Tabel 2. 260
 Persentase Ranperda yang difasilitasi pembahasannya Kabupaten
 Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.4.3 Perencanaan Pembangunan

1) Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD

Konsistensi Penjabaran program RKPD kedalam APBD merupakan perbandingan antara jumlah program yang ada di APBD dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dan angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen APBD dengan RKPD. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 261
 Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD di
 Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	93,52	100	100	100	100	100
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda, Tahun 2021

2) Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Program

Tabel 2. 262
 Persentase peningkatan capaian kinerja program di Kabupaten Gowa 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Persentase peningkatan capaian kinerja program	%						

Sumber : Bappeda, Tahun 2021

3) Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 2. 263
 Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Bidang PPM	%	100	100	100	100	100	100
Bidang Ekonomi dan SDA	%	100	100	100	100	100	100
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda, Tahun 2022

2.3.4.4 Keuangan

1) Persentase SILPA Terhadap APBD

SILPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan persentase SILPA merupakan perbandingan antara total SILPA dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase SILPA terhadap APBD di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 264
 Persentase SiLPA Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Total SiLPA	Total APBD	Persentase SiLPA
2017	146.188.502.771,23	1.902.076.670.273,33	7,69%
2018	91.351.245.045,91	1.982.464.216.421,23	4,61%
2019	92.540.509.568,07	2.013.411.115.780,91	4,60%
2020	149.148.157.506,03	1.975.626.062.446,40	7,55%
2021	215.726.977.462,470	2.224.019.879.780,36	9,70%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Persentase program yang tidak terlaksana di Kabupaten Gowa dan jumlah kegiatan yang tidak terlaksana di Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Tabel 2. 265
 Persentase Program yang tidak Terlaksana di Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Program Dalam APBD Yang Tidak Dilaksanakan	Total Program Dalam APBD	Persentase Program Yang Tidak Terlaksana
2017	6	245	2,45%
2018	6	229	2,62%
2019	5	188	2,66%
2020	8	188	4,26%
2021			

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Tabel 2. 266
 Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Kegiatan Dalam APBD Yang Tidak Dilaksanakan	Total Kegiatan Dalam APBD	Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana
2017	8	1119	0,71%
2018	11	1127	0,98%
2019	8	1110	0,72%
2020	27	872	3,10%
2021			

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Belanja Pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa sudah memenuhi amanat Undang-Undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD, hal ini terlihat dari data yang ada dari tahun 2017-2021 alokasi anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Gowa telah berada diatas 20 persen disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 267

Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase belanja pendidikan (20%)
2017	557.175.572.516,00	1.902.076.670.273,33	29,29%
2018	578.246.657.958,00	1.982.464.216.421,23	29,17%
2019	589.508.165.664,71	2.013.411.115.780,91	29,28%
2020	559.912.562.000,13	1.975.626.062.446,40	28,34%
2021	591.629.977.232,00	2.224.019.879.780,36	26,60%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan kesehatan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Belanja Kesehatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa selama tahun 2017-2021 telah melebihi 10% dan semakin meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 268

Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase belanja kesehatan (10%)
2017	282.474.850.936,25	1.902.076.670.273,33	14,85%
2018	303.042.436.886,00	1.982.464.216.421,23	15,29%
2019	319.134.559.443,31	2.013.411.115.780,91	15,85%
2020	343.230.685.128,00	1.975.626.062.446,40	17,27%
2021	455.957.326.975,00	2.224.019.879.780,36	20,50%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung merupakan perbandingan antara jumlah belanja langsung dan jumlah belanja tidak langsung terhadap total APBD yang dinyatakan dalam persen. Di tahun 2017-2019 mulai terlihat adanya penurunan belanja tidak langsung dan meningkatnya belanja langsung.

Tabel 2. 269
 Persentase Belanja Langsung Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Belanja Langsung	Total APBD	Persentase belanja langsung
2017	873.409.009.977,25	1.902.076.670.273,33	45,92%
2018	899.913.411.399,28	1.982.464.216.421,23	45,39%
2019	887.620.119.527,91	2.013.411.115.780,91	44,09%
2020	831.280.811.012,66	1.975.626.062.446,40	42,08%
2021	813.567.780.693,25	2.224.019.879.780,36	36,58%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Tabel 2. 270
 Persentase Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Total APBD	Persentase belanja tidak langsung
2017	854.553.516.478,00	1.902.076.670.273,33	44,93%
2018	927.727.665.691,41	1.982.464.216.421,23	46,80%
2019	978.336.280.228,57	2.013.411.115.780,91	48,59%
2020	1.050.981.828.905,89	1.975.626.062.446,40	53,19%
2021	1.176.064.730.254,70	2.224.019.879.780,36	52,88%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2022

6) Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan perbandingan antara jumlah belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa yang dinyatakan dalam persen. Belanja bagi hasil dan desa di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 271
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Total APBD	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa
2017	87.871.879.826,00	1.902.076.670.273,33	4,62%
2018	75.891.104.209,00	1.982.464.216.421,23	3,83%
2019	101.883.197.749,97	2.013.411.115.780,91	5,06%
2020	90.192.159.355,40	1.975.626.062.446,40	4,57%
2021	98.417.427.079.00	2.224.019.879.780,36	4,43%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2022

7) Penetapan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Kabupaten Gowa pernah mengalami keterlambatan Penetapan APBD yaitu pada Penetapan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2016.

Tabel 2. 272
Penetapan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Penetapan APBD
2017	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016
2018	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017
2019	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018
2020	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019
2021	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 27 Desember 2020

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.3.4.5 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah perbandingan antara ASN yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah

seluruh ASN yang dinyatakan dalam persen. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa capaian persentase keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Gowa masih rendah.

Tabel 2. 273
 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah total ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2017	552	7.759	7,11%
2018	552	7.759	7,11%
2019	663	7.530	8,80%
2020	693	7.564	9,16%
2021	852	6.968	59,36%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah perbandingan antara jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dapat dilihat pada tabel berikut. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural tetap sama, karena selama kurun waktu tersebut tidak diadakan diklat struktural.

Tabel 2. 274
 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural	Jumlah total jabatan	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
2017	406	1071	37,91%
2018	406	1071	37,91%
2019	466	825	56,48%
2020	466	825	56,48%
2021	466	825	56,48%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi

memimpin dan memotivasi setiap Pegawai pada Instansi Pemerintah. Pada tahun 2017 terjadi perubahan jumlah pejabat tinggi pada Pemerintah Kabupaten Gowa, hal ini dikarenakan adanya perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan sejak itu sampai tahun 2021 jumlah jabatan pimpinan tinggi tidak mengalami perubahan.

Tabel 2. 275
 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	42	42	42	42	42

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah Jabatan Administrasi di Kabupaten Gowa stagnan sebesar 208 orang, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 276
 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten
 Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	208	208	208	208	208

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gowa, Tahun 2022

5) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Gowa dapat dilihat di tahun 2020 sebanyak 5.084 ASN.

2.3.4.6 Penelitian dan Pengembangan

1) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD yang dinyatakan dalam persen. Pada tahun 2016 kelitbangan masih menjadi bagian dari Bappeda, sehingga hal-hal terkait kelitbangan belum menjadi prioritas perangkat daerah saat itu. Sehingga hal-hal terkait kelitbangan baru betul-betul dilaksanakan pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 277
 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
 Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Persentase implementasi rencana kelitbangan
2017		Tidak Ada	
2018		Tidak Ada	
2019	3	15	20,00%
2020	2	15	13,33%
2021	2	2	100,00%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti (sesuai dengan Renja perangkat daerah yang berkenaan) yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah, dan dinyatakan dalam persen. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 278
 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten
 Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah kelitbangan dalam Renja PD	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
2017		Tidak Ada	
2018		Tidak Ada	
2019	3	3	100,00%
2020	2	2	100,00%
2021	2	2	100,00%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dengan jumlah total perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 279
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	Jumlah total perangkat daerah	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
2017		Tidak Ada	
2018		Tidak Ada	
2019		2	
2020	10	2020	10
2021	10	54	18,51%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gowa, Tahun 2022

4) Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Dalam kurun waktu 2017-2021 belum ada kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Gowa.

2.3.4.7 Pengawasan

1) Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan merupakan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang dinyatakan dalam persen. Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 280
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Jumlah total temuan	Persentase tindak lanjut temuan
2017	134	215	62,33%
2018	113	264	42,80%
2019	164	322	50,93%
2020	140	182	76,92%
2021	174	124	71,00%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2) Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 281
Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Jumlah total ASN	Persentase pelanggaran pegawai
2017	0	7.759	0,00%
2018	8	7.759	0,10%
2019	11	7.530	0,15%
2020	11	7.329	0,15%
2021	20	6.925	0,29%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gowa, Tahun 2022

3) Jumlah Temuan BPK

Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Jumlah temuan BPK di Kabupaten Gowa semakin menurun setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 282
Jumlah Temuan BPK Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah temuan BPK	51	41	35	27	88

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gowa, Tahun 2022

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah total biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua rumah tangga dibagi dengan banyaknya rumah tangga. Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 283
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PDRB-ADHB)	Milyar Rp	17.192,66	19.071,98	20.939,00	21.531,88	23.536,84
Jumlah Penduduk	Jiwa	748.200,00	760.610,00	772.680,00	765.840,00	773.320,00
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita/Tahun	Juta Rp/Kapita/Tahun	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98

Sumber : Gowa Dalam Angka, Tahun 2022 (diolah)

2.4.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita

Tabel 2. 284
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	49,46	52,55	51,14	48,55	48,12

Sumber : BPS, Tahun 2018 - 2022

2.4.3 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Nilai Tukar Petani Kabupaten Gowa dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2. 285
 Nilai Tukar Petani Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks yang diterima Petani (It)	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	Nilai Tukar Petani
2017	129,06	127,97	100,85
2018	135,33	132,3	102,29
2019	138,74	134,63	103,05
2020			
2021			

Sumber : BPS, Tahun 2022

2.4.4 Presentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Tabel 2. 286
 Presentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa	Desa	121	121	121	121	121
Jumlah Desa Swasembada	Desa	8	8	9	38	63
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6,61	6,61	7,44	31,40	52,07

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun 2022

2.4.5 Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB/PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 287
 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB Kabupaten Gowa Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	PDB	Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB
2017	3.383.482,97	13.598.825.000,70	0,02%
2018	2.699.571,36	14.838.311.000,50	0,02%
2019	2.966.976,00	15.833.943.000,40	0,02%
2020	1.467.865,00	15.434.151.000,80	0,01%
2021	3.500.000+		

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Tabel diatas menggambarkan terjadinya penurunan rasio ekspor dan impor terhadap PDB pada tahun 2020 dimana tahun 2017-2019 memiliki nilai yang konstasn. Ekspor akan secara langsung memberi kenaikan penerimaan dalam pendapatan suatu negara. Terjadinya kenaikan penerimaan pendapatan suatu negara akan mengakibatkan terjadinya kenaikan tingkat PDB. Dengan kata lain ekspor akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi

2.4.6 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun. Puncak pertumbuhannya berada di tahun 2021 sebesar 11,34 persen dengan total kontribusi sebesar 4.289,11 miliar rupiah berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.990.

Grafik 2. 13
 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik,Tahun 2022

2.4.7 Angka kriminalitas yang Tertangani

Rasa aman merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa

aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (kriminalitas) setiap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas di Kabupaten Gowa pada tahun 2020 turun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Gowa dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Adanya pengaturan operasional tempat umum, pusat perbelanjaan dan jam malam sehingga hal ini membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah masing-masing. Angka kriminalitas di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 288
**Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Gowa
 Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Dalam 1 Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas yang Tertangani
2017	1.485	748.200	19,85
2018	1.359	760.607	17,87
2019	1.260	772.684	16,31
2020	812	765.836	10,60
2021	1.262	768.682	16,00

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2022

2.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. IKU juga merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Berikut matriks pencapaian indikator tujuan, sasaran, dan program prioritas Bupati Gowa tahun 2021 berdasarkan target RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yang ditetapkan. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator program prioritas terdapat pada uraian aspek pelayanan umum.

Tabel 2. 289
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Meningkatnya Layanan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	7.97	8.14	8.19	100,61	8.14
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13.48	14.06	13.64	97	14.06
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70.37	70.04	70.43	100,55	70.04
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Lapangan Berusaha	Angka Pengangguran Terbuka (%)	4.87	3.22	6.44	0	3.22
4	Meningkatnya rasa aman dan tentram	Angka kriminal yang tertangani	12	17	12	70.60	17
5	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	87.19*	91.14	87.17	95.64	91.14
6	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan KB	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1.59*	1.96	1.65	115.81	1.96

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
7	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan	Tingkat Kemiskinan (%)	7.53*	7.10	7.38	96.05	7.10
8	Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	41,5	45-50	41,5	83	45-50
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	67.60	67.73	62.99	93	67.73
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian	5.943.989,10	5.752.848.140	6.764.231.14	119	5.752.848.140
11	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan(Rp)	2.714.680.000.000	1.600.000.000.000			1.600.000.000.000
		Nilai PDRB sektor industri (Rp)	1.353.250.000.000	850.000.000.000			850.000.000.000
12	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Nilai PDBR sektor pariwisata		381.079.000.000			381.079.000.000
13	Meningkatnya kapasitas infrastuktur	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (%)	0.31	0.31	0.32	103	0.31

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
		Rasio jaringan irigasi(%)	90.81	90.16	82.3	91	90.16
		Persentase rumah tangga bersanitasi(%)	51,49	80.20	51.65	64	80.20
14	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan RTRW(%)	77.20	80.91	76.50	94.5	80.91
15	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni.(Rasio)	72.70	73.95	72.73	97.67	73.95
16	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi(Katagori)	-	60.00 (Baik)	52.20	87	60.00 (Baik)
		Indeks SAKIP(Katagori)	-	70-80 (BB)	63.51	105.85	70-80 (BB)
		Katagori LPPD(Katagori)	Tinggi {3.6618}	Sangat Tinggi [3.0000 - 3,5000}			Sangat Tinggi [3.0000 -3,5000}
		Opini BPK(Katagori)		WTP	WDP	66.66	WTP
17	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks pelayanan publik (Nilai)	3,91{Baik}	4.01 (Sangat Baik)	4.02	100.24	4.01 (Sangat Baik)
Jumlah				1.812,69		1.812,69	
Rata-Rata capaian						90,63	

2.5.2 Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Capaian kinerja hasil penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Gowa selama lima tahun (2017-2021) dijabarkan pada tabel dibawah.

Tabel 2. 290
Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,21	7,14	7,46	1,76	7,26
2	Laju Inflasi	%	3,37	3,48	3,72	2,13	2,26
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Milyar Rp	17.192,66	19.063,89	20.938,87	21.531,88	23.536,84
4	Indeks Gini	Angka	0,40	0,38	0,35	0,35	0,358
5	Tingkat Kemiskinan	%	8,42	7,83	7,53	7,38	7,54
	• Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	333.002	365.503	385.820	390.917	408.435
	• Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	62,77	59,34	57,98	57,68	58,66
	• Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	1,42	1,25	0,92	1,18	1,38
	• Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	91,58	92,17	92,47	92,62	92,46
	KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,33	68,87	69,66	70,14	70,29
	• Angka Melek Huruf (AMH) >15 Tahun	%	92,43	92,63	96,10	96,63	96,71

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	• Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,74	7,75	7,97	8,19	8,20
	• Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,94	69,98	70,01	70,43	70,45
	• Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,04	13,29	13,48	13,64	13,65
	• Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	864,76	1.008,14	935,44	1.084,50	1.044,67
2	Persentase Balita Stunting	%	0,02	0,02	0,07	0,10	
3	Prevelansi Balita Gizi Kurang	%	6,90	1,73	5,82	4,62	5,47
4	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	58,53	64,19	62,44	63,27	65,93
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,14	4,80	4,87	6,44	4,30
6	• Jumlah Penganggur	Ribu Jiwa	20.453	17.682	17.786	25.385	17.505
7	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	93,86	95,20	95,13	93,56	95,70
8	Laju Pertumbuhan PDRB/PDB per Tenaga Kerja	%	3,83	3,66	3,96	3,80	3,86
9	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	36,60	36,84	36,72	43,47	42,95
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,90	79,46	83,86	83,13	84,85
11	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	14,99	12,19	12,74	12,82	13,71
12	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	TIDAK WTP	WTP

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
13	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	89,6	89,7	89,8	89,9	90,0
14	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	2	2	2	2	2
15	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	25	20	15	15	33
16	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (Hortikultura)	%					
17	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	83,45	83,56	83,70	84,21	
18	Produksi Sektor Pertanian	Trilyun Rupiah	1.423				
19	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	3,49	3,31	3,27	4,90	5,57
20	Produksi Sektor Perkebunan	Trilyun Rupiah					
21	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%					
22	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	6,09	2,81	2,41	1,86	6,56
23	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	3,49	3,31	3,27	4,90	
24	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	3,88	3,97	4,01	3,57	2,13

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
25	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	5,41	5,37	5,33	4,80	4,80
26	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	12,31	12,71	13,11	7,87	12,51
27	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	6,72	6,50	6,78	6,28	6,45
28	Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan	%	1,64	1,62	1,68	1,59	1,68
29	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,31	12,71	13,11	7,87	12,51
SENI, BUDAYA, DAN OLAHRAGA							
1	Jumlah lembaga sanggar kesenian per 10.000 penduduk	%	Belum ada				
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	%	Belum ada				
3	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	%	Belum ada				
ASPEK PELAYANAN UMUM							
PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	%	64,44	80,61	89,99	90,32	88,95

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	63,88	59,70	59,04	60,50	60,34
3	Angka Kelulusan (AL)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	95,11	100,00	100,00	95,05	100,00
5	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Angka	53,03	59,04	52,62	51,56	56,00
6	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Angka	5,98	6,09	6,17	6,15	6,50
7	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	%	97,45	88,04	91,01	90,43	91,33
8	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	86,05	95,64	92,05	95,33	92,52
Kesehatan							
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Orang	75	42	47	41	65
2	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita)	Orang	24	53	51	48	66

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal)	Orang	4	3	3	3	5
4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	6	3	3	3	5
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	9	11	5	1	5
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	9	11	5	1	5
7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka (per 100.000 KH)	103	130	103	111	128
8	Rasio Posyandu peratuan Balita	Angka per 1000 balita	12,00	13,42	13,12	13,90	15,90
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Angka per 1000 Penduduk	0,0013	0,0026	0,0026	0,0039	0,0038
10	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	0,127	0,201	0,230	0,266	0,280
11	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	0,348	0,463	0,458	0,268	0,280

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	73,31	77,26	72,39	51,18	56,23
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95,83	98,76	100,00	92,88	98,90
14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00	100,00	100,00	90,42	86,82
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	105	109	106	98	99
17	NonPolio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	2	0	0	0
18	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	32	12	15	15	12
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	41,84	41,34	45,37	46,72	63,12
20	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	195,67	207,47	224,02	123,92	163,71
21	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	2	4	2	4	11

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
22	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
23	Penderita Diare yang ditangani	Orang	14.750	20.303	20.862	20.687	20.880
24	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 penduduk	0	0	0	0	0
25	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,000	0,007	0,013	0,0026	0,0077
26	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	%	1,15	1,14	1,07	0,90	
27	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	%	0,00	0,03	0,05	0,08	0,22
28	Cakupan Kunjungan Bayi	%	94,37	98,79	94,86	96,40	100,21
29	Cakupan Puskesmas	%	144,44	144,44	144,44	144,44	144,44
30	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	95,04	95,04	95,04	103,31	98,34
31	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95,25	98,20	94,32	92,43	94,85
32	Cakupan Pelayanan Nifas	%	94,45	97,70	92,09	90,03	95,39
33	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	65,96	64,50	71,94	100,00	100,00
34	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	87,78	100,00	75,12	87,88	86,52

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
35	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100,00	81,82	94,56	NA
36	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	86,92	83,44	78,17	46,44	70,31
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	74,40	83,87	88,54	91,01	92,53
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jiwa	0,0032	0,0032	0,0031	0,0031	0,0031
3	Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	%	3,9	3,7	3,3	NA	2,6
4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)	%	65,7	71,3	74,4	76,2	77,7
5	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 Meter)	%	0,98	0,98	1,06	1,06	1,06
7	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	50,46	51,04	51,23	51,51	73,31

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
8	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	50,43	51,02	51,20	51,49	51,74
9	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47
10	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	62,20	62,70	63,50	63,50	64,50
11	Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun	%	44,01	43,75	43,50	43,50	60,38
12	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	4,4	4,4	6,7	6,7	2,2
13	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	84,00	87,72	90,48	90,81	86,91
14	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	0,0052	0,0057	0,0059	0,0060	0,0090
15	Persentase Penduduk Berakses air minum	%	69,77	70,40	69,42	70,72	83,40
16	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	73,54	75,31	75,43	76,29	77,13
17	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	57,33	54,56	60,58	77,5	27,54

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
18	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/Jiwa	1,93	1,78	1,71	2,39	0,17
19	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	72,06	73,24	72,65	NA	NA
20	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Angka	179,19	176,26	173,51	175,06	48,69
21	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB		7,70	3,30	2,70	2,70	2,70
22	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	%	0,75	0,75	1,27	1,27	1,27
23	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	0,034	0,025	0,026	0,029	0,034
24	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	%	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
25	Ketaatan terhadap RTRW	%	68,67	74,60	77,21	79,50	93,91
Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman							
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	15,00	15,23	15,09	15,33	18,230
2	Rasio Permukiman Layak Huni	%	0,73	0,75	0,77	0,79	0,82
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa	%	75,00	77,00	77,15	77,28	80,00

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	s	73,01	75,01	77,01	79,05	80,120
5	Persentase Permukiman yang Tertata	%	28,01	29,43	30,72	32,01	35,230
6	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	5,45	4,24	3,04	2,50	2,370
7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan		15,15	25,97	27,73	32,06	36,39
8	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan		7,79	7,61	7,46	7,30	7,24
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU		5,71	6,33	26,67	24,00	34,55
Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10.000 penduduk	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	24,20	31,57	59,58	59,58	59,58
4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	63,04	94,12	62,89	55,81	83,78

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
5	Persentase Penegakan PERDA	%	6,15	98,82	96,69	99,57	100,00
Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100	dihapus karena pemotongan anggaran Covid-19	
6	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
7	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	61,85	94,28	99,96	100,00	100,00
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
Tenaga Kerja							
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,17	67,42	65,63	67,62	68,89
2	Rasio Penduduk yang bekerja	%	93,86	85,20	95,13	93,56	95,70
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0,66	1,95	0,84	1,15	2,10
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	60,00	92,86	33,33	42,86	100,00
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	5,73	21,74	22,10	88,82	28,70

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	Belum ada kebijakan (peraturan) pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan				
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	Kewenangan Provinsi				
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	Kewenangan Provinsi				
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	32,00	42,67	59,03	9,02	52,63
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	46,51	51,95	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Angka	529	600	685	1102	
12	Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	58,35	64,19	62,44	63,27	65,93
13	Persentase Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ketas	%	58,42	62,58	60,36	61,92	61,64
14	Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	44,98	43,72	45,78	43,47	42,95
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	5,70	5,65	5,82	5,82	5,82

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	17,78	17,78	17,78	28,89	28,89
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	0,50	0,89	0,94	0,97	0,96
4	Rasio KDRT	%	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	6,21	6,54	6,76	6,79	6,76
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	51,58	100,00	94,17	100,00	100,00
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
9	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100
10	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100
11	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	51,58	100,00	94,17	100,00	16,94
12	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	100	100	100	100	100
13	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	%	93,41	93,83	92,82	92,31	92,82
14	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	%	100,00	102,00	98,00	99,00	98,00
15	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Pangan							

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN					
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	33,06	33,07	32,35	34,22	32,76	
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%						
3	Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	-	-	-	-	-	
4	Ketersediaan Energi Perkapita	Kkal/th	5.562	6.067	4.878	5.540	7.799	
5	Ketersediaan Protein Perkapita	Gr/Th	178,91	191,70	159,12	163,91	172,82	
6	Ketersediaan Lemak Perkapita	Gr/th	66,26	71,58	101,70	81,23	103,80	
7	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	60	100	87,5	100	Tidak ada pengujian	
Lingkungan Hidup								
1	Tersedianya dokumen RPPLH	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
2	Tersusunnya RPPLH	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4	Tersedianya dokumen KLHS	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	%	65,00	56,00	-	71,08	50,00
7	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	%	-	83,00	83,00	83,85	85,58
8	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	-	52,00	52,50	53,00	43,51
9	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	53,08	60,05	60,45	93,19	89,06
10	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	4,68	4,61	4,54	4,56	4,61
11	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	6,42	6,42	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	53,08	60,05	60,45	93,19	89,06
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	0,88	0,86	0,97	0,99	0,99
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	0,63	1,04	0,99	0,99	0,99
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	0,17	0,20	0,21	0,22	0,24
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	87,62	86,08	97,49	98,78	99,95
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	76,89	120,81	110,64	106,14	102,08
Pemberdayaan Masyarakat dan desa							
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	84,30	90,08	90,91	100,00	100,00
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	3	3	3	3	3
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	32,47	32,47	32,47	33,04	33,04
	Persentase LSM Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase LPM Berprestasi	%	12,57	14,37	16,77	10,78	10,78
5	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,77	1,73	1,66	1,59	1,59
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,47	2,47	2,00	2,39	2,39
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak/keluarga	1,507	1,500	1,509	1,456	1,23

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Rasio Akseptor KB	%	69,09	68,70	70,20	71,64	69,69
5	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah 15-49	%	99,33	99,53	99,56	96,87	99,24
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	24,06	25,19	46,60	28,04	28,04
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,00	1,67	1,06	-	2,90
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	18,15	17,94	16,43	12,34	13,88
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	15,94	18,54	20,33	19,68	21,49
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	19,12	15,06	13,81	16,37	15,86
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	78,13	78,92	78,93	88,21	86,80
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	65,57	66,32	66,49	81,74	84,58
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	48,97	59,11	59,32	81,59	81,15

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
14	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	805,56	811,11	827,78	516,67	583,33
15	Cakupan PKB/PKLB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	64,03	65,96	68,48	81,50	81,68
17	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	59,69	53,81	48,03	47,14	
19	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
20	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi Keluarga	%	97,12	98,90	99,60	96,08	99,34
21	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	37,93	38,23	46,12	39,26	67,06
Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	0,11362	0,10225	0,92029	0,46015	0,45554
2	Rasio ijin trayek	Angka	0,00027	0,00023	0,00018	0,00007	0,00002
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Angka	806	961	1193	1707	378
4	Persentase layanan angkutan darat	%	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	7,84	8,92	14,06	23,05	5,10
6	Pemasangan Rambu-Rambu	%	5,56	6,75	7,94	14,13	15,71
7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/kendaraan	0,009	0,009	0,009	0,008	
8	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	1.136,16	1.022,54	920,29	460,15	455,54
Komunikasi dan Informatika							

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	50,00	55,56	55,56	55,56	55,56
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	33,33	63,16	88,04	99,76	99,78
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	0,25	0,33	0,40	0,49	2,02
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	0,20	0,21	0,36	0,46	2,02
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	%	78,65	79,97	83,67	84,24	24,73
2	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	%	43,48	83,33	75,68	91,43	-
3	Persentase BPR/LKM Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	-
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96,27	96,34	96,39	93,35	99,56
Penanaman Modal dan Investasi							
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun rupiah	1,444	1,960	3,303	4,602	8,008
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	853	825	1.618	2.324	2.097

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	218	36	69	39	74
Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100,00	97,22	100,00	100,00	100,00
2	Persentase wirausaha muda	%	50,00	40,00	80,00	75,00	11,16
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	52,50	58,75	58,75	60,00	62,50
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	46,00	46,67	48,00	48,00	48,00
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	8	13	10	10	10
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	0	9	9	9	9
Statistik							
1	Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persandian							
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
Kebudayaan							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	14	16	16	8	8

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	102 BCB	493 BCB	494 BCB	495 BCB	493 BCB
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	0	2	0	0	0
4	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Unit	1	1	1	1	1
Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	2014	16547	17172	285	553
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	8.764	4.581	6.389	6.389	6.471
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	0,030	0,030	0,029	0,030	0,003
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun		0,3100	3,6200	2,2200	0,0003	46,08
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	4.376	2.949	3.562	3.562	3.686
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	Kab. Gowa belum mempunyai				
6 Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	79,62	100	100	100	100

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	79,62	100	100	100	100
PELAYANAN URUSAN PILIHAN							
Pariwisata							
1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	kunjungan	199.217	214.553	287.687	150.435	230.506
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	2,00	2,00	1,50	1,25	2
3	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah					500.490.000
Pertanian							
1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%					
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	83,45	83,56	83,70	84,21	
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%					
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (Perkebunan)	%					
5	Cakupan bina kelompok tani (Pertanian)	%	6,09	2,81	2,41	1,86	1,83
6	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%					
7	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	Ton					14.019

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
8	Produktivitas Hasil Peternakan (Telur)	Ton					10.470
9	Produktivitas Hasil Peternakan (Susu)	Ton					
10	Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB	%					
Perdagangan							
1	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$1000	3.383.482,97	2.699.571,36	2.966.976,00	1.467.865,00	3.111.129,00
2	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	84,33	81,88	84,75	82,99	85,79
Perindustrian							
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	94,25	88,60	83,64	80,11	80,62
Transmigrasi							
1	Persentase transmigran umum	%	Belum ada transmigrasi swakarsa				
Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan	%	100,86	102,53	104,33	116,09	107,89
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	25,00	25,00	25,00	25,93	18,52
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	7,55	8,75	9,91	9,99	10,46
4	Nilai Tukar Nelayan	%					
5	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	84,70	83,26	81,63	81,25	80,70

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
6	Volume produksi perikanan tangkap	Ton					
7	Konsumsi Ikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,19
Penunjang Urusan							
Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	93,52	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%					
Keuangan							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WTP	Tidak WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%					
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	7,69	4,61	4,60	7,55	
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	29,29	29,17	29,28	28,34	
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,85	15,29	15,85	17,27	
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (tidak sesuai perhitungan 100%)	Rasio	45,92	45,39	44,09	42,08	
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	4,62	3,83	5,06	4,57	
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Tahun					

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,11	7,11	8,80	9,16	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	37,91	37,91	56,48	56,48	
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	42	42	42	42	42
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	208	208	208	208	208
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang				5.048	
Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	Tidak ada	Tidak ada	20,00	13,33	100,00
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	Tidak ada	Tidak ada	100,00	100,00	100,00
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	Tidak ada	Tidak ada		10,00	18,51
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	Belum ada kebijakan Inovasi yang diterapkan				
Pengawasan							

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	%					
2	Persentase tindak lanjut temuan	%	62,33	42,80	50,93	76,92	71,00
3	Jumlah temuan BPK	Kasus	51	41	35	27	88
Sekretariat Dewan							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
ASPEK DAYA SAING							

NO.	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rupiah	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98
2	Nilai Tukar Petani	Ribu Rupiah	100,85	102,29	103,05	97,40	97,33
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	49,46	52,55	48,55	48,55	48,12
4	Produktivitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja					
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%					
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB/PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	0,02	0,02	0,02	0,01	
7	Angka Kriminalitas yang tertangani	Angka	1.485	1.359	1.260	812	1.262
8	Rasio Ketergantungan	Angka					

Sumber : OPD Kabupaten Gowa Tahun 2022 (diolah)

2.5.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2020 dan tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 291
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
A. Pendidikan									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	45,06	92,68	1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Orang		473
					2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			Tidak Ada
					3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang		13.925
					4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang		940
					5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang		984
					6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang		594

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
					7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	Orang		145
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,36	93,97	1	Jumlah SD Negeri terakreditasi	Orang		414
					2	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			Tidak Ada
					3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang		72.750
					4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang		4.630
					5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang		2.372
					6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang		400
					7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang		400

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
				8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang		1.825	
				9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang		367	
				10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA	Orang		429	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	80,85	80,6	1	Jumlah SMP Negeri terakreditasi	Sekolah		82
					2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			Tidak Ada
					3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang		22.50
					4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang		1881
					5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang		869

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang		357
				7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang		88
				8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang		763
				9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang		62
				10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA	Orang		315
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	3,17	2,53	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Unit	30
					2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	2.598

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang		2.598
				4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang		552
				5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang		458
				6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang		458
				7	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			Tidak Perlu Diisi
				8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1			Tidak Perlu Diisi
B. Kesehatan								
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,025	0,06	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	1

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
2	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	66,67	33,33	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit		2
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		5
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal sesuai standar	Orang		500
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		3
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang		600
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		6
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang		533
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		9
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang		578
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		5
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang		356
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		2
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		26

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
9	Persentase usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		3
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		180
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		3
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		162
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		3
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		143
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		4
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		52
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		7
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		26
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis		4
					2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		26
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang	%	0	0	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			Tidak Ada Data

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
	terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota				2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			Tidak Ada Data
					3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			Tidak Ada Data
					4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			Tidak Ada Data
					5	Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota			Tidak Ada Data
					6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air kewenangan kabupaten/kota			Tidak Ada Data
					7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota			Tidak Ada Data
					2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	100	0
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			Tidak Ada Data					
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan			Tidak Ada Data					

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
					akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				
				4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			Tidak Ada Data	
				5	Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota			Tidak Ada Data	
				6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air kewenangan kabupaten/kota			Tidak Ada Data	
				7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota			Tidak Ada Data	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	81,87	86,9	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%		56,57
					2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik			91,00
					3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik			43,89
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	%	80,30	81,19	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota			Ada
					2	Tersusunnya dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota			Tidak Ada

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
	perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				3	Jumlah BUMD dan UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	PDAM	PDAM Tirta Je'neberan g
					4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	1 (Satu)
					5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain		Tidak Ada
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,30	74,75	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	RT	503
					2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Tidak ada Pembangunan
					3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	RT	503
					4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Tidak Ada Data
					5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Tidak Ada Data

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
					6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	RT		3206
					7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	%		90,3
					8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	%		90,1
					9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman			Tidak Ada Data
					10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%		3,4%
					11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%		0%
					12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%		0%
					13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	%		15,69
					14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja			Belum Ada Jasa Penyedotan
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	%	100	100	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%		0,005%
					2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	IMB		5987 IMB
					3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda		Perda No. 4

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
								Tahun 2014
				4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung			Belum Ada
				5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan			Tidak Ada Data
				6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			Tidak Ada Data
				7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Unit		105 Unit
				8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara dan dirawat	Unit		18 Unit
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	81,57	74,8	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota	%	74,80%
					2	Panjang jalan yang dibangun	Km	0
					3	Panjang jembatan yang dibangun	M	68
					4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Km	36,28
					5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	M	30
					6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	M	0
					7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	M	0
					8	Panjang jalan yang dipelihara	Km	40,13
					9	Panjang jembatan yang dipelihara	M	36,3

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	100	1	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Keg.		1
					2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang		44
					3	Jumlah tenaga konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Orang		48
					4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir			Tidak Ada Data
					5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota			Tidak Ada Data
					6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN			Tidak Ada Data
					7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			Tidak Ada Data
					8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha			Tidak Ada Data

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
					jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
				9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota			Tidak Ada Data
				10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			Tidak Ada Data
				11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis			Tidak Ada Data
				12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota			Tidak Ada Data
				13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota			Tidak Ada Data

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			Tidak Ada Data
				15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Keg.		100
				16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			Tidak Ada Data
				17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			Tidak Ada Data
				18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota			Tidak Ada Data
				19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota			Tidak Ada Data
				20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota			Tidak Ada Data

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota			Tidak Ada Data
				22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			Tidak Ada Data
				23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			Tidak Ada Data
				24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			Tidak Ada Kecelakaan
				25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Keg.		100
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	0				
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Tidak Ada Data
					2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Tidak Ada Data

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
					3	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			Tidak Ada Data
					4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			Tidak Ada Data
					5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			Tidak Ada Data
					6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			Tidak Ada Data
					7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			Tidak Ada Data
					8	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi			Tidak Ada Data
					9	Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan			Tidak Ada Data
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			Tidak Ada Data
					2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			Tidak Ada Data
					3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			Tidak Ada Data

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			Tidak Ada Data
				5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			Tidak Ada Data
				6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			Tidak Ada Data
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	100	100	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	3
					2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	48
					3	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Ha	3
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,56	4,57	1	Jumlah rumah di kabupaten/kota	Unit	151474
					2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	48
					3	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	6915
					4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Unit	0
					5	Rasio rumah dan KK	Unit	1,39
					6	Jumlah rumah pembangunan baru	Unit	250
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,25	0,15	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Unit	226
					2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Unit	151.474
					3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Unit	151.474
					4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	Unit	151.474

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Unit		28
				6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Data		Tidak Ada
				7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Pengembang		45
				8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Pengembang		45
				9	Jumlah pengembang yang mendapatkan penyuluhan atau pelatihan	Pengembang		15
E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	5
					2	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	29
					3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	7
					4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	3
					5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedia / Tidak	Tersedia
					6	Tersedianya sarana dan prasarana minimal	Unit	21
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	46,67				

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	748.256	543.219	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%		100
					2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%		100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	748.256	543.219	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%		100
					2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%		100
					3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%		1,40
					4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%		4,25
					5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%		0,59
					6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%		0,59
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	748.256	853	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%		100
					2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%		50,00
					3	Persentase jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana	%		25,00

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
					4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%		83,30
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	48	81,13	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten/kota	Jenis		2
					2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, sarana dan prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Unit		2
					3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedia / Tidak		Tersedia
					4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana/prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tersedia / Tidak		Tidak Ada
					5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jenis		5
					6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar	Orang		33

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
					Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			
				7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang		60
				8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			Tidak Ada Kegiatan
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	21	15.30				
F. Sosial								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Unit	1
					2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Orang	3628
					3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tim	1
					4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Orang	3628
					5	Jumlah kendaraan roda empat yang berakses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Unit	1

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				6	Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang		150
				7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			Tidak Ada
				8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang		150
				9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			Tidak Ada
				10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter			Tidak Ada
				11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Unit		1
				12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			Tidak Ada
				13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah			Tidak Ada
				14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Orang		7

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			Tidak Ada Kegiatan
				16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			Tidak Ada Kegiatan
				17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang		38
				18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang		7
				19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang		2
				20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Orang		5

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
				21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Orang		3	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Orang		515
					2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang		515
					3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Unit		1
					4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Orang		515
					5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang		515
					6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang		6
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
A. Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Ada/ Tidak Ada		Ada
					2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0%		0
					3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Ada/Belum Ada		Belum Ada
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,022		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%		100

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	52,46%		52,46
				3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	25,42%		25,42
				4	Persentase LPK yang terakreditasi	16,67%		16,67
				5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%		100
				6	Jumlah penganggur yang dilatih	240 Orang		240
				7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	99,16%		99,16
				8	Persentase penyerapan lulusan	99,16%		99,16
				9	Lulusan bersertifikat kompetensi	36,97%		36,97
				10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0 Orang		0
				11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0 Orang		0
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	3,804	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	40,42%		40,42
				2	Data tingkat produktivitas total			
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	%	100	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	10,18%		10,18
				2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%		100

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	8 Buah		8
				4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%		100
				5	Persentase perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%		100
				6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2,10%		2,1
				7	Jumlah mogok kerja	Tidak Ada		Tidak Ada
				8	Jumlah penutupan perusahaan	1 Unit		1
				9	Jumlah perselisihan kepentingan	0 Kasus		0
				10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0 Kasus		0
				11	Jumlah perselisihan PHK	10 Kasus		10
				12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	20 Orang		20
				13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	10 Kasus		10
				14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0 LKS		0
				15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	60%		60

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	88,82		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	106 Buah		106
					2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	2.439 Orang		2.439
					3	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	6 Unit		6
					4	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0 Orang		0
					5	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	1 Orang		1
					6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	3 Unit		3
					7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	6 Kerjasama		6
					8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	366 Orang		366
					9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0%		0
					10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0 Orang		0

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0%		0
				12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0%		0
				13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0%		0
				14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0 LTSA		0
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,77	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Lembaga		54
				2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Program		3
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,008	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media		2
				2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Unit		2
				3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%		100

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	Unit		2
				5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	Unit		2
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	0	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Tidak Ada		Tidak Ada
				2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Orang		2
				3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	Lembaga		7
				4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga		2
				5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Program		1
				6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Unit		3
				7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%		100
C. Pangan								

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	399,85		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan			Ada
					2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya			Ya
					3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal			Ya
					4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang			Ya
					5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan			Ada
					6	Tertanganinya kerawanan pangan			Ya
					7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan			Ya
					8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar			Ya
D. Pertanian									
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan	%	100		1	SK Izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota			Tidak Ada Data
					2	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Objek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subjek			Tidak Ada Data
					3	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee			Tidak Ada Data

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				4	Dokumen izin membuka tanah			Tidak Ada Data
				5	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota			Tidak Ada Data
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0					
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	0					
4	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100					
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100					
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100					
E. Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	%	67,68	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks kualitas udara (IKU) b. Indeks kualitas tutupan lahan (ITLH) c. Indeks tutupan hutan (ITH)			50.00 85.58 43.51 0
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	98,18	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota			Ada

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	%	11,11		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota	%		100
					2	Rasio pejabat pengawas LH (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	%		0
					3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	%		0
					4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	%		0
					5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%		0
					6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	%		100
F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,94		1	Penerbitan akta perkawinan	%		100
					2	Penerbitan akta perceraian	%		100
					3	Penerbitan akta kematian	%		96,8
					4	Penyajian data kependudukan	%		100

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
2	Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	16,87					
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,98					
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	11,11					
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
					2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
					3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
					4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,176		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	121
					2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	121

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga		7.042
				4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Ada/Tidak Ada		Tidak Ada
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	TFR (Total Fertility Rate)/Angka Kelahiran Total		2,39		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/Tidak Ada	Ada
					2	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Media	21
					3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	28,04
					4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	%	80
					5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jenis	5
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	93,91		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100
					2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	70

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				3	Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Pokja		54
				4	Persentase pelayanan KB pasca melahirkan	%		52,78
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	16,60	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%		12,34
				2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%		71,47
I. Perhubungan								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,14	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%		100
				2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%		488,8
				3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Ada/Tidak Ada		Tidak Ada
				4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	%		97,8
2	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota			1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	%		97,8
J. Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	83,33	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%		100

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%		100
				3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			Video Conferenc es, Daftar IP Phone, Mail OPD
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015			Tidak Ada Data
				2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal atau situs web yang sesuai standar	%		100
				3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%		100
				4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam	%		40,74

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
					dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			
				5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%		0,11
				6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%		0,41
				7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%		0,26
				8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%		100
				9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%		100
				10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)	%		100
				11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Ada/Tidak Ada		Tidak Ada
				12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%		100

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0%		0
				14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/Tidak Ada		Ada
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	77,23	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten			Tidak Ada Data
				2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)			Tidak Ada Data
				3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan			Tidak Ada Data
K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	11,18	1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		0,064
				2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk			Tidak Ada

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
					koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
				3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			Tidak Ada
				4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			Tidak Ada Data
				5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		0,062
				6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		0,0004
				7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		0,0017
				8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			Tidak Ada

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,094%		0,094
				10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit		24
				11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		4,3
				12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		0,89
				13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			Tidak Ada
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	0,38	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%		0,8176
				2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (OSD)	%		0,0178

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%		0,0013
				4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%		0,0001
				5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%		0,0004
				6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%		0,0018
				7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%		0,0007
L. Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-32,44		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
					2	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
					3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
					4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
					5	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	1
					6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Ada/Tidak Ada		Ada
				8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Izin		9.716
				9	Laporan realisasi penanaman modal	Rp		8.008.088.688.594
				10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Kegiatan		1 Kegiatan
				11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Pelaku Usaha		191 Pelaku Usaha
				12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada		Ada
M. Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		0,00095		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
					2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial		5,104		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	Orang	526
					2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	2

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga		0		1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan – satuan pendidikan	Orang		48
					2	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Ada/Tidak Ada		Tidak Ada
N. Statistik									
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak Ada		Ada
					2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali		2 Kali
					3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			Tidak Ada Data
					4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Kali		2 Kali
					5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS			Tidak Ada Data
					6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral			Tidak Ada Data
					7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral			Tidak Ada Data
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100						
O. Persandian									

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah		0		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan			Tidak Ada Data
					2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip – prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian disbanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah			Tidak Ada Data
					3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah			Tidak Ada Data
					4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan			Tidak Ada Data
P. Kebudayaan									
1	Terlestarnya Cagar Budaya	%	100		1	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Objek		10
					2	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)			Tidak Ada

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				3	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Objek		1
				4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang		3
				5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Ada/ Belum Ada		Belum Ada
				6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Ada/ Belum Ada		Belum Ada
				7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data			Tidak Ada Data
				8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)			Tidak Ada Data
				9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)			Tidak Ada Data
				10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Koleksi		458

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Kunjungan		14.587
					Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum			Tidak Ada Data
				12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			Tidak Ada Data
				13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Ada/Tidak Ada		Ada
				14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Ada/Tidak Ada		Ada
				15	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	Ada/Tidak Ada		Ada
				16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Orang		12 Orang
				17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	Orang		12 Orang
				18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Unit		119
				19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan		5
Q. Perpustakaan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	26,7		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		0,008
					2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		0,007

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
				3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk			0,00005
				4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Ada/ Belum Ada		Belum Ada
				5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			Tidak Ada Data
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		0	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya			Tidak Ada Data
				2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa			Tidak Ada Data
				3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya			Tidak Ada Data
R. Kearsipan								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang saha dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	17,5	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			Tidak Ada Data
				2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			Tidak Ada Data
				3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik			Tidak Ada Data
				4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			Tidak Ada Data
2	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan	%	100	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK			Tidak Ada Data

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
	pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai dengan NSPK			Tidak Ada Data
				3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai dengan NSPK di provinsi			Tidak Ada Data
				4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK			Tidak Ada Data
				5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			Tidak Ada Data
				6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan NSPK			Tidak Ada Data
		Urusan Pilihan						
A. Kelautan dan Perikanan								
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di		2,306		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	907
					2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	%	100

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
	wilayah provinsi (sumber data : one data KKP)			3	Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	IUP		18
				4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	RTP		328
				5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	Ekor		600.370
B. Pariwisata								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-89,34	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Objek Wisata		101 Objek Wisata
				2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Jenis		5 Jenis
				3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jenis		17 Jenis
				4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Orang		191 Orang
				5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Kali		4 Kali
				6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Ada/ Tidak Ada		Tidak Ada
				7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Ada/ Tidak Ada		Tidak Ada

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
				8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%		1,935	
				9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%		25%	
				10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi		3 Lokasi	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-42,41						
3	Tingkat hunian akomodasi	%	12,52						
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,21						
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,06						
C. Pertanian									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		596,46 8		1	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Jenis		31
					2	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis		27
					3	Penerbitan izin usaha pertanian	Ada/ Tidak Ada		Tidak Ada
					4	Persentase prasarana yang digunakan	%		100
					5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten/kota	Ada/ Tidak Ada		Tidak Ada

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-11,11		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%		52,29
D. Kehutanan									
1					1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TAHURA			Tidak perlu diisi
					2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			Tidak perlu diisi
					3	Pemulihan ekosistem pada TAHURA			Tidak perlu diisi
					4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			Tidak perlu diisi
E. Energi dan Sumber Daya Mineral									
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten/kota				1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota			Tidak perlu diisi
F. Perdagangan									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTMT/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		0		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan			Tidak Ada 139 Unit
					2	Persentase penerbitan TDG	%		100
					3	Persentase gudang yang tidak memiliki TDG			78,75
					4				

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
					Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%		100
					a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	%		100
					b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri			
					c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri			
				5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	Ada/ Tidak Ada		Tidak Ada
				6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Ada/ Tidak Ada		Tidak Ada
				7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%		45
				8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%		3,75
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	9,15		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	%	0,0054
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	4,44		1	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	81,00
					2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN		
		2020	2021				2020	2021	
G. Perindustrian									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	22,57		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IKUI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Ada/ Tidak Ada		Tidak Ada
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0		1	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	%		100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	8,70		1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%		32
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0		1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan izin perluasan industri (IPUI) kecil dan menengah yang diterbitkan	Ada/ Tidak Ada		Tidak Ada
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	%	0						

NO.	SATUAN	CAPAIAN		NO	IKK OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	
		2020	2021				2020	2021
	Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota							
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0		1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	Ada/ Tidak Ada		Tidak Ada
H. Transmigrasi								
					1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Unit		2
					2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Unit		2
					3 Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Unit		2

2.5.4 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

Cakupan pelayanan dasar sebagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Pengaturan standar pelayanan dalam kategori minimal dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Tabel 2. 292

Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gowa Tahun 2020-2021 (Permendagri No. 100 Tahun 2018)

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2020	Capaian 2021	Interpretasi
BIDANG PENDIDIKAN					
Pendidikan Dasar					
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	89,77%	93,97%	Belum Tercapai
Pendidikan Kesetaraan					
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	Tercapai
Pendidikan Anak Usia Dini					
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	45,06%	92,69%	Belum Tercapai
BIDANG KESEHATAN					
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2020	Capaian 2021	Interpretasi
4	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
5	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
6	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Balita					
7	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
8	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
9	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
10	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
11	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
12	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	80%	100%	100%	Terlampai
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					
13	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)					
14	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang	100%	100%	100%	Tercapai

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2020	Capaian 2021	Interpretasi
	mendapatkan layanan kesehatan				
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan <i>Immunodeficiency</i>					
15	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	Tercapai
BIDANG PEKERJAAN UMUM					
Penyediaan Pelayanan Air Minum					
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	80,30%	79,60%	Belum Tercapai
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
17	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	74,56%	73,32%	Belum Tercapai
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
18	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	Tercapai
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Hui Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					
19	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	Tidak Dilaksanakan	Tercapai
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
20	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	Tercapai

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2020	Capaian 2021	Interpretasi
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
22	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Tercapai
BIDANG SOSIAL					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas					
25	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	Tercapai
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					
26	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	Tercapai
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar					
27	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	Tercapai
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
28	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	Tercapai
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban					
29	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	Tercapai

2.5.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Umumnya dari 17 TPB yang ada, terdapat 5 TPB yang tingkat pencapaiannya masih dibawah 50%, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 293
Tingkat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. TPB	Tujuan TPB	Kategori				Tingkat Capaian TPB (%)
		A	B	C	D	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	9	11	1	1	40,91%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	7	1	1	2	63,63%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	15	12		5	55,56%
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	5	6		2	45,45%
5	Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	6	5		3	54,55%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	7	5	5		58,33%
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua				2	0,00%

No. TPB	Tujuan TPB	Kategori				Tingkat Capaian TPB (%)
		A	B	C	D	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	6	3		8	66,67%
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	4	1		4	80,00%
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	3	2		4	60,00%
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	3	4		1	42,86%
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2			1	100,00%
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1	1			50,00%
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	1			1	100,00%
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	3	1			75,00%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	8	2		11	80,00%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	2	3	1	9	40,00%

Keterangan :

A : Dilaksanakan dan mencapai target

B : Dilaksanakan dan belum mencapai target

C : Belum dilaksanakan dan belum mencapai target

D : Tidak ada data

Adapun capaian SDGs/TPB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 294
Capaian Target Indikator SDGs/TPB Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
Tujuan 1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat									
1,2	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	7%	8,42%	7,83%	7,53%	7,53%	7,54%	Terlampau	Dinas Sosial
1,3	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95%	NA	70%	84%	84%	NA	NA	Dinas Kesehatan
1,3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Meningkat	NA	9,62%	8,42%	8,42%	NA	NA	Dinas Kesehatan
1,3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Meningkat	61,85%	94,28%	99,96,%	100,00%	100,00%	Tercapai	Dinas Sosial
1,3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Dinas Sosial
1,4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	95,83%	98,76%	100,00%	92,88%	98,90%	Tercapai	Dinas Sosial
1,4	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95%	100%	100%	100%	90,42%	86,82%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
1,4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi	65,00%	99,33%	99,53%	99,56%	96,87%	99,24%	Tercapai	Dinas Kesehatan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
	perempuan menikah usia 15 - 49								
1,4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	57,33%	54,56%	60,58%	77,52%	27,54%	Belum Tercapai	Dinas PU dan PR
1,4	Persentase rumah tangga bersanitasi	100%	50,46%	51,04%	51,23%	51,51%	73,31%	Belum Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1,4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,78%	102,34%	120,73%	104,31%	104,31%	97,62%	Terlampau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1,4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,20%	96,35%	95,64%	99,56%	99,56%	76,94%	Terlampau	Dinas Pendidikan
1,4	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
1,5	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	3	-	59	59	0%	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1,5	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat	1	1	1	1	1	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
1,5	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Dinas Sosial
1,5	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sosial
1,5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	400.000.000	200.000.000	44.457.973.485	44.457.973.485	562.500.000	Belum Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,5	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	1	1	1	1	1	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0,39%	0,32%	0,33%	0,33%	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a	Persentase belanja pendidikan (20%);	Terpenuhi	29,29%	29,17%	29,28%	28,34%	26,60%	Melampaui	Dinas Pendidikan
	Persentase belanja kesehatan (10%)	Terpenuhi	14,85%	15,29%	15,85%	17,27%	20,5	Melampaui	Dinas Kesehatan
Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan									
2,1	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan	Menurun	5%	5%	5%	5%	NA	NA	Dinas Ketahanan Pangan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)								
2,1	Prevalensi balita gizi kurang	Menurun	6,90%	1,73%	5,82%	4,62%	5,47%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
2,1	Penanganan daerah rawan pangan	Menurun	25%	20%	15%	15%	NA	NA	Dinas Kesehatan
2,2	Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. (Data ePPGBM)	Menurun	-	-	8,33%	6,26%	5,11%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
2,2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
2,2	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi	Menurun	0,02%	0,02%	0,07%	0,10%	0,13%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
2,2	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
2,2	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat	44,89%	71,84%	81,10%	81,10%	NA	NA	Dinas Kesehatan
2,2	Konsumsi ikan	Meningkat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,19%	Tercapai	Dinas Kesehatan
2,3	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia									
3,1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Menurun	103	130	103	111	128	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
3,1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	95,83%	98,76%	100,00%	92,88%	98,90%	Tercapai	Dinas Kesehatan
3,1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	85%	73,71	77,26	72,39	51,18	56,23	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Menurun	9	11	5	1	5	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,2	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Menurun	9	11	5	1	5	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	6	3	3	3	5	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,2	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95%	100%	100%	100%	90,42%	86,82%	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
3,3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Menurun	0	0,007	0,013	0,0026	0,0077	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Menurun	195,67	207,47	224,02	123,92	167,71	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,3	Angka kejadian Malaria	Menurun	0	0	0	0	0	Tercapai	Dinas Kesehatan
3,3	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.	18	18	18	18	18	18	Tercapai	Dinas Kesehatan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
3,3	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	30,70%	46,10%	76,90%	76,90%	NA	NA	Dinas Kesehatan
3,3	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	2 Orang	1 Orang	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3,3	Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3,3	Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3,4	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun	0,14%	0,20%	0,23%	0,23%	NA	NA	Dinas Kesehatan
3,4	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun	10,00%	16,00%	34,12%	34,12%	NA	NA	Dinas Kesehatan
3,4	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	47,00%	19,00%	4,38%	4,38%	NA	NA	Dinas Kesehatan
3,4	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Meningkat	2 puskesmas	4 puskesmas	5 puskesmas	5 puskesmas	6 puskesmas	Tercapai	Dinas Kesehatan
3,5	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3,5	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
	15 tahun dalam satu tahun terakhir.								
3,7	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Meningkat	99,33%	99,53%	99,56%	96,87%	99,24%	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkat	15,94%	18,54%	20,33%	19,68%	21,49%	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Menurun	24,06	25,19	46,6	28,04	28,04	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,7	Total Fertility Rate (TFR)	Menurun	2,47	2,47	2	2,39	2,39	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
									Keluarga Berencana
3,8	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun	18,15%	17,94%	16,43%	12,34%	13,88%	Belum Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,8	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	NA	529477 Jiwa	648793 Jiwa	648793 Jiwa	NA	NA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95%	NA	70%	84%	84%	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.a	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	0,14%	0,20%	0,23%	0,23%	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.b	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	80%	85%	85%	85%	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.c	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	Meningkat	0,348	0,463	0,458	0,268	0,28	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
TUJUAN 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua									
4,1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Dinas Kesehatan
4,1	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	84,20%	53,48%	73,48%	76,74%	76,74%	NA	NA	Dinas Pendidikan
4,1	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	81%	34,25%	46,25%	47,32%	47,32%	NA	NA	Dinas Pendidikan
4,1	Angka partisipasi kasar SD/MI	Meningkat	113,26%	110,61%	104,51%	105,88%	107,00%	Tercapai	Dinas Pendidikan
4,1	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	Meningkat	79,58%	92,85%	104,25%	86,23%	84,31%	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
4,1	Angka rata-rata lama sekolah	Meningkat	7,74	7,75	7,97	8,19	8,2	Tercapai	Dinas Pendidikan
4,4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Meningkat	32,00%	42,67%	59,03%	9,02%	52,63%	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
4,5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A;	Meningkat	99,50%	97,92%	95,82%	97,01%	97,62%	Tercapai	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Meningkat	68,21%	59,70%	59,04%	60,50%	60,34%	Tercapai	Dinas Pendidikan
4,6	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	96,10%	97,43%	85%	96,42%	96,42%	NA	NA	Dinas Pendidikan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
4,6	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Meningkat	92%	92,63%	96,42%	96,42%	NA	NA	Dinas Pendidikan
4.a	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
4.c	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	81%	83%	83%	83%	594	Tercapai	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan									
5,1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	16	8	11	12	12	NA	NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,2	Rasio KDRT	Menurun	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
									Perlindungan Anak
5,2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun	0,28	0,19	0,16	0,16	NA	NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,17	0,1	0,09	0,09	NA	NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Menurun	2,00%	1,67%	1,06%	1,06%	2,90%	Belum Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
5,3	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Meningkat	NA	NA	NA	NA	21 tahun	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5,3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Menurun	NA	NA	NA	NA	28,04	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5,5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Meningkat	17,78%	17,78%	28,89%	28,89%	28,89%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,5	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	3,35%	2,25%	1,15%	1,15%	NA	NA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,6	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
5,6	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun	18,15%	17,94%	16,43%	12,34%	13,88%	Belum Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5,6	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	85%	50,10%	50%	53,90%	53,90%	NA	NA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.b	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Meningkat	33,33%	63,16%	88,04%	99,76%	99,78%	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua									
6,1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Meningkat	57,33	54,56	60,58	77,5	27,78%	Belum Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,1	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	118,6 m3/dt	529.5 lt/dt	529.5 lt/dt	529.5 lt/dt	529.5 lt/dt	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	73,54%	75,31%	75,43%	77,43%	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
6,2	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	45%	55%	70%	70%	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Meningkat	50,46%	51,04%	51,23%	51,51%	73,31%	Belum Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,2	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat	119 Desa/Ke l	167 Desa/Kel	167 Desa/Kel	167 Desa/Kel	167 Desa/Kel	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,2	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	112 Desa/Ke l	137 Desa/Kel	153 Desa/Kel	153 Desa/Kel	NA	NA	Dinas Kesehatan
6,2	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat	13 IPAL	38 IPAL	45 IPAL	45 IPAL	NA	NA	Dinas Kesehatan
6,2	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	75 rumah tangga	1120 rumah tangga	350 rumah tangga	350 rumah tangga	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,3	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
6,3	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,3	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Meningkat	65	0,56	-	71,08	50	Belum Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,5	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,5	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,5	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,5	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUJUAN 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua									
7,2	Bauran energi terbarukan.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
7,3	Intensitas energi primer.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua									
8,1	Pertumbuhan PDRB	Meningkat	7,21%	7,14%	7,46%	1,76%	7,26%	Tercapai	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8,1	PDRB per Kapita	Meningkat	22,98 Jt	25,07 Jt	27,1 Jt	27,1 Jt		Tercapai	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8,2	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Meningkat	3,83%	3,66%	3,96%	3,80%	3,86%	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
8,3	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Tenaga Kerja
8,3	Persentase tenaga kerja formal.	51%	33,31%	33,29%	34,88%	34,88%		Belum Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
8,3	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Tenaga Kerja
8,3	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Tenaga Kerja

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
8,5	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	NA	55.162	59.591	59.591		Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
8,5	Tingkat pengangguran terbuka	Menurun	6,14%	4,80%	4,87%	6,44%	4,30%	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
8,5	Tingkat setengah pengangguran.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Tenaga Kerja
8,6	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Tenaga Kerja
8,9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkat	3,88%	3,97%	4,01%	3,57%	2,13%	Belum Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8,9	Kunjungan wisata	Meningkat	199.217 Orang	214.533 Orang	287.687 Orang	150.435 Orang	230.506 Orang	Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8,9	PAD sektor pariwisata	Meningkat	417.351.000	467.965.000	517.149.000		500.490.000	Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8,9	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8,1	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Tenaga Kerja
TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi									
9,1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perhubungan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
9,2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkat	6,72%	6,50%	6,78%	6,28%	6,45%	Tercapai	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9,2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9,3	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%		Belum Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
9,3	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.c	Presentase penduduk yang menggunakan hp/telepon	Meningkat	33,33%	63,16%	88,04%	99,76%	99,78%	Tercapai	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
9.c	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Meningkat	0,25	0,33	0,4	0,49	2,02	Tercapai	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara									
10,1	Indeks Gini	0,36	0,4	0,38	0,35	0,35	0,36	Tercapai	BPS
10,1	Presentase penduduk di atas garis kemiskinan	100%	91,58	92,17	92,47	92,62	92,46	Belum Tercapai	Dinas Sosial
10,1	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sosial

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
10,1	Jumlah desa tertinggal.	0	36	6	0	0	0	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10,1	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat	0	0	0	1	12	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10,2	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		NA	NA	NA	NA			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10,3	Indeks Kebebasan Sipil.		NA	NA	NA	NA			Dinas Sosial
10,3	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	10	10	14	14		Tercapai	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
10,4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Meningkat	NA	9,62%	8,42%	8,42%		Belum Tercapai	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

TUJUAN 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

No	
Tujuan 1. F	
1,2	

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									1,3	I
									1,3	I
									1,3	I
									1,3	I
									1,4	C
									1,4	C
									1,4	A
									1,4	I
									1,4	I
									1,4	A
									1,4	A

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									3,1	C
									3,2	A
									3,2	A
									3,2	A
									3,2	C
									3,3	B
									3,3	B
									3,3	A
									3,3	J
									3,3	B
									3,3	J
									3,3	J
									3,3	J

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									3,4	
									3,4	
									3,4	
									3,4	
									3,5	
									3,5	
									3,7	
									3,7	
									3,7	

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									3,7	A
									3,7	7
									3,8	U
									3,8	J
									3,8	0
									3.a	I
									3.b	I
									3.c	I
TUJUAN 4.										

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									4,1	I P t s r
									4,1	I P
									4,1	I P
									4,1	A
									4,1	A
									4,1	A
									4,4	I P
									4,5	A S
										S
									4,6	I P
									4,6	A t

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
									4.a
									4.c
									TUJUAN 5.
									5,1
									5,2
									5,2

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									5,2	
									5,2	
									5,3	
									5,3	
									5,3	
									5,5	

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									5,5	
									5,6	
									5,6	
									5,6	
									5.b	
									TUJUAN 6.	
									6,1	

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									6,1	
									6,1	
									6,2	
									6,2	
									6,2	
									6,2	
									6,2	
									6,2	

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									6,3	J P c I
									6,3	I s
									6,3	I
									6,5	J S c I
									6,5	J y
									6,5	J P c I
									6,5	I c
									TUJUAN 7.	
									7,2	I

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									7,3	
									TUJUAN 8.	
									8,1	
									8,1	
									8,2	
									8,3	
									8,3	
									8,3	
									8,3	
									8,3	
									8,5	
									8,5	
									8,5	

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									8,6	I
									8,9	I
									8,9	I
									8,9	I
									8,9	J
									8,1	I
									TUJUAN 9.	
									9,1	J
									9,2	I
									9,2	I
									9,3	I
									9,3	I

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
									9.c
									9.c
									TUJUAN 10
									10,1
									10,1
									10,1
									10,1
									10,1
									10,2
									10,3

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									10,3	J c D
									10,4	D P
TUJUAN 11										
									11,1	D
									11,3	J
									11,5	D c
									11,5	D
									11,5	J i
									11,5	J P
									11,6	T c

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
									11.b
									TUJUAN 12
									12,4
									12,5
									12,6
									TUJUAN 13
									13,1
									13,1
									TUJUAN 14
									14,6
									14.b

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									16,2	
									16,2	
									16,2	
									16,5	
									16,6	
									16,6	
									16,6	

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									16,6	
									16,6	
									16,6	
									16,7	
									16,7	
									16,9	

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									16,9	
									16,1	
									16.b	
TUJUAN 17										
									17,1	
									17,1	
									17,1	
									17,8	

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021			
									17,17	J c I
									17,17	J I I c
									17,18	I (c
									17,18	I c u
									17,18	J s S
									17,18	I I
									17,19	T c

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
11,1	Rasio rumah layak huni	Meningkat	15	15,23	15,09	15,33	18,23	Tercapai	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
11,3	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
11,5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11,5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun	9	9	9	9		Belum Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11,5	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	2	3	3	3		Tercapai	Badan Penanggulangan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
									n Bencana Daerah
11,5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	400.000.000	200.000.000	44.457.973.485	44.457.973.485	562.500.000	Belum Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11,6	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Meningkat	72,06%	73,24%	72,65%	NA	NA	Belum Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
11.b	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada	1	1	1	1	1	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan									
12,4	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Meningkat	16,13%	21,62%	24,39%	24,39%		Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
12,5	Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Meningkat	4,68%	4,61%	4,54%	4,56%	4,61%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
12,6	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya									
13,1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	1	1	1	1		Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
13,1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	3	-	59	59	0	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan									
14,6	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Meningkat	100%	100%	96%	88,89%	88,89%	Tidak Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14,b	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Meningkat	4 Orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang	7 Orang	Tercapai	Dinas Perikanan
TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati									
15,1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	Meningkat	58,40%	54,94%	58,60%	58,60%		Tercapai	Dinas Perikanan
15,3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Meningkat	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%		Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
15,6	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Ada	10	10	14	14		Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
15,9	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	1	1	1	1		Belum Tercapai	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
TUJUAN 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level									
16,1	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16,1	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16,1	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16,1	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16,2	Rasio KDRT	Menurun	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
16,2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Menurun	51,58%	100,00%	94,17%	100,00%	100%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16,2	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	0,17%	0,10%	0,09%	0,09%		Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16,5	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
16,6	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	93,35%	95,69%	95,13%	95,13%		Tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16,6	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	Tidak Tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16,6	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat	100% (B)	100% (B)	-	63,51 (B)	63,38 (B)		Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
16,6	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	80%	33,89%	30,60%	45,10%	45,10%		Tercapai	Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
16,6	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	CC	C	CC	CC	CC			Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
16,6	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	90%	NA	59,54%	91,27%	91,27%		Terlampai	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
16,7	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Meningkat	17,78%	17,78%	28,89%	28,89%	28,89%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16,7	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Meningkat	5,70%	5,65%	5,82%	5,82%	5,82%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
16,9	Rasio bayi berakte kelahiran	Meningkat	0,63	1,04	0,99	0,99	0,99	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16,9	Cakupan penerbitan akta kelahiran	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16,1	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.b	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kesbangpol
TUJUAN 17. Menkuatn ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan									
17,1	Persentase PAD terhadap pendapatan	Meningkat	14,99	12,19	12,74	12,82	13,71	Belum Tercapai	Badan Pendapatan Daerah
17,1	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	12%	1,15%	1,00%	1,08%	1,08%		Belum Tercapai	Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
17,1	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	5,83%	6,22%	6,92%	6,92%		Tercapai	Badan Pendapatan Daerah
17,8	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Meningkat	0,25	0,33	0,4	0,49	2,02	Tercapai	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
17,1 7	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
17,1 7	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
17,1 8	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
17,1 8	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
17,1 8	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	20%	20%	20%	20%		Belum Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17,1 8	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17,1 9	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17,1 9	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17,1 9	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.6 Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan

2.6.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Gowa tahun 2017 -2021 diukur melalui indikator kinerja menunjukkan bahwa dari 321 indikator yang diukur, terdapat 104 indikator yang telah melampaui capaian tahun sebelumnya, 80 indikator dengan capaian yang sama dengan tahun sebelumnya dengan rata-rata capaian adalah 100 persen. Sedangkan indikator yang capaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya adalah sebanyak 137 indikator. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, dari 137 indikator tersebut beberapa diantaranya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi terdapat 6 Indikator makro yang diukur. Untuk Indikator Pertumbuhan Ekonomi sendiri mencapai target melebihi yang telah ditetapkan. PDRB per kapita juga mengalami peningkatan. Sejalan dengan tingkat Kemiskinan yang mengalami peningkatan, Indeks Gini juga tidak mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2021. Untuk Indeks Williamson belum dapat diketahui dikarenakan pengukurannya menggunakan data PDRB per Kecamatan, sedangkan pengukuran PDRB per kecamatan belum pernah ada sampai saat ini, sehingga tingkat ketimpangan antar wilayah di lingkup Kabupaten Gowa belum dapat diketahui.

Pada aspek kesejahteraan sosial terdapat 29 Indikator yang diukur. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan Prevelensi Balita Gizi Kurang juga mengalami peningkatan. Disisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melampaui target yang ditetapkan (target 5,77%) untuk tahun 2021. Sedangkan capaian TPT tahun 2021 sebesar 4,3 persen. Ini menandakan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Gowa mengalami penurunan. Walaupun demikian, jumlah penganggur masih terbilang banyak yakni sebesar 17.505 orang yang masih perlu mendapatkan perhatian.

Selain itu, rasio penduduk yang bekerja, laju pertumbuhan PDRB/PDB per tenaga kerja, Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase PAD terhadap Pendapatan, pencapaian Pola Skor Pangan Harapan (PPH), dan penanganan daerah rawan pangan juga mengalami peningkatan. Sejalan dengan peningkatan capaian tersebut, cakupan bina kelompok petani juga mengalami peningkatan. Begitupun dengan kontribusi sektor perdagangan, industri, serta transportasi dan pergudangan terhadap PDRB mengalami peningkatan, yang menandakan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Gowa kian membaik.

2.6.2 Evaluasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Urusan Pendidikan

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, maka Dinas Pendidikan menerapkan Standar Pelayanan Minimal yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Standar Pelayanan Minimal bidang

pendidikan terdiri dari 3 jenis pelayanan dasar dengan jumlah indikator sebanyak 3 indikator.

- a. Permasalahan utama yang dihadapi yaitu :
 - 1) Masih rendahnya akses penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan disebabkan kondisi layanan pendidikan antar kecamatan belum berimbang.
 - 2) Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Solusi yang ditempuh yaitu :
 - 1) Peningkatan akses layanan pendidikan sekaligus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang merata.
 - 2) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu fokus dan indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dinas Kesehatan merupakan organisasi perangkat daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 12 jenis pelayanan dengan 12 indikator utama.

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan kesehatan sebanyak 900 orang yang terdiri dari pejabat struktural, tenaga medis/kesehatan serta pejabat fungsional umum.

- a. Permasalahan yang dihadapi yaitu :
 - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat pentingnya pola hidup sehat.
 - 2) Masih rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang cakupan makanan yang bergizi.
 - 3) Masih tingginya angka kematian bayi.
- b. Solusi yang ditempuh yaitu :
 - 1) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pola hidup sehat.
 - 2) Peningkatan promosi dan preventif bagi masyarakat akan pentingnya makanan yang bergizi bagi usia dini.
 - 3) Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan anak.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menerapkan Standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar dan 2 indikator. Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebanyak 112 orang dengan 29 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

- a. Permasalahan yang dihadapi yaitu :
 - 1) Masih rendahnya pelayanan sanitasi bagi rumah tangga.
 - 2) Belum tersedianya lahan untuk TPU.
 - 3) Masih terdapatnya kawasan permukiman yang minim sarana dan

- prasarana sanitasi yang layak.
- 4) Rendahnya kesadaran/peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase.

b. Solusi yang ditempuh :

- 1) Peningkatan cakupan rumah tangga yang mengakses sanitasi.
- 2) Pengadaan lahan untuk TPU.
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.
- 4) Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan yang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukkan lahan yang berwawasan lingkungan, nyaman, sehat dan aman. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menerapkan Standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar dan 2 indikator.

a. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Jumlah anggaran yang disediakan untuk melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana sangat minim sehingga dengan kondisi dan kebutuhan yang mendesak.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak melaksanakan program peningkatan jalan, jembatan dan atau program lainnya yang berakibat pada relokasi lahan milik masyarakat

5. Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Standar pelayanan minimal bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator.

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
- 2) Sosialisasi Peraturan Daerah yang masih kurang ke pedagang kaki lima dan pedagang asongan.
- 3) Masih terdapatnya bencana kebakaran yang tidak memenuhi respon time disebabkan karena lokasi yang jauh dari pos jaga pemadam kebakaran.

Solusi yang ditempuh :

- 1) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah.
- 2) Membentuk UPT Pemadam Kebakaran di beberapa kecamatan untuk memenuhi respon time.

6. Urusan Sosial

Dinas Sosial merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dan 5 indikator.

- a. Permasalahan yang dihadapi yaitu :
 - 1) Masih rendahnya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
 - 2) Sosialisasi Peraturan Daerah yang masih kurang ke pedagang kaki lima dan pedagang asongan.
 - 3) Masih terdapatnya bencana kebakaran yang tidak memenuhi respon time disebabkan karena lokasi yang jauh dari pos jaga pemadam kebakaran.
- b. Solusi yang ditempuh :
 - 1) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah.
 - 2) Membentuk UPT Pemadam Kebakaran di beberapa kecamatan untuk memenuhi respon time.

2.6.3 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Gowa juga ikut berkomitmen mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dari 188 indikator tersebut telah dilakukan analisis data berdasarkan 4 kategori yaitu :

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebesar 63 indikator (34%);
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target sebesar 37 indikator (20%);
- c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan tidak dilakukan pengumpulan data sebesar 88 indikator (47%);

2.7 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Gowa melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
3. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.7.1 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun 2021

1. Konsistensi Program dan Kegiatan

Konsistensi program dan kegiatan antara RPJMD, RKPD, dan APBD disajikan pada tabel berikutnya. Dapat dilihat adanya adanya konsistensin antara ketiga dokumen perencanaan tersebut antara program dan kegiatannya. Setiap program yang dimasukkan ke dalam RKPD bersumber dari program-program yang ada dalam RPJMD. Begitupun program dan kegiatan dalam APBD diturunkan dari RKPD. Sehingga, nampak tidak ada program maupun kegiatan yang tidak sama atau tidak konsisten.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.298 dibawah.

Tabel 2.295
Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

NO. URUT	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM YANG TIDAK SAMA				JUMLAH KEGIATAN			KEGIATAN YANG SAMA			KEGIATAN YANG TIDAK SAMA		
		RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Dinas Pendidikan	11	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	12	2	2	4	2	2	2	4	0	0	0	0	3	3	9	3	9	9	0	0	0
3	RSUD Syekh Yusuf	5	2	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	5	5	3	5	3	3	0	0	0
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	9	9	10	9	9	9	10	0	0	0	0	13	13	14	13	13	13	0	0	0
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2	5	5	4	5	5	4	2	0	0	0	0	8	8	7	8	7	7	0	0	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3	2	3	2	2	0	0	0
7	Dinas Pemadam Kebakaran	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3	2	3	2	2	0	0	0
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0
9	Dinas Sosial	8	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	7	7	5	7	5	5	0	0	0

NO. UR UT	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM YANG TIDAK SAMA				JUMLAH KEGIATAN			KEGIATAN YANG SAMA			KEGIATAN YANG TIDAK SAMA		
		RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	5	5	3	5	5	3	3	0	0	0	0	9	9	3	9	3	3	0	0	0
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	0	0	0
12	Dinas Ketahanan Pangan	2	4	4	4	2	4	4	2	0	0	0	0	7	7	6	7	6	6	0	0	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	5	10	10	9	5	10	9	5	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	4	4	4	1	4	4	1	0	0	0	0	7	7	6	7	6	6	0	0	0
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan	9	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	5	5	6	5	5	5	0	0	0

NO. UR UT	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM YANG TIDAK SAMA				JUMLAH KEGIATAN			KEGIATAN YANG SAMA			KEGIATAN YANG TIDAK SAMA		
		RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Keluarga Berencana																					
17	Dinas Perhubungan	6	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	10	9	10	9	9	0	0	0
18	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	5	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0
19	Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3	7	7	7	3	7	7	3	0	0	0	0	7	7	8	7	7	7	0	0	0
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	5	5	3	1	5	3	1	0	0	0	0	5	5	3	5	3	3	0	0	0
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	0	0	0
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4	4	2	4	4	2	2	0	0	0	0	10	10	4	10	4	4	0	0	0

NO. UR UT	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM YANG TIDAK SAMA				JUMLAH KEGIATAN			KEGIATAN YANG SAMA			KEGIATAN YANG TIDAK SAMA		
		RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23	Dinas Perikanan	10	3	3	4	3	3	4	4	0	0	0	0	8	8	7	8	7	7	0	0	0
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	7	7	4	7	7	4	4	0	0	0	0	9	9	5	9	5	5	0	0	0
25	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	10	4	4	3	4	4	3	3	0	0	0	0	5	5	4	5	4	4	0	0	0
26	Dinas Peternakan dan Perkebunan	5	6	6	3	6	6	3	3	0	0	0	0	10	10	3	10	3	3	0	0	0
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	0	0	0
28	Sekretariat Daerah	18	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	0	0	0
29	Sekretariat DPRD	3	2	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	6	6	4	6	4	4	0	0	0
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	4	4	2	4	4	2	2	0	0	0	0	10	10	5	10	5	5	0	0	0
31	Badan Pendapatan Daerah	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
32	Badan Pengelolaan	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0

NO. UR UT	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM YANG TIDAK SAMA				JUMLAH KEGIATAN			KEGIATAN YANG SAMA			KEGIATAN YANG TIDAK SAMA		
		RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Keuangan Daerah																					
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	2	2	3	2	2	3	3	0	0	0	0	4	4	7	4	4	4	0	0	0
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	5	4	5	4	4	0	0	0
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	5	5	4	5	5	4	4	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0
36	Inspektorat	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	3	3	2	3	2	2	0	0	0
37	Kecamatan Bontomarannu	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0
38	Kecamatan Tompobulu	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
39	Kecamatan Pallangga	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
40	Kecamatan Bajeng	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	0	0	0

NO. UR UT	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM YANG TIDAK SAMA				JUMLAH KEGIATAN			KEGIATAN YANG SAMA			KEGIATAN YANG TIDAK SAMA		
		RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
41	Kecamatan Biringbulu	2	2	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3	2	3	2	2	0	0	0
42	Kecamatan Barombong	1	2	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	2	2	1	2	1	1	0	0	0
43	Kecamatan Bajeng Barat	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kecamatan Parangloe	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
45	Kecamatan Manuju	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kecamatan Bontonompo Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
47	Kecamatan Parigi	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kecamatan Somba Opu	2	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
49	Kecamatan Pattallassang	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0
50	Kecamatan Bontolempangan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kecamatan Tinggimoncong	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
52	Kecamatan Bungaya	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0

NO. UR UT	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM YANG TIDAK SAMA				JUMLAH KEGIATAN			KEGIATAN YANG SAMA			KEGIATAN YANG TIDAK SAMA		
		RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RKP D & RPJ MD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	APB D & RPJ MD	RK PD	RE NJA	AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD	RE NJA & RK PD	AP BD & RK PD	RE NJA & AP BD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
53	Kecamatan Tombolopao	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
54	Kecamatan Bontonompo	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0

2. Konsistensi Kerangka Pendanaan

APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Pada RKPD Tahun 2021 masih berpedoman pada RPJMD tahun sebelumnya (RPJMD Tahun 2016-2021). Sedangkan pada tahun 2021 sudah mulai dilakukan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya (RPJMD 2021-2026) sehingga masih nampak adanya selisih pendanaan yang cukup besar. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.299.

Tabel 2. 296
Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran				
		RPJMD		RKPD		RENJA		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	RENJA & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.		Rp.	%RPJ MD	Rp.	%RK PD	Rp.	%RPJ MD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6) = (4) - (3)	(7) = (6) - (4)	(8) = (6) - (3)					
1	Dinas Pendidikan	117.834.878.492,92	496.760.863.922	422%	496.760.863.922	100%	591.629.977.232	502%	378.925.985.429,08	94.869.113.310	-	473.795.098.739,08	
2	Dinas Kesehatan	127.116.975.623,47	320.169.009.669	252%	320.169.009.669	100%	455.957.326.975	359%	193.052.034.045,53	135.788.317.306	-	328.840.351.351,53	
3	RSUD Syekh Yusuf	85.380.703.267,35	183.234.123.776	215%	183.234.123.776	100%	104.012.572.001	122%	97.853.420.508,65	79.221.551.775	-	18.631.868.733,65	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.564.118.315,64	349.051.777.663	137%	349.051.777.663	100%	426.004.482.922	167%	93.487.659.347,36	76.952.705.259	-	170.440.364.606,36	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.553.514.214,00	17.785.842.256	391%	17.785.842.256	100%	4.827.743.246	106%	13.232.328.042,00	12.958.099.010	-	274.229.032,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.255.337.500,00	12.474.884.587	293%	12.474.884.587	100%	15.961.959.394	375%	8.219.547.087,00	3.487.074.807	-	11.706.621.894,00	
7	Dinas Pemadam Kebakaran	347.016.000,00	4.686.350.809	1350%	4.686.350.809	100%	3.981.621.295	1147%	4.339.334.809,00	704.729.514	-	3.634.605.295,00	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	489.789.500,00	2.907.437.368	594%	2.907.437.368	100%	27.319.625.034	5578%	2.417.647.868,00	24.412.187.666	-	26.829.835.534,00	
9	Dinas Sosial	4.323.202.900,00	10.157.505.484	235%	10.157.505.484	100%	12.462.976.217	288%	5.834.302.584,00	2.305.470.733	-	8.139.773.317,00	

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Perangkat Daerah	Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran			
		RPJMD	RKPD		RENJA		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	RENJA & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.	Rp.	%RPJMD	Rp.	%RKP PD	Rp.	%RPJMD				
		(3)	(4)		(5)		(6)		(6) = (4) - (3)	(7) = (6) - (4)	(8) = (6) - (3)	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	602.671.400,00	4.256.517.211	706%	4.256.517.211	100%	3.383.392.506	561%	3.653.845.811,00	-873.124.705	-	2.780.721.106,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	855.712.500,00	2.654.916.301	310%	2.654.916.301	100%	2.241.105.107	262%	1.799.203.801,00	-413.811.194	-	1.385.392.607,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	1.219.051.300,00	6.218.360.303	510%	6.218.360.303	100%	4.462.117.024	366%	4.999.309.003,00	-1.756.243.279	-	3.243.065.724,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	3.647.062.250,00	12.629.030.662	346%	12.629.030.662	100%	15.173.283.391	416%	8.981.968.412,00	2.544.252.729	-	11.526.221.141,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.180.470.867,00	13.040.858.697	1105%	13.040.858.697	100%	5.964.155.286	505%	11.860.387.830,00	-7.076.703.411	-	4.783.684.419,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.930.958.776,22	5.319.698.696	108%	5.319.698.696	100%	7.388.518.429	150%	388.739.919,78	2.068.819.733	-	2.457.559.652,78
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.114.533.100,00	5.724.580.994	139%	5.724.580.994	100%	11.481.679.885	279%	1.610.047.894,00	5.757.098.891	-	7.367.146.785,00
17	Dinas Perhubungan	1.355.948.000,00	8.293.500.000	612%	8.293.500.000	100%	28.768.185.739	2122%	6.937.552.000,00	20.474.685.739	-	27.412.237.739,00

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Perangkat Daerah	Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran			
		RPJMD	RKPD		RENJA		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	RENJA & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.	Rp.	%RPJ MD	Rp.	%RK PD	Rp.	%RPJ MD				
		(3)	(4)		(5)		(6)		(6) = (4) - (3)	(7) = (6) - (4)	(8) = (6) - (3)	
18	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	182.688.600,00	10.725.750.327	5871 %	10.725.750.327	100%	9.734.028.212	5328 %	10.543.061.727,00	- 991.722.115	-	9.551.339.612,00
19	Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.965.109.300,00	3.353.458.456	171%	3.353.458.456	100%	2.544.504.776	129%	1.388.349.156,00	- 808.953.680	-	579.395.476,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.500.000,00	4.489.343.080	3325 4%	4.489.343.080	100%	3.558.402.530	2635 9%	4.475.843.080,00	- 930.940.550	-	3.544.902.530,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.002.699.500,00	5.766.186.305	192%	5.766.186.305	100%	7.080.633.558	236%	2.763.486.805,00	1.314.447.253	-	4.077.934.058,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	749.741.500,00	4.046.833.155	540%	4.046.833.155	100%	11.926.208.759	1591 %	3.297.091.655,00	7.879.375.604	-	11.176.467.259,00
23	Dinas Perikanan	7.357.249.600,00	33.493.900.947	455%	33.493.900.947	100%	4.603.580.304	63%	26.136.651.347,00	- 28.890.320.643	-	2.753.669.296,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.669.574.363,85	8.395.268.798	314%	8.395.268.798	100%	4.717.045.497	177%	5.725.694.434,15	- 3.678.223.301	-	2.047.471.133,15
25	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	19.743.375.068,30	15.292.741.962	77%	15.292.741.962	100%	15.285.869.876	77%	- 4.450.633.106,30	- 6.872.086	-	4.457.505.192,30
26	Dinas Peternakan dan Perkebunan	5.821.428.324,27	7.314.929.112	126%	7.314.929.112	100%	10.577.870.332	182%	1.493.500.787,73	3.262.941.220	-	4.756.442.007,73

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Perangkat Daerah	Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran			
		RPJMD	RKPD		RENJA		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	RENJA & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.	Rp.	%RPJMD	Rp.	%RKP PD	Rp.	%RPJMD				
		(3)	(4)		(5)		(6)		(6) = (4) - (3)	(7) = (6) - (4)	(8) = (6) - (3)	
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.742.322.535,97	36.990.127.076	423%	36.990.127.076	100%	14.893.538.440	170%	28.247.804.540,03	-22.096.588.636	-	6.151.215.904,03
28	Sekretariat Daerah	6.717.900.534,00	52.387.000.000	780%	52.387.000.000	100%	53.908.346.626	802%	45.669.099.466,00	1.521.346.626	-	47.190.446.092,00
29	Sekretariat DPRD	12.742.327.700,00	17.848.400.774	140%	17.848.400.774	100%	58.409.646.002	458%	5.106.073.074,00	40.561.245.228	-	45.667.318.302,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.672.947.850,00	6.364.214.012	238%	6.364.214.012	100%	4.933.047.634	185%	3.691.266.162,00	-1.431.166.378	-	2.260.099.784,00
31	Badan Pendapatan Daerah		13.793.027.217	#DIV/0!	13.793.027.217	100%	12.688.934.735	#DIV/0!	13.793.027.217,00	-1.104.092.482	-	12.688.934.735,00
32	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.482.494.260,00	11.302.311.829	206%	11.302.311.829	100%	282.529.480.671	5153%	5.819.817.569,00	271.227.168.842	-	277.046.986.411,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.751.099.000,00	6.811.315.744	389%	6.811.315.744	100%	6.040.055.930	345%	5.060.216.744,00	-771.259.814	-	4.288.956.930,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	200.000.000,00	2.590.560.716	1295%	2.590.560.716	100%	1.951.677.882	976%	2.390.560.716,00	-638.882.834	-	1.751.677.882,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	896.579.624,00	2.792.672.253	311%	2.792.672.253	100%	4.343.730.588	484%	1.896.092.629,00	1.551.058.335	-	3.447.150.964,00
36	Inspektorat	1.727.820.000,00	7.399.476.098	428%	7.399.476.098	100%	7.951.308.828	460%	5.671.656.098,00	551.832.730	-	6.223.488.828,00

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Perangkat Daerah	Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran			
		RPJMD	RKPD		RENJA		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	RENJA & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.	Rp.	%RPJMD	Rp.	%RKP PD	Rp.	%RPJMD				
		(3)	(4)		(5)		(6)		(6) = (4) - (3)	(7) = (6) - (4)	(8) = (6) - (3)	
37	Kecamatan Bontomarannu	146.613.500,00	5.225.693.600	3564%	5.225.693.600	100%	4.946.372.122	3374%	5.079.080.100,00	-279.321.478	-	4.799.758.622,00
38	Kecamatan Tompobulu	209.920.000,00	2.107.873.015	1004%	2.107.873.015	100%	3.169.060.977	1510%	1.897.953.015,00	1.061.187.962	-	2.959.140.977,00
39	Kecamatan Pallangga	218.750.000,00	7.137.555.931	3263%	7.137.555.931	100%	6.682.199.959	3055%	6.918.805.931,00	-455.355.972	-	6.463.449.959,00
40	Kecamatan Bajeng	208.750.000,00	6.562.446.562	3144%	6.562.446.562	100%	6.269.876.988	3004%	6.353.696.562,00	-292.569.574	-	6.061.126.988,00
41	Kecamatan Biringbulu	215.622.000,00	3.931.767.434	1823%	3.931.767.434	100%	3.463.061.685	1606%	3.716.145.434,00	-468.705.749	-	3.247.439.685,00
42	Kecamatan Barombong	142.081.281,00	3.480.005.453	2449%	3.480.005.453	100%	3.776.914.799	2658%	3.337.924.172,00	296.909.346	-	3.634.833.518,00
43	Kecamatan Bajeng Barat	191.000.000,00	1.477.000.000	773%	1.477.000.000	100%	1.190.579.667	623%	1.286.000.000,00	-286.420.333	-	999.579.667,00
44	Kecamatan Parangloe	150.000.000,00	4.218.500.000	2812%	4.218.500.000	100%	3.754.913.113	2503%	4.068.500.000,00	-463.586.887	-	3.604.913.113,00
45	Kecamatan Manuju	204.400.000,00	1.298.670.929	635%	1.298.670.929	100%	1.248.141.838	611%	1.094.270.929,00	-50.529.091	-	1.043.741.838,00
46	Kecamatan Bontonompo Selatan	135.940.000,00	2.690.000.000	1979%	2.690.000.000	100%	2.740.910.040	2016%	2.554.060.000,00	50.910.040	-	2.604.970.040,00
47	Kecamatan Parigi	153.265.000,00	1.153.259.762	752%	1.153.259.762	100%	941.171.065	614%	999.994.762,00	-212.088.697	-	787.906.065,00
48	Kecamatan Somba Opu	127.655.000,00	17.938.199.605	14052%	17.938.199.605	100%	17.521.227.745	13725%	17.810.544.605,00	-416.971.860	-	17.393.572.745,00
49	Kecamatan Pattallassang	155.720.000,00	1.721.000.000	1105%	1.721.000.000	100%	1.407.076.897	904%	1.565.280.000,00	-313.923.103	-	1.251.356.897,00

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Perangkat Daerah	Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran			
		RPJMD	RKPD		RENJA		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	RENJA & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.	Rp.	%RPJMD	Rp.	%RKPD	Rp.	%RPJMD				
		(3)	(4)		(5)		(6)		(6) = (4) - (3)	(7) = (6) - (4)	(8) = (6) - (3)	
50	Kecamatan Bontolempangan	146.149.500,00	1.352.836.905	926%	1.352.836.905	100%	1.273.936.955	872%	1.206.687.405,00	-78.899.950	-	1.127.787.455,00
51	Kecamatan Tinggimoncong	202.700.000,00	7.304.080.000	3603%	7.304.080.000	100%	7.250.385.981	3577%	7.101.380.000,00	-53.694.019	-	7.047.685.981,00
52	Kecamatan Bungaya	217.254.700,00	3.387.719.726	1559%	3.387.719.726	100%	3.513.164.091	1617%	3.170.465.026,00	125.444.365	-	3.295.909.391,00
53	Kecamatan Tombolopao	189.500.000,00	2.770.000.000	1462%	2.770.000.000	100%	2.172.565.741	1146%	2.580.500.000,00	-597.434.259	-	1.983.065.741,00
54	Kecamatan Bontonompo	162.500.000,00	5.648.300.000	3476%	5.648.300.000	100%	5.168.034.046	3180%	5.485.800.000,00	-480.265.954	-	5.005.534.046,00

3. Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2021

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dipengaruhi oleh konsistensinya dalam penganggaran. Semakin banyak kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD, maka semakin kecil pula tingkat capaian RKPD. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan menggunakan tabel sebagaimana terlampir, diperoleh capaian kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2. 297
Capaian Kegiatan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2021

NO. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Tidak dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100 %	Capaian= 100%	Capaian> 100%	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan	12	0	12	0	0	12	0	100	90,1	ST	T
2	Dinas Kesehatan	18	0	18	0	10	8	0	95	77,3	ST	T
3	Rumah Sakit Syekh Yusuf	12	2	12	2	0	10	0	100	97,7	ST	ST
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	3	21	3	0	18	0	100	71,4	ST	ST
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14	2	14	2	0	12	0	100	92,32	ST	ST
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8	1	8	1	0	7	0	100	98	ST	ST
7	Dinas Pemadam Kebakaran	9	1	9	1	2	5	1	107	89,97	ST	T
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	0	9	0	0	9	0	100	95,6	ST	ST
9	Dinas Sosial	14	6	14	6	3	5	0	97,97	91	ST	ST
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	6	11	6	0	5	0	100	91,1	ST	ST
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13	0	13	0	0	13	0	100	92,86	ST	ST
12	Dinas Ketahanan Pangan	13	2	13	2	7	4	0	99,98	95,84	ST	ST
13	Dinas Lingkungan Hidup	18	0	18	0	0	18	0	100	97,57	ST	ST

NO. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Tidak dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100 %	Capaian= 100%	Capaian> 100%	K	Rp.	K	Rp.
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	1	12	1	0	11	0	100	95,26	ST	ST
15	Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	0	9	0	1	8	0	99,24	90,46	ST	T
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13	0	13	0	3	10	0	99,47	89,74	ST	T
17	Dinas Perhubungan	16	1	16	1	1	14	0	99,37	97,61	ST	ST
18	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	13	0	13	0	3	10	0	95	76	ST	S
19	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	15	0	15	0	0	15	0	100	97	ST	ST
20	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu	11	2	11	2	2	7	0	100	89,57	ST	T
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	10	0	10	0	0	10	0	100	100	ST	ST
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	6	10	6	0	4	0	100	95,70	ST	ST
23	Dinas Perikanan	13	1	13	1	0	12	0	100	88	ST	T
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10	4	10	4	1	5	0	98	94,83	ST	ST
25	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	10	1	10	1	0	9	0	100	92	ST	ST
26	Dmas Peternakan dan Perkebunan	7	0	7	0	0	7	0	100	95,05	ST	ST

NO. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Tidak dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100 %	Capaian= 100%	Capaian> 100%	K	Rp.	K	Rp.
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	18	0	18	0	2	16	0	95	81	ST	T
28	Sekretariat Daerah	19	0	19	0	0	19	0	100	98	ST	ST
29	Sekretariat DPRD	12	2	12	2	0	10	0	100	98	ST	ST
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	5	12	5	0	7	0	100	86,18	ST	T
31	Badan Pendapatan Daerah	7	0	7	0	0	7	0	101,5	85,37	ST	T
32	Badan Pengelolah Keuangan Daerah	12	0	12	0	0	12	0	96	88,67	ST	T
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	12	0	12	0	5	7	0	86	86,12	T	T
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	10	1	10	1	0	8	1	101	98	ST	ST
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	0	11	0	0	11	0	100	95,55	ST	ST
36	Inspektorat	10	1	10	1	0	9	0	100	94,24	ST	ST
37	Kecamatan Bontomarannu	5	0	5	0	0	5	0	100	85,24	ST	T
38	Kecamatan Tompobulu	6	0	6	0	0	6	0	100	83,32	ST	T
39	Kecamatan Pallangga	5	0	5	0	0	5	0	100	93,22	ST	ST
40	Kecamatan Bajeng	7	0	7	0	0	7	0	100	92,12	ST	ST
41	Kecamatan Biringbulu	7	1	7	1	0	6	0	100	93	ST	ST
42	Kecamatan Barombong	5	1	5	1	0	4	0	100	95,29	ST	ST

NO. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Tidak dianggarkan di APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100 %	Capaian= 100%	Capaian> 100%	K	Rp.	K	Rp.
43	Kecamatan Bajeng Barat	5	0	5	0	0	5	0	100	89,2	ST	T
44	Kecamatan Parangloe	6	0	6	0	0	6	0	100	98	ST	ST
45	Kecamatan Manuju	6	0	6	0	0	6	0	100	99,02	ST	ST
46	Kecamatan Bontonompo Selatan	4	0	4	0	0	4	0	100	92,59	ST	ST
47	Kecamatan Parigi	4	0	4	0	0	4	0	100	85,24	ST	T
48	Kecamatan Somba Opu	4	0	4	0	0	4	0	100	95,29	ST	ST
49	Kecamatan Pattallassang	4	0	4	0	0	4	0	100	89,2	ST	T
50	Kecamatan Bontolempangan	5	0	5	0	0	5	0	100	94,83	ST	ST
51	Kecamatan Tinggimoncong	5	0	5	0	0	5	0	100	92	ST	ST
52	Kecamatan Bungaya	5	0	5	0	0	5	0	100	95,05	ST	ST
53	Kecamatan Tombolopao	5	0	5	0	0	5	0	100	96,87	ST	ST
54	Kecamatan Bontonompo	7	0	7	0	0	7	0	100	99,4	ST	ST
Rata-Rata Capaian		539	50	539	50	40	447	2	99,45	91,84	ST	ST

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah 539 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa dengan jumlah indikator seluruhnya juga sebanyak 539 indikator. Hal ini berarti tiap-tiap kegiatan masing-masing memiliki 1 (satu) indikator. Dari semua kegiatan di RKPD, sebanyak 50 kegiatan tidak dianggarkan dalam APBD.

Tabel 2. 298
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja1 tahun
1.	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2.	Tinggi	T	76 % ≤ 90%
3.	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4.	Rendah	R	66 % ≤ 75 %
5.	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber :Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja RKPD Kabupaten Gowa pada Tahun 2021 sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan RKPD dengan capaian 0% persen sebanyak 50 kegiatan atau sebesar 9,3% dari total jumlah kegiatan RKPD. Tidak adanya capaian karena kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam RKPD sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.
2. Jumlah kegiatan dengan capaian di bawah 100% sebanyak 40 kegiatan (7,4%)
3. Jumlah kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100% sebanyak 447 kegiatan atau 82,9% dari total kegiatan RKPD.
4. Jumlah kegiatan dengan kinerja di atas 100% sebanyak 2 (dua) kegiatan saja.
5. Rata-rata capaian kinerja untuk semua SKPD di Kabupaten Gowa adalah sebesar 99,45%, sedangkan capaian realisasi kinerjanya sebesar 91,84% dengan predikat sangat tinggi untuk keduanya.

2.7.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun Berjalan

RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, belum terdapat hasil pelaksanaan RPJMD s/d tahun lalu yang akan dianalisis pencapaiannya. Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD, sebelum menyajikan capaian RKPD, perlu dikemukakan bagaimana komposisi program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD (yang disebut program prioritas) dan program perangkat daerah (yang disebut program strategis) serta program rutin yang menunjang pencapaian sasaran tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 299
Komposisi Program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Program RKPD 2022			Program RPJMD 2021-2026		
		Prioritas	Program Strategis-PD	Rutin	Prioritas	Program Strategis PD	Rutin
1	Dinas Pendidikan	2	2	1	5	5	1
2	Dinas Kesehatan	2	2	1	4	4	1
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	10	1	10	10	1
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4	4	1	8	8	1
7	Dinas Pemadam Kebakaran	1	1	1	1	1	1
9	Dinas Sosial	1	1	1	5	5	1
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	3	1	5	5	1
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	1	6	6	1
13	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	1	10	10	1
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	4	1	4	4	1
19	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2	2	1	7	7	1
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	1	6	6	1
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	1	1	3	3	1
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	4	4	1
23	Dinas Perikanan	1	1	1	4	4	1
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	1	1	8	8	1
25	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	2	2	1	5	5	1
26	Dinas Peternakan dan Perkebunan	1	1	1	6	6	1

No.	Perangkat Daerah	Program RKPD 2022			Program RPJMD 2021-2026		
		Prioritas	Program Strategis- PD	Rutin	Prioritas	Program Strategis PD	Rutin
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2	2	1	7	7	1
28	Sekretariat Daerah	1	1	1	3	3	1
29	Sekretariat DPRD			1	2	2	1
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	1	2	2	1
31	Badan Pendapatan Daerah	1	1	1	1	1	1
32	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	2	1	2	2	1
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	1	2	2	1
36	Inspektorat	1	1	1	1	1	1
Total		61	61	26	121	121	26

Pada tabel diatas terlihat banyaknya selisih antara program strategis perangkat daerah antara RKPD dan RPJMD di tahun 2022. Pada RPJMD 2021-2026 ditetapkan 121 program strategis yang terbagi-bagi ke tiap SKPD. Namun di tahun 2022 hanya bisa direncanakan sebanyak 61. Salah satu pertimbangannya adalah adanya keterbatasan anggaran.

2.8 Permasalahan Pembangunan

2.8.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran pembangunan daerah

6. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Gowa ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Perkembangan IPM Kabupaten Gowa selama periode 5 tahun terakhir memperlihatkan trend peningkatan. Data IPM Kabupaten Gowa tahun 2017 sebesar 68,33 berada pada kategori menengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga di tahun 2021 sebesar 70,29 berada pada kategori tinggi. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Sulawesi Selatan sebesar 72,24. Capaian IPM Kabupaten Gowa ini secara relatif di tahun 2021 berada di urutan 12 dari 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Setingkat lebih tinggi dibandingkan urutan tahun 2020.

Penyebab masih rendahnya IPM Kabupaten Gowa adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah yaitu hanya 8,20 tahun, lamanya sekolah hanya sampai kelas VIII (kelas 2 SMP). Beberapa hal yang menjadi akar

masalah dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gowa yaitu rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah masih kurang, Jumlah guru pendidik yang telah bersertifikasi belum mencapai target, Masih kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Bebas IT dalam mendukung proses belajar mengajar, serta Pandemi Covid 19 yang belum berakhir sehingga pembelajaran terhadap siswa tidak maksimal.

Pembangunan sektor kesehatan memperlihatkan bahwa angka umur harapan hidup kabupaten Gowa tahun 2021 sebesar 70,45. Umur Harapan Hidup Sulawesi Selatan yang masih rendah menunjukkan kinerja pembangunan sektor kesehatan yang belum maksimal dikarenakan oleh pandemi covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun yang secara langsung berdampak pada perubahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan, sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan, persalinan yang aman pertumbuhan balita, kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka peningkatan gizi, serta kurangnya informasi tentang pengasuhan anak dan kesehatan calon ibu.

Sementara itu tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Gowa yang masih tergolong rendah menjadi salah satu faktor rendahnya pembangunan manusia. Daya beli masyarakat yang disetarakan dengan pengeluaran perkapita sangat tergantung pada tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Data terakhir menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Gowa tahun 2021 yang diukur dari besaran pengeluaran perkapita pertahun masih lebih rendah dari capaian Sulawesi Selatan pada tahun yang sama, hal ini disebabkan karena pendapatan masyarakat masih rendah.

Dari pembangunan perspektif gender diukur berdasarkan beberapa indikator, diantaranya adalah Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dimana IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. IPG di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai IPG nya masih jauh lebih rendah dengan IPG Provinsi dan Nasional. Hal ini disebabkan karena IPG di kabupaten Gowa terjadi kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan pada kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Sementara itu Perkembangan IDG Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir yaitu sebesar 78,31 ditahun 2019 menurun sebesar 77,97 ditahun 2020 dan kembali meningkat ditahun 2021 sebesar 79,71. Angka ini berada di atas angka IDG Sulawesi Selatan (74,76). Kenaikan angka IDG Kabupaten Gowa secara umum disebabkan oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuk IDG di tahun 2021. IDG diperoleh dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan, dengan demikian IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Perkembangan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Gowa di tahun 2019 angka indeks telah mencapai 48,45 persen

yang masih lebih rendah dengan rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 53,02 persen yang artinya tenaga profesional di Kabupaten Gowa yang berperan pula sebagai pengambil keputusan masih perlu ditingkatkan hingga mengalami kesetaraan gender. Perempuan di Kabupaten Gowa mampu mengejar ketertinggalan dari laki-laki dalam sektor publik. Kemampuan perempuan dalam penciptaan pendapatan di Kabupaten Gowa secara trend terus mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 34,09 persen (Sulawesi Selatan = 32,44 persen) artinya sumbangan pendapatan perempuan cenderung lebih baik di Sulawesi Selatan. Keterlibatan perempuan dalam parlemen cukup berpengaruh terhadap ketimpangan IDG. Kabupaten Gowa sebagai kabupaten dengan nilai IDG 78,31 persen, memiliki angka indeks keterlibatan perempuan dalam parlemen yang cukup baik sebesar 28,89 persen masih diatas rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 27,71 persen.

7. Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Masalah ketimpangan pendapatan memang bukan isu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Nilai indeks gini Kabupaten Gowa tahun 2020 sebesar 0,345 meningkat menjadi 0,362 ditahun 2021. Meskipun peningkatannya kurang signifikan, namun tetap menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Nilai indeks gini Kabupaten Gowa masih berada pada kategori sedang (Moderat).

8. Masih tingginya angka kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Gowa. Terlebih di tahun 2021 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan adalah karena adanya Pandemi Covid-19 yang berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat. Walaupun berbagai upaya yang telah dilakukan seperti pemberian bantuan pada PMKS, namun hal ini belum merupakan solusi. Salah satu permasalahannya adalah data penduduk miskin belum sepenuhnya akurat sehingga sasaran pemberian bantuan belum sepenuhnya maksimal.

Pengentasan kemiskinan memang tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang tergolong besar sebesar 773.315 jiwa (BPS 2022) sedangkan data masyarakat rentan Kabupaten Gowa sebesar 58.660 jiwa. Hal ini berarti jumlah masyarakat miskin atau rentan di Kabupaten Gowa sebesar 7,54% dari total jumlah penduduk yang ada. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa memang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemberian layanan Kesehatan dasar berupa bantuan KIS dengan dana bersumber dari APBD bagi 122.487 jiwa dan bantuan sosial bagi 26.638 jiwa penduduk. Selain itu, 97.911 jiwa diberikan bantuan sosial yang dana nya bersumber dari APBN berupa bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT)

dan bantuan sosial tunai (BST). Disamping itu pendataan data keluarga Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 114 miskin belum sepenuhnya akurat sehingga sering adanya penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Penyebab lain meningkatnya kemiskinan adalah tingkat pengangguran yang masih tinggi yang dikarenakan oleh banyaknya pekerja yang di PHK, adanya aturan pemerintah tentang PSBB dan Social Distancing, Pendidikan angkatan kerja yang rendah, program pelatihan vokasi yang belum maksimal, berkurangnya keahlian angkatan kerja akibat perkembangan pesat teknologi, serta perkembangan IT yang sangat pesat. Selain itu, Jumlah lapangan kerja yang tersedia yang jauh lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja dan terkadang kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja yang tersedia.

9. Masih tingginya tingkat pengangguran

Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Gowa terutama disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Disamping itu ketersediaan Pendidikan vokasional belum mampu menciptakan *link and macth* antara kurikulum vokasional dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, ketersediaan kesempatan kerja dari pengelolaan kegiatan dan sektor ekonomi yang masih berorientasi padat modal dari pada padat karya dan adanya kondisi ekonomi nasional dan daerah yang tidak stabil.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang penting karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diantaranya aspek sosial dan aspek ekonomi. Tujuan memperluas kesempatan kerja adalah penting, bukan saja karena kesempatan kerja memiliki nilai ekonomis, melainkan juga karena mengandung nilai kemanusiaan dan menumbuhkan rasa harga diri. Kebijakan kesempatan kerja tidak semata-mata ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga penggunaan tenaga kerja secara penuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pengalaman membuktikan bahwa banyak gejolak sosial seperti meningkatnya angka kriminal. Untuk mengantisipasi hal itu, maka setiap upaya pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Secara detail, rumusan masalah pokok, masalah, dan akar masalah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 300
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa

No	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Indeks Pendidikan (tahun)	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Masih rendahnya akses, kualitas, serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, kualitas guru, mutu proses pembelajaran serta budaya literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang ▪ Kuantitas dan kurang meratanya penyebaran guru antar wilayah ▪ Ketersediaan sarana dan perpustakaan Perpustakaan yang masih kurang ▪ Masih minimnya pengembangan kurikulum berbasis Pendidikan Karakter dan teknologi informasi ▪ Masih rendahnya kualitas SDM bidang pendidikan ▪ Menurunnya capaian APK SMP ▪ Menurunnya Angka Pendidikan SD dan SMP; ▪ Menurunnya % guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
2	Indeks Kesehatan (tahun)	Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya Angka Harapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya kesejahteraan penduduk ▪ Rendahnya derajat Kesehatan ▪ Menurunnya prevalensi kekurangan gizi ▪ Masih tingginya kasus gizi buruk balita

No	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya asupan pangan dan gizi seimbang ▪ Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) ▪ Belum mencukupi dan meratanya tenaga Kesehatan ▪ menurunnya rasio tenaga medis ▪ menurunnya cakupan pertolongan oleh tenaga Kesehatan ▪ menurunnya cakupan pelayanan Kesehatan masyarakat miskin
5	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (%)	Melambatnya pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan dan Industri dan Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Pemerataan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum merata ke setiap golongan miskin ▪ Rendahnya untuk mengembangkan nilai tambah dari hasil sumber daya alam ▪ Pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan Produk hasil-hasil ekonomi ke seluruh penduduk, ▪ Masih rendahnya pendapatan masyarakat ▪ Adanya kontraksi dari sektor pertanian dan industri pengolahan yang

No	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				<p>mempengaruhi nilai PDRB.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kurang optimalnya peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan; ▪ Kurangnya Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan sektor unggulan
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran yang masih meningkat	tingginya jumlah penduduk miskin yang menganggur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya daya beli penduduk ▪ Tingkat produktifitas masyarakat yang rendah. ▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus meningkat ▪ Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki ▪ Rendahnya Pemberian skills pada usia produktif agar dapat mandiri sektor sektor usaha mikro, sektor usaha kecil, dan sektor

No	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				usaha menengah, dapat menjadi penyelamat krisis ekonomi seperti Covid -19
7	Angka Kemiskinan (%)	Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan	Masih tingginya ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kesenjangan pembangunan antar daerah, desa dan kota masih tinggi ▪ Adanya kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar sektor serta antar daerah.
8	Gini Ratio (Nilai)	Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Masih tingginya ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kesenjangan pembangunan antar daerah, desa dan kota masih tinggi ▪ Adanya kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar sektor serta antar daerah.
9	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	Belum optimalnya kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat	Belum berkualitasnya ketersediaan infrastruktur dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ adanya kesenjangan antar Kecamatan yaitu pemenuhan perumahan dan pemukiman. Rumah atau tempat tinggal belum merata. ▪ Kurangnya konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan

No	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
10	Indeks Desa Membangu n (Nilai)	Belum optimalnya infrastruktu r sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal. ▪ Belum adanya kerjasama antar Desa yang telah memiliki legal standing ▪ Administrasi Pemerintahan Desa ▪ Belum Optimal.
11	Indeks Pelayanan Publik (Nilai Kategori)	Belum optimalnya pelayanan publik	Belum terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur pelayanan publik yangb belum terintegrasi ▪ Aksesibilitas Sistem informasi Pelayanan publik yang belum optimal ▪ Penetrasi penggunaan teknologi masih rendah. ▪ Mekanisme pelaporan dan evaluasi masih konevensional atau belum efektif diimplementasikan
12	Nilai LPPD (Nilai Kategori)	Tata Kelola pemerintah anyang	Masih Belum efektifnya kualitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur.

No	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		belum optimal	penyelenggara kinerja Instansi pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Penataan dan penguatan kelembagaan. ▪ Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah. ▪ Kurang optimalnya pengawasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

2.8.2 Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.8.2.1 Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Masih rendahnya akses penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan disebabkan kondisi layanan pendidikan antar kecamatan belum berimbang.
- b. Masih rendahnya akses penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan disebabkan kondisi layanan pendidikan antar kecamatan belum berimbang.
- c. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah masih kurang.
- d. Jumlah guru pendidik yang telah bersertifikasi belum mencapai target.
- e. Masih kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis IT dalam mendukung proses belajar mengajar.
- f. Adanya Pandemi Covid 19 sehingga pembelajaran terhadap siswa tidak maksimal.

2. Kesehatan

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat pentingnya pola hidup sehat.
- b. Masih rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang cakupan makanan yang bergizi.
- c. Masih tingginya angka kematian bayi

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya pelayanan sanitasi bagi rumah tangga.
- b. Belum tersedianya lahan untuk TPU.
- c. Masih terdapatnya kawasan permukiman yang minim sarana dan

- d. Rendahnya kesadaran/peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase.
 - e. Adanya pemotongan anggaran untuk upaya pencegahan penyebaran Covid 19 sehingga target yang ditentukan tidak mencapai target dan penambahan penduduk tidak bisa diimbangi dengan jumlah perizinan IMB yang dikeluarkan pemerintah daerah.
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
- a. Masih rendahnya kualitas rumah di Kabupaten Gowa
 - b. Masih terdapatnya kawasan permukiman yang minim sarana dan prasarana sanitasi yang layak.
 - c. Rendahnya kesadaran/peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas umum.
- 5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
- a. Masih rendahnya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
 - b. Sosialisasi Peraturan Daerah yang masih kurang ke pedagang kaki lima dan pedagang asongan.
 - c. Masih terdapatnya bencana kebakaran yang tidak memenuhi respon time disebabkan karena lokasi yang jauh dari pos jaga pemadam kebakaran.
- 6. Urusan Sosial**
- a. Masih relatif tingginya angka kemiskinan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan masalah sosial lainnya.
 - b. Masih relatif tingginya angka kemiskinan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan masalah sosial lainnya.
- 2.8.2.2 Urusan Pemerintah Bukan Pelayanan Dasar**
- 1. Tenaga Kerja**
- a. Banyaknya pekerja di PHK.
 - b. Adanya aturan pemerintah tentang PSBB dan social Distancing.
 - c. Pendidikan Angkatan kerja yang rendah
 - d. Program pelatihan vokasi yang belum maksimal.
 - e. Berkurangnya keahlian Angkatan kerja akibat perkembangan pesat teknologi
 - f. Jumlah lapangan kerja yang tersedia yang jauh lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja dan terkadang kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja yang tersedia.
 - g. Masih dibutuhkan suntikan dana dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- a. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
 - b. Belum Optimalnya Jumlah dan Kualitas Tempat layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
 - c. Persepsi APH terhadap Peraturan Perundang – Undangan terkait TPPO masih belum bersinergi.

- d. Pokja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point Belum Berjalan Secara Optimal.
 - e. Belum Tercapainya Kabupaten Layak Anak
 - f. Belum Terbentuknya Pusat Layanan Informasi Sahabat Anak
3. **Pangan**
- a. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama;
 - b. Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein perkapita;
 - c. Kurangnya SDM petani sehingga hasil produksi pertanian lebih maksimal;
 - d. kuantitas bantuan sarana dan prasarana masih belum bisa memenuhi seluruh permintaan dari kelompok tani karena adanya keterbatasan anggaran.
4. **Pertanahan**
- a. Letak Kabupaten Gowa yang berbatasan dengan Kota Makassar sehingga banyak pendatang dari kabupaten tetangga yang membangun gubuk gubuk tanpa memiliki alas hak atas lahan tersebut, karena menjadi persyaratan dalam peningkatan rumah layak huni.
5. **Lingkungan Hidup**
- b. Belum adanya Laboratorium pengujian kualitas air yang terakreditasi sehingga pengujian kualitas air di Kabupaten Gowa belum dapat dilakukan sendiri;
 - c. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Gowa;
 - d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mulai terlibat dalam upaya pengurangan sampah
 - e. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kabupaten Gowa, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.
 - f. Dampak negatif dari pertumbuhan kawasan wisata disekitar wilayah kawasan hutan, dimana banyak terbangun pemukiman dan bangunan komersial
 - g. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa, terutama jam-jam masyarakat beraktivitas serta setiap akhir minggu dan libur, dimana kendaraan dari luar kota memadati Kabupaten Gowa;
 - h. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kabupaten Gowa, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.
 - i. Alih fungsi kawasan hutan menjadi areal pertanian dan perkebunan;
 - j. Dampak negatif dari pertumbuhan kawasan wisata disekitar wilayah kawasan hutan, dimana banyak terbangun pemukiman dan bangunan komersial;
 - k. Peladang berpindah yang masih banyak dijumpai.
6. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
- a. Masih adanya perkawinan usia muda (usia di bawah 20 tahun) dan

- kurangnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi;
 - b. Masih tingginya angka Drop Out kesertaan ber-KB;
 - c. Masih rendahnya kesertaan ber KB MKJP;
 - d. Masih rendahnya kesertaan ber KB MKJP
 - e. Masih rendahnya kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS;
 - f. Sering terjadinya pergantian Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD);
 - g. Masih adanya program kegiatan yang masih 112esehat tindh dan belum saling bersinergi dan berkesinambungan;
 - h. Kurangnya kesehat yang tepat dan menyeluruh dalam penetapan sasaran indikator program kegiatan, yang menyebabkan capaian (output-outcome) yang dihasilkan belum tepat sasaran dan belum terukur;
 - i. Anggaran APBD terkait belanja dalam program Bangga Kencana masih sangat kurang;
 - j. Profesionalisme Sumber Daya Manusia belum diakomodir dalam kegiatan pembinaan, diklat, sosialisasi, bimtek dan lain-lain, yang menyebabkan menurunnya kualitas SDM karena belum bisa mengikuti informasi dan teknologi yang terus berkembang;
 - k. Kurangnya SDM penunjang kegiatan di lingkungan DPPKB Kabupaten Gowa. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa PNS yang menjalani masa resehat, dan kurangnya rekrutmen untuk tenaga PNS di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa;
 - l. Updating data yang masih mengalami kendala, dimana data yang diperoleh belum akurat dikarenakan terdapat beberapa prosedur dalam proses pengumpulan dan pengolahan data yang belum sepenuhnya dijalankan.
7. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- a. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP
 - b. Masih terdapat bayi yang belum memiliki akte kelahiran
 - c. Masih banyaknya pasangan yang belum memiliki akte nikah
 - d. Belum optimalnya penerbitan KTP
 - e. Belum optimalnya penerbitan akte kelahiran
 - f. Minimnya edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya identitas administrasi kependudukan.
8. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- a. Rendahnya LPM berprestasi
 - b. Tidak optimalnya pembinaan LPM
 - c. Rendahnya dukungan swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat
9. **Perhubungan**
- a. Masih banyaknya angkutan umum yang tidak memiliki KIR
 - b. Belum optimalnya peningkatan angkutan umum massal untuk mengatasi kemacetan

10. **Komunikasi dan Informatika**
 - a. belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
 - b. Masih rendahnya rumah tangga dengan akses internet;
 - c. Minimnya fasilitasi website di instansi pemerintah.
11. **Koperasi dan UKM**
 - a. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
 - b. Masih terdapat banyak UKM non BPR/LKM yang tidak aktif
 - c. Tidak optimalnya pembinaan kelompok UMKM
12. **Penanaman Modal**
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan
 - b. masih rendahnya promosi penanaman modal yang dilakukan
 - c. Masih terbatasnya kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sehingga masih ada pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM)
13. **Kepemudaan dan Olahraga**
 - a. Banyak organisasi kepemudaan yang tidak melapor kegiatannya baik pada Badan Kesatuan Bangsa maupun pada Dinas pemuda dan olahraga.
 - b. Ada beberapa cabang yang pertandingan pada skala kecil seperti popda dan Proda dan pertandingan antar club namun hal kegiatan ini tidak dihitung dalam indikator cabang olahraga yang prestasi.
 - c. Banyak cabang olahraga yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang representatif
14. **Statistik**
 - a. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
 - b. Perlunya peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
 - c. Kurangnya dorongan keterbukaan badan informasi publik
15. **Persandian**
 - a. Minimnya peningkatan kompetensi SDM persandian dalam pengemangan aplikasi atau sistem elektronik di lingkungan perangkat daerah
16. **Kebudayaan**
 - a. Jumlah personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara kualitas dan kuantitas masih kurang memadai dan kurangnya SDM yang menguasai secara teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing
 - b. Pandemi Covid 19 banyak destinasi wisata dibatasi pengunjungnya.
 - c. Penyelenggaraan festival seni dan budaya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya pada wilayah dataran tinggi
 - d. Minimnya karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi.
17. **Perpustakaan**
 - a. Rendahnya minat kunjungan perpustakaan dalam kurun waktu satu tahun
 - b. Minimnya koleksi buku yang dimiliki perpustakaan
 - c. Minimnya fasilitas perpustakaan di wilayah penduduk

- d. Rendahnya dukungan gerakan literasi pada masyarakat
- e. Tidak terciptanya budaya baca di sekolah dan di masyarakat
- f. Tidak optimalnya pemanfaatan perpustakaan berbasis aplikasi
- g. Minimnya pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.

18. Kearsipan

- a. Minimnya pelatihan kearsipan yang dilakukan secara berkelanjutan di setiap perangkat daerah

2.8.2.3 Urusan Pemerintah Pilihan

1. Pariwisata

- a. Masih rendahnya PAD sektor pariwisata
- b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi objek wisata
- c. Masih rendahnya publikasi potensi objek wisata yang dapat dikelola
- d. Tidak optimalnya pemasaran objek wisata

2. Pertanian

- a. Masih rendahnya produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal seperti jagung
- b. Minimnya pembinaan pada kelompok tani
- c. Tidak optimalnya penyuluhan pertanian di lapangan
- d. Minimnya peningkatan kualitas SDM penyuluh
- e. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian
- f. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian berbasis teknologi
- g. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian

3. Perdagangan

- a. Masih rendahnya ekspor bersih perdagangan
- b. Belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal

4. Perindustrian

- a. Belum optimalnya pembinaan kelompok pengrajin

5. Transmigrasi

- a. Masih minimnya sarana dan prasarana di wilayah transmigrasi

6. Kelautan dan perikanan

- a. Tidak optimalnya pembinaan kelompok nelayan
- b. Belum optimalnya tangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman

2.8.2.4 Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya ketersediaan data realisasi kinerja OPD yang menghambat penyusunan dokumen perencanaan
- b. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam rancangan awal perencanaan pembangunan

- c. Belum optimalnya ketersediaan data RTRW
 - d. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan belum optimal
- 2. Keuangan**
- a. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.
- 3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**
- a. Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
 - c. Belum adanya pemetaan kompetensi ASN dalam rangka mendukung jenjang karir ASN di masa yang akan datang
- 4. Penelitian dan pengembangan**
- a. Masih rendahnya rencana implementasi kelitbangan
 - b. Minimn fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
 - c. Belum adanya inovasi kelitbangan yang diterapkan daerah
 - d. Minimnya kegiatan penelitian dalam pengembangan inovasi
- 5. Pengawasan**
- a. Belum optimalnya tindak lanjut temuan
 - b. Masih terbatasnya pengawas intern pemerintah
 - c. Penilaian akuntabilitas kinerja OPD hanya berorientasi pada nilai bukan pada tindaklanjut kinerja atau pemberian sanksi
- 6. Sekretariat dewan**
- a. Kurang optimalnya SDM dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD

2.9 Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

2.9.1 Isu Strategis Global

2.9.1.1 Pandemi Covid-19

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Data per-10 Maret 2021 menunjukkan Kabupaten Gowa ada 305 orang yang terkonfirmasi Covid, 3.409 dinyatakan sembuh dan 72 orang dinyatakan meninggal dunia.

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi ini praktis membuat Pemerintah Daerah harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Tahun 2020 Kabupaten Gowa mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi serta telah dilakukan revisi APBD dengan menyediakan alokasi anggaran yang besar untuk mengatasi wabah corona ini. Mengingat bahwa penyakit yang datang melalui virus corona cukup mematikan (rata-rata sekitar 3-5 persen kematian dari korban yang telah terpapar virus), lalu obat paten belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan untuk melindungi setiap nyawaarganya.

Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada aspek ketenagakerjaan Indonesia dimana banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Di Kabupaten Gowa, pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan 4,35 persen tahun 2019 menjadi 6,44 persen pada tahun 2020 sebagai akibat pekerja yang dirumahkan dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terbanyak terdampak pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan.

Perencanaan pembangunan pasca covid-19 merupakan tantangan berat, kehidupan normal baru masyarakat dimana sampai saat ini belum ada obat paten yang menjamin untuk menyembuhkan covid-19 menjadikan bahwa hal yang pasti kalau masyarakat akan hidup bersama covid. Pemerintah

Kabupaten Gowa harus dapat menyusun skenario sendiri dengan asumsi bahwa obat paten yang akan menyembuhkan akan lama ditemukan, dan yang pasti tidak akan terjadi dalam jangka pendek. Bagaimana menggerakkan ekonomi ketika kehidupan normal baru memerlukan perubahan budaya yang sangat drastis akan perilaku masyarakat. Pemerintah memberikan panduan bagaimana kehidupan normal baru yang harus dilakukan masyarakat dengan merancang program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman Covid-19.

2.9.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDG's ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDG's tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, dimana SDG's sudah menjadi *mainstreaming* untuk pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi SDG's di Indonesia, yaitu; (1) SDG's adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi SDG's, dan (3) pembiayaan inovatif.

Berdasarkan hasil analisis capaian Indikator TPB di Kabupaten Gowa hingga tahun 2019 hanya berkisar 40,80%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gowa belum tercapai dengan baik. Umumnya dari 17 TPB yang ada, terdapat 5 TPB yang tingkat pencapaiannya masih dibawah 50%. Untuk itu disepakati TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% dijadikan sebagai isu pembangunan

berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian pada periode RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (*Nationally Determined Contribution-NDC*) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties (COP) -24* di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue*.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO₂eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi

adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu diperlukan melibatkan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

2.9.1.3 Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan fenomena kependudukan karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan. Indonesia memasuki era bonus demografi yang terjadi akibat berubahnya struktur umur penduduk, digambarkan dengan menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (umur kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun).

Sejak tahun 2015-2020 penduduk usia produktif Kabupaten Gowa lebih besar jumlah penduduk non produktif yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun-tahun kedepan, kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan.

Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

Bonus demografi tidak terlepas dari generasi milenial. Generasi milenial dengan kekuatan sebesar itu tentu saja memiliki peranan yang sangat besar pada era bonus demografi. Generasi ini yang akan mencerminkan gambaran bangsa Indonesia apakah menjadi bangsa yang konsumtif atau produktif. Gambaran bangsa ini di antaranya dapat terpantau dari aktivitas sensus.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan

lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

2.9.1.4 Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan marketplace yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Transformasi digital para pelaku UMKM di Kabupaten Gowa tidak bisa ditawar lagi, untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMKM itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana

yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Kabupaten Gowa berharap dengan sistem pertanian modern akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Gowa.

2.9.2 Isu Strategis Nasional

2.9.2.1 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II. Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar kabupaten Gowa yang masih perlu

mendapatkan perhatian untuk pembangunan jangka menengah 2021-2026 :

- a. Pelayanan pendidikan anak usia dini ;
- b. Pelayanan kesehatan ibu hamil ;
- c. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- d. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir ;
- e. Pelayanan kesehatan balita ;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia produktif ;
- h. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut ;
- i. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi ;
- j. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus ;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat ;
- l. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis (Tb) ;
- m. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immuno deficiency virus*) ;
- n. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- o. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- p. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- q. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- r. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti ;
- s. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

2.9.2.2 Stunting

Hingga saat ini stunting masih menjadi salah satu isu prioritas nasional. Mengapa stunting penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Kondisi tersebut harus segera diantisipasi karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045.

Hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka *stunting* berada pada 27,67 persen pada tahun 2019. Walaupun angka *stunting* ini menurun, namun angka tersebut masih dinilai tinggi, mengingat WHO menargetkan angka *stunting* tidak boleh lebih dari 20 persen. Data Bank Dunia atau World Bank mengatakan angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami *stunting* mencapai 54%. Artinya, sebanyak 54% angkatan kerja saat ini adalah penyintas *stunting*. Hal inilah yang membuat *stunting* menjadi perhatian serius pemerintah.

Strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP No 72 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), prevalensi balita yang mengalami *stunting* di Indonesia sebanyak 24,4% pada 2021. Dengan demikian, hampir seperempat balita di dalam negeri yang mengalami *stunting* pada tahun lalu. Sedangkan prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 menurut data SSGI adalah 33,0%, merupakan angka yang sangat tinggi krn menandakan bahwa sepertiga balita di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 mengalami *stunting*.

Upaya percepatan penurunan *stunting* ini memerlukan komitmen yang kuat, serta tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, sehingga target menurunkan prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024 dapat tercapai.

2.9.2.3 Pasokan Ketersediaan Pangan dan Pasokan Energi

Jumlah penduduk dunia yang menghadapi kerawanan pangan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak pandemi Covid-19, dari semula 135 juta orang menjadi 345 juta orang. Pernyataan tersebut dikeluarkan *World Food Programme* (WFP), sebuah organisasi kemanusiaan terbesar di dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WFP fokus menangani kelaparan penduduk dunia dan meningkatkan ketahanan pangan.

Dengan adanya konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan pembatasan ekspor, pasokan pangan kian terganggu. Gangguan tersebut mendorong harga pangan ke level tertinggi. Harga pangan dunia merangkak naik hampir 13% pada bulan Maret 2022, dan kemungkinan akan terus naik bahkan berpotensi menyentuh 20% pada akhir tahun ini. Jika tak ada upaya mencari solusi, situasi ekonomi dunia pada akhir 2022 bisa jadi akan lebih buruk daripada akhir 2021.

Tak hanya kerawanan pangan, dunia juga tengah menghadapi ancaman krisis energi. Pada 14 Maret 2022, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membentuk Global Crisis Response Group on Energy and Finance (GCRG) yang memberikan kebijakan khusus pada bidang pangan, energi, dan keuangan.

Forum G20 turut andil dalam mencari solusi untuk mengatasi ancaman krisis pangan dan energi. Isu ketahanan pangan dan energi sempat menjadi sorotan dalam diskusi G20 pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini saat Indonesia memegang presidensi, pembahasan seputar isu tersebut kian menguat. Selama memegang presidensi G20, Indonesia mendesak adanya tindakan nyata untuk mengatasi kerawanan pangan dan energi yang terus meningkat. Para anggota G20 berkolaborasi dengan organisasi internasional

untuk mengatasi ketahanan pangan, terutama untuk membantu negara-negara yang membutuhkan. Kolaborasi ini sangat penting agar krisis pangan dan energi segera berakhir dan tidak merambah ke krisis keuangan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya agar dampak pandemi dapat teratasi dan tak terus melebar kemana-mana. Di sisi pangan, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, memperkuat cadangan penunjang, menyempurnakan sistem logistik, modernisasi sistem pertanian. Fokus lain pemerintah Indonesia dalam mengatasi kerawanan pangan dan energi yakni dengan menerapkan reformasi struktural. Upaya reformasi struktural di bidang infrastruktur, produktivitas, kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan lainnya menjadi pembahasan utama dalam penyusunan APBN. Dalam jangka pendek, program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat ekonomi bawah menjadi upaya agar mereka tidak mengalami kekurangan nutrisi. Dalam jangka panjang, program ketahanan pangan nasional memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan.

Menurut data Global Food Security Index (GFSI), ketahanan pangan Indonesia pada 2021 memang melemah dibanding tahun sebelumnya. GFSI mencatat skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2020 mencapai level 61,4. Namun, pada 2021 indeksnya turun menjadi 59,2. Indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia tahun 2021 berada di peringkat ke-69 dari 113 negara. GFSI mengukur ketahanan pangan negara-negara dari empat indikator besar, yakni keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (*quality and safety*), serta ketahanan sumber daya alam (*natural resources and resilience*).

Menurut penilaian GFSI, harga pangan di Indonesia cukup terjangkau dan ketersediaan pasokannya cukup memadai jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, infrastruktur pertanian pangan Indonesia masih di bawah rata-rata global. Standar nutrisi dan keragaman makanan pokok juga masih dinilai rendah. Sumber daya alam Indonesia juga dinilai memiliki ketahanan yang buruk karena belum dilindungi kebijakan politik yang kuat, serta rentan terpapar bencana terkait perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan pencemaran lingkungan.

2.9.2.4 Kemudahan investasi, peningkatan investasi pemerintah

Bank Dunia yang baru saja merilis prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, yakni minus 2% - minus 1,6% year on year, menjadi bukti bahwa keterpurukan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah selama dua dekade terakhir. Jika melihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan kuartal II, bisa dilihat bahwa angka pertumbuhannya masih berada dalam level minus.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri mencapai minus 5,32% di kuartal II dan diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan naik mencapai minus 2,9% - minus 1%. Data ini menandakan Indonesia sudah dipastikan akan masuk ke jurang resesi. Meski begitu, pemerintah Indonesia masih optimis, melihat dari data-data yang sudah didapat di kuartal I dan II, bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi yang positif menjelang Oktober sampai akhir tahun.

Upaya menghitung kondisi ekonomi Indonesia ini tidak luput dari tiga komponen penting, yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis untuk investasi, serta sektor luar negeri untuk ekspor-impor. Dari tiga komponen yang disebutkan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa ketiganya saling berhubungan. Apabila ada penurunan dari salah satu komponen, maka akan langsung berimbas kepada dua komponen lainnya. Inilah yang membuktikan peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia, terutama di tengah pandemi sekarang ini.

Pendapatan nasional atau PDB sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Sepanjang semester I tahun 2020, BKPM mencatat bahwa sudah ada realisasi investasi sebesar Rp402,6 triliun yang mencakup 49,3% dari target realisasi di tahun 2020. Ini merupakan kabar baik, mengingat kondisi yang kurang kondusif akibat pandemi. Melihat angka ini, BKPM pun optimis bahwa Indonesia mampu memenuhi target realisasi investasi 2020.

Adapun peran investasi dalam pemulihan ekonomi yaitu, pertama, investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor. Kedua, investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Seperti UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang menjadi beberapa sektor bisnis yang tumbuh di masa pandemi ini. Ketiga, banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

2.9.2.5 proyek strategis nasional melalui kebijakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pandemi COVID-19 menghadirkan cukup banyak tantangan selama 2 tahun terakhir. Perekonomian global mengalami permasalahan yang serupa. Akibat Pandemi, jumlah pengangguran bertambah karena adanya PHK sebanyak

3,5 juta orang. Selain itu, terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja per tahun dengan total 87 persen merupakan lulusan SMA. Sedangkan tingkat pengangguran berada di angka 6,9 juta orang.

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum.

Terobosan Omnibus Law memungkinkan 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal direvisi dengan UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Dengan demikian, revisi memangkas pasal-pasal yang tidak efektif. Terobosan ini diperlukan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena hyper regulation dan kebijakan tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron.

Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral.

2.9.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah

2.9.3.1 Mendekatkan pelayanan Publik bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan publik yang baik berkualitas adalah pelayanan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continously*). Artinya semua jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit diakses, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan publik yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi unit pelayanan publik yang berkualitas menjadi sangat penting.

Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pos pelayanan publik dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang dihadapi dunia. Diharapkan dengan penggunaan teknologi informasi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

Isu strategis mendekatkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat sejalan dengan isu strategis dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan 2018-2023 khususnya pelayanan publik bidang kesehatan yaitu Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat bahwa belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi.

2.9.3.2 Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian

Kabupaten Gowa memiliki luas kurang lebih 1.883,33 km persegi, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian anatar 10-2800 meter diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal karena dimana panjang jaringan jalan yang ada di kabupaten Gowa 2.938 km terdiri dari 23 km jalan negara, 272 km jalan provinsi dan 2.644 km jalan kabupaten. Kondisi jalan dalam kondisi baik Tahun 2019 telah mencapai 92,69 persen, sedangkan kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85.

Isu strategis mendekatkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat sejalan dengan isu strategis dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Sementara itu dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 kualitas infrastruktur juga menjadi isu strategis karena peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak berat yang berakibat capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi serta masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan kondisi rusak berat. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak berat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Gowa.

2.9.3.3 Pemerataan Pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Gowa

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Isu pemerataan pemerataan pendapatan bagi masyarakat menjadi sangat penting karena karena juga menjadi isu yang diarusutamakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

Pendapatan per-kapita masyarakat kabupaten Gowa tahun 2020 masih terendah di Sulawesi Selatan saat ini telah meningkat mencapai 27,45 juta per tahunnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2020 Sulawesi Selatan menjadi kabupaten yang memiliki ketimpangan pendapatan warga terendah keempat di Sulawesi Selatan sebesar 0,345. Selain itu, jumlah orang miskin di Kabupaten Gowa masih cukup tinggi sebesar 7,38 % pada tahun 2020.

2.9.3.4 Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kabupaten Gowa seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif.

Di Kabupaten Gowa pada tahun 2020, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 461.344 jiwa atau 60,24 % dari total penduduk Kabupaten Gowa. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 70,14 yang artinya Kabupaten Gowa berada diperingkat 9 dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,97tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Kabupaten Gowa hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.

2.10 Inovasi Pembangunan Tahun 2023

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui konsep *good governance*, Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah menjadi sebuah keniscayaan. Pelayanan yang cepat, tepat dan efisien hanya akan dapat dipenuhi dengan kreasi dan terobosan yang inovatif. Salah satu inovasi yang digunakan untuk mendukung pembangunan adalah “Kampung Rewako” di Kabupaten Gowa.

Embrio gagasan “Kampung Rewako” lahir di penghujung tahun 2019 dari pihak Pemerintah Desa Je’nettallasa bersama warganya sebagai respon terhadap drastisnya penurunan pendapatan keluarga warga. Pada mulanya, sebuah areal milik warga seluas 2 Hektar diusulkan dalam pertemuan desa (lamp.1) agar disulap secara partisipatif dengan bantuan dana desa menjadi kolam budidaya ikan darat guna mensubstitusi kebutuhan konsumsi warga. Topografi areal lahan ini terdiri dari seperempat hektar hamparan persawahan berbatas dengan pemukiman warga dan tiga perempat lainnya berupa hamparan tanaman hutan golongan-B dengan ketinggian pepohonan antara 5-15 meter.

Sepanjang proses penataan arsitektur, sarana dan prasarana (MICE) desa wisata “Kampung Rewako” berlangsung (2020-2021), kinerja BUMDesa serta dampak program “Kampung Rewako” terhadap kondisi sosial ekonomi warga telah membuahkan hasil. pada tahun 2020-2021, produktivitas sebelas lapangan usaha di Kabupaten Gowa berhasil terdongkrak

Pengembangan inovasi “Kampung Rewako” ini sudah menunjukkan kemampuannya memecahkan masalah kabupaten pada akhir 2021 sebagaimana statistik produktivitas lapangan usaha tersebut (Tabel 2). Diperkuat pula oleh capaian penanggulangan masalah pengangguran kabupaten, dari 6,44% tahun 2020 turun menjadi 4,30% pada tahun 2021, yang bermakna turun lebih rendah dari persentase tingkat pengangguran pada tahun sebelum pandemi Covid-19 yaitu 4,87% tahun 2019. Faktor potensial yang mendukung laju pertumbuhan kembali ekonomi Kabupaten Gowa adalah daya beli masyarakat masih meningkat dari Rp. 9.369 tahun 2019 menjadi Rp. 9.394 pada tahun 2020, kemudian meningkat terus sebesar Rp. 9.504 pada tahun 2021 dan Rp. 9.812 pada tahun 2022.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pedoman hasil pembangunan jangka menengah Kabupaten Gowa yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun, mengacu pada Perda Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dengan Visi “Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”. Sementara langkah untuk mendukung mewujudkan Visi Kabupaten Gowa dalam bidang perekonomian tercantum di dalam Misi 2 yaitu “Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal Dan Teknologi”.

Upaya yang dilakukan untuk membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan mempunyai tujuan untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sebagai parameter ketercapaian tujuan misi tersebut ditetapkan beberapa indikator kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Gini, PDRB Per Kapita, dan Pengeluaran Per Kapita.

Untuk menjabarkan tujuan menjadi lebih spesifik, terukur, jelas target capaiannya, ada relevansinya dan jelas tahapan serta batas waktunya maka ditetapkan 4 sasaran misi yaitu Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah dengan indikator Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan), Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu dengan indikator Angka Kemiskinan dan Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat dengan indikator gini ratio.

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di tingkat global, nasional dan regional. Perkembangan kondisi perekonomian setiap tahun akan berbeda dengan kondisi perekonomian pada saat rencana pembangunan jangka menengah tersebut ditetapkan. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan ekonomi yang lebih fleksibel setiap tahunnya, meskipun arah kebijakan pembangunan ekonominya tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan upaya untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro diberbagai level yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Fakta-fakta kondisi perekonomian pada tahun 2021 dan proyeksi kondisi perekonomian pada tahun 2022 dan tahun 2023 baik global, nasional dan regional akan menjadi bahan analisis dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2023 yang proporsional, sesuai dengan perkembangan isu-isu

pembangunan yang harus diprioritaskan pembiayaannya dan diselaraskan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2023. Dengan adanya rancangan tersebut diharapkan alokasi belanja dan pembiayaan APBD pada tahun 2023 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui proses partisipasi masyarakat dalam musrenbang, proses politis dengan DPRD, proses teknokratis dengan para akademisi, proses bottom up dan top down dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan, dan semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Program dan kegiatan pembangunan yang akan diimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Gowa.

3.1.1 PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Posisi geografis Kabupaten Gowa yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten penyanggah Ibu Kota Sulawesi Selatan, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa dipengaruhi kondisi perekonomian Kota Makassar yang relative stabil.

Prospek perekonomian Kabupaten Gowa pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2022. Penerapan adaptasi kebiasaan baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong trend pemulihan ekonomi.

Sekaitan dengan tema pembangunan Tahun 2023, pertumbuhan sektor unggulan daerah merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, pengembangan inovasi daerah melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) ; dan 2) Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan 3) Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan 4) Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, dengan menjalin kemitraan antara pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat

berpenghasilan rendah.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Global

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara, termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula.

Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Boleh jadi, peperangan melawan pandemi virus belum akan tuntas dalam waktu cepat. Kalaupun, mudah-mudahan, bisa secepatnya tertangani lantaran keberadaan vaksin semakin nyata, setiap negara masih harus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang rontok sebagai konsekuensi penanganan pandemi.

Setelah berbulan-bulan diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, banyak negara mulai melakukan upaya menyeimbangkan kebijakan antara dua persoalan yang sesungguhnya bukan pilihan.

Banyak negara kini mulai berupaya menghindari keruntuhan total perekonomian sekaligus mencegah meluasnya atau munculnya gelombang baru pandemi, plus distribusi vaksin. Keseimbangan pilihan tersebut jelas bukan perkara mudah. Tetapi, setidaknya, celah-celah pemulihan ekonomi ditengarai mulai terlihat.

Perekonomian dunia yang rontok selama 2021 diperkirakan membaik setelah vaksin mengalami progres yang cukup tinggi. Ekonomi global diperkirakan berbalik arah pada 2022, meski masih dibayangi beberapa varian virus baru yaitu delta dan omicron.

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda
2. Dampak luka memar pandemi pada korporasi dan stabilitas sistem keuangan
3. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto
4. Tuntutan ekonomi keuangan hijau
5. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia saat ini tengah berada dalam jalur pemulihan, seiring dengan mulai Bergeraknya lagi aktivitas berbagai sektor industri dan menurunnya angka penyebaran Covid-19 namun tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih akan tetap diwarnai berbagai ketidakpastian global, meski demikian pemerintah cukup optimistis geliat perekonomian nasional tak akan terganggu.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 3,69 % (C to C) . Kemudian pada tahun 2022 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,7-6,0 % sedangkan tahun 2023 sebesar 5,3 – 5,9 %.

Dengan target tersebut, Indonesia dibidik masih menyandang predikat Upper-Middle Income Countries. Sehingga kedepan pemerintah menyiapkan lima langkah untuk meningkatkan investasi, yakni finalisasi Rancangan Undang-Undang terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan, pemberian fasilitas investasi seperti percepatan perizinan berusaha di kementerian, lembaga, dan daerah melalui sistem Online Single Submission terintegrasi, pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, hingga kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor.

Target peningkatan ekspor barang dan jasa diprediksi akan terus meningkat dengan didorong naiknya permintaan ekspor Indonesia akibat pulihnya aktivitas ekonomi dunia. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin Bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk. Pemerintahpun optimistis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi) berlanjut hingga 2023, meski tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 masih akan mewarnai tahun depan dan proses pengendalian Covid-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai herd immunity.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian lain :

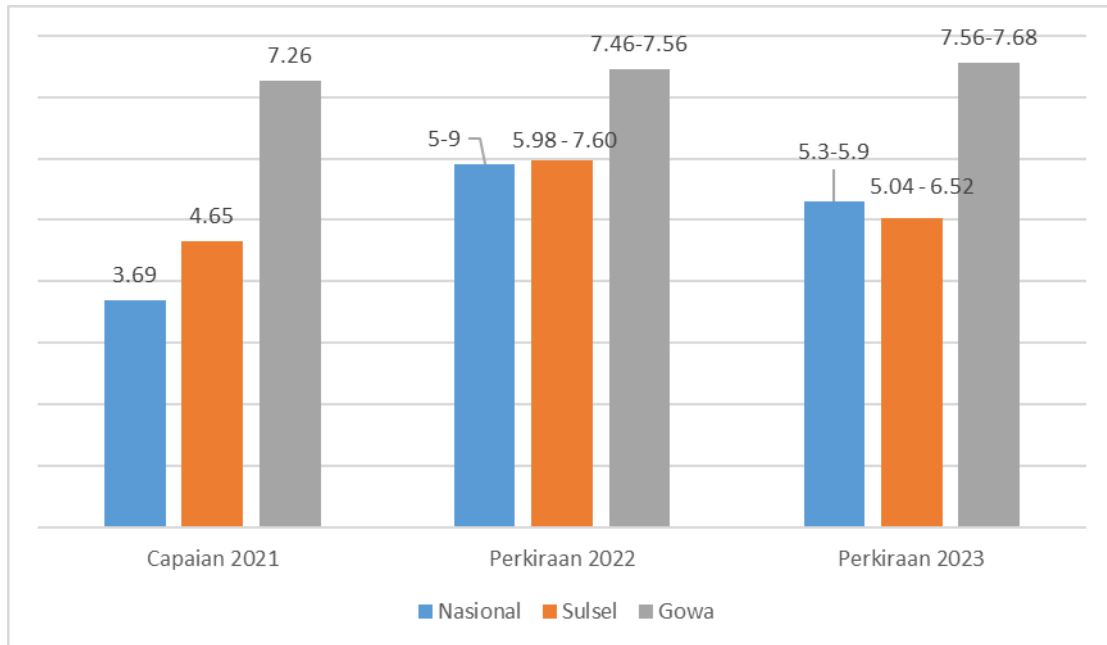
1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

C. Tantangan Perekonomian Daerah

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui kolaborasi dan gotong royong antar daerah dalam mengembangkan ekonomi Kabupaten Gowa.

Dengan melihat kondisi Kabupaten Gowa yang saat ini masih bergelut dengan wabah covid-19 yang makin meluas, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2022 Kabupaten Gowa memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 7,46 – 7,56 persen dan tahun 2023 sebesar 7,56-7.68 persen.

Grafik 3. 1
 Pertumbuhan Ekonomi Gowa, Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2021, Perkiraan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023



Sumber : BPS, RKP 2022 dan Rancangan RKP 2023 Diolah

Jika dilihat Dari sisi lapangan usaha (LU) pelemahan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Struktur PDRB Kabupaten Gowa menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Gowa masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,74 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,58 persen; konstruksi sebesar 12,51 persen dan konstruksi sebesar 11,52 persen. Kontribusi keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Gowa mencapai 54,84 persen.

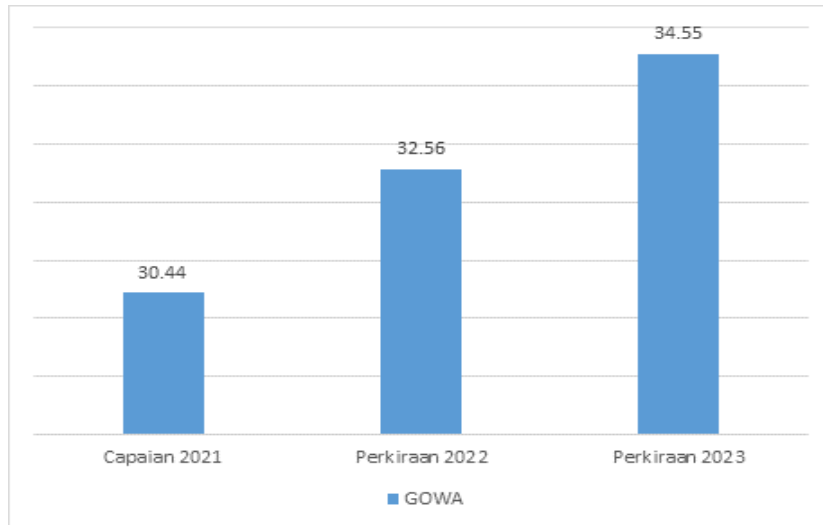
Tabel 3. 1
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Gowa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 Tahun Dasar 2010 (persen)

Kategori	LAPANGAN USAHA	Laju PDRB Menurut Harga Konstan			Struktur PDRB Menurut Harga Berlaku		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,08	2,69	11.34	27.01	27,61	28.74
B	Pertambangan dan Penggalian	15,67	1,12	4	4.82	4.85	4.66
C	Industri Pengolahan	12,37	-6,36	9.37	6.78	6.28	6.45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,13	4,82	5.48	0.12	0.13	0.12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,01	8,87	4	0.11	0.11	0.11
F	Konstruksi	10,01	0,38	4	11.88	11.63	11.52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,27	-2,14	6.05	13.11	12.61	12.51
H	Transportasi dan Pergudangan	12,3	-5,13	8.43	1.68	1.59	1.68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,58	-10,57	3.89	2.47	2.21	2.13
J	Informasi dan Komunikasi	11,08	10,87	7.63	8.21	8.87	8.79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,41	4,06	7.28	2.40	2.43	2.46
L	Real Estate	6,37	4,53	2.5	8.18	8.37	7.86
M,N	Jasa Perusahaan	10,34	-10,79	5.5	0.12	0.11	0.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,23	-0,29	5.89	5.73	5.66	5.53
P	Jasa Pendidikan	6,76	6,16	3.5	3.96	4.11	3.88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,2	10,38	7.5	1.87	2.08	2.09
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,61	-10,44	7.5	1.54	1.36	1.35
PDRB		7,46	1,76	7.26	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Sedangkan untuk PDRB perkapita Kabupaten Gowa menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Gowa rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Gowa latan pada tahun 2021 sebesar Rp. 30,44 juta. Dan pada tahun 2022, ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 32,56 juta, kemudian untuk tahun 2023 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 34,55 Juta.

Grafik 3.2
PDRB Perkapita Kabupaten Gowa, Capaian 2021,
Perkiraan 2022 dan Target 2023

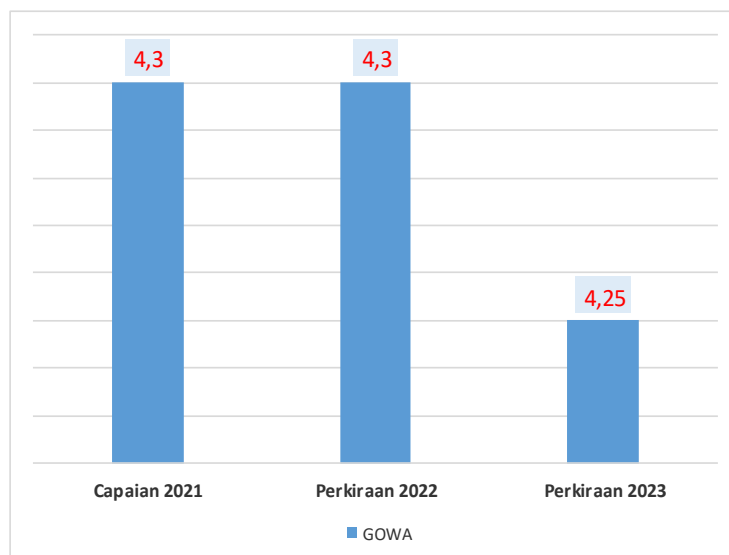


Sumber : BPS, dan Rancangan RKPD 2023 Diolah oleh Tahun 2022

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan kondisi awal pandemi COVID-19 di Kabupaten Gowa pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Melihat dari kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Gowa ditahun 2022 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 persen atau masih masih sama dari capaian tahun 2021.

Grafik 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gowa
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023



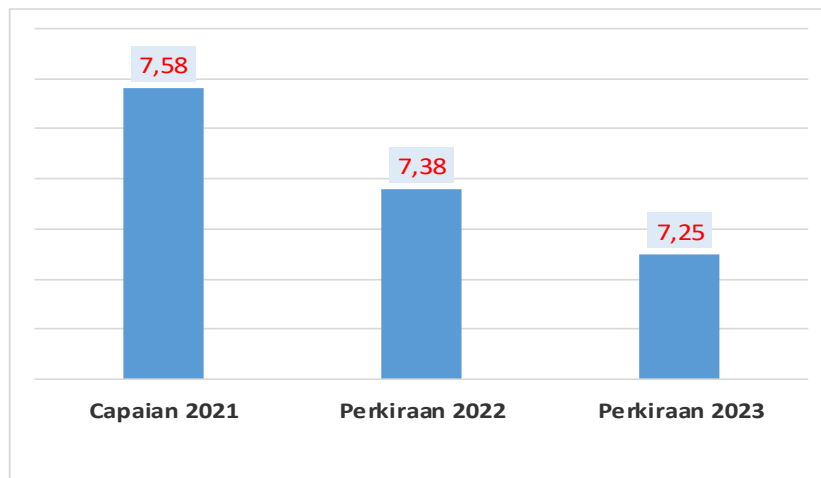
Sumber : BPS, RKPD 2022 dan Rancangan RKP 2023 Diolah Tahun 2022

3.1.1.4 Kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Gowa pada Maret 2021 berjumlah 58,66 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 57,68 ribu orang terhadap Maret 2020 dan menurun sebanyak 0,98 ribu orang terhadap Maret 2021. Penurunan angka kemiskinan di daerah perdesaan Kabupaten Gowa disebabkan perekonomian, terutama di sektor pertanian yang masih mengalami pertumbuhan di tahun 2021.

Penduduk miskin di Kabupaten Gowa pada tahun 2022 di prediksi akan mencapai 7,38-8,38 persen. Namun pada tahun 2023, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat akan membaik, maka pemerintah Kabupaten Gowa menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 7,25 persen.

Grafik 3. 4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa , Perkiraan
Capaian 2022 dan Target 2023



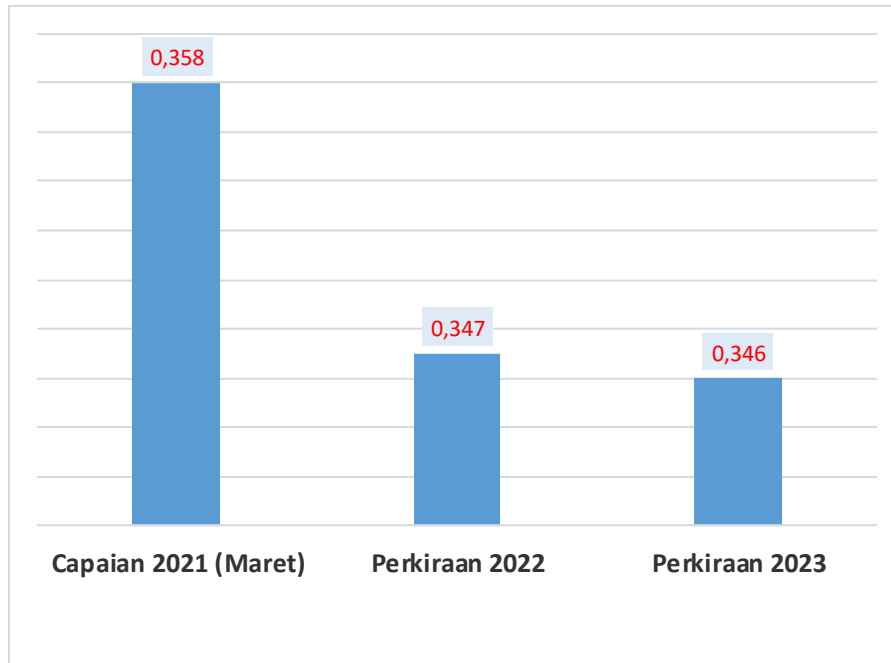
Sumber : BPS, RKPD 2022 dan Rancangan RKP 2023 Diolah Tahun 2022

3.1.1.5 Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Kabupaten Gowa berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Gini Ratio Provinsi Kabupaten Gowa pada periode Maret tahun 2021 mencapai sebesar 0,358, atau berada dibawah capaian angka Kabupaten Gowa yaitu 0,382. Untuk tahun 2022, Gini Ratio di Kabupaten Gowa di prediksi akan mencapai angka 0,347 sementara pada tahun 2023, angka Gini Rasio Kabupaten Gowa di targetkan sebesar 0,346, atau menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan yang tidak terlalu signifikan Gini Ratio ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

Grafik 3.5
Gini Rasio Kabupaten Gowa Capaian 2021, Perkiraan
Capaian 2022 dan Target 2023 (Priode Maret)



Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Gowa selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Gowa Tahun 2023, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kabupaten Gowa. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Gowa 2023 dan pencapaiantarget Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Kabupaten Gowa.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2023

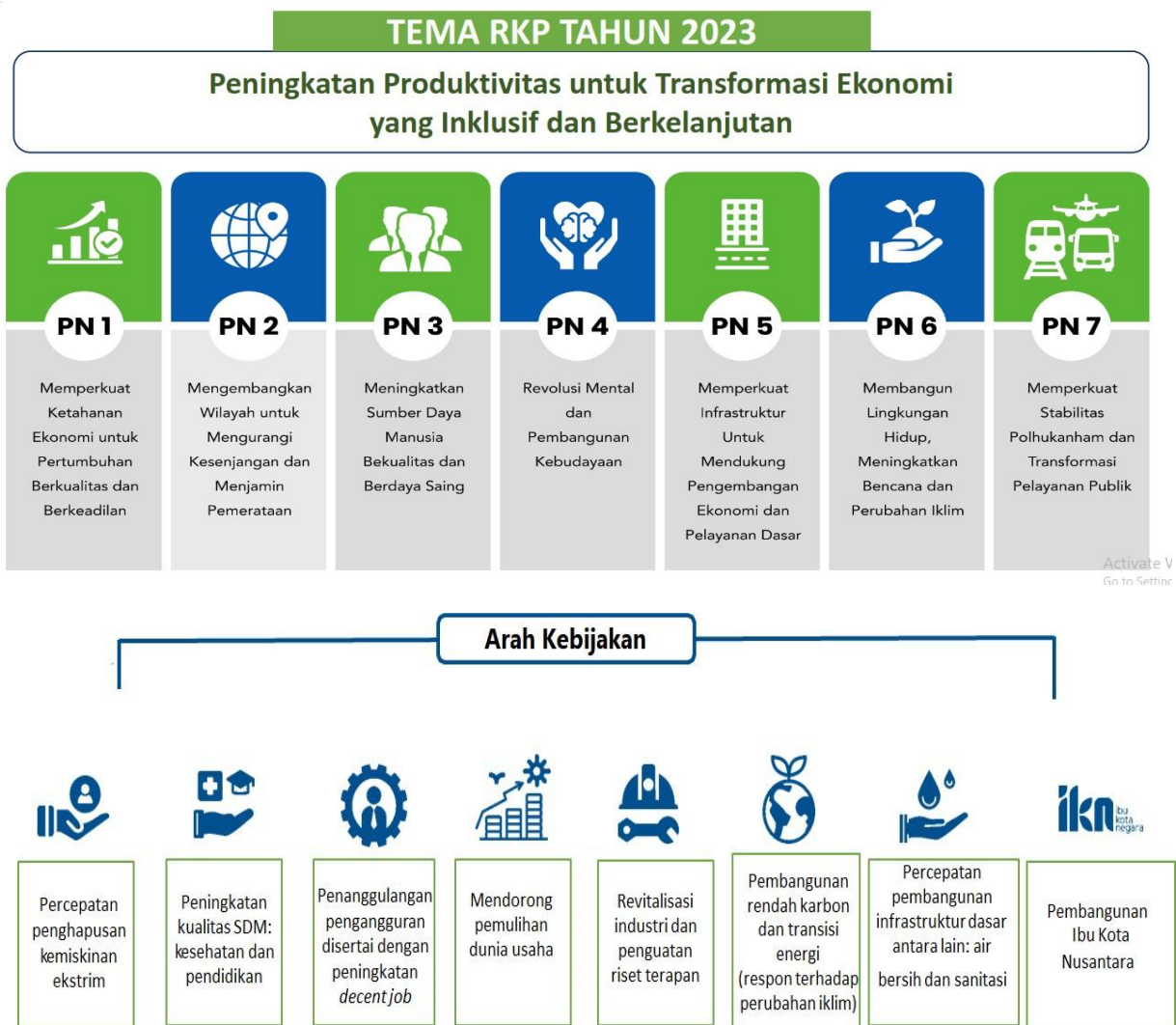
Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service

delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*).

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Gambar 3. 1
Tema, Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023



Sumber : Rancangan awal RKP tahun 2023

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut :

Gambar 3. 2
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023



Sumber: Rancangan awal RKP tahun 2023

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2021-2026. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut :

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Prediksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai pandemi Covid-19 belum berakhir hingga tahun 2022 membawa harapan perekonomian daerah akan mulai memasuki masa pemulihan pada tahun 2023 yang akan datang namun tetap berjaga dan mempersiapkan langkah apabila pandemi masih terus berlanjut. Masa pemulihan ekonomi ini tentunya diharapkan turut berdampak positif terhadap perkembangan pendapatan daerah pada tahun 2023. Sementara itu Pemerintah Pusat sementara menyusun Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah yang merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini berarti terdapat perubahan fundamental dalam pola pemungutan Pendapatan Daerah yang juga akan berdampak signifikan terhadap penerimaan

Pendapatan Daerah.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat kebijakan pendapatan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gowa , pada tahun 2023 : (1) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan pendapatan dari sumber daya yang ada. Dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki, khususnya bahan galian golongan C, yang masih menjadi primadona hendaknya memperhatikan pengembangan dan kelestariannya (2) Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Diusahakan agar terjadi kesesuaian antara target PBB dengan potensi PBB baik sektor perkotaan maupun pedesaan yang ditunjang oleh akuratnya data potensi PBB, sarana dan prasarana pendukung yang memadai, di samping peningkatan pengawasan atas manajemen pengelolaan dan keterpaduan tugas serta pengembangan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah dan (3) Penyempurnaan dan Penambahan Jenis Pajak dan Retribusi Kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah saat ini telah terbukti memberi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor penerimaan. Besarnya kewenangan pengelolaan pendapatan, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, yang bersumber dari penerimaan daerah yaitu pajak daerah.

3.2.1.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2024

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Kabupaten Gowa bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2020- 2021, target APBD Pokok Tahun 2022 serta proyeksi pendapatan tahun 2023 dan 2024 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

NO	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021 (Unaudit)	Target APBD 2022	Tahun Rencana 2023	Proyeksi 1 Tahun setelah tahun rencana Tahun 2024 **)
A	BELANJA	1.931.392.222.938,55	1.822,749,513,654.75	1.847.261.192.535,00	2,226,924,160,661.00	2,672,308,992,793.20
1	BELANJA OPERASI	1.100.111.411.925,89	1,068,934,246,192.55	1.269.619.302.673,36	1,528,487,177,565.64	1,834,184,613,078.76
	Belanja Pegawai	716.976.502.117,00	639,433,587,930.50	752.274.809.330,00	906,451,514,827.31	1,087,741,817,792.77
	Belanja Barang dan Jasa	97.217.987.620,00	398,132,818,689.15	468.391.551.399,00	564,387,144,208.75	677,264,573,050.50
	Belanja Bunga	19.824.610.100,00	3,021,750,000.00	15.500.000.000,00	17,339,485,813.33	20,807,382,975.99
	Belanja Hibah	1.068.106.071,00	23,900,535,582.60	28.118.277.156,00	33,881,042,680.52	40,657,251,216.62
	Belanja Bantuan Sosial	229.566.158.017,89	4,445,553,990.30	5.334.664.788,36	6,427,990,035.73	7,713,588,042.88
2	BELANJA MODAL	35.458.048.000,00	553,632,816,617.20	342.049.615.287,64	414,560,703,415.85	497,472,844,099.03
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	831.280.811.012,66	2,125,000,000.00	2.550.000.000,00	3,072,615,664.04	3,687,138,796.85
4	BELANJA TRANSFER	53.373.038.881,00	198,057,450,845.00	233.042.274.574,00	280,803,664,015.47	336,964,396,818.57
	Belanja Bagi Hasil	407.456.317.961,00	1,424,127,145.00	1.708.952.574,00	2,059,197,822.73	2,471,037,387.28
	Belanja Bantuan Keuangan	370.451.454.170,66	196,633,323,700.00	231.333.322.000,00	278,744,466,192.74	334,493,359,431.28

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, pendapatan daerah pada APBD Provinsi Kabupaten Gowa diharapkan dapat bertumbuh dengan baik utamanya dari sumber PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Adapun besaran kontribusi masing-masing sumber pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022*)	2023*)	2024**)
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.38	10.78	11.06	11.10	10.87
A	Hasil Pajak Daerah	53.87	54.00	55.32	56.60	56.64
B	Hasil Retribusi Daerah	31.01	19.02	18.48	17.95	17.93
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.02	2.53	2.46	2.39	2.38
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.68	24.45	23.75	23.07	23.05
II	PENDAPATAN TRANSFER	64.62	84.30	84.04	84.00	84.22
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	98.24	93.18	93.18	93.18	93.18
B	Pendapatan Transfer antar Daerah	1.76	6.82	6.82	6.82	6.82
III	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.56	4.92	4.90	4.90	4.91
	Jumlah Pendapatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah

daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atasPenerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2022 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 4
 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 Berdasarkan Peraturan
 Pemerintah No 12 Tahun 2019

NO	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET APBD 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
A	BELANJA	1,931,392,222,938.55	2,037,190,632,908.25	1,847,261,192,535.00	2,226,924,160,661.00	26,723,089,927,932.00
1	BELANJA OPERASI	1,132,646,737,504.50	1,194,691,216,332.85	1,269,619,302,673.36	152,848,717,756,564.00	183,418,461,307,876.00
	Belanja Pegawai	677,546,228,685.26	714,661,068,863.50	752,274,809,330.00	906,451,514,827,307.00	108,774,181,779,277.00
	Belanja Barang dan Jasa	421,863,028,327.48	444,971,973,829.05	468,391,551,399.00	56,438,714,420,875.00	6,772,645,730,505.00
	Belanja Bunga	3,201,857,636.47	3,377,250,000.00	15,500,000,000.00	173,394,858,133,263.00	208,073,829,759,915.00
	Belanja Hibah	25,325,097,169.13	26,712,363,298.20	28,118,277,156.00	338,810,426,805,206.00	406,572,512,166,248.00
	Belanja Bantuan Sosial	4,710,525,686.17	4,968,560,342.10	5,334,664,788.36	642,799,003,573,236.00	771,358,804,287,883.00
2	BELANJA MODAL	586,631,409,509.49	618,766,089,160.40	342,049,615,287.64	414,560,703,415,854.00	497,472,844,099,025.00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,251,657,972.20	2,375,000,000.00	2,550,000,000.00	3,261,566,403,943.00	3,713,879,684,731.00
4	BELANJA TRANSFER	209,862,417,952.36	221,358,327,415.00	233,042,274,574.00	280,803,664,015,471.00	336,964,396,818,565.00
	Belanja Bagi Hasil	1,509,010,465.63	1,591,671,515.00	1,708,952,574.00	205,919,782,273,447.00	247,103,738,728,136.00
	Belanja Bantuan Keuangan	208,353,407,486.73	219,766,655,900.00	231,333,322,000.00	278,744,466,192,736.00	334,493,359,431,283.00

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp. 2,226,924,160,661** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 152,848,717,756,564** Belanja Modal sebesar **Rp. 414,560,703,415,854.00** Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 3,261,566,403,943.00**, serta Belanja Transfer sebesar **Rp. 280,803,664,015,471.00**. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2023.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun belanja Transfer, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM) di tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 236,956,030,623.00** atau **10,64** persen dari total Belanja Daerah dengan rincian alokasi sebagai berikut :

Tabel 3. 5
 Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja Terhadap Urusan Wajib
 Mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2023

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84,307,457,080	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	116.487.520.000	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	26,564,993	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
5	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8,160,809,800	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,673,678,750	Dinas Sosial
Total			236,956,030,623	

Sumber : Bappeda 2022, Diolah

Kebijakan Belanja Daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja daerah terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.
2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Kerangka pendanaan yang merupakan perspektif rencana penganggaran untuk tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hal ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran telah menentukan porsi besaran anggaran terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebesar **Rp. 2,646,317,808,953.90** atau **38,93 persen** dari total Belanja Daerah sebesar **Rp. 11.528.900.792.965,50** untuk membiayai **62** program prioritas yang rinciannya telah tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana pertanian	100%	2,134,741,104	Dinas TPH
				Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian (Pternakan)	100%	2,228,827,205	Dinas TPH
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	10%	93,174,433	Dinas Peternakan dan Perkebunan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	992,5 Ton	695,434,863	Dinas Perikanan
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	13.50%	327,973,895	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang telah mendaftarkan dan atau mendapatkan izin usaha mikro kecil atau Nomor Induk Berusaha (NIB)	1.42%	33,709,811	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-49%	131,181,940	Dinas Pariwisata
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	48%	14,940,799	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	46%	368,149,317	Dinas Penanaman Modal
			Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan UMKM	0.58%	33,501,022	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	61.29%	8,715,004,908	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	48%	14,940,799	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	64%	67,212,835	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100%	72,164,610,473	Dinas Pendidikan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan kinerja penyelenggaraan bidang pemerintahan, hukum, kerja sama dan kesejahteraan masyarakat	100%	4,896,795,953	Bag. Administrasi KESRA Setda
			Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan sekolah yang menerapkan kurikulum bermuatan lokal di tingkat Pendidikan Dasar	20.08%	103,138,889	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	87%	1,525,228,905	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	50%	8,845,400,412	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Sakit yang mendapatkan layanan kesehatan	70%	116,487,520,000	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP yang terlaksana	100 Persen	116,487,520,000	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG	60%	12,208,469	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	600-700	21,536,641	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda mandiri	54.52%	390,115,736	Dinas Pemuda Olahraga
3	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang	Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	84.99%	19,952,249,674	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100.00%	9,159,312,114	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang tersedia	2 unit	1,839,969,129	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100.00%	3,246,693,080	Dinas PUPR

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	70.10%	2,641,436,362	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan	9.52%	92,957,674,003	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	54.20%	4,548,869,939	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	84.4%	270,051,458,614	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.40	258,930,323	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan terhadap RTRW	0.84	1,536,109,765	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100.00%	26,564,993	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	56.00%	1,148,024,798	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase meningkatnya rumah layak huni	73.30%	12,970,463	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	62.00%	12,970,463	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan program perencanaan lingkungan hidup	100.00%	112,894,771	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00%	1,098,165,439	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	44.14%	236,825,832	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang memiliki TPS LB3 sesuai regulasi	49.28%	32,174,128	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	10.00%	34,579,603	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA	0.00%	5,851,787	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	55.56%	6,210,242	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan (adhiyaya)/filantropi yang diusulkan dalam penilaian tingkat Kabupaten	88.89%	5,605,118	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup	100.00%	1,872,790	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah tingkat kabupaten	80.00%	6,845,475,168	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100%	683,270,779	Dinas PMD
4	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	20.00%	92,932,775	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0.27%	367,752,086	Dinas PMD
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	39%	247,349,592	Dinas PMD
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	68,517,457	Dinas PMD
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%	94,090,684	Dinas PMD
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan korban bencana	100%	60,777,328	Dinas Pemadam Kebakaran
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	100%	1,408,353,914	Dinas Pemadam Kebakaran

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
					Target		
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	525,204,469	Bappeda
				Tingkat konsistensi dokumen penjabaran RKPD ke dalam APBD	100%		Bappeda
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	100%	154,381,923	Bappeda
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan SKPD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah	100%	212,298,993,115	BPKD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	398,341,721	BPKD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Potensi Pajak Daerah	100.00%	1,204,824,846	Bapenda
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78.4%	814,652,066	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10.06%	1,022,173,073	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Unit Kerja yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan/Aset yang Material	95%	1,652,427,785	Inspektorat Daerah
			Program Administrasi Umum	Persentase Kinerja Program Administrasi Umum	100%	40,654,068,687	Sekretariat Daerah

Disisi lain dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut,telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Pagu RKPD
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	584,893,875,677
2	Dinas Kesehatan	237,218,263,990
3	RSUD Syekh Yusuf	65,302,601,525
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	435,625,000,000
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5,018,305,520
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13,614,418,958
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27,805,500,000
8	Dinas Pemadam Kebakaran	5,067,400,000
9	Dinas Sosial	6,517,928,149
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,553,550,000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,188,023,722
12	Dinas Ketahanan Pangan	5,756,303,628
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3,359,497,656
14	Dinas Lingkungan Hidup	11,777,937,099
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28,669,235,000
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,918,354,369
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15,322,500,000
18	Dinas Perhubungan	32,205,113,240
19	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	10,709,268,834
20	Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3,054,438,261
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,693,623,950
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	4,911,294,647
23	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	2,592,000,000
24	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3,900,000.000
25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.005,000,000,
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11,706,708,447

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Pagu RKPD
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	280,278,894
28	Dinas Perikanan	5,119,460,487
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6,379,200,000
30	Dinas Peternakan dan Perkebunan	20,721,646,051
31	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	45,545,729,815
32	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17,682,366,360
33	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	869,997,500
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40,000,000
35	Sekretariat Daerah	49,909,000,000
36	Sekretariat DPRD	61,096,048,934
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,556,203,372
38	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	301,850,512,138
39	Badan Pendapatan Daerah	14,899,615,328
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7,411,097,012
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1,350,000,000
42	Badan Penelitian dan Pengembangan	2,754,597,208
43	Inspektorat	9,858,850,000
44	Kecamatan Bontomarannu	13,400,000,000
45	Kecamatan Tompobulu	7,567,500,000
46	Kecamatan Pallangga	9,690,000,000
47	Kecamatan Bajeng	8,141,829,986
48	Kecamatan Biringbulu	3,973,322,905
49	Kecamatan Barombong	4,206,500,000
50	Kecamatan Bajeng Barat	2,675,000,000
51	Kecamatan Parangloe	8,805,000,000
52	Kecamatan Manuju	3,229,000,000
53	Kecamatan Bontonompo Selatan	3,545,500,000
54	Kecamatan Parigi	2,380,000,000
55	Kecamatan Somba Opu	20,514,100,000
56	Kecamatan Pattallassang	1,772,100,000
57	Kecamatan Bontolempangan	1,757,000,000
58	Kecamatan Tinggimoncong	11,625,000,000
59	Kecamatan Bungaya	4,464,120,000
60	Kecamatan Tombolopao	4,485,750,000
61	Kecamatan Bontonompo	7,880,000,000
62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,632,200,000
Jumlah		2,226,924,160,661

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Gowa tentang Perubahan APBD Kabupaten Gowa Tahun anggaran 2020, TAPD Kabupaten Gowa akan mengalokasikan kembali atas pemotongan anggaran dimaksud dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah pada saat penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2020. Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kabupaten Gowa, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja kegiatan yang direncanakan, atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus ditanggulangi atau didanai dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA.

Penerimaan pembiayaan yang diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Penerimaan piutang daerah, proyeksi Pembiayaan Daerah lima tahun kedepan (2021-2026) dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran.

Target pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan beberapa asumsi data historis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi covid-19. Pembiayaan Daerah tahun 2021 sebesar Rp 303.000.000.000,00, untuk lebih jelasnya Proyeksi Pembiayaan Daerah disajikan pada tabel dibawah ini :

Selengkapnya realisasi, target dan proyeksi pembiayaan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 8
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020– 2024

URAIAN	Realisasi Capaian 2020	Realisasi Capaian 2020	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
Surplus /Defisit	1.555.712.387,19	0	0	0	0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	188.112.015.464,84	353.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
SILPA	149.148.119.206,03	53.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah		300.000.000.000		-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.519.608.646,00	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh Tempo		50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

3.2.4 Pendanaan Pembangunan lainnya

Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Gowa mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Hibah 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gowa tahun 2023 yang dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati Gowa yang termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Gowa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2023. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, capaian target pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2026, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada Rancangan RKP 2023.
2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2023.
3. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi maupun Kabupaten Gowa.
4. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2023. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Gowa sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional dan Sulawesi Selatan tahun 2023.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan

kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 pada periode ke-4. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gowa memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

4.1.1 Telaahan Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*), menghadapi tantangan besar akibat *pandemi Covid-19* yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2021. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi RPJMN 2020–2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Misi 7: Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

8. Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi Pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP reformasi sistem perlindungan sosial;
 - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
 - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%; Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - b. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;

- c. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - d. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - e. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - f. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP reformasi kesehatan nasional; dan
 - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP destinasi pariwisata prioritas; dan
 - MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP kawasan industri prioritas dan smelter.

6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
- b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
- c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
- d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
- MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.

7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
- b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
- c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
- d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
- e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
- MP transformasi digital;
- MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
- MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
- b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;

5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

4.1.2 Telaahan Agenda dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana pembangunan Tahun 2023 merupakan rencana akhir dari RPJMD provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Dengan demikian prioritas dan sasaran pembangunan yang merupakan dasar utama untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk tahun 2023 amat menentukan capaian kinerja akhir RPJMD. Demikian juga menentukan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan target kinerja dan besaran anggaran. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2023, mengacu kepada permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota. Rumusan tersebut menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018- 2023. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 yang telah diubah menjadi Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 yaitu provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD

Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel 4. 1
Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Visi	Pokok- PokokVisi	Penjelasan Visi
Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkarakter	Inovatif	Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehinggaterwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”
	Kompetitif	Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengankualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”
	Produktif	Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barangdan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud
		Sulawesi Selatan yang “mandiri dansejahtera”.
	Inklusif	Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujudSulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.
	Berkarakter	Kondisi penyelenggaraan pem- bangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang teralhir dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu ***Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Peningkatan Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target			
					RKPD Tahun 2023	P-RPJMD	Ranc-RKP	
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/angka	A (81 – 90)	A (81 – 90)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/angka	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/angka	A (4,51 – 5,0)	A (4,51 – 5,0)	
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,567-0,607 (2021: 0,568)	0,607	
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,4	83,4	
3	Pengembangn kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,98	65,98	
			7	Tingkat Kemiskinan	%	7,45 (2021: 8,53)	7,45	7,75 – 8,00
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,69 (2021: 5,72)	5,69	4,95 – 5,50
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Rasio Gini	Angka	0,376-0,381 (2021:0,377)	0,381	0,375 – 0,378

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target			
					RKPD Tahun 2023	P-RPJMD	Ranc-RKP	
5	Akselerasi pembangunan sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10	IPM	Angka	73,05	73,05	73,50 – 73,53
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11	Indeks Pendidikan	Angka	67,05	67,05	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	Indeks Kesehatan	Angka	77,86	77,86	
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13	Indeks Pemberdayaan Gender(IDG)	Angka	77.23	77.23	
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14	Angka kriminalitas	Kasus	24,438	24,438	
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04–6,52 (2021:4,675)	5,04–6,52	6,70 – 7,30
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16	Produktifitas Total Daerah	Rp/- Angkatan Kerja	77.349.122	77.349.122	
7	Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17	IKLH	poin	73,24 (2021:73,22)	72,84	
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	Juta TonCO2Eq	1,347	1,347	

Perioritas3 Pembangunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan arah kebijakan RPJMD 2018-2023 sebagai mana pada tabel IV. 8 yang menggambarkan arah kebijakan RPJMD terhadap Prioritas Penguataann tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 4. 3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Misi RPJMD untuk Tahun 2023

No.	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif (1)	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahandan pelayananpublik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1 Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2 Nilai SAKIP Provinsi
			Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3 Indeks Pelayanan Publik
2	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel (2)	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4 Indeks Williamson
			Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5 Indeks Layanan Infrastruktur
3	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif (3)	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6 PDRB Perkapita ADHB
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	7 Tingkat Kemiskinan
		Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	8 Tingkat Pengangguran terbuka	
	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif,	Akselerasi	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	9 Rasio Gini
				10 IPM

No.	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
4	Inklusif dan Berkarakter (4)	pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11 Indeks Pendidikan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12 Indeks Kesehatan
			Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14 Angka kriminalitas
5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sumber daya Alam yang Berkelanjutan (5)	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15 Pertumbuhan Ekonomi
			Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16 Produktifitas Total Daerah
		Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17 IKLH
			Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18 Potensi Penurunan emisiGRK (Juta Ton CO2Eq)

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;

Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi

pelayanan yang responsif. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur salah satu program nyata adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani (Sulsel Bersih Melayani). Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek pelayanan menjadi hal utama yang perlu diupayakan untuk meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan Nilai SAKIP A pada periode akhir RPJMD, serta meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik melalui inovasi dalam pelayanan publik yang diukur dengan Indeks Pelayanan Publik yang diharapkan mencapai nilai A pada tahun 2023.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Provinsi mencapai nilai A adalah:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.
- b. Penataan dan penguatan kelembagaan.
- c. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah.
- d. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- e. Implementasi e-government.

Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkannya antara lain:

- a. Pengembangan inovasi daerah.
- b. Pengelolaan informasi publik.
- c. Penataan organisasi.

2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah;

Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuat inter-konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan saat ini masih menghadapi isu kesenjangan, baik kesenjangan secara ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Sedangkan kesenjangan sosial ditunjukkan dengan tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran, maka distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah perlu untuk mendapatkan perhatian yang seksama, sehingga berdampak pada semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan indeks layanan infrastruktur. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya:

- a. Membangun konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat

- kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
- b. Mengoptimalkan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta.
 - c. Membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut;
 - d. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian;
 - e. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan.
 - f. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya.

3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;

Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan. RTRWN dan RTRWP menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang, kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, kawasan perkotaan Bantaeng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan

kawasan perkotaan Sengkang.

Berdasarkan pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing kawasan dan sekitarnya, yaitu meliputi: Kawasan Makassar dan sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya, Kawasan Parepare dan sekitarnya, serta Kawasan Palopodan sekitarnya.

Pengembangan komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta pembangunan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat;
 - b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
 - c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kemaritiman.
- 4. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.**

Sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi daerah. Hal ini dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk:

- a. Peningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara

- komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dan daerah dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara
- b. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi yang menitikberatkan pada pengembangan produk pariwisata yang mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat wisatawan dan pengembangan produk wisata tersebut harus mendukung pelestarian lingkungan.
 - c. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan yang datang.
 - d. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan pada perluasan segmen pasar untuk produk-produk ekonomi kreatif. Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar negeri. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan jangkauan maupun transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia sehingga mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
 - e. Meningkatkan citra pariwisata daerah yang berdaya saing yang menitikberatkan pada pembangunan citra (branding) pariwisata nasional meliputi citra bangsa (national branding), citra daerah/wilayah di Indonesia (regional branding) maupun citra destinasi pariwisata Indonesia (destination branding). Pengembangan citra dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan awareness hingga citra pariwisata daerah menjadi top of mind tujuan pariwisata.
 - f. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata. Oleh karenanya, digital marketing akan digunakan dalam pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan konten creator dan influencer.
 - g. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini fokus pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri. Serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi
 - h. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang fokus kepada penguatan komunitas maupun kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berjalannya komunitas dan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan bidang ini secara signifikan, merata dan

menyeluruh.

5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;

Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial;

6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;

Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pendistribusian tenaga pendidik, pengembangan pendidikan vokasional serta meningkatkan kualitas belajar mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kululusan pada pendidikan tinggi bereputasi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sulawesi Selatan akan diarahkan pada kebutuhan dunia usaha, khususnya pada sektor jasa dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat menggerakkan PDRB Sulawesi Selatan melalui strategi antara lain:

- a. Peningkatan akses layanan Pendidikan menengah yang merata. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Sulawesi Selatan untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era glocal, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun.
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang bereputasi melalui
- d. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan semua jenjang melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para stake holder Pendidikan.
- e. Penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi

- Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) Di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik ; meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan; mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas ; dan memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
- f. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK pada dunia usaha dan industri;
 - g. Meningkatkan sarana prasarana SMK untuk mendukung link and match antara sekolah vokasi dengan dunia industri.
 - h. Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui upaya penambahan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar mengajar.

7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga;

Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana prasarana olahraga serta meningkatkan prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi olah raga. Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan. Olahraga merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Olahraga selain berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga merupakan modal sosial dengan membentuk watak bangsa yang akan diperoleh melalui strategi penumbuhan budaya olahraga dan prestasi.

Kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah berada di atas rata-rata kinerja pembangunan nasional. Permasalahan

yang masih harus menjadi perhatian di Sulawesi Selatan antara lain adalah belum optimalnya peran upaya kesehatan berbasis masyarakat, belum optimalnya pemenuhan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, khususnya pada rumah sakit di Kabupaten/Kota, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan akan dilakukan melalui strategi:

- a. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
- b. Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
- d. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengembangan dan pembinaan olahraga.

8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;

Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan serta mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi yang akan dilaksanakan melalui strategi:

- a. Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan;
- b. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan mengoptimalkan upaya pencegahan;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat

Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan melalui:

- a. Meningkatkan Pemahaman nilai keagamaan dan budaya lokal, pencegahan konflik berbasis masyarakat. Untuk memperkuat landasan kehidupan

masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin religius, toleran, juga dilakukan upaya peningkatan peran tokoh agama dan guru agama serta Lembaga keagamaan. Hal ini sebagai upaya untuk membangun hubungan yang harmonis menuju kehidupan yang saling menghormati, serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

- b. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
- c. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19;

a. Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam,

Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat. Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak cukup efektif mengurangi angka kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas rumput laut, kakao, dan jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pengembangan industri sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai nilai tambah tinggi menciptakan kesempatan kerja.

Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran visi/misi gubernur melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja.

Pemerintah melalui kebijakan percepatan peningkatan populasi sapi yang diharapkan akan meningkatkan produksi daging lokal guna mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Asia pada Tahun 2045. Sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, maka pemerintah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah sentra peternakan dengan sistem pemeliharaan semi intensif sekaligus sebagai Lumbung Ternak Nasional.

Peningkatan produksi perikanan sebagai sumberdaya kelautan dan jasa maritim merupakan upaya yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi Selatan. Salah satu komoditas perikanan yang volume ekspornya bertumbuh positif adalah ikan kerapu, namun memperhatikan rendahnya produksi kerapu di Sulawesi Selatan yang sangat dipengaruhi oleh skema produksi yang dilakukan nelayan maka sangat dibutuhkan upaya peningkatan manajemen budidaya dan penangkapan ikan kerapu dengan melakukan edukasi dan pelatihan terhadap kelompok nelayan guna meningkatkan jumlah produksi dan nilai kerapu tanpa merusak ekosistem kerapu di lautan.

Komoditas perkebunan yang paling dominan di wilayah Sulawesi adalah kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok sekitar 67% produksi kakao nasional. Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan kakao unggulan di Indonesia yang saat ini telah didukung oleh ketersediaan pusat penelitian dan pengembangan kakao yang akan berperan dalam meningkatkan produktivitas petani dengan melakukan pembinaan terhadap petani untuk memproduksi kakao berkualitas tinggi, sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi sentra benih kakao di Indonesia.

Pengembangan ekonomi maritim dengan mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati, nonhayati, dan jasa-jasa lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa lingkungan secara terarah dan berkelanjutan selain dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, juga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir. Sebaliknya,

terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya, degradasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar gugus kepulauan merupakan akibat dari pemanfaatan sumberdaya atau jasa lingkungan yang tidak terarah dan tidak berkelanjutan

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan sesuai dengan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan hilirisasi komoditas unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan jasa maritim yang diiringi dengan upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut.

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan potensi kawasan pesisir untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
- 2) Peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir;
- 3) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4) Pembangunan dan Pengembangan industri perkapalan.

b. Pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19

Corona virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari

optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang menyerang sistem pernapasan. Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin atas penyakit tersebut membuat COVID-19 memberikan ancaman serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang terus meningkat.

Untuk itu, kecenderungan pembiayaan yang lebih ekspansif ditempuh Sulawesi Selatan harus dapat memastikan untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan untuk alokasi program pembangunan daerah dan program perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih ekspansif ke depan, akan difokuskan pada arah kebijakan, antara lain: (1) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, untuk tetap menjaga stabilitas

permintaan konsumsi domestik; serta (2) menciptakan iklim investasi untuk mendorong peningkatan investasi daerah, selain untuk merespon permintaan konsumsi domestik juga ditujukan untuk mendorong produksi unggulan daerah dalam memenuhi permintaan pasar ekspor.

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang terkena dampak akibat penyebaran wabah covid-19, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, maka di tahun 2020 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar (-0,89) – 1,59 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4-2,3 persen. Namun target ini dapat dicapai dan melampaui target yaitu -0.70 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional yaitu -2,07 persen.

Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan mengancam kesehatan publik, mendorong negara-negara untuk mengambil berbagai langkah pencegahan yang ekstrim. Salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah melalui memberlakukan physical distancing serta karantina mandiri termasuk dengan memindahkan aktivitas kantor, belajar, dan beribadah di rumah. Berbagai kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dikurangi atau bahkan dilarang dengan pengawasan ketat dari aparat hukum. Tes COVID-19 bersifat cepat (rapid) dan masif (massive) serta penelusuran (tracing) juga menjadi tonggak kebijakan utama untuk dapat memutus rantai penyebaran virus. Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Namun demikian, langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Dampak dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan COVID-19 yang extraordinary dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand) maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.

11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership* dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi.

Pilar pembangunan lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Terrestrial Berkelanjutan.

KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 menghasilkan skenario terkait integrasi pilar pembangunan lingkungan hidup dalam pembangunan Sulawesi Selatan yang merujuk pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan meliputi:

- a. Permukiman dengan akses layanan air minum dan sanitasi yang kurang memadai akan berdampak pada kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya tambahan guna mencapai sasaran pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi layak pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya;
- b. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai kawasan yang aman dan nyaman dihuni sesuai standar pelayanan perkotaan dengan meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu dan memperluas jangkauan transportasi umum serta mengoptimalkan kemampuan kawasan perkotaan untuk melakukan pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan danau di Sulawesi Selatan, khususnya pada Danau Tempe dan Danau Matano yang ditetapkan menjadi danau prioritas Nasional sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman Penyelematan Danau Prioritas Nasional dan

- Pencanangan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan danau dengan melaksanakan penyelamatan danau dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau yang sehat dan lestari, serta mendukung penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelamatan danau prioritas di Sulawesi Selatan;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan melalui pembagian wilayah kelola Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merata yang belum didukung oleh hubungan koordinasi yang didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan pendanaan yang cukup;
 - e. Mengoptimalkan penurunan emisi gas rumah kaca melalui identifikasi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca tinggi, dan membangun basis data terpadu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca serta mengintegrasikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca kedalam rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana perangkat daerah;
 - f. Mengoptimalkan peran dan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan guna menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan dan sumber daya hayati laut.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gowa

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gowa dan Target Kinerja Tahun 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
1. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN INKLUSIF							
	Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	70.29	71.36	73.05
		Meningkatnya ksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat)	Indeks Pendidikan	Nilai	65.19	67.46	68.59
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Nilai	77.58	78.01	78.22
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	78.31	79.25	79.57
			Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	41.50	42.50	43.00
2. MEMPERKOKOH KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN TEKNOLOGI							
	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,26	5,04 - 6,38	5,18-6,52
			PDRB Per Kapita				
			ADHB	Juta	30,44	28,15	28,50
			ADHK	Juta	19,45	19,54	20,47

Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)					
Meningkatnya kesempatan kerja	Pengangguran Terbuka	Persen	4.30	5.00-5.25	4.50-5.08	
	Jumlah Penganggur	Ribu Jiwa	17.505	16.725	15.952	
Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat mampu	Angka Kemiskinan golongan kurang mampu	Persen	7.54	7.08-7.35	6.75-6.93	
	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	58,66	58,21	57,62	
Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Ratio	Nilai	0.358	0.331	0.342	
3. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, TERINTEGRASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN						
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat	Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB	Persen	13.55	57.29	58.04	
Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	50	55	55	
Berkembangnya infrastruktur ekonomi perdesaan	Indeks Desa Sosial Masyarakat Membangun	Nilai	0.6884	0.6836	0.6912	
Meningkatnya kualitas	Indeks Kualitas	Persen	67.60	60-70	70-80 (Baik)	

lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	(Cukup Baik)	(Cukup Baik)			
4. MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INOVATIF MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	52.39 (CC)	60-70 (B)	60-70 (B)	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai (Kategori)	3.91 (Baik)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	
Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai (Kategori)	3.66 (Tinggi)	3.76 (Tinggi)	3.86 (Tinggi)	
	Nilai SAKIP	Nilai (Kategori)	63.25 (B)	60-70 (B)	70-80 (BB)	
	Nilai IPKD	Nilai	60-80	60-80	60-80	

4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 disusun dengan memperhatikan:

Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program di tingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang di dalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan. Prioritas II berhubungan dengan tema/ program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD Kabupaten Gowa Tahap ke-4, kinerja RPJMD periode 2018-2023 yang belum mencapai target, evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2020, permasalahan pembangunan Kabupaten Gowa yang belum tertangani, serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi.

Proses penentuan prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pembobotan dilakukan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan, kemudian dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;

3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Pencapaian SDGs;
8. Pencapaian SPM.

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan di Kabupaten Gowa, maka ditetapkan prioritas RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan inklusif
3. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang;
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, program/kegiatan tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada periode 2016-2021 pada tahun kedua.

4.2.1. Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi

4.2.1.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional

Tema pembangunan RKP 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2023.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah: "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta mempedomani RPJMN 2020-2024. Sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2022 dengan
Prioritas Nasional Tahun 2022

No	Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang dan Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan inklusif
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023 selanjutnya disandingkan dengan Program dalam RKPD Tahun 2023. Hasil pemetaannya diketahui bahwa 31 program Kabupaten Gowa mendukung 52% Kegiatan Prioritas dari Prioritas Nasional 1, 80% dukungan terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 2, 62% dukungan terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 3, 45% dukungan terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional 4, 55% dukungan terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional 5, 54% dukungan terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional 6, sedangkan untuk Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional 7 didukung sebanyak 54% dari program daerah atau sebanyak 14 program. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6
Keterkaitan Kegiatan Prioritas (KP) Pada Prioritas Nasional (PN) RKP 2023 dengan Program Daerah (PD) RKPD 2023

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
1	PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			24 KP (31 PD) dari 46 KP = 52%
	KP 1 : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	KP 2: Pengelolaan Impor	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	KP 3: Pengembangan Industri Halal	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	KP 4: Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	KP 5: Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	KP 6: Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 7: Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro Yang Terintegrasi Hulu-Hilir	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	KP 8: Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	KP 9: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi	
	KP 10: Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi	
	KP 11: Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi	
	KP 12: Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Perkebunan	
	KP 13: Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 14: Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi	
	KP 15: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	
	KP 16: Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan	
	KP 17: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	KP 18: Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi	
	KP 19: Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	
	KP 20: Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Perkebunan	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 21: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	
	KP 22: Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	KP 23: Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	
	KP 24: Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	KP 25: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan			
	KP 25: Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi			
	KP 26: Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik			
	KP 27: Pengembangan Industri Pendukung EBT			
	KP 28: Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)			
	KP 29: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
	KP 30: Penyediaan Air untuk Pertanian			
	KP 31: Penyediaan Air Baku untuk air baku untuk kawasan prioritas			

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 32: Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konseruasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau			
	KP 33: Pengembangan Waduk Multiguna			
	KP 34: Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang taut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut			
	KP 35: Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan			
	KP 36: Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan			
	KP 37: Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi			
	KP 38: Peningkatan Nilai Tambah usaha sosial			
	KP 39: Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kau'asan Industri Terutama di Luar Jawa			
	KP 40: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantar Pasok			

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 41: Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor			
	KP 42: Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global			
	KP 43: Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA/ Free Trade Agreement (FTA) / Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi			
	KP 44: Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan			
	KP 45: Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata			
	KP 46: Reformasi Fiskal			
2	PN.2 : Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan			4 KP (7 PD) dari 5 KP = 80%
	KP 1: Kelembagaan dan Keuangan daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN	
	KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	KP 5: Pengembangan Kawasan Strategis			
3	PN. 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			18 KP (34 PD) dari 29 KP = 92%
	KP 1: Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	
	KP 2: Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	KP 3: Kualitas Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	KP 4: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	KP 5: Pendampingan dan Iayanan Terpadu	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 6: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	KP 7: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	
	KP 8: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	KP 9: Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	
	KP 10: Peningkatan Kapabilitas, Iptek dan Penciptaan Inovasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	KP 11: Peningkatan Kesehatan ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	
	KP 12: Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	
	KP 13: Penjaminan Mutu Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	KP 14: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Syekh Yusuf	
	KP 15: Perlindungan Sosial Adapti	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	
	KP 16: Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	KP 17: Reforma Agraria	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	KP 18: Sistem Jaminan Sosial Nasional	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	
	KP 19: Perhutanan Sosial			
	KP 20: Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial			
	KP 21: Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan	
	KP 22: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	KP 23: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	KP 24: Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Dinas Pendidikan	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
		KEPENDIDIKAN		
	KP 25: Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan	
	KP 26: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	
	KP 27: Peningkatan Pengendalian Penyakit	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	
	KP 28: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	KP 29: Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4	PN. 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			9 KP (15 PD) dari 20 KP = 75%
	KP 1: Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	KP 2: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	
	KP 3: Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
	KP 4: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 5: Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	KP 6: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	KP 7: Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	KP 8: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	
	KP 9: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
	KP 10: Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi			
	KP 11: Peningkatan Budaya Literasi			
	KP 12: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan			
	KP 13: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama			
	KP 14: Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 15: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	
	KP 16: Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	KP 17: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan tokal	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	KP 18: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental			
	KP 19: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	KP 20: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan	
5	PN. 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			11 KP (17 PD) dari 20 KP = 55%
	KP 1: Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 2: Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	KP 3: Keselamatan dan Keamanan Transportasi	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	
	KP 4: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	KP 5: Konektivitas Darat	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	
	KP 6: Konektivitas Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	KP 7: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	KP 8: Penuntasan Infrastruktur TIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
	KP 9: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi layak dan Aman di Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	KP 10: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi layak dan Aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	KP 11: Penyediaan Akses Perumahan dan Pemukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	Perkotaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	KP 12: Pemanfaatan Infrastruktur TIK			
	KP 13: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik			
	KP 14: Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan			
	KP 15: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan			
	KP 16: Transportasi Perkotaan			
	KP 17: Konektivitas Udara			
	KP 18: Konektivitas laut			
	KP 19: Konektivitas Kereta Api			
	KP 20: Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi			
6	PN.6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			6 KP (14 PD) dari 11 KP = 54%
	KP 1: Pemulihan lahan BerkeLanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	
	KP 2: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	
	KP 3: Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	
	KP 4: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	
	KP 5: Pengelolaan Limbah	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	
	KP 6: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	
	KP 7: Rendah Karbon Pesisir dan Laut			
	KP 8: Pengembangan Industri Hijau			
	KP 9: Pembangunan Energi Berkelanjutan			
	KP 10: Peningkatan Ketahanan Iklim			
	KP 11: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
7	PN.7 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			6 KP (14 PD) dari 11 KP = 54%
	KP 1: Pemulihan lahan BerkeLanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	
	KP 2: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	
	KP 3: Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	

No	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROGRAM DAERAH (PD)	SKPD PELAKSANA	PERSENTASE DUKUNGAN
	KP 4: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	
	KP 5: Pengelolaan Limbah	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	
	KP 6: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	
	KP 7: Rendah Karbon Pesisir dan Laut			
	KP 8: Pengembangan Industri Hijau			
	KP 9: Pembangunan Energi Berkelanjutan			
	KP 10: Peningkatan Ketahanan Iklim			
	KP 11: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			

Selain memperhatikan prioritas nasional, pembangunan Kabupaten Gowa juga harus mempertimbangkan kebijakan global yang akan berpengaruh terhadap pembangunan kota, Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa dengan Tujuan SDGs dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 7
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa dengan Tujuan SDGs

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan inklusif
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan inklusif
5	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
6	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang
8	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus- menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
9	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang dan Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023
10	Mengurangi kesenjangan;	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
11	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
13	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
14	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;	-
15	Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
16	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif diseluruh tingkatan;	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang
17	Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (<i>means of implementation</i>) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	-

4.2.1.2 Sinkronisasi Prioritas Daerah Dengan Prioritas Provinsi

Selain berpedoman terhadap prioritas nasional, pembangunan Kabupaten Gowa juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan pembangunan nasional, tema pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2023 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan daerah yang terdampak pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu ***Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Peningkatan Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Tabel 4.7 merupakan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Tabel 4. 8
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023
1	Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
3	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
4	Peningkatan Pembangunan manusia	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan inklusif
5	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
6	Pelestarian lingkungan hidup	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang;

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Perumusan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gowa yang akan dilaksanakan tahun 2023, selain mempertimbangkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan

RKPD Tahun 2022, Target RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023, Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 serta Pokok Pokok Pikiran DPRD. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022, isu strategis pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 maka telah dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan inklusif
3. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang;
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Adapun tema pembangunan RKPD Tahun 2023 adalah “ **Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan di Dukung Penguatan SDM, Pemanfaatan Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Daerah**” Tema tersebut berfokus pada empat hal yaitu Pemulihan Sosial Ekonomi, Penguatan SDM, pemanfaatan infrastruktur dan peningkatan daya saing daerah. **Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan** dapat diterjemahkan sebagai upaya antisipasi dan pulih kembali dari berbagai permasalahan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Antisipasi dan Pemulihan Pembangunan dilakukan melalui upaya **Penguatan SDM, Pemanfaatan Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Daerah**. Fokus Pemulihan Ekonomi diarahkan kepada upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi sedangkan Reformasi Sosial dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan ketahanan kota melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Gowa Tahun 2023, yaitu :

1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan inklusif
3. Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang;
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Proses penentuan prioritas tersebut dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dilakukan pembobotan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan, kemudian dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Pencapaian SDGs;
8. Pencapaian SPM.

Prioritas pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2022 yang telah ditetapkan tersebut, dicapai melalui pelaksanaan program – program prioritas. Program prioritas merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah. Anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung (*supporting*). Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan, Sasaran serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.8.

Tabel 4. 9
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023

N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
1	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan intelektual	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Hubungan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Industrial	
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan inklusif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Perkebunan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program	Dinas Pengendalian

N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Pengendalian Penduduk	Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
4.	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang;	Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang
			Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran

NO	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang
5.	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Khusus Anak	Perlindungan Anak
6.	Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan DanAsistensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Setda)	Sekretariat Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesra
			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Program Penyelenggaraan	Dinas Komunikasi, Informatika dan

NO	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Statistik Sektoral	Persandian
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perijinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu atap
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu atap

NO	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Pemerintahan
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan

4.2.2 Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Maksimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dinyatakan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Tujuan dari penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain:

1. Dengan adanya SPM maka masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan publik dari Pemda dengan mutu tertentu;
2. SPM sebagai alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar dan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan dan bantuan lain yang lebih adil dan transparan;
3. SPM dapat dijadikan dasar dalam menentukan Anggaran Kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat menjadi dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur;
4. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemda dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan publik;
5. Adanya SPM dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda;
6. SPM dapat merangsang rasionalisasi kelembagaan Pemda, karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada pembentukan kelembagaan yang berkorelasi

dengan pelayanan masyarakat; dan

7. Adanya SPM dapat membantu Pemda dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Kejelasan pelayanan akan membantu Pemda dalam menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai untuk mengelola pelayanan publik tersebut.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dalam menyusun SPM ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM. Penyusunan SPM oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Penerapan SPM dalam kerangka Pembangunan Nasional yang akan menjadi arah kebijakan Pemerintah Daerah adalah:

1. Menetapkan SPM sebagai bagian dari Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Menjadikan SPM sebagai upaya mewujudkan penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
3. Penerapan SPM merupakan sasaran meningkatnya kinerja Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah mengkomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM. Pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah dan pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta permintaan Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penerapan SPM di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gowa memacu pencapaian SPM dengan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Jenis Pelayanan Dasar yang termaksud SPM adalah sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gowa yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, Pendidikan Dasar sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a) Pendidikan anak usia dini;
- b) Pendidikan dasar; dan
- c) Pendidikan kesetaraan.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Gowa telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c) Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d) Pelayanan Kesehatan Balita;
- e) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- g) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- k) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis;
- l) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Gowa telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari;
- b) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Gowa telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana;
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gowa telah ditetapkan sebagai berikut:

Sub Urusan Kentraman dan Ketertiban Umum

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sub Urusan Bencana

- a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- b) Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
- c) Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana.

Sub Urusan Kebakaran

Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

6. Bidang Urusan Sosial

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban

Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gowa telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti;
- b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti;
- c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti;

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Dijabarkan dalam Satu Kesatuan Wilayah (Spasial)

Dalam dokumen RPJMD telah ditetapkan beberapa kawasan berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa pasal 31 rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa yang ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya . Berdasarkan hal tersebut dibuat pemetaan antara konsep spasial dengan prioritas pembangunan daerah. Hubungan antara keduanya dijabarkan dalam Tabel 4.10.

Tabel 4. 10
 Prioritas Pembangunan Daerah Dijabarkan dalam Satu Kesatuan Wilayah (Spasial)

NO	PRIORITAS	KONSEP SPASIAL
1	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah	1. Kawasan peruntukan hutan produksi di Kecamatan Biringbulu, Bontolempangan, Bungaya, Parigi, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Manuju, Parangloe, Pattallassang dan Tompobulu
		2. Kawasan peruntukan pertanian di 18 kecamatan, pusat pengembangan ternak sapi di kecamatan Tombolopao dan Bontonompo, pusat pengembangan hortikultura di Kecamatan Tombolopao dan Tinggimoncong, pusat pengembangan perkebunan di 9 kecamatan dataran tinggi
		3. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Pattallassang (industri sedang dan besar), indutri rumah tangga di 18 kecamatan
		4. Kawasan peruntukan pariwisata di Kecamatan Tinggimoncong, Somba Opu, Pattallassang, Parangloe, dan Barombong
		5. Kawasan peruntukan permukiman di Kecamatan Somba Opu, Pallangga, Barombong, Bontomarannu, dan Pattallassang
2.	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan inklusif	1. Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi di Kecamatan Bontomarannu, Somba Opu, Pattallassang, Manuju, dan Pallangga
		2. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga di Kecamatan Somba Opu dan Pallangga

NO	PRIORITAS	KONSEP SPASIAL
		3. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan di Kecamatan Somba Opu, Bontonompo, dan Bajeng
3.	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang;	1. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kecamatan Somba Opu, Pattallassang, Pallangga, Bontomarannu, dan Barombong 2. Kawasan sekitar danau atau waduk di Kecamatan Somba Opu dan Parangloe 3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya di Kecamatan Tinggimoncong dan Somba Opu 4. Kawasan Lindung Geologi di Kecamatan Pattallassang dan Bontomarannu
4.	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Kawasan Rawan Bencana Alam Tanah Longsor dan Angin Kencang di kecamatan dataran tinggi Sedangkan Bencana Alam Banjir dan Angin Kencang di kecamatan dataran rendah 2. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di 18 Kecamatan, terutama di Kecamatan Padat Penduduk (Perkotaan) 3. Kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Parangloe (Desa Belabori) dan tersebar di Kecamatan lainnya
5.	Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Kawasan Peruntukan Pemerintahan di Kecamatan Somba Opu 2. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara di Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, dan Tinggimoncong

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2023 Kabupaten Gowa. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program. Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III disajikan bahwa pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp. 1.768.801.149.949,-** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp248.314.756.493,-** dan pendapatan transfer sebesar **Rp. 1.496.429. 325.456,-** serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 24.057.068.000,-** Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun **2023**, dengan jumlah belanja daerah sebesar **Rp. 2,226,924,160,661.00,-**

Belanja daerah tahun 2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2023 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023.

Struktur Belanja Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja pada Tabel 5.1 :

Tabel 5. 1
Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
A	BELANJA	2,226,924,160,661.00	2,672,308,992,793.20
1	BELANJA OPERASI	1,528,487,177,565.64	1,834,184,613,078.76
	Belanja Pegawai	906,451,514,827.31	1,087,741,817,792.77
	Belanja Barang dan Jasa	564,387,144,208.75	677,264,573,050.50
	Belanja Bunga	17,339,485,813.33	20,807,382,975.99
	Belanja Hibah	33,881,042,680.52	40,657,251,216.62
	Belanja Bantuan Sosial	6,427,990,035.73	7,713,588,042.88
2	BELANJA MODAL	414,560,703,415.85	497,472,844,099.03
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,072,615,664.04	3,687,138,796.85
4	BELANJA TRANSFER	280,803,664,015.47	336,964,396,818.57
	Belanja Bagi Hasil	2,059,197,822.73	2,471,037,387.28
	Belanja Bantuan Keuangan	278,744,466,192.74	334,493,359,431.28

Sumber : BPKD Kabupaten Gowa, Tahun 2023

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 5 (lima) prioritas pembangunan.

Prioritas pertama Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 12 (Sebelas) program prioritas, prioritas kedua Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif dengan 1(satu) sasaran dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Program, Prioritas pembangunan ke 3 (tiga) Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan 1 (Satu) sasaran yang dijabarkan kedalam 25 (dua puluh lima) program, prioritas pembangunan ke 4 (empat) Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan 1 (Satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program, dan untuk prioritas pembangunan ke-5 (lima) Pembangunan Manusia, dengan 2 (dua) sasaran yang dijabarkan ke dalam 5 (Lima) program, Prioritas pembangunan ke 5 (lima) Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dijabarkan dengan 1 sasaran yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) program, asaran yang dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebanyak 5 (Lima) prioritas pembangunan dengan 7(tujuh) sasaran, dan 62

(Enam Puluh Dua) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel V.2. berikut.

Tabel 5. 2
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana pertanian	100%	2,134,741,104	100%	2,182,183,492	Dinas TPH
				Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian (Pernakan)	100%	2,228,827,205	100%	2,278,360,558	Dinas TPH
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	10%	93,174,433	10%	95,245,137	Dinas Peternakan dan Perkebunan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	992,5 Ton	695,434,863	1040,8 Ton	710,890,175	Dinas Perikanan
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	13.50%	327,973,895	14.00%	335,262,772	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang telah mendaftarkan dan atau mendapatkan izin usaha mikro kecil atau Nomor Induk Berusaha (NIB)	1.42%	33,709,811	2.26%	34,458,977	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-49%	131,181,940	-29%	134,097,321	Dinas Pariwisata
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	48%	14,940,799	49%	15,272,842	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	46%	368,149,317	48%	376,331,051	Dinas Penanaman Modal
			Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan UMKM	0.58%	33,501,022	3.52%	34,245,547	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	61.29%	8,715,004,908	67.74%	8,908,686,775	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	48%	14,940,799	49%	15,272,842	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	64%	67,212,835	66%	68,706,570	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100%	72,164,610,473	100%	73,768,393,451	Dinas Pendidikan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan kinerja penyelenggaraan bidang pemerintahan, hukum, kerja sama dan kesejahteraan masyarakat	100%	4,896,795,953	100%	5,005,622,121	Bag. Administrasi KESRA Setda
			Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan sekolah yang menerapkan kurikulum bermuatan lokal di tingkat Pendidikan Dasar	20.08%	103,138,889	19.98%	105,431,043	Dinas Pendidikan

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	87%	1,525,228,905	92%	1,559,125,522	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	50%	8,845,400,412	60%	9,041,980,183	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Sakit yang mendapatkan layanan kesehatan	70%	116,487,520,000	75%	145,609,400,000	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP yang terlaksana	100 Persen	116,487,520,000	100%	145,609,400,000	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG	60%	12,208,469	65%	12,479,790	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	600-700	21,536,641	700-800	22,015,270	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda mandiri	54.52%	390,115,736	56.73%	398,785,650	Dinas Pemuda Olahraga
3	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang	Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	84.99%	19,952,249,674	86.55%	20,395,667,551	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100.00%	9,159,312,114	100.00%	9,362,868,244	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang tersedia	2 unit	1,839,969,129	2 unit	1,880,860,518	Dinas PUPR

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100.00%	3,246,693,080	100.00%	3,318,847,437	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	70.10%	2,641,436,362	71.10%	2,700,139,522	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan	9.52%	92,957,674,003	14.29%	95,023,561,068	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	54.20%	4,548,869,939	56.20%	4,649,963,815	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	84.4%	270,051,458,614	84.4%	276,053,069,788	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.40	258,930,323	0.60	264,684,779	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan terhadap RTRW	0.84	1,536,109,765	0.87	1,570,248,198	Dinas PUPR

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100.00%	26,564,993	100.00%	27,155,372	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	56.00%	1,148,024,798	58.00%	1,173,538,448	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase meningkatnya rumah layak huni	73.30%	12,970,463	73.60%	13,258,717	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	62.00%	12,970,463	64.00%	13,258,717	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan program perencanaan lingkungan hidup	100.00%	112,894,771	100.00%	115,403,739	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	100.00%	1,098,165,439	100.00%	1,122,571,017	Dinas Lingkungan Hidup

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	44.14%	236,825,832	44.14%	242,089,039	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang memiliki TPS LB3 sesuai regulasi	49.28%	32,174,128	52.70%	32,889,165	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	10.00%	34,579,603	10.00%	35,348,099	Dinas Lingkungan Hidup

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA	0.00%	5,851,787	100.00%	5,981,837	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	55.56%	6,210,242	61.11%	6,348,258	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan (adhiyayata)/ filantropi yang diusulkan dalam penilaian tingkat Kabupaten	88.89%	5,605,118	89.06%	5,729,686	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup	100.00%	1,872,790	100.00%	1,914,411	Dinas Lingkungan Hidup

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah tingkat kabupaten	80.00%	6,845,475,168	71.00%	6,997,608,693	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100%	683,270,779	100%	698,455,757	Dinas PMD
4	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	20.00%	92,932,775	21.00%	94,998,109	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0.27%	367,752,086	0.28%	375,924,991	Dinas PMD
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	39%	247,349,592	40%	252,846,678	Dinas PMD
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	68,517,457	100%	70,040,186	Dinas PMD

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%	94,090,684	100%	96,181,751	Dinas PMD
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan korban bencana	100%	60,777,328	100%	62,128,041	Dinas Pemadam Kebakaran
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	100%	1,408,353,914	100%	1,439,653,106	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	525,204,469	100%	536,876,589	Bappeda
				Tingkat konsistensi dokumen penjabaran RKPD ke dalam APBD	100%		100%		Bappeda

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	100%	154,381,923	100%	157,812,900	Bappeda
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan SKPD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah	100%	212,298,993,115	100%	217,017,116,157	BPKD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	398,341,721	100%	407,194,450	BPKD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Potensi Pajak Daerah	100.00%	1,204,824,846	100.00%	1,231,600,818	Bapenda
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78.4%	814,652,066	79.3%	832,756,856	BKPSDM

RKPD KABUPATEN GOWA 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10.06%	1,022,173,073	10.06%	1,044,889,801	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Unit Kerja yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan/Aset yang Material	95%	1,652,427,785	97%	1,689,151,264	Inspektorat Daerah
			Program Administrasi Umum	Persentase Kinerja Program Administrasi Umum	100%	40,654,068,687	100%	41,557,562,837	Sekretariat Daerah

5.3 Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2023 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang disusun menggunakan matrik program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Nama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- Lokasi Kegiatan;
- Besaran dana yang dibutuhkan;
- Sumber dana;
- Sinergitas terhadap Prioritas Nasional dan Daerah;
- Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024;
- Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

Tabel 5. 3
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Berdasarkan
Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
1	Dinas Pendidikan	3	12	46	584,893,875,677
2	Dinas Kesehatan	5	13	47	237,218,263,990
3	RSUD Syekh Yusuf	2	12	36	65,302,601,525
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	22	79	435,625,000,000
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10	26	48	5,018,305,520
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	9	21	13,614,418,958
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	19	27,805,500,000
8	Dinas Pemadam Kebakaran	2	11	36	5,067,400,000
9	Dinas Sosial	7	16	31	6,517,928,149
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	15	27	3,553,550,000

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	21	33	3,188,023,722
12	Dinas Ketahanan Pangan	5	15	47	5,756,303,628
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	6	6	3,359,497,656
14	Dinas Lingkungan Hidup	11	18	32	11,777,937,099
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	18	54	28,669,235,000
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	11	45	30,918,354,369
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	13	48	15,322,500,000
18	Dinas Perhubungan	2	18	44	32,205,113,240
19	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	11	28	10,709,268,834
20	Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	14	25	3,054,438,261
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	32	5,693,623,950
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	9	12	4,911,294,647
23	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1	1	2	27,592,000
24	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1	2	2	33,900,000
25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4	4	8	905,000,000
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	11	42	11,706,708,447
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	6	15	280,278,894
28	Dinas Perikanan	5	18	41	5,119,460,487
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5	12	23	6,379,200,000
30	Dinas Peternakan dan Perkebunan	7	20	32	20,721,646,051
31	Dinas Tanaman	6	13	38	45,545,729,815

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
	Pangan dan Holtikultura				
32	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	19	41	17,682,366,360
33	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	1	3	869,997,500
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	2	40,000,000
35	Sekretariat Daerah	3	19	57	49,909,000,000
36	Sekretariat DPRD	2	12	21	61,096,048,934
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	15	34	4,556,203,372
38	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3	12	41	301,850,512,138
39	Badan Pendapatan Daerah	4	16	66	14,899,615,328
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2	10	31	7,411,097,012
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2	3	3	1,350,000,000
42	Badan Penelitian dan Pengembangan	3	16	35	2,754,597,208
43	Inspektorat	3	10	30	9,858,850,000
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	18	27	3,632,200,000
45	Kecamatan Bontomarannu	8	14	17	13,400,000,000
46	Kecamatan Tompobulu	2	7	16	7,567,500,000
47	Kecamatan Pallangga	7	19	22	9,690,000,000
48	Kecamatan Bajeng	3	8	20	8,141,829,986
49	Kecamatan Biringbulu	5	14	32	3,973,322,905
50	Kecamatan Barombong	2	7	12	4,206,500,000
51	Kecamatan Bajeng Barat	4	7	11	2,675,000,000
52	Kecamatan Parangloe	2	7	8	8,805,000,000
53	Kecamatan Manuju	1	6	9	3,229,000,000
54	Kecamatan Bontonompo Selatan	4	10	18	3,545,500,000
55	Kecamatan Parigi	1	5	8	2,380,000,000
56	Kecamatan Somba Opu	4	10	16	20,514,100,000

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
57	Kecamatan Pattallassang	3	8	16	1,772,100,000
58	Kecamatan Bontolempangan	1	6	10	1,757,000,000
59	Kecamatan Tinggimoncong	4	10	16	11,625,000,000
60	Kecamatan Bungaya	4	16	28	4,464,120,000
61	Kecamatan Tombolopao	2	6	11	4,485,750,000
62	Kecamatan Bontonompo	2	7	14	7,880,000,000
JUMLAH		254	720	1,674	2,226,924,160,661

Sumber: Hasil Pengolahan Data SIPD Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023

Penjelasan lebih rinci terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran dokumen RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makropembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

6.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sector, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Gini Ratio
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. PDRB Perkapita ADHB

Target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 1
Target Indikator Makro Kabupaten Gowa Tahun 2022-2023

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,26	5,04 -6,38	5,18-6,52	5,18-6,52
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,54	7,08-7.35	6,75-6,93	6,75-6,93
	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	58,66	58,21	57,62	57,62
3	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	%	4,30	5.00-5.25	4.50-5,08	4.50-5,08
	Jumlah Penganggur	Ribu Jiwa	17.505	16.725	15.952	15.952
4	Gini Rasio	Angka	0,358	0,331	0,342	0,342
5	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	Angka/ Nilai	70,29 (Tinggi)	71,36 (Tinggi)	73,05 (Tinggi)	73,05 (Tinggi)
6	PDRB Perkapita ADHB	Jt Rp.	30,44	28,15	28,50	28,50
	ADHK	Jt Rp.	19,45	19,54	20,47	20,47

Sumber : BPS dan RPJMD Gowa 2021-2026

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Gowa 2023, merupakan periode akhir dari RPJMD tahun 2021-2026. RPKD 2023, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pembangunan Kabupaten Gowa dan pencapaian target RPJMD yang telah ditetapkan melalui Perda No.1 tahun 2021 RPJMD Kabupaten Gowa. Capaian targetkinerja pembangunan dan asumsi indikator kinerja pemerintah Kabupaten Gowa.

Capaian Pertumbuhan ekonomi pada beberapa tahun kedepan masih menjadi issue perekonomian Kabupaten Gowa. Pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian tidak lagi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu difokuskan pada inklusivitas pertumbuhan, dan tetap diupayakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk enurunkan tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan

pendapatan antar wilayah, serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan semata-mata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok Kabupaten Gowa.

Corona virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan.

Dampak positif lain dari perbaikan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, tentu saja akan berdampak positif terhadap menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada capaian tahun 2021, TPT Kabupaten Gowa 4,30 %, sedang asumsi TPT pada tahun 2022 turun menjadi 4,25 % dan pada tahun 2023 pemerintah Daerah menargetkan angka TPT turun menjadi 4,30%.

Suksesnya pencapaian kinerja pemerintah Daerah, juga dihubungkan dengan pengukuran indeks Gini Ratio. Faktor pemerataan pendapatan masyarakat akan lebih baik dengan standar pengukuran Gini Ratio. Jika pada tahun 2021 angka Gini Ratio dapat dicapai 0,358 maka pada tahun 2022 dan 2023 ditargetkan menjadi 0,318 dan 0,309, sehingga terdapat perubahan perbaikan pemerataan pendapatan masyarakat.

Indikator pembangunan Makro berikutnya yang perlu diperhatikan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil capaian IPM Kabupaten Gowa pada tahun 2021 adalah 70,29. Sejalan dengan program dan kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Gowa, asumsi pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan dan pada periode akhir RPJMD 2023, diharapkan capaian IPM menjadi 71,60.

Trend indeks IPM yang bertumbuh positif, dapat dilihat dari bertambahnya angka PDRB perkapita di Sulawesi Selatan. Jika pada tahun 2021 capaian angka PDRB perkapita Rp. 30,04 juta, maka pada tahun 2023 ditargetkan tumbuh positif menjadi Rp. 31,15 juta. Keenam indikator Makro Pembangunan yang menunjukkan trend yang lebih baik, akan berdampak baik pada capaian Target Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa periode 2021-2026.

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk

mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel 6. 2

Capaian Indikator Kinerja Utama 2021, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gowa Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Capaian 2021	TARGET KINERJA	
			2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	70,29 (Tinggi)	71,36 (Tinggi)	73,05 (Tinggi)
Indeks Pendidikan	Nilai	66,32	67,46	68,59
Indeks Kesehatan	Nilai	77,80	78,01	78,22
Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	78,62	79,25	79,57
Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	42,00	42,50	43,00
Pertumbuhan Ekonomi	%	7,26	5,04-6,38	5,18-6,52
PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	30,44	28,15	28,50
PDRB Perkapita ADHK	Juta Rp.	19,45	19,54	20,47
Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB	%	2,70	8,06	7,04
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,30	5,00-5,25	4,50-5,08
Jumlah Penganggur	Ribu Jiwa	17,505	16,725	15,952
Tingkat Kemiskinan	%	7,54	7,08-7,35	6,75-6,93
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	58,66	58,21	57,62
Rasio Gini	Angka	0,336	0,331	0,342
Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB		57,29	58,04	57,93
Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	55	55	55
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6884	0,6836	0,6912
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	62,99 (Cukup Baik)	60-70 (Cukup Baik)	70-80 (Baik)
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Kategori	52,20 (CC)	60-70 (B)	60-70 (B)
Indeks Pelayanan Publik	Nilai/ Kategori	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)
Nilai LPPD	Nilai/ Kategori	3,66 (Tinggi)	3,76 (Tinggi)	3,86 (Tinggi)
Nilai SAKIP	Nilai/ Kategori	63,51 (B)	60-70 (B)	70-80 (BB)
Nilai IPKD	Predikat	60	60-80	60-80

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome. Yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator kinerja utama sebagai suatu

prioritas program kegiatan yang mengacu padasasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan perangkat Daerah.

6.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan wakil Gubernur dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penyajian indikator indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. 3
Asumsi Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Gowa

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Asumsi Capaian 2022	Asumsi Capaian 2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan PDRB	6,38	6,54
2	Laju inflasi	2-3,5	2-3,5
3	PDRB per kapita :		
	- PDRB per kapita Atas Dasar harga Berlaku (ADHB)	25.786,98	28.220,18
	- PDRB per kapita Atas Dasar harga Konstan (ADHK)	15.827,48	15.827,48
4	Indeks Gini	0,327	0,318
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Rendah	Rendah
6	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,1007	0,1117
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	92,75	92,88
8	Rasio kesenjangan kemiskinan	0,60	0,45
9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dai USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	7,76	7,76
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,11 (Tinggi)	71,60 (Tinggi)
11	Angka melek huruf	98,63	99,63
12	Angka rata-rata lama sekolah	8,39	8,49
13	Angka usia harapan hidup	70,63	70,73
14	Persentase balita gizi buruk	0,08	0,07
15	Prevalensi balita gizi kurang	3,62	3,12
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100
17	Angka partisipasi angkatan kerja	76,62	80,22
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,6	73,59
19	Tingkat pengangguran terbuka	5,44	4,94
20	Rasio penduduk yang bekerja	94,56	95,06
21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3,8	3,8
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	69,35	71,55
23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	48,05	50,34
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	47,47	47,17
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	12,82	12,82
27	Opini BPK	WTP	WTP
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,9	89,9
29	Penguatan cadangan pangan	2 Ton	2 Ton
30	Penanganan daerah rawan pangan	Ada	Ada
31	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	19,47	19,47
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	84,21	84,21
33	Produksi sektor pertanian	1.488.373	1.488.373
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	4,9	4,9

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Asumsi Capaian 2022	Asumsi Capaian 2023
35	Produksi sektor perkebunan	5.147	5.25
36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100
37	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3.57	3.57
38	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4.8	4.8
39	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7.87	7.87
40	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6.28	6.28
41	Pertumbuhan Industri	1.81	1.81
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Pengeluaran Perkapita	9.789	9.987
2	Nilai tukar petani	107,69	108,45
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	54,35%	57,44%
4	Produktivitas total daerah		
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	49,70%	52,69%
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	0.01	0.01
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	2.57	2.57
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	2,22	2,3
9	Angka kriminalitas yang tertangani	0.07	0.05
10	Rasio ketergantungan	60	57
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan		
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	100%
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	100%
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%
1.5	Harapan Lama Sekolah	13,75	13,81
2	Kesehatan		
2.1	Rasio daya tampung RS	05:29.8	05:33.9
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Gowa yang terakreditasi	100%	100%
2.3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%
2.4	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%
2.5	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%
2.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
2.9	Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
2.1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Asumsi Capaian 2022	Asumsi Capaian 2023
2.12	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%
2.13	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0.8343	0.8499
3.2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100%	100%
3.3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%
3.4	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	17 Unit	17 Unit
3.5	Tingkat kemantapan jalan	83.40%	84.40%
3.6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.2	0.4
3.7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0.01	0.01
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman			
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%	100%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100%	100%
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	54%	56%
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	72.95%	73.30%
4.5	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	60%	62%
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit
6 Sosial			
6.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Asumsi Capaian 2022	Asumsi Capaian 2023
7	Tenaga Kerja		
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%
7.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.02%	0.02%
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3.80%	3.80%
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100%	100%
7.5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	62%	64%
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	55%	60%
8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	55%	60%
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100%	100%
9	Pangan		
9.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	78%	79%
10	Pertanahan		
10.1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%
11	Lingkungan Hidup		
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60-70 (Cukup Baik)	70-80 (Baik)
11.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	85.00%	72.00%
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	10%	10%
12	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil		
12.1	Perekaman KTP Elektronik	100%	100%
12.2	Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	16.87%	16.87%
12.3	Kepemilikan akta kelahiran	100%	100%
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan penjanjian kerja sama	14.81%	22.22%
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
13.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	100%
13.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	100%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.31	2.29
14.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	58.78%	59.77%
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10.34%	9.34%
16	Komunikasi dan Informatika		
16.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	90%	100%
16.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%
16.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100%	100%
18	Penanaman Modal		

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Asumsi Capaian 2022	Asumsi Capaian 2023
18.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	44%	46%
20	Statistik		
20.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
20.2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%
21	Persandian		
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60%	90%
22	Kebudayaan		
22.1	Terlestarnya Cagar Budaya	2 Unit	2 Unit
23	Perpustakaan		
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tinggi	Tinggi
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0%	3%
24	Kearsipan		
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 UU 43/2009)	5%	7%
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	5%	7%
URUSAN PILIHAN			
1	Kelautan dan Perikanan		
1.1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten	2242.6 Ton	2293.5 Ton
2	Pariwisata		
2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-69%	-49%
2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	-46%	-26%
2.3	Tingkat hunian akomodasi	10%	15%
2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PDRB	22.20%	22.20%
2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PAD	0.02%	0.02%
3	Pertanian		
3.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5.96 Ton/Ha	5.96 Ton/Ha
3.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10%	10%
4	Perdagangan		
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	9.16%	9.16%
4.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	55.53%	57.12%
5	Perindustrian		
5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	13.00%	13.50%
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Asumsi Capaian 2022	Asumsi Capaian 2023
5.4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1 Perencanaan dan Keuangan			
1.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	11.86	11.86
1.2	Rasio PAD	11.801,399 %	11.801,399 %
1.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3
1.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3
1.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	37.75%	37.75%
1.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
2 Pengadaan			
2.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%	100%
2.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	64.04%	64.04%
2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	26%	26%
3 Kepegawaian			
3.1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	77.50%	78.40%
3.2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10.07%	10.06%
3.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	47.98%	52.26%
4 Manajemen Keuangan			
4.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	94.7	94.7
4.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	105,83	105,83
4.3	Assets management	Ada	Ada
4.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	7.64	7.64
5 Transparansi dan Partisipasi Publik			
5.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline service delivery units)	100	100
5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (public access to fiscal information)	100	100

6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki daerah, maka yang perlu didorong dan diutamakan adalah penerapan SPM sebagai pelaksanaan urusan wajib sekaligus perwujudan penyediaan pelayanan publik yang bersifat dasar. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan penyusunan SPM oleh Kementerian/Lembaga dan penerapannya oleh Pemerintahan Daerah. Hingga kuartal ketiga tahun 2011 telah ditetapkan 14SPM oleh Kementerian/Lembaga.

Salah satu isu utama penerapan SPM di daerah adalah terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dan

belum dituangkannya SPM dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pengintegrasian SPM dalam perencanaan dan penganggaran akan memastikan prioritas dan komitmen pemda dalam mengalokasikan belanja langsung terutama untuk pelayanan dasar. Untuk membantu pengintegrasian SPM di daerah, maka perlu disusun sebuah buku panduan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah berdasarkan berbagai peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal kemudian lebih teknis dijelaskan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;

Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA).

a. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM;

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM. Selanjutnya, nota kesepakatan tentang KUA

dan PPA menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), dan satuan harga. RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN. Sedangkan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. 4
Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Gowa 2023 (Persen)

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2021	Rencana Capaian 2022	Target Capaian 2023
BIDANG PENDIDIKAN					
Pendidikan Dasar					
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	93.97%	100%	100%
Pendidikan Kesetaraan					
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%
Pendidikan Anak Usia Dini					
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	92.69%	100%	100%
BIDANG KESEHATAN					
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					

4	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
5	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
6	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Balita					
7	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
8	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
9	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
10	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
11	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
12	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	80%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					
13	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)					
14	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang	100%	100%	100%	100%

	mendapatkan layanan kesehatan				
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan <i>Immunodeficiency</i>					
15	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
BIDANG PEKERJAAN UMUM					
Penyediaan Pelayanan Air Minum					
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	79.60%	100%	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
17	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	73.32%	100%	100%
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
18	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Hui Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					
19	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0%	100%	100%
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
20	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana					

21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
22	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%
BIDANG SOSIAL					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas					
25	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					
26	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar					
27	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
28	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban					

29	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%
----	---	------	------	------	------

Sumber : OPD Pengelola SPM Kabupaten Gowa , Tahun 2022

6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan yang dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance.

Pilar pembangunan manusia lekat dengan penyediaan pelayanan dasar sehingga tujuan SDGs yang dapat dikelompokkan dalam beberapa sektor. Sektor-sektor itu adalah menjamin kehidupan yang sehat, memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan pendidikan inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Tujuan SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, mencapai akses universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan.

Dalam bidang governance, tujuan SDGs antara lain mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, memastikan masyarakat stabil dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi. Penetapan target tahun 2023 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. 5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Gowa Tahun 2023

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	Target Capaian 2023	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN 1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat			
1.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7.53	Dinas Sosial
1.3	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	87	Dinas Kesehatan
1.3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta bidang ketenaga kerjaan	Meningkat	Dinas Kesehatan
1.3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	34%	Dinas Sosial
1.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	23.000KK	Dinas Sosial
1.4	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	85%	Dinas Kesehatan
1.4	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap)	63%	Dinas Kesehatan
1.4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	55.90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94.78	Dinas Pendidikan

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	Target Capaian 2023	PENANGGUNG JAWAB
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82.2	Dinas Pendidikan
1.5	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	100%	Dinas Sosial
1.5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	200juta	Dinas Sosial
1.5	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	0.53	Dinas Sosial
1.a	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	12.51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan			
2.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	4%	Dinas Ketahanan Pangan
2.1	Prevalensi balita gizi kurang	15%	Dinas Kesehatan
2.1	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	15%	Dinas Ketahanan Pangan
2.1	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	5%	Dinas Ketahanan Pangan
2.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	34.90%	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	34.90%	Dinas Kesehatan
2.2	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi	34.90%	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	NA	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	Target Capaian 2023	PENANGGUNG JAWAB
2.2	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	83.1	Dinas Kesehatan
2.2	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	92.50%	Dinas Ketahanan Pangan
TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia			
3.1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	103.3	Dinas Kesehatan
3.1	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	95%	Dinas Kesehatan
3.1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85%	Dinas Kesehatan
3.2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0.2	Dinas Kesehatan
3.2	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	2.9	Dinas Kesehatan
3.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2.8	Dinas Kesehatan
3.2	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95%	Dinas Kesehatan
3.3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	49 Orang	Dinas Kesehatan
3.3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1.78	Dinas Kesehatan
3.3	Angka kejadian Malaria	.0.011	Dinas Kesehatan
3.3	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.	18	Dinas Kesehatan
3.3	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	78.9	Dinas Kesehatan
3.4	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	0.30%	Dinas Kesehatan
3.4	Prevalensi tekanan darah tinggi.	31%	Dinas Kesehatan
3.4	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	2.50%	Dinas Kesehatan
3.4	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	4 puskesmas	Dinas Kesehatan
3.7	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	66%	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	Target Capaian 2023	PENANGGUNG JAWAB
3.7	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25.68	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	22.04	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7	Total Fertility Rate (TFR)	2.15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	529477 Jiwa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	70%	Dinas Kesehatan
3.a	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	0,18	Dinas Kesehatan
3.b	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	113.14%	Dinas Kesehatan
3.c	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	1127	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua			
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100%	Dinas Pendidikan
4.1	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	62.98%	Dinas Pendidikan
4.1	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	62.98%	Dinas Pendidikan
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	114.09%	Dinas Pendidikan
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	106.94%	Dinas Pendidikan
4.1	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,2 Tahun	Dinas Pendidikan
4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	77.20%	Dinas Pendidikan
4.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	82.20%	Dinas Pendidikan

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	Target Capaian 2023	PENANGGUNG JAWAB
4.6	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	96.10%	Dinas Pendidikan
4.6	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	96.63%	Dinas Pendidikan
4.c	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	91.30%	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan			
5.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan..	0,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir..	,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	85%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0,07	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	17.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	3.35%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9.90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.6	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	85%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.b	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	99.96	Dinas Komunikasi dan Informatika, SP
TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua			
6.1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
6.1	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	118,6 m3/dt	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	Target Capaian 2023	PENANGGUNG JAWAB
6.2	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	55%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	Dinas Kesehatan
6.2	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	167	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	167	Dinas Kesehatan
6.2	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	38 IPAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	550 rumah tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.3	Kualitas air danau.	65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.3	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	65%	Dinas Lingkungan Hidup
6.5	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUJUAN 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua			
TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua			
8.1	Pertumbuhan PDRB	9%	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8.1	PDRB per Kapita	33 Jt	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8.2	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	NA	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8.3	Persentase tenaga kerja formal.	34.88%	Dinas Tenaga Kerja
8.5	Upah rata-rata per jam pekerja.	55,162	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8.5	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	4.80%	Dinas Tenaga Kerja
8.9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	517.149,5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.9	Kunjungan wisatawan mancanegara	3462	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.9	Kunjungan wisata domestik	284225	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.9	PAD sektor pariwisata	281 (Triliun Rupiah)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi			
9.2	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	6.61%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.2	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	6.78%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.3	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	0.02%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.c	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	70.11	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	Target Capaian 2023	PENANGGUNG JAWAB
9.c	Proporsi individu yang menggunakan internet	44.31	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara			
10.1	Koefisien Gini.	0.36	Dinas Sosial
10.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7%	Dinas Sosial
10.1	Jumlah desa tertinggal.	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1	Jumlah Desa Mandiri.	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.3	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
TUJUAN 11. Membangun Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan			
11.1	Rasio rumah layak huni	72.32	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
11.5	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	200Juta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	71.45%	Dinas Lingkungan Hidup
11.b	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 12. Memastikan Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan			
12.4	Jumlah limbah B3 yang dikelola	24.39%	Dinas Lingkungan Hidup
12.5	Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	28046.72	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya			
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 14. Mengkonservasi dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Laut, Samudra dan Maritim untuk Pembangunan yang Berkelanjutan			
14.b	Jumlah nelayan yang terlindungi.	6	Dinas Perikanan
TUJUAN 15. Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi (Penggurunan) dan Menghambat dan Membalikkan Degradasi Tanah dan Menghambat Hilangnya Keanekaragaman Hayati			

NO	TUJUAN/ INDIKATOR	Target Capaian 2023	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN 16. Mendukung Masyarakat yang Damai dan Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua dan Membangun Institusi-Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Level			
16.6	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	95.13	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.6	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	80%	Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
16.6	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.6	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	90%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.7	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	30%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TUJUAN 17. Menguatkan Ukuran Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan			
17.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	8.93%	Badan Pendapatan Daerah
17.1	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	1.08%	Badan Pendapatan Daerah
17.8	Proporsi individu yang menggunakan internet.	44.31%	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
17.18	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	20%	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian

BAB VII PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan fokus pada pematapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun 2023 pada RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya RKPD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RPJMD Kabupaten Gowa dan RPJPD. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Gowa pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 diimplementasikan dengan:

1. Tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Gowa dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
3. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kabupaten Gowa dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran

pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kabupaten Gowa. Dokumen RKPD Kabupaten Gowa berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD.

Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah, Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya.

Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja,

pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2023.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2023 dengan sebaik baiknya.

3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan perundangan lainnya.

72. Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Gowa untuk Tahun 2023 yaitu : ***“Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan di Dukung Penguatan SDM, Pemanfaatan Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Daerah “*** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN

FORMAT ISIAN FASILITASI RKP DAERAH TAHUN 2023

A. FORM 1

KONSISTENSI TARGET PROGRAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

KABUPATEN GOWA

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKP	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
		Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100 %		Dinas Pendidikan
		Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %		100 %		Dinas Pendidikan
		Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %		100 %		Dinas Pendidikan
		Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bermuatan lokal di tingkat Pendidikan Dasar	100 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Dinas Pendidikan
		Persentase guru berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	87 %	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	87 %		Dinas Pendidikan
		Persentase perizinan pendidikan yang ditindaklanjuti	75 %	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
		Proporsi bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan	50 %	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SAstra			Dinas Pendidikan
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
		Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase layanan pemenuhan UKP dan UKM	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara terduga TBC yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1 : 273.91 Rasio		1 : 273.91 Rasio		Dinas Kesehatan
		Rasio dokter per satuan penduduk	48.3 : 100.000 Rasio	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	48.3 : 100.000 Rasio		Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dan dokter gigi) per satuan penduduk	73.7 : 100.000 Rasio		73.7 : 100.000 Rasio		Dinas Kesehatan
		Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100 %	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase Masyarakat yang memiliki perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	100 %		Dinas Kesehatan
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,000800 %	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,000800 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,009300 %		0,009300 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	73,08 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	73,08 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	33,52 %		33,52 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang tersedia	2 Unit	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2 Unit		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91,94 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	91,94 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %		100 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	89,97 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	89,97 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan	17 Unit	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17 Unit		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Panjang Jalan Lingkungan atau Pedestrian serta Ruang terbuka hijau yang	4 Km	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	4 Km		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	91,25 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	91,25 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	50 Orang	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI	50 Orang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0.01 Rasio	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI	0.01 Rasio		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Rasio Ketaatan terhadap RTRW	0,0084 Rasio	PROGRAM PENYELENGGARAAN	0,0084 Rasio		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
		Persentase rumah ber-IMB	75 %	PROGRAM PENGEMBANGAN	75 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
		Persentase warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %		100 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
		Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	56 %	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	56 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
		Persentase meningkatnya rumah layak huni	75,70 %	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	75,70 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	62 %	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	62 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkadaangguan trantibum yang dapat diselesaikan	90 %	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90 %		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	PROGRAM PENANGGULANGAN	100 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100 %		100 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %		100 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	62 %	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	62 %		Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
		Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi	32 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	32 %		Dinas Sosial
		Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	- NA	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	- NA		Dinas Sosial
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100 %		Dinas Sosial
		Persentase jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %		100 %		Dinas Sosial
		Persentase jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di	100 %		100 %		Dinas Sosial
		Persentase jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %		100 %		Dinas Sosial
		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan	100 %		100 %		Dinas Sosial
		Persentase jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 %		Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	54 %		54 %		Dinas Sosial
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 %	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 %		Dinas Sosial
		Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	100 %		Dinas Sosial
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	100 %	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	48 %	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	48 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	66 %	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100 %	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
		Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG	60 %	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	60 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Yang Terstandarisasi	60 %	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	60 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Penyediaan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	60 %	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Penyediaan Data Gender dan Anak yang terupdate	60 %	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	60 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Kota Layak Anak	65 %	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	65 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Penyediaan Layanan Anak Korban Kekerasan Yang Terstandarisasi	60 %	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	60 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	79 %	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	79 %		Dinas Ketahanan Pangan

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase terpenuhinya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat	77 %	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	77 %		Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase desa rawan pangan	46 %	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	46 %		Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase tingkat pelaksanaan pengawasan keamanan pangan	82 %	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	82 %		Dinas Ketahanan Pangan
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
		Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 %	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase luas lahan bersertifikat	60 %	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	60 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
		Cakupan program perencanaan lingkungan hidup	80 %	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	80 %		Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 %	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	80 %		Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	50 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50 %		Dinas Lingkungan Hidup

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang memiliki TPS LB3 sesuai regulasi	66 %	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	66 %		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat pada regulasi perundangan	91,00 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	91,00 %		Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA	100 %	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN	100 %		Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 %		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diusulkan dalam	100 %	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 %		Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan program penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100 %		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sampah yang ditangani	72,00 %		72,00 %		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sampah yang ditangani	72,00 %				Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Pendaftaran Penduduk	100 %	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	100 %	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase data Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
		Persentase penataan desa	100 %	PROGRAM PENATAAN DESA			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Kerjasama Desa Yang Dibina	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100 %		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Desa yang menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan Desa	100 %	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100 %		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100 %		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
		Persentase Kampung KB Mandiri	36 %	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	36 %		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		TFR (Angka Kelahiran Total)	2,21 %	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2,21 %		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)	22.04 Nilai	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	22.04 Nilai		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,34 %	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9,34 %		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	59,9 %	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	59,9 %		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	25,68 %	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	25,68 %		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21.5 Tahun	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Keluarga Bumil dan balita yang mendapatkan informasi 1000 HPK di kelompok BKB	52,7 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
		Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai	66 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	66 %		Dinas Perhubungan
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100 %		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100 %		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
		Persentase usaha simpan pinjam	100 %	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100 %		Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		Persentase capaian pengawasan dan pemeriksaan koperasi	100 %	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		Persentase Penilaian Kesehatan KSP- USP	100 %	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100 %		Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		Persentase capaian Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	100 %	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100 %		Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		Persentase capaian pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100 %		Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		Persentase capaian pengembangan sistem pendukung usaha mikro,, kecil dan menengah	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	100 %		Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		Persentase capaian pengembangan UMKM	100 %	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100 %		Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
		Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal	100 %	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan	100 %	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase izin yang diterbitkan	100 %	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase pengendalian perusahaan penanaman modal	70 %	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	70 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARHAGA						
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	50,16 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	50,16 %		Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Jumlah Kegiatan Olahraga	100 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	100 %		Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Jumlah Kegiatan Kepemudaan	100 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100 %		Dinas Pemuda dan Olahraga
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100 %		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
		Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah	90 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	90 %		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah	90 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
		Jumlah Warisan budaya yang tersertifikasi	2 Unit	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2 Unit		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah sanggar seni yang dibina	10 Unit	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	10 Unit		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	2 Unit	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2 Unit		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah Museum Daerah Yang dikelola	1 Unit	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1 Unit		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
		Cakupan Pembinaan Perpustakaan	50 %	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	50 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	3 %	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	3 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase pengelolaan arsip	55 %	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	55 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	7 %	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	7 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Cakupan pelayanan peizinan penggunaan arsip	7 %	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
		Produksi Perikanan Tangkap	1301 Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1301 Ton		Dinas Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya	992.5 Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	992.5 Ton		Dinas Perikanan
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	0 %	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Dinas Perikanan
		Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	70 Ton	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	70 Ton		Dinas Perikanan
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
		Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata yang dibina	10 %	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10 %		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan perjalanan/kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Kota	60 %	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	60 %		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5 %	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	5 %		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 %	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4 %		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	100 %		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Persentase Penyediaan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	100 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	100 %		Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100 %		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	100 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100 %		Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	10 %	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	10 %		Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75 %	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	75 %		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	100 %	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100 %		Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Persentase Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang diterbitkan	100 %	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100 %		Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Persentase Perizinan Usaha Pertanian yang diterbitkan	100 %	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100 %		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Persentase Penyuluhan Pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dilaksanakan	100 %	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100 %		Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	100 %	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100 %		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan dan STP / lanjutan Waralaba)	100 %	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100 %		Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase terbangunnya Pasar Rakyat yang representatif	61,29 %	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	61,29 %		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase kesesuaian harga jual pedagang dan HET ketetapan Pemerintah	1,001 %	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	1,001 %		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Nilai ekspor bersih perdagangan	1699237,22 \$	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1699237,22 \$		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0,056 %	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,056 %		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Jumlah produk dalam negeri yang dihasilkan IKM dan dipasarkan setiap tahun	46 Produk Berizin	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	46 Produk Berizin		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	82,66 %	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	82,66 %		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang	100 %	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Frekuensi penyampaian laporan data RPIK untuk mendukung SIINAS	3 Kali	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
		Persentase warga transmigrasi yang mendapatkan pelatihan	80 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	80 %		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
29	SEKRETARIAT DAERAH						
		Persentase Kinerja Program Administrasi Umum	100 %	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			Sekretariat Daerah
		Persentase Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 %	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	95 %		Sekretariat Daerah
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	100 %	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PELAYANAN	100 %		Sekretariat Daerah
30	SEKRETARIAT DPRD						
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Administrasi Keuangan	100 %	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA			Sekretariat DPRD

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kepuasan terhadap layanan rapat-rapat anggota DPRD	90,31 (Indeks)	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	90,31 (Indeks)		Sekretariat DPRD
31	PERENCANAAN						
		Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	100 %	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	100 % (3 Bidang)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 % (3 Bidang)		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	KEUANGAN						
		Persentase SKPD yang tertib pengelolaan keuangan	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100 %		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase SKPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah (BMD)	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100 %		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	94,68 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	94,68 %		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB	12,20 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12,20 %		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Potensi Pajak Daerah	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100 %		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	96,72 %	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	96,72 %		Badan Pendapatan Daerah
33	KEPEGAWAIAN						
		Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kependidikan)	40 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	40 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
34	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
		Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3 %	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Persentase pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1 %	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
35	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100 %	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100 %		Badan Penelitian dan Pengembangan

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase inovasi yang diimplementasikan	100 %	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100 %		Badan Penelitian dan Pengembangan
36	INSPEKTORAT DAERAH						
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal/Eksternal) Setiap Tahun	79 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN	79 %		Inspektorat
		Persentase Unit Kerja yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan/Aset yang	90 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN	90 %		Inspektorat
		Indeks RB pada Komponen Penguatan Pengawasan	6 %	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6 %		Inspektorat
		Persentase pemenuhan MCP pada Penguatan APIP	74 %	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	74 %		Inspektorat
37	KECAMATAN						
		Persentase penyelesaian pelayanan publik	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	100 %		
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	100 %		
		Persentase penyelesaian program urusan pemerintahan umum	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	100 %		
		Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 %		
38	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
		Persentase potensi konflik etnis/suku yang ditindaklanjuti	100 %	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase permohonan bantuan keuangan partai politik yang memenuhi syarat	100 %	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	100 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	URUSAN	PROGRAM RPJMD/RPD*)	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase ormas yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	100 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang ditindakanjuti	100 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	100 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase potensi konflik antar golongan yang ditindakanjuti	100 %	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

*Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Keterangan:

Sungguminasa, Juni 2022

Plt. Kepala Bappeda Kab. Gowa



Drs. H. Alimuddin Hakim, MM.

NIP. 196504091994031009

B. FORM 2

**REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PAGU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

KABUPATEN GOWA

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	12	46	584.893.875.677	Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	13	47	237.218.263.990	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	12	36	65.302.601.525	RSUD Syekh Yusuf
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	22	79	435.625.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	26	48	5.018.305.520	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	9	21	13.614.418.958	Satuan Polisi Pamong Praja
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	10	19	27.805.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	11	36	5.067.400.000	Dinas Pemadam Kebakaran
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	16	31	6.517.928.149	Dinas Sosial
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	15	27	3.553.550.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	21	33	3.188.023.722	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	15	47	5.756.303.628	Dinas Ketahanan Pangan
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	6	6	6	3.359.497.656	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	18	32	11.777.937.099	Dinas Lingkungan Hidup
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	18	54	28.669.235.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	11	45	30.918.354.369	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	13	48	15.322.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	18	44	32.205.113.240	Dinas Perhubungan
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	11	28	10.709.268.834	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Percandian
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	14	25	3.054.438.261	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	14	32	5.693.623.950	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	9	12	4.911.294.647	Dinas Pemuda dan Olahraga
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2	27.592.000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Percandian
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	2	2	33.900.000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Percandian
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	4	8	905.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	11	42	11.706.708.447	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	6	15	280.278.894	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	18	41	5.119.460.487	Dinas Perikanan
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	12	23	6.379.200.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	20	32	20.721.646.051	Dinas Peternakan dan Perkebunan
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	13	38	45.545.729.815	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	19	41	17.682.366.360	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1	1	3	869.997.500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	2	40.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	57	49.909.000.000	Sekretariat Daerah
36	SEKRETARIAT DPRD	2	12	21	61.096.048.934	Sekretariat DPRD
37	PERENCANAAN	4	15	34	4.556.203.372	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38	KEUANGAN	3	12	41	301.850.512.138	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
39	KEUANGAN	4	16	66	14.899.615.328	Badan Pendapatan Daerah
40	KEPEGAWAIAN	2	10	31	7.411.097.012	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
41	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	3	3	1.350.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
42	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3	16	35	2.754.597.208	Badan Penelitian dan Pengembangan

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
43	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	30	9.858.850.000	Inspektorat
44	KECAMATAN	8	14	17	13.400.000.000	Kecamatan Bontomarannu
45	KECAMATAN	2	7	16	7.567.500.000	Kecamatan Tompobulu
46	KECAMATAN	7	19	22	9.690.000.000	Kecamatan Pallangga
47	KECAMATAN	3	8	20	8.141.829.986	Kecamatan Bajeng
48	KECAMATAN	5	14	32	3.973.322.905	Kecamatan Biringbulu
49	KECAMATAN	2	7	12	4.206.500.000	Kecamatan Barombong
50	KECAMATAN	4	7	11	2.675.000.000	Kecamatan Bajeng Barat
51	KECAMATAN	2	7	8	8.805.000.000	Kecamatan Parangloe
52	KECAMATAN	1	6	9	3.229.000.000	Kecamatan Manuju
53	KECAMATAN	4	10	18	3.545.500.000	Kecamatan Bontonompo Selatan
54	KECAMATAN	1	5	8	2.380.000.000	Kecamatan Parigi
55	KECAMATAN	4	10	16	20.514.100.000	Kecamatan Somba Opu
56	KECAMATAN	3	8	16	1.772.100.000	Kecamatan Pattallassang
57	KECAMATAN	1	6	10	1.757.000.000	Kecamatan Bontolempangan
58	KECAMATAN	4	10	16	11.625.000.000	Kecamatan Tinggimoncong
59	KECAMATAN	4	16	28	4.464.120.000	Kecamatan Bungaya
60	KECAMATAN	2	6	11	4.485.750.000	Kecamatan Tombolopao
61	KECAMATAN	2	7	14	7.880.000.000	Kecamatan Bontonompo
62	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	18	27	3.632.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH		254	720	1.674	2.226.924.160.661	

*Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Sungguminasa, Juni 2022

Pt. Kepala Bappeda Kab. Gowa



Drs. H. Alimuddin Hakim, MM.

NIP. 196504091994031009

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

KABUPATEN GOWA

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
	Dinas Pendidikan					487.614.420.917	
		Indikator Urusan Pendidikan....	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	400.879.883.112	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	127.004.500	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran di bidang KeuanganAdministrasi Keuangan	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49028 Orang/bulan	398.232.080.428	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	645.024.481	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	117.146.100	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 Paket	60.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	3.511.212	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	286.917.591	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48.420.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	942.407.500	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	58.224.100	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	73.194.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	149.885.600	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	149.885.600	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14.090.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	32.032.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100%	84.307.457.080	
				Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	100%		
				berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persentase Warga Negara Usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100%		
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi)	100%		
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 ruang	11.283.880.000	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	547.662.000	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	19 Ruang	604.429.560	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang	1.373.134.840	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	18 Unit	3.112.105.160	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	71 Ruang	17.863.863.600	
			Rehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala			
			Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang	1.911.887.580	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	1.569.267.900	
			Rehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana			
			Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Unit	79.709.940	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	124 Paket	13.236.283.000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	510 Peserta	81.369.582	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah MenengahDasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	419 Satuan Pendidikan	511.570.800	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100%		
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.950.000.000	
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	1.607.547.000	
			Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratoriumyang Telah Dibangun	1 Ruang	812.824.500	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	3.673.012.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	381.530.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	296.746.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	3.986.647.000	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan yang tersedia	51 Paket Sekolah	3.384.733.000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik Didik dan Non Akademik	245 Peserta	57.090.538	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	129.000.000	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	202 Satuan	337.089.400	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	85%		
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	2.575.000.000	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			481.270.680	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	147.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	6 Paket	274.754.000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11557 Peserta	8.922.000.000	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	271 Satuan Pendidikan	47.175.000	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Angka Melek Huruf	85.9 %		
			Penyelenggaraan Proses Belajar nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	210 Peserta didik	3.068.874.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru berprestasi di tingkat Provinsi dan	87 % Nasional	2.427.080.725	
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik yang Profesional	1703 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	413 Dokumen	2.427.080.725	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
	Dinas Kesehatan					227.270.063.990	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	71.266.541.390	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	110.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100 Persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	906 Orang/bulan	70.316.283.287	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	69.372.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	60.994.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.392.103	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.500.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	145.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	149.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	1 laporan	350.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	28.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen	116.487.520.000	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100 Persen		
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
				Persentase layanan pemenuhan UKP dan UKM	100 Persen		
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 Persen		
				Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 Persen		
				Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
				Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
				Persentase warga negara terduga TBC yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
				Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1 : 273.91 Rasio		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP yang terlaksana	100 Persen		
			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	10.000.000	
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1.000.000.000	
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	8.200.000.000	
			Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	16.500.000.000	
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	2.050.000.000	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	710.000.000	
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	101.000.000	
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	68.320.000	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12932 Orang	35.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12221 Orang	55.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12205 Orang	15.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42311 Orang	12.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39922 Orang	7.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	260307 Orang	5.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39444 orang	10.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52086 Orang	12.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8631 Orang	5.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1120 Orang	15.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6230 Orang	10.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12173 Orang	5.500.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	15.000.000	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	33.000.000	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	66.586.000.000	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	20.011.500.000	
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	203.700.000	
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	550.000.000	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	10.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	48.3 :	62.500.000	
				Rasio tenaga medis (dokter, gigi) per satuan penduduk	73,7:		
				dokter spesialis, dan dokter per satuan penduduk	100.000 Rasio		
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	100 Persen		
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	12.500.000	
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	20 Persen		
				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan Kompetensinya	20 Persen		
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	110.250.000	
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT yang dilakukan tindak lanjut pengawasan	90 Persen		
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	39.750.000	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	4 Kegiatan		
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	45.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan inpres	45 Persen		
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	25.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat yang memiliki perilaku Hidup 100 % Bersih dan Sehat		70.500.000	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	4 Kegiatan		
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	45.500.000	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan inpres	45 Persen		
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	25.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100 Persen	39.272.752.600	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen		
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	Masing masing 1 Dokumen		
				Puskesmas Smba Opu		2.739.945.000	
				Puskesmas Samata		1.784.993.000	
				Puskesmas Pallangga		3.179.480.000	
				Puskesmas Moncobalang		771.077.000	
				Puskesmas Kanjilo		1.234.641.000	
				Puskesmas Kampili		1.758.559.000	
				Puskesmas Bajeng		3.041.940.600	
				Puskesmas Pabbentengan		1.275.531.000	
				Puskesmas Gentungan		1.774.823.000	
				Puskesmas Bontonompo I		1.883.311.000	
				Puskesmas Bontonompo II		2.746.998.000	
				Puskesmas Bontomarannu		1.691.795.000	
				Puskesmas Pattallassang		918.829.000	
				Puskesmas Paccellekang		459.488.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Puskesmas Parangloe		1.079.122.000	
				Puskesmas Manuju		752.616.000	
				Puskesmas Tinggimoncong		884.221.000	
				Puskesmas Parigi		967.019.000	
				Puskesmas Tamaona		2.726.963.000	
				Puskesmas Tompobulu		2.625.472.000	
				Puskesmas Sapaya		1.499.162.000	
				Puskesmas Bontolempangan I		1.331.477.000	
				Puskesmas Tonrorita		864.969.000	
				Puskesmas Lauwa		662.964.000	
				Puskesmas Batumalonro		617.357.000	
	RSU Syekh Yusuf					65.302.601.525	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	40.215.151.525	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.400.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.552.190	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	26.250.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	457 Orang/Bulan	35.634.389.335	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.150.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.150.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	63.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.510.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	92.400.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.700.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	138.600.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	220.500.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	633.150.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	12.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	264.600.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	982.500.000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	125 Unit	87.150.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.239.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	10 Laporan	315.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	107.100.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	162.750.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	132.300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	100 persen	25.087.450.000	
				Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 Persen		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM	100 Persen & UKP yang terlaksana		
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	52.500.000	
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	105.000.000	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	200 Unit	315.000.000	
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1 Paket	100.000.000	
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	175.350.000	
			Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yangt Dilakukan Pemeliharaan	3 uni	168.000.000	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik FasilitasLayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	210.000.000	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan UKM dan UKP rujukan yang terlaksana	100 Persen		
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7 Dokumen	22.050.000.000	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5 Dokumen	1.209.600.000	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	100 Persen		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	192.000.000	
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	3 unit	31.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tata kelola yang meningkat	100 Persen		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator	5 Dokumen	89.250.000	
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen	89.250.000	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					433.995.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	17.255.000.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan pelaporan yang disusun	12 Dok		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kegiatan investigasi keciptakarya	1 Dokumen	400.000.000	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Database Ke PU-an	1 Dokume		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas PUPR	18 Dokumen		
				Jumlah Dokumen Perenc Perangkat Daerah	20 Dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	100.000.000	
				Dokumen Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan dari Pelaksanaan Musrembang	1 Dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	85.000.000	
				Telaksananya Penyusunan DPA SKPD	2 Dokumen	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	120.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	12 Dok		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	11.300.000.000	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	250.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Tugas ASN	12 Bulan		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	250.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai ASN yang tercatat	111 Orang		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	126 Paket	250.000.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	20.000.000	
				Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk Pegawai	1 Kegiatan		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana umum yang disediakan	40 Unit		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	10.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	12 Paket 12 Bulan	650.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan yang di cetak Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan 12 Paket	85.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan	12 Dokumen 12 Bulan	200.000.000	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terlaksananya Kegiatan Pameran Pembangunan	1 Paket 1 Kegiatan	160.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.150.000.000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dan Perlengkapan kantor yang tercatat	5 Unit		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	250.000.000	
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Tersedianya Alat Besar yang memadai untuk Operasional lapangan	1 unit 1 Unit	700.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang tersedia Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit 7 Unit	160.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan layanan penunjang yang dilaksanakan	12 Keg		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146 laporan 146 buah	25.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan 12 Bulan	150.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung dan kendaraan Kantor	181 Unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	150.000.000	150.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	65.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Tersedianya Pemeliharaan Alat-alat besar	1 Unit 1 Kegiatan	150.000.000	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	90 Unit	30.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya alat-alat Berat Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya alat-alat	90 Unit 93 Unit 3 Unit	45.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0.000812 % 0.009258 %	26.760.000.000	
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bantaran/Sempadan Sungai/ Saluran yang dipelihara (Normalisasi)	3.7 KM		
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	9 Unit	14.500.000.000	
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Pengaman Sungai yang terpelihara Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	200 M 200 Km	300.000.000	
			Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	7 Unit	300.000.000	
			Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	20 Unit	600.000.000	
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	3 KM	1.000.000.000	
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan tanggul dan tebing sungai Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	2 Kegiatan 2 KM	300.000.000	
			Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara Tersedianya Papan himbauan untuk masyarakat	5 Km 5 Buah	50.000.000	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan 4 Orang	100.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kesepakatan Rapat Komisi Irigasi yang diputuskan Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen 2 Orang	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Irigasi wewenang kabupaten yang dikembangkan dan dikelola	5.5 KM		
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Pengadaan Unit Pompa dan Rumah Pompa untuk Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	3 Unit 3 Km	450.000.000	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6 Km	3.100.000.000	
			Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1 Bendung	1.500.000.000	
			Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan Tersedianya Jumlah Pompa dan Rumah Pompa	3 Titik 3 Unit	350.000.000	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.812 KM	1.700.000.000	
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	1.500.000.000	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.86 KM	950.000.000	
			Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Air Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	1 Dokumen 1 Unit	10.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	73,08%	16.800.000.000	
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	33,52%		
				Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah tangga yang mendapat akses layanan air minum	1526 RT		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Air Minum atau Sanitasi Berbasis Masyarakat yang Dibangun	2 SR 2 unit	800.000.000	
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah tangga yang mendapat akses layanan air minum	1264 rumah Tangga	7.000.000.000	
			Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah tangga yang mendapat akses layanan air minum di pedesaan Jumlah Rumah tangga yang mendapat akses layanan air minum di pedesaan	250 KK 250 Rumah Tangga	3.000.000.000	
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			6.000.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Fasilitas pengurangan sampah diperkotaan yang tersedia	2 Unit	2.500.000.000	
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem pemilahan sampah yang dikembangkan dan dibangun	2 Unit		
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPS3R Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3 Unit 3 Rumah Tangga	2.500.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	91,94 % 100 %	9.500.000.000	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem air limbah domestik yang dibangun	5 Unit		
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah tangga terlayani Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	574 KK 574 Rumah Tangga	5.500.000.000	
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			4.000.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	89.97 %	2.350.000.000	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun / dipelihara	3.8 KM		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan Drainase Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	200.000.000	
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	3250 M	2.150.000.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan	17 Unit	40.000.000.000	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Gedung yang direhabilitasi/ditingkatkan bangunannya	5 Unit		
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3582.79 Dokumen 3582.79 M2	40.000.000.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan atau Pedestrian serta Ruang terbuka hijau yang Lingkungannya Tertata	4 Km	2.150.000.000	
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan dikawasan permukiman ,pedestrian serta Ruang Terbuka Hijau yang tertata	3.5 KM		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	484 Kawasan	2.000.000.000	
				Panjang Jalan Lingkungan yang Dibangun	4.84 KM		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	91.25 %	314.730.000.000	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	78 KM		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah Dokumen Perencanaan / DED Jalan dan Jembatan	4 Dokuemn 4 Dokumen	1.500.000.000	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	1 Dokumen 1 Dokumen	60.000.000	
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan Panjang Jalan yang Dibangun	20 Km 21,94 Km 132,73 Km 174,67 Km	300.000.000.000	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang terpelihara/direhabilitasi Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	30 Ruas 30 Km	800.000.000	
			Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun	5 Unit 5 M	10.000.000.000	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5 Unit 5 M	200.000.000	
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah Kegiatan Pemantauan Kegiatan	1 Dokumen 1 Kegiatan	70.000.000	
			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2.100.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga operator/ teknisi/analisi yang memiliki Sertifikat kompetensi	50 Orang	360.000.000	
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0,01 Rasio		
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat Keterampilan Yang Dikeluarkan	50 org		
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Orang Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan Terlatihnya Para Tenaga Terampil Konstruksi	50 Orang 50 Orang	150.000.000	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	3 Dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen	80.000.000	
			Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Jumlah Kegiatan Investigasi Kondisi bangunan Keciptakaryaan dan irigasi	1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	
			Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Jumlah Kegiatan Pengujian Laboratorium	1 Dokumen 1 Dokumen	30.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan terhadap RTRW	0,0084 Rasio	1.590.000.000	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang Ditetapkan	3 Dokumen		
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan Daerah yang telah melalui tahap persetujuan substansi	1 Dokumen 1 Dokumen	450.000.000	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang / RRTR	1 Dokumen 2 Dokumen	300.000.000	
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen kebijakan dalam pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah aparat kecamatan & kelurahan yang mengikuti sosialisasi Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	60 Orang 60 Dokumen	120.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten	1 Dokumen		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	150.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Tersedianya Informasi tentang kesesuaian Ruang	1 Dokumen 1 Software	200.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian ruang Daerah Kabupaten	2 Dokumen		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Terlaksananya kegiatan dalam mendayagunakan aparat terkait penegakan hukum bidang Penataan Ruang	1 Dokumen 1 Kegiatan	120.000.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Laporan dan Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen 1 Dokumen	150.000.000	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan					5.018.305.520	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.817.774.803	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Serta Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22.841.250	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	31 Bulan/orang/bulan	2.935.909.022	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Serta Peningkatan Kapasitas ASN	100 %		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan"	48 Paket	23.760.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	16.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan Bangunan Kantor	17 buah	1.906.200	0
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.320.000	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	8.250.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	232.532.400	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi skpd	936 kali	0	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jenis Barang Milik Daerah Untuk Penunjang Kerja	100 %		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	38.500.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	12 unit	0	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	12 unit	65.570.190	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jenis Jasa Untuk Penunjang Kerja	100%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	63.956.560	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kegiatan pendukung penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 kegiatan	0	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	1 laporan	305.168.601	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jenis Jasa Untuk Penunjang Kerja	100%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	82.250.580	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	15 Unit	12.410.000	
			Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	4.400.000	
			Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang Terpelihara	200 m2	0	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			26.564.993	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	100%		
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	14 unit	20.300.000	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	2.102.800	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 laporan	4.162.193	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			100.653.186	
			Penerbitan Izin pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %		
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	3.903.186	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	2.750.000	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani			
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	18.750.000	
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	75.250.000	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase meningkatnya rumah layak huni	75.70 %	1.060.342.075	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Rutilahu yang Tertangani				
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar 50 unit Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 unit	1.060.342.075		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			12.970.463		
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Kawasan Permukiman yang dikembangkan				
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	12.970.463		
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
	Satuan Polisi Pamong Praja					13.614.418.958		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen 100 %	5.453.609.158		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 Persen			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	32.728.500		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 Persen			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	3.797.908.481		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	62.674.800		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket	75.000.000		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian"	5 Dokumen0	15.237.900		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum 100 Persen Perangkat Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	3 Paket	16.124.175	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket Kantor yang Disediakan	-	37.789.350	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.200.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.949.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	742.399.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan 100 Persen barang milik daerah	0		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	50.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	108.715.530	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	24.053.674	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	205.209.920	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	233.928.828	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	14 Unit	8.690.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkadaangguan trantibum yang dapat	90%	8.160.809.800	
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 Kasus	7.777.080.000	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	1 Dokumen	178.530.000	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Jumlah Aparat yang bekerjasama dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	176.400.000	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen		
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	7 Laporan	12.873.100	
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	7 Laporan	15.926.700	
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah			27.805.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	1.605.500.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	50.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	100 Persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20 Orang/Bulan	200.000.000	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	150.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	20 Persen		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	120.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Paket	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	20 Paket	120.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	120.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	5 Paket	50.500.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	12 Paket	25.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen	20.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	75.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD	100 Persen		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Telpon, Listrik dan Air	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	150.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	50.000.000	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh ayanan informasi rawan bencana	100%	26.200.000.000	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan	250 Penduduk		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 orang	26.000.000.000	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10 Desa/Kel		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	12 Orang	50.000.000	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah penduduk	2224 Penduduk		
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 orang	150.000.000	
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang		
			Dinas Pemadam Kebakaran			5.067.400.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	2.932.400.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrai Keuangan	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	20 Orang	1.600.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	118 Paket	85.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan	2 laporan	2.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	10 paket	50.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	5 Paket	70.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket barang logistik kantor yang disediakan	5 paket	20.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang tersedia	4 Paket	25.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan yang disediakan	2 Dokumen	2.400.000	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 Laporan	3.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	139 Laporan	100.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	100.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	50.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	35.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	50.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berfungsi dengan baik	85%		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	50.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	400.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	62%	2.135.000.000	
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Cakupan Area pelayanan	96 Persen		
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	100 Laporan	1.800.000.000	
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Dokumen	10.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5 unit	50.000.000	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang	20 Orang	100.000.000	
			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	5.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan Bangunan/Lingkungan Wajib Proteksi	87 Persen		
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku n yang	700 Dokumen	25.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kelompok Masyarakat yang di berdayakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Kelompok		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	100.000.000	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase operasi pencarian dan pertolongan yang berhasil dilaksanakan	80 Persen		
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10 Laporan	25.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan	3 Unit	15.000.000	
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Membahayakan	1 Laporan	5.000.000	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
	Dinas Sosial					6.517.928.149	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	4.189.463.694	
				Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggar dan Evaluasi Kinerja	100%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.833.030.459	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	118.240.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	6 Laporan		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	9.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	75.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	3 Paket	2.061.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	24.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	47.594.830	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	82.023.250	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	19.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	62.250.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	282.474.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan /pemeliharaan barang milik daerah	100%		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	27.373.600	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	18.399.435	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	456.942.120	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Beroperasi Dengan Baik	10 Unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	96.975.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	23.100.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase panti sosial yang menerima	32 %	105.200.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) 20 % yang aktif			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	105.200.000	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	- NA	13.513.117	
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah kasus yang tertangani / jumlah pengaduan	0 Kasus		
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk	0 Orang	13.513.117	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	1.673.678.750	
				Persentase jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna	100%		
				Persentase jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%		
				Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Difabel Yang Mendapatkan Alat Bantu	50 orang		
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	809.541.250	
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	737.000.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	41.837.500	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20.000.000	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	27.000.000	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	28.300.000	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang tersosialisasikan	19 %		
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	100 % 54 %	280.000.000	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	39 %		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	200.000 keluarga	280.000.000	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	133.875.000	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %		
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	61.875.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.000.000		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	43 %			
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	42.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%	122.197.588		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	10 Makam	122.197.588		
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						3.553.550.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	3.229.550.000		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen 1 Laporan	7.000.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 %			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang 38 Orang/bulan	2.900.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19 Dokumen	52.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 %		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Set 43 Paket	26.650.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat Listrik dan alat elektronik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis 2 Paket	1.500.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Kantor Yang diadakan	11 Paket 11 Jenis	2.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang diadakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41 Jenis 41 Paket	18.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Jenis 2 Dokumen	2.400.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tanu yang difasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Kunjungan 5 Laporan	5.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	50 Laporan 50 Rapat	55.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jenis 3 Unit	25.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Beban Jasa Komunikasi dan Listrik yang difasilitasi	12 Bulan 12 Laporan	55.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Beban Jasa Kebersihan yang	12 Bulan	6.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit 6 Unit	60.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Ruangan Kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 Unit 1 Unit	2.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	100%	10.000.000	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen yang ditetapkan	1 Dokumen		
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	10.000.000	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan	48 % Pelatihan	55.000.000	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	83 Persen		
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang 16 Orang	15.000.000	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK Swasta yang terakreditasi	38 Persen		
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Jumlah LPK Swasta yang mendapatkan pembinaan	13 Lembaga 13 LPK	20.000.000	
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan		
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Pembinaan Peningkatan Kecil Produktivitas Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan kecil 20 Perusahaan	20.000.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	66 %	210.000.000	
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga yang mendapatkan Pembinaan	27 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	20 Orang 20 Orang	25.000.000		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan AK 1	3000 Orang			
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3000 Orang	85.000.000		
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi ke Penyedia Lapangan Pekerjaan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2500 Orang 2500 Orang	100.000.000		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100 %	49.000.000		
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan	9.06 %			
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan 1 Dokumen	5.000.000		
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	10 Perkara 20 Perusahaan	22.000.000		
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan sosialisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40 Orang 40 Orang	22.000.000		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						3.238.023.722	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.038.023.722	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	60 persen	10.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	60 persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.438.023.722	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	40.000.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah gedung BMD SKPD yang di inventaris	60 gedung		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	60 persen		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket/orang	30.000.000	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	10.000.000	0
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	60 persen		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	30.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	80.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	60 persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	60 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	150.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG	60%	150.000.000	
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah yang telah dilatih PUG	60 persen		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Perangkat daerah	50.000.000	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	60 persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	18 organisasi	50.000.000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	60 persen		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Yang Terstandarisasi	60%	600.000.000	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani sesuai standarisasi	60 persen		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Perangkat Daerah	200.000.000	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan	50 Kasus		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Layanan	200.000.000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi	8 Kecamatan		
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Penyediaan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	60%	100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang di edukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga di tingkat kecamatan	150 Keluarga		
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	50.000.000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menyediakan Layanan Pembelajaran Keluarga yang Terstandarnisasi	18 Kecamatan		
				Persentase Keluarga yang di Edukasi oleh Lembaga Layanan Pembelajaran Keluarga di Tingkat Kecamatan	18 Kecamatan		
				Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang terstandarnisasi	60 Persen		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penyediaan Data Gender dan Anak yang terupdate	60%	100.000.000	
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyediaan data gender dan anak	60 persen		
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	54 Dokumen	50.000.000	
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kota Layak Anak	65%	100.000.000	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan, kelurahan dan desa yang difasilitasi PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang dibina	60 persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	50.000.000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak yang terstandarnisasi	60 persen		
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyediaan Layanan Anak Korban Kekerasan Yang Terstandarnisasi	60 persen	150.000.000	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan pencegahan kekerasan terhadap anak	60 persen		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Perangkat Daerah	50.000.000	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terstandarnisasi	60 persen	50.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang 9 Layanan Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Layanan	50.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
	Dinas Ketahanan Pangan					5.818.103.628	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	3.697.203.493	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketyersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.350.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.250.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.250.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.867.410.993	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	151.500.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	25.250.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	91 %		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Pelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	26.512.500	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15.150.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	25.250.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.575.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.535.000	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	130 Laporan	7.575.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	252.500.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	86 %		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	106.050.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.250.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86 %		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	12.120.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Laporan	15.150.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	7.575.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	87 %		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.500.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.100.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	35.350.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	79%	575.405.664	
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur yang Direalisasikan	79%		
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	4 Unit	272.967.114	
			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	4 Unit	61.800.000	
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	4 Unit	185.400.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	55.238.550	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase terpenuhinya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat	14 Persen 77 %	699.494.471	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Stok Pasokan dan harga Pangan sesuai Kebutuhan Kabupaten	81%		
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25 Laporan	30.600.000	
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 Laporan	20.200.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	7 Laporan	23.041.450	
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	3 Dokumen	21.000.000	
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	7 Unit	21.000.000	
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 Unit	150.000.000	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Stok Cadangan Pangan	100%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	21.000.000	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	94.500.000	
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	0 Ton	26.653.021	
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase Komoditas Pangan Lokal yang Ditetapkan Harganya	100%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	3 Laporan	30.900.000	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Jumlah dokumen Angka ketersediaan energi (Kilo kalori perkapita per Tahun)	86 Persen		
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	35.350.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	200.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi PerKapita Per Tahun	6 Laporan	25.250.000	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rawan pangan	46%	846.000.000	
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%		
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	35.350.000	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan Yang Dilakukan	100%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.250.000	
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	600.000.000	
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase Kecamatan yang Menjadi Target Pengawasan dalam Setahun	100%		
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	2 Dokumen	25.750.000	
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	20.600.000	
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	15.450.000	
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.750.000	
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	20.600.000	
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	15.450.000	
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.750.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36.050.000	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan					3.395.547.656	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 %	3.075.918.714	
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Ganti Kerugian Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Umum	100%		
			Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	3.075.918.714	
			Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang lahan Pemda yang dibebaskan	3 Bidang	0	
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			13.168.506	
			Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Rekomendasi Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	100%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	13.168.506	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			306.460.436	
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aset Lahan Pemda yang tersertifikasi	150 Bidang		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	270.410.436	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36.050.000	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	Dinas Lingkungan Hidup					4.664.318.569	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Daerah	100 % 100 %	3.377.525.221	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen 3 Dokumen	24.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	6 Laporan 6 Dokumen	24.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Yang Disusun Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan 34 Orang/Bulan	2.929.288.971	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun	19 Laporan 19 Laporan	43.562.500	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Baju Khusus Hari Tertentu Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Pegawai	45 Pegawai 1 Unit Disiplin	34.593.750	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kantor Yang Mendapat Layanan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Kantor 3 Paket	10.240.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kantor Yang Mendapat Layanan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Kantor 4 Paket	30.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 Dokumen 3 Dokumen	2.460.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi		117.875.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Kantor Yang Mendapat Layanan Penyediaan Meubeler Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Kantor 5 Unit	12.300.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kantor Yang Mendapat Layanan Penyediaan Peralatan Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		22.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kantor Yang Mendapat Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	6 Laporan	41.205.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		41.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kantor Yang Mendapat Layanan Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Kantor 20 Unit	5.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan		40.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan program perencanaan Lingkungan hidup CAKUPAN	80% 100 %	228.960.378	
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyusunan RPPLH Kabupaten	100%		
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah Tahapan Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Yang Diselesaikan	4 Dokumen 5 Tahapan	128.960.378	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kewajiban Atas Dokumen KLHS	100%		
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	2 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 % 100 %	55.000.000	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Laporan Kualitas Lingkungan Hidup	3 Laporan		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,	12 Dokumen 3 Laporan	40.000.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Penyediaan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan	15.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang memiliki TPS LB3 sesuai regulasi	66 % 49.28 %	10.000.000	
			Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penghasil Limbah B3 Yang Memiliki TPS LB3 setelah diverifikasi	100%		
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin	10 Laporan 10 Laporan	10.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KAB KOTA Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat padaregulasi perundangan	10 % 49,28 %	16.500.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap dan PUU LH berdasarkan Berita kegiatan Acara Pengawasan	27 Usaha		
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Dinilai Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100 % 100 %	16.500.000	
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA CAKUPAN PENGAKUAN KEBERADAAN MHA, KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA	100 % 0 %	22.000.000	
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	Jumlah Calon MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diusulkan	1 MHA		
			Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Calon MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang mendapat pembinaan Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	9 MHA 9 Dokumen	22.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat CAKUPAN PENINGKATAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10 % 55,56 %	13.000.000	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Jumlah Kelompok Masyarakat Sasaran Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan	2 Kelompok		
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye	Jumlah Masyarakat/Kelompok	70 Orang	13.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN (ADIWIYATA)/FILANTROPI YANG MENDAPAT PENGHARGAAN TINGKAT KABUPATEN Persentase masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang diusulkan dalam penilaian tingkat provinsi	88,89 % 100 %	35.000.000	
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT Sekolah yang memenuhi kriteria penghargaan tingkat kabupaten	20 UPT Sekolah		
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah UPT Sekolah yang mendapat penilaian tingkat kabupaten	22 Entitas 22 UPT Sekolah	35.000.000	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	CAKUPAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan program penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 % 100 %	7.000.000	
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan yang diverifikasi Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	5 Laporan 5 Dokumen	7.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT KABUPATEN Persentase sampah yang ditangani	80 % 72.00 %	899.332.970	
			Pengelolaan Sampah	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	100%		
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jalur yang mendapat penyapuan sampah secara rutin Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	32 Jalur 12.128 Ton	6.744.720	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank Sampah yang aktif Sampah Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	110 Bank 10 Kelompok	102.500.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Kendaraan Operasional Penanganan Sampah Yang Beroperasi baik	0 Dokumen 46 Kendaraan	720.088.250	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan diTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah Tempat Pembuangan Sementara Sampah	382 Unit 122 TPS	70.000.000	
6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						28.576.235.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 100 %	21.962.570.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	6 Dokumen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	45.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	3 Kegiatan		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.200.000.000	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12.750.000.000	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	142.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	112.500.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	375.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	1 Kegiatan		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	116 Paket	45.000.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	450.000.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	278 Orang	480.000.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	278 Orang	480.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	4 Kegiatan		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 Paket	117.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	38.700.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 Paket	54.900.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6750 Paket	379.500.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	10.035.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	10.035.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	95.850.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	534.750.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106 Unit		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	75.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	277.800.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	87.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Kali		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	379.500.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	279.500.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	12 Unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10 Unit	38.400.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	52.500.000	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	78.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	144.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	135.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	95.100.000	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Pendaftaran Penduduk	100%	2.822.550.000	
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	90.3 Nilai		
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	18 Dokumen	18.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	18 Dokumen	18.000.000	
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	938.700.000	
			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	18 Dokumen	18.000.000	
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kenaikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Kependudukan	0.55 Nilai		
			Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90 Laporan	534.900.000	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	30000 Dokumen	238.350.000	
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	544.500.000	
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	12 Dokumen	37.500.000	
			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	6 Laporan	237.300.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pegawai pendaftaran penduduk yang profesional	76.3 %		
			Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Laporan	237.300.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	100%	1.710.150.000	
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pencatatan sipil	90.3 Nilai		
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20 Layanan	483.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	18 Dokumen	18.000.000	
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah Penduduk yang dilayani pada pelayanan pencatatan sipil	70.2 %		
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	375 Laporan	537.150.000	
			Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	5 Laporan	273.000.000	
			Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	24.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pegawai pencatatan sipil yang profesional	58.33 %		
			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	375.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100%	1.968.465.000	
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase informasi Kependudukan yang memanfaatkan oleh instansi lain	37.5 %		
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	14 Dokumen	375.000.000	
			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	9 Dokumen	23.715.000	
			Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	528.150.000	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi Kependudukan yang memanfaatkan oleh instansi lain	37,50%		
			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	504.300.000	
			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	237.300.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pegawai Pengolah Data Yang Profesional.	50%		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	5 Laporan	300.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	112.500.000	
			Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang menjadi dasar informasi dalam penyusunan profil kependudukan	75%		
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	112.500.000	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					30.918.354.369	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	3.189.431.870	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	18.778.960	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	41.834.480	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	2.016.021.056	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.200.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.150.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	18.006.872	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	28 Paket	50.611.007	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	37.558.950	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	35.020.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	300 Paket	10.300.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	35.020.000	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	69.685.577	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	5.150.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	284 Laporan	255.028.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan	2 Unit	44.780.074	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 2 Unit Disediakan	-	27.356.800	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	1 Unit	412.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.170.750	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	3.707.176	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	15.550.631	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5.150.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	10.453.264	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 5 Unit Lainnya yang Dipelihara	-	1.931.250	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6.967.023	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa Yang Dibina	100 %	18.612.100.000	
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa Yang Terfasilitasi	100 %		
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	121 Dokumen	10.300.000	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	121 Dokumen	10.300.000	
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	18.591.500.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan Desa	100 %	9.116.822.499	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	100 %		
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	121 Dokumen	25.750.000	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	121 Dokumen	35.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	121 Orang	373.890.000	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	121 Dokumen	111.774.107	
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	54 Laporan	5.400.000.000	
				Jumlah Kepala Desa yang Terpilih dan yang Dilakukan Pembinaan	54 Orang	0	
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	121 Dokumen	30.900.000	
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	121 Dokumen	124.630.000	
				Jumlah Aparat Desa yang Dilakukan Pembinaan	363 Orang	0	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	121 Orang 0 Orang	249.260.000	
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	167 Dokumen	246.542.860	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	100%		
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	167 Dokumen	1.001.160.000	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1457 Lembaga	1.176.260.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36 Dokumen	45.812.958		
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20 Laporan	92.700.000		
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan BhaktiGotong Royong Masyarakat	121 Laporan	100.142.574		
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan	100 Dokumen	103.000.000		
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					14.350.500.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	4.125.500.000		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	3.500.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.000.000		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang lengkap administrasi	0			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100%			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	50.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum	100%			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.000.000	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	140.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	60.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang % urusan pemerintah daerah	100%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	60.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	142.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	100%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	70.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.500.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Mandiri TFR (Angka Kelahiran Total)	36% 2.21 %	475.000.000	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan	20%		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPk)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	20.000.000	
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
			Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	
			Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	45.000.000	
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan	1 Dokumen	45.000.000	
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	45.000.000	
			Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi	40 Organisasi	45.000.000	
			Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis	40 Orgnisasi	55.000.000	
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	120.000.000	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di Desa/Kelurahan	100%		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 25.68 % (MKJP)	22,04 nilai 9,34 % 59,9% 25,68%	9.750.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya peserta KB aktif MKJP	28.79 %		
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	800.000.000	
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Unit	800.000.000	
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	18 Dokumen	800.000.000	
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	4 Buah	800.000.000	
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	800.000.000	
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	800.000.000	
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	800.000.000	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini	Jumlah IMP dan Program Bangga Kencana	1179 orang	950.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10 Unit	800.000.000		
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	950.000.000		
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	997 Orang	950.000.000		
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	mCPR	59.77 %			
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	31 Laporan	500.000.000		
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
	Dinas Perhubungan					32.205.113.240		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	29.241.113.240		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			20.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			25.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			25.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.000.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.500.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			95.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			25.000.000	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			25.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			75.000.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			75.000.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			25.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	95.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.145.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	125.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 Persen		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	30.250.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.500.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	22.250.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	595.968.240	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	153.950.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	25.300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai	66% 66 %	2.964.000.000	
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ yang disusun dan dimanfaatkan	100 persen		
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	10 Dokumen	70.000.000	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan Perlengkapan Jalan	53.09 persen		
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	450 Unit	855.000.000	
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C	50 Persen		
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3 Unit	15.500.000	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			25.000.000	
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C			20.000.000	
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelayanan Uji Berkala	100 Persen		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	465.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang	85.000.000	
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	250 Dokumen	215.000.000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100 Unit	75.000.000	
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 Persen		
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 Laporan	250.000.000	
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 Unit	75.500.000	
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 Laporan	35.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Peresentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	100 Persen		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	50 Laporan	298.000.000	
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peresentase Audit Keselamatan	3.05 Persen		
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			50.000.000	
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	50 Laporan	35.000.000	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten	0.357 (Rasio)		
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	50.000.000	
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50 Laporan	100.000.000	
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai	66 Persen		
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	100 Persen	50.000.000	
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	100.000.000	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin trayek	100 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000	
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai	66 Persen		
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	35.000.000	
			Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian					10.730.760.834	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.236.404.253	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6 dokumen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.421.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	26.500.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	17.265.789	
			Administrasi Keuangan	Persentase ketersediaan dokumen	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.208.787.038	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.908.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan	7.340.000	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	6.753.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100%		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 persen		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.293.980	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.724.372	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 paket	31.514.415	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 jenis	757.411.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 persen		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	693.396.525	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	3 unit	160.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	3 laporan	55.307.934	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	120.021.200	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 unit	43.110.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	19.650.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.580.690.500	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	100 persen		
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	15 Dokumen	2.348.878.400	
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	226.564.600	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	5.247.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	Persentase Layanan Publik yang	100%	2.852.174.081	
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan, perangkat daerah dan pelayanan publik pd pemerintah daerah yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain	100 persen		
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 unit	1.635.000.000	
			Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	70.000.000	
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	629.140.881	
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 unit	41.877.000	
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	375.846.200	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.310.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	27.592.000	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yg mendapat rekomendasi dari BPS	100 persen		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	15.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat	63 orang	12.592.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yg menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Persentase Tingkat keamanan informasi Pemerintah	90% 90 %	33.900.000	
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yg menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi	90 persen		
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	25.000.000	
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pola hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat Daerah	100 persen		
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	63 Perangkat Daerah	8.900.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					3.054.438.261	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	1.908.738.261	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100 %		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.200.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.200.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.607.438.261	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	114.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.600.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100 %		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	16.600.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100 %		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	5.400.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.900.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1.300.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100 %		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	24.100.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	0 Laporan	24.100.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100 %		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	2 Unit	57.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.400.000	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pesentase usaha simpan pinjam	100 %	14.000.000	
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Fasilitas Pemenuhan izin	100 persen		
			Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	13 Unit Usaha	14.000.000	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP-USP	100 %	19.500.000	
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah eanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	100 %		
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	19.500.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase capaian Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	100 %	373.800.000	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi	100%		
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	62 Orang	336.400.000	
			Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendidikan dan latihan UMKM yang dilatih	100 persen		
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		167	37.400.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase capaian pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	100 %	31.200.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaa dan perlindungan koperasi	100%		
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	31.200.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase capaian pengembangan sistem pendukung usaha mikro,, kecil dan menengah	100 %	624.000.000	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro menjadi Kecill	100 %		
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	111.000.000	
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	13.800.000	
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1 Unit Usaha	13.800.000	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	453.700.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	67 Orang	31.700.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase capaian pengembangan UMKM	100 %	83.200.000	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Peningkatan Usaha Mikromenjadi Kecil	100%		
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	67 Unit Usaha	83.200.000	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			6.061.773.267	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 100 %	5.042.926.466	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	20.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	13 Laporan	5.000.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	35.000.000	
			Administrasi Keuangan	Persentase ketersediaan layanan	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.995.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	13 Laporan	20.000.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi Barang Milik Daerah	100%		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	50.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	82 Paket	36.900.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	25.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	3 Dokumen	6.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	184.000.000	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	60.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang berfungsi 100 % dengan baik			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	3 Unit	100.727.832	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	25.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal	46% 100 %	368.149.317	
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perda pemberian fasilitas/insentif yang diberlakukan	100%		
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	158.149.317	
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3 Kegiatan	10.000.000	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase potensi pengembangan penanaman modal yang dipetakan	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku investasi Investasi	50 Pelaku sektor unggulan	220.889.590	
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan	100 %		
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan	3 Kegiatan		
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	15 Dokumen	170.889.590	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang diterbitkan	100%	262.828.758	
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase izin yang diterbitkan	100 %		
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %		
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	13000 dokumen 20 aduan		
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Usaha Pelayanan Perizinan	13650 Pelaku	117.000.000	
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	13000 Kegiatan Usaha	55.000.000	
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	90.828.758	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian perusahaan penanaman Persentase perusahaan penanaman modal yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal	70 % modal 96 %	397.732.765	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Usaha Pelaksanaan Penanaman Modal	40 Kegiatan	147.823.383	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Usaha Modal	90 Pelaku	102.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Usaha Sinkronisasi Pengawasan	40 Kegiatan	147.909.382	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi yang	100 % valid	137.395.688	
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan permintaan data dan informasi	2 dokumen		
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	137.395.688	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	Dinas Pemuda dan Olahraga					4.911.294.647	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	3.986.416.499	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2.720.911.681	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	891.265.809	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	85.045.275	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 Unit	270.965.672	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Dalam Kondisi Baik	100%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14.230.562	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	3.997.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	50,16 %	602.686.673	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	50,16 %		
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan dasar Kepemimpinan dibagi Jumlah pemuda (16 - 30 Thn)	100 Orang	69.603.400	
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Anggota Paskibraka yang Dilatih	76 Orang	403.466.768	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	50,16 %		
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah OKP yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan Oraganisasi Kepemudaan	100 orang	129.616.505	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Jumlah Kegiatan Olahraga	100%	216.507.837	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kegiatan olahraga	100%		
			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi yang mengikuti Kejuaraan dan pekan Olahraga Tingkat daerah	61 Orang	103.719.817	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Jumlah Kegiatan Olahraga	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	61 Orang	112.788.020	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Jumlah Kegiatan Kepemudaan	100%	105.683.638	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase jumlah kegiatan kepemudaan	100%		
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Anggota Pramuka yang mengikuti Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan	230 Orang	105.683.638	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Warisan budaya yang tersertifikasi	2 Unit	85.000.000	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	10 kegiatan		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pengembangan WBTB yang dilaksanakan	1 Objek	15.000.000	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan yang dibina	40 Orang	70.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar seni yang dibina	10 Unit	85.000.000	
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sanggar Seni yang mendapatkan ijin	15 persen		
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	75.000.000	
			Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	30 Sertifikat	10.000.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	2 Unit	35.000.000	
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	0.25 persen		
			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	35.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Museum Daerah Yang dikelola	1 Unit	700.000.000	
			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Museum Daerah yang dikelola	100 persen		
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	224.000.000	
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	364.000.000	
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	112.000.000	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			6.379.200.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 persen	3.736.200.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 persen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterseiaan Layanan Administrasi Keuangan	100 persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	3.200.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	90.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	150.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	100.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	70.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata yang dibina	10 %	676.000.000	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang dibina	10 persen		
			Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	50.000.000	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Entitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata	4 persen		
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Dokumen	240.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	356.000.000	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	10 persen		
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Dokumen	30.000.000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan/ kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Kota	60 %	207.000.000	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata - rata lama kunjungan wisatawan	2 hari		
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	27.000.000	
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	150.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	30.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5 %	130.000.000	
			Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Prasarana untuk pelaku ekonomi kreatif	1 persen		
			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 Unit	130.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 %	1.630.000.000	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Peserta Sektor KePariwisata	8 persen		
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	200 Orang	1.340.000.000	
			Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	200.000.000	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelaku Ekraf	10 persen		
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	90.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					12.011.987.341	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.915.269.365	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	100%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.492.964.965	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	10.000.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Penatausahaan BMD yang disusun	6 Dokumen		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.120.000	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.180.000	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	4.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Adiministrasi Kepegawaian	80%		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	11.896.500	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	10.300.000	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.120.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	64 Orang	38.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	50.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket	15.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 Laporan	95.000.000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen	30.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	50 %		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	60.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	30.000.000	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	78.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	120.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	280.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	80 %		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.626.900	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	65.061.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	32.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	68.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	50 %	8.780.840.701	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Perpustakaan Daerah	6 Kali		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	10 Layanan	260.000.000	
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	8 Perpustakaan	24.000.000	
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	8 Perpustakaan	24.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	32.000.000	
			Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	6000 Eksemplar	528.000.000	
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6000 Eksemplar	12.000.000	
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	4 Kali		
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	250 Lokus	240.000.000	
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	7.500.000.000	
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2 Orang	125.000.000	
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	35.840.701	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	3 %	154.877.275	
			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	1 Dokumen		
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar	10.598.381	
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar Arsip	53 Folder		
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	70 Berkas	20.000.000	
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	21 Berkas	9.278.894	
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil IPengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000	
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang telah dibuatkan daftar arsip	1 Box		
			Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1 Arsip	25.000.000	
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	4 Arsip	25.000.000	
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0 Dokumen		
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	25.000.000	
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	7%	161.000.000	
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	2 Dokumen	25.000.000	
			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1 Berkas	20.000.000	
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Akibat Bencana yang dilindungi dan dilakukan penyelamatan	1 Dokumen		
			Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	4 Arsip	20.000.000	
			Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 Arsip	15.000.000	
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diselamatkan	1 Dokumen		
			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	13.000.000	
			Pendataan, Penyusunan 4 Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Arsip	13.000.000	
			Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	1 Arsip	20.000.000	
			Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1 Arsip	15.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Dinas Perikanan						5.119.460.487	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	3.051.678.740	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.382.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
			Administrasi Keuangan	Persentase Ketersediaan Layanan	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.581.101.740	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.000.000	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.102.000	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 %		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.255.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kedisiplinan Pegawai Perangkat Daerah	100 %		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	40 Unit	12.500.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	13.137.500	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3 Paket	13.844.250	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	10.255.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.051.000	
			Penyediaan Bahan/Material			10.255.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.614.750	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308 Laporan	71.785.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.765.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	60.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	155.355.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	12 Unit	30.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	10.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.275.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	1301 Ton	1.856.103.059	
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	628 Ton		
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Laporan	10.000.000	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	6 Unit	60.000.000	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	70 Pis	182.549.355	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Laut	194.6 Ton		
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	16.019.741	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3 Kelompok	10.000.000	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Dana, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	4 Unit Usaha	145.000.000	
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Meningkatnya Produksi Tempat Pelelangan Ikan	478.3 Ton		
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	10 Jenis	52.099.100	
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Produksi Kontribusi Kelompok Terhadap Produksi Ikan	35.5 Ton		
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	15 Kelompok	42.000.000	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	18 Kelompok	45.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	21 Kelompok	895.648.060	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	922.2 Ton		
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit	255.000.000	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21 Kelompok	67.786.803	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	10.000.000	
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Kelompok	30.000.000	
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	100 Orang	20.000.000	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	15%	13.657.231	
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nelayan Mematuhi Penggunaan Alat tangkap Ramah Lingkungan	30 RTP		
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.657.231	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	70 Ton	198.021.457	
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memiliki Tanda daftar Usaha (TDU)	33 RTP		
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	1 Dokumen	10.254.935	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar yang dibina	4 Klp		
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	133.314.159	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kontribusi Kelompok Terhadap Hasil Olahan Ikan	4.7 Ton		
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1 Pelaku Usaha	54.452.363	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
			Dinas Peternakan dan Perkebunan			20.721.646.051	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.487.328.251	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 orang/bulan	5.576.000.256	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya logistik dan laporan administrasi umum	100 persen		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	25.244.099	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 eksampler	6.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 laporan	168.023.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	54.658.788	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	618.772.956	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	100 persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibyarkan pajaknya	2 unit	38.629.152	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	100 %	86.500.000	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani pengguna sarana pertanian yang terawasi	100 persen		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi	1 laporan	10.000.000	
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelahiran ternak sapi hasil Ib yang tertangani	100 persen		
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah ternak yamh di inseminasi	500 Dokumen 500 ekor	26.500.000	
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak dan pakan	100 persen		
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	1 laporan	10.000.000	
			Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	jumlah pengawasan bahan pakan/pakan benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	1 laporan	10.000.000	
			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase tersedianya pengawasan obat hewan	100 persen		
			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keaman obat hewan yang beredar	1 laporan	10.000.000	
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase engawasan benih/bibiternak, serta pakan ternak dan dijamin sesuai standar	100 persen		
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	1 laporan	10.000.000	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase jumlah hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kab lain	100 persen		
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100 ton	10.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	100%	13.915.250.000	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dibangun	100 persen		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah jaringan irigasi usaha tani Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	21 Unit 5 Unit	831.250.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara jumlah embun yang dibangun	4 Unit 6 unit	600.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	1.500.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Uni	120.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Long Storage yang Dibangun,	1 Unit	120.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3.000.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun	6 Paket 11 unit	7.700.000.000	
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase luas wilayah sumber bibit ternak	100 persen		
			Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	1 laporan	22.000.000	
			Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Persentase luas lahan pengembalaan umum	100 Persen		
			Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	jumlah pembinaan dan pengawasan lahan pengembalaan umum	1 laporan	22.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kinerja program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masarakat veteriner persentase kinerja program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Persentase Penurunan	100 Persen 100 Persen 10 Persen	168.088.800	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	jumlah hewan yang bebas wabah penyakit hewan menular Persentase Ketresediaan hewan yang bebas penyakit hewan	7000 ekor 100 Persen		
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	1 laporan	98.088.800	
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran	persentase pengawasan hewan dan produk	100 persen		
			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	20000000	
			Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan diperbatasan lintas daerah kabupaten/kota	1 laporan	15.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase tersedianya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	100 persen		
			Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	jumlah pelayanan jasa laboratorium	100 Sampel	20.000.000	
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	persentase tersedianya pengawasan hewan yang sesuai dengan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	100 persen		
			Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan	jumlah pendampingan penerapan unit	100 persen	15.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	100 %	20.000.000	
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase kinerja program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 persen		
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan	40 Ha	20.000.000	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang diterbitkan	100%	30.000.000	
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah	Persentase isin usaha perkebunan dan peternakan yang difasilitasi terhadap usulan	100 persen		
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	1 dokumen	15.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 laporan	15.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dilaksanakan	100%	14.479.000	
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan kegiatan penyuluhan pertanian	100 persen		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian dikecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	100 unit	14.479.000	
			Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura			45.545.729.815	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayananan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.388.570.465	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Dihasilkan Persentase Ketersediaan	7 Dokumen 100 Persen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	18.145.418	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	18.615.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	18.998.469	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan	25.846.800	
			Administrasi Keuangan	Ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 orang/bulan	10.454.737.027	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	18 Dokumen	94.158.036	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 %		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	42.997.500	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	55.072.500	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	17.365.071	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	12.600.000	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	18.375.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.255.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 Kali	387.543.082	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Daerah	100 % Milik		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	78.991.500	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	61.892.449	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	23.326.380	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	31.444.025	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	6.693.750	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6.513.458	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian	100% 100 %	24.105.062.350	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan dan pendampingan sarana pendukung pertanian	2 Laporan		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	1 Laporan	21.885.568.500	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1 Laporan	2.219.493.850	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100% 100 %	8.987.797.000	
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana	1 Dokumen		
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B, dan Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan / LCP2B	1 Dokumen	13.797.000	
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1.000.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana	1 Laporan	200.000.000	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Prasarana Pertanian yang Dibangun	34 Unit		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	6 Unit	997.500.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang dibangun,direhabilitasi dan dipelihara	6 Unit	630.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Km	4.497.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	378.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	378.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	220.500.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	378.000.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	295.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75%	339.275.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas areal bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	600 Ha		
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	300 Ha	276.125.000	
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	300 Ha	63.150.000	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	100%	22.575.000	
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang	Persentase Permohonan izin yang	100 Persen		
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian	24 Dokumen	22.575.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian yang	100%	702.450.000	
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang	100 Persen		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	18 Unit	193.725.000	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan	167 Unit	315.000.000	
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	193.725.000	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
			Dinas Perdagangan dan Perindustrian			18.536.615.110	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	5.333.233.772	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun	100 persen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19.767.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	43.151.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.827.090	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	100 persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.742.869.600	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59.305.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.868.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8.092.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100 persen		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	38.422.125	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	100 persen		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.031.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	33.800.500	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 persen		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.500.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.201.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	19.845.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	18.257.400	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	561.276.082	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	0		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	64.323.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113.276.500	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	315.671.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	71.500.500	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	37.446.750	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	21.311.325	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	59.490.900	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan dan STP / lanjutan Waralaba)	100%	180.048.000	
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan izin Usaha Toko Swalayan	1 Sub Kegiatan		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pas	1 Dokumen	80.720.000	
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan 1 Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0		
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	24.979.000	
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STPW) untuk penerima Waralaba dan Waralaba dalam Negeri	1 Sub Kegiatan		
			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	74.349.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase terbangunnya Pasar Rakyat yang representatif	61.29 %	11.211.094.688	
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Sub Kegiatan		
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	10.066.455.920	
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	260.000.000	
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	2 Sub Kegiatan		
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan	12 Dokumen	142.623.722	
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan	12 Dokumen	742.015.046	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kesesuaian harga jual pedagang dan ketentuan Pemerintah	1.001 % HET	155.190.000	
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Sub Kegiatan		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	53.770.000	
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	12 Laporan		
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	59.350.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Sub Kegiatan		
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	42.070.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor bersih perdagangan	1699237.22 \$	501.799.900	
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 4 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Penyelenggaraan Promosi	4 Sub Kegiatan		
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor	10 Pelaku Usaha	50.000.000	
			Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam	20 Pelaku Usaha	305.000.000	
			Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam	15 Pelaku Usaha	66.799.900	
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	80 Pelaku	80.000.000	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	0.056 %	126.000.000	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	3 Sub Kegiatan		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3600 Unit	77.700.000	
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	280 orang	39.900.000	
			Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	10 Unit	8.400.000	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang dihasilkan IKM dan dipasarkan setiap tahun	46 Produk	350.000.000	
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Sub Kegiatan		
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120 UMKM	120.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan 50 UMKM Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		55.000.000	
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam 120 UMKM Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		120.000.000	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan 50 UMKM Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		55.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	82.66 %	488.500.000	
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3 Sub Kegiatan		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	99.300.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	282.197.500	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	12 Dokumen	488.500.000	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			40.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang mendapatkan pelatihan	80%	40.000.000	
			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	1 SP		
			Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina Jumlah Warga Transmigran yang mendapatkan Pelatihan	20 Kepala Keluarga 20 Orang	20.000.000	
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Jumlah Warga Transmigran yang Mendapatkan Bantuan	1 satuan permukiman 20 Orang	20.000.000	
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				

1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH						
	SEKRETARIAT DAERAH					51.189.000.000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 %	1.280.000.000	
			Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan tata pemerintahan	100 persen		
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan yang terfasiliasi	4 Kali	850.000.000	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang	18 kecamatan	80.000.000	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun	4 Dokumen	350.000.000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 %	1.280.000.000	
			Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan tata pemerintahan	100 persen		
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan yang terfasiliasi	4 Kali	850.000.000	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang	18 kecamatan a	80.000.000	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun	4 Dokumen	350.000.000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95 %	1.638.000.000	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	100 persen		
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	471 Kal	1.600.000.000	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan yang terfasiliasi	3 Kali	24.000.000	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan yang terfasiliasi	1 Kali	14.000.000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95%	1.365.000.000	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang	100 persen		
				Persentase Produk Hukum yang terpublikasi	100 persen		
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang terfasiliasi	13 Dokumen	650.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Hukum Daerah yang ditangani Jumlah Laporan Pelaksanaan RANHAM	8 Kasus 1 Kasus	700.000.000	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan	13 Dokumen	15.000.000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	95%	117.500.000	
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerja sama daerah yang	100 persen		
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerja sama daerah dalam negeri yang	24 MOU	25.000.000	
			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah kerja sama daerah luar negeri yang	1 MOU	2.500.000	
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah kerja sama daerah yang dievaluasi	24 Laporan	90.000.000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	100%	2.435.000.000	
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase data dan informasi yang			
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	Jumlah laporan pengelolaan BUMD dan	2 Dokumen	35.000.000	
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Kegiatan pengendalian dan Distribusi	4 Laporan	100.000.000	
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan 100 persen			
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pembangunan yang tersusun.	2 Dokumen	1.500.000.000	
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Pemantauan Kebijakan sumber daya alam	100 persen		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang terfasilitasi	1 Kali	800.000.000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Ratio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	70% 100 % 100 %	1.250.000.000	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan yang	70 persen		
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengajuan proses	100 Persen	800.000.000	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase paket pengadaan SKPD melalui LPSE	91 Persen	150.000.000	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang	Jumlah Pejabat PBJ yang mengikuti	8 Orang	300.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Pemenuhan Penunjang	100%	1.198.000.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase ketersediaan Dokumen	100 persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi yang	2 kali	24.000.000	
			Penataan Organisasi	Nilai komponen pelaporan kinerja SAKIP OPD Persentase Penataan	100 persen 100 persen		
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang ditetapkan kelembagaannya	54 Unit 54 Unit	24.000.000	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi penyusunan	54 Opd 54 Unit	290.000.000	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah yang tersusun. Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	1 Dokumen 54 Unit	200.000.000	
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah unit pelayanan publik yang dibina	54 Unit	210.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja instansi pemerintah yang tersusun	1 Dokumen	450.000.000	
	Bagian Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	25.847.000.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset sekretariat daerah yang terkelola dengan baik	70 persen		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset sekretariat daerah yang diasuransikan	126 Unit	650.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang memperoleh pakaian dinas dan kelengkapannya	275 Orang	500.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang diadakan	45 Orang	165.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	31 Unit	160.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	54 Unit	250.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	350.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	10 Bagian	7.000.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi	10 Bagian	240.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 persen		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Pengadaan Mebel	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Jumlah meubeler yang diadakan	4 Unit 3 Jenis	4.500.000.000 500.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan	12 Jenis	1.500.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitas pemenuhan air, kelistrikan dan ³ Jenis komunikasi yang		2.500.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan ⁷ Laporan		1.500.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa layanan umum yang ²⁰⁰ Orang		2.600.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang persen terlaksana	100 persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terfasilitasi	70 Unit	1.600.000.000	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	3 Jenis	12.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang	12 Jenis	200.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang terpeliharaan	9 Unit	1.600.000.000	
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	kegiatan medical check up yang dilaksanakan	4 Kali	20.000.000	
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.380.000.000	
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan Aparatur Sipil Negara yang terfasilitasi keprotokoleran Jumlah kegiatan Aparatur Sipil Negara yang terfasilitasi keprotokoleran Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0 Kali 1 Kali 4 Laporan	2.100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah komunikasi pimpinan (sambutan) yang terfasilitasi	100 Dokumen	80.000.000	
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan (Bupati Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah) yang terbukukan	120 Dokumen	200.000.000	
	Bagian Perencanaan dan Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	12.398.500.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 persen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	1 Dokumen	24.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran yang tersusun	2 Dokumen	26.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	26.000.000	
			Administrasi Keuangan	Persentase ketersediaan layanan	100 persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	125 Orang	12.000.000.000	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN selaku pengelola keuangan yang mendapatkan tunjangan	3 Orang	50.000.000	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan SPJ yang diverifikasi	3 Jenis	25.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	26.500.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	18 Dokumen	50.000.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset sekretariat daerah yang terkelola dengan baik	70 persen		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD yang tersusun	12 Dokumen	26.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN pengelola BMD	13 Orang	145.000.000	
URUSAN SEKRETARIAT DPRD							
Sekretariat DPRD						61.096.048.934	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Pemenuhan Penunjang	100 %	34.624.648.934	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan	24.959.648.934	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.000.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 %		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	218 Paket	350.000.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	250.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum 100 % Perangkat Daerah			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	300.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	800.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	400.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	430.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	250.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	13 Unit	600.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	170.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000.000	
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase anggota DPRD yang melakukan medical check up	100 %		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	60.000.000	
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase rapat-rapat AKD yang dilaksanakan	100%		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	2.000.000.000	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan terhadap layanan rapat-rapat anggota DPRD	90,31 (Indeks)	26.471.400.000	
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	100%		
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	300.000.000	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	541.000.000	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dalam pokir	100%		
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1080 Laporan	1.500.000.000	
			Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	6.000.000.000	
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase publikasi di media	100 %		
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	330.400.000	
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 Persen		
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	17.800.000.000	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	URUSAN PERENCANAAN						
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					4.556.203.372	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 Persen	3.820.203.372	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	289.036.620	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang difasilitasi penyusunannya	5 Dokumen	-	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/Bulan	2.296.635.852	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	60.530.900	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	27.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	700.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik Daerah	100%		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	3 Unit Disediakan	200.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	92.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan milik daerah	100 % barang		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	80.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	100%	581.000.000	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	100%		
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	4 Dokumen	130.000.000	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dokumen	130.000.000	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	23.000.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	15.000.000	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	100.000.000	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20 Usulan	50.000.000	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	70.000.000	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil pengendalian Evaluasi dan Pelaporan yang ditindak lanjuti	100%		
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	50.000.000	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	13.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan (3 pembangunan daerah yang Bidang) dilaksanakan	100%	155.000.000	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Sasaran RPJMD, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, tercapai atau melebihi target tahunan	100%		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	47.000.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	18.000.000	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator sasaran RJMD bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tercapai atau melebihi target tahunan	100%		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	17.000.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	10.000.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	22.000.000	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase indikator sasaran RJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan tercapai atau melebihi target tahunan	100%		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	17.000.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 laporan	15.000.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	9.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN KEUANGAN						
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah					301.850.512.138	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan	100 %	57.069.887.124	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	48.939.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4 Laporan	17.875.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 Persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55.421.294.505	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159 Dokumen	498.575.400	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	33.582.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	81.200.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	1 Orang	12.500.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10 Paket	10.084.200	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	249.051.159	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5 Dokumen	6.000.000	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	71.700.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	82.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396 Laporan	282.002.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.532.300	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	17.700.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96 Laporan	70.313.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	30 Unit	127.341.600	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	13 Unit	23.696.960	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan keuangan	100%	244.309.738.614	
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen penganggaran Pemerintah Daerah yang diselesaikan tepat	100 Persen		
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen	16.891.750	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen	17.116.750	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen	48.645.000	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen	48.645.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	4 Dokumen	423.298.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	4 Dokumen	152.187.693	
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100 Persen		
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7500 Dokumen	41.242.000	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	810 Dokumen	95.259.800	
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2400 Dokumen	60.029.800	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	5100 Dokumen	84.601.000	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	80 Orang	148.389.600	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan yang	100 Persen		
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	649 Laporan	99.240.380	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 Dokumen	144.594.350	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	2 Dokumen	21.249.750	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	80 Orang	62.510.000	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan	100 Persen		
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman	1 Laporan	15.983.759.500	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	121 Laporan	221.186.634.040	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	4.000.000.000	
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	167 Laporan	1.675.443.701	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah (BMD)	100%	470.886.400	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang diselesaikan	100 Persen		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	118.827.800	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	30 Dokumen	101.327.900	
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	4 Laporan	33.378.400	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	217.352.300	
			Badan Pendapatan Daerah			14.899.615.328	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	12.240.056.276	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	60.000.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	10.000.000.000	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	370.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	85.486.042	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	30.250.000	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	7 Dokumen	5.000.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	60.000.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	10 Orang	25.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan	100%		
			Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Paket	7.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	10 Paket	6.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	15 Paket	7.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	5.769.260	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	650.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	50.750.000	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan	1 buah	-	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.955.144	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1 Laporan	140.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	150.512.730	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	53 unit	65.333.100	
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud, yang Dipelihara	5 Uni	250.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	94.68 %	2.659.559.052	
				Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB	12,20 %		
				Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Pajak Daerah	100 % Potensi		
				Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	96.72 %		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	20%		
				Persentase Penyelenggaraan Penagihan k Daerah	20 % Paja		
				Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	100 % potensi		
				Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	20 % Paja		
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	8 Dokumen	69.430.585	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	8 Dokumen	68.487.071	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan	1 Laporan	81.521.063	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	529 unit	750.000.000	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan	12 Laporan	400.000.000	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,	12 Laporan	87.105.911	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1089 Dokumen	131.937.887	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 Layanan	3.813.950	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	3.686.562	
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	863.965.386	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	99.890.093	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokumen	99.720.544	
			URUSAN KEPEGAWAIAN				
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			8.761.097.012	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.188.032.662	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	keluaran kegiatan	100 persen		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	3.769.097.990	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	19 Laporan	75.033.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	36.000.000	
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	250 orang	40.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	10 Laporan	582.819.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 persen		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	80.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	80.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	2.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan 0 laporan	316.082.672	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	41.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	25.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	100.000.000	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan	40%	2.323.064.350	
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	cakupan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yg terlaksana	100 persen		
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	200.000.000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.100.000.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	20.000.000	
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	20.000.000	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	54 Dokumen	46.758.600	
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	54 Dokumen	60.000.000	
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	60.000.000	
			Mutasi dan Promosi ASN	persentase mutasi dan promosi asn yang terlaksana	100 persen		
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	100.000.000	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	110.000.000	
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	5 Dokumen	250.000.000	
			Pengembangan Kompetensi ASN	persentase peningkatan kompetensi ASN	100 persen		
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 orang	52.572.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	1 Dokumen	50.000.000	
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja	1 Dokumen	50.000.000	
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	30 orang	30.000.000	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi	1 Dokumen		
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian	1 Dokumen	20.000.000	
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	300 orang	45.000.000	
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang		48.733.750	
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			40.000.000	
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			20.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3 % 1 %	1.250.000.000	
			Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	30 persen		
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 orang	150.000.000	
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase CPNSD yang lulus diklat	100 persen		
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1.100.000.000	
			URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
			Badan Penelitian dan Pengembangan			2.754.597.208	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.916.997.398	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.284.960	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	10.100.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.548.632.438	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.550.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6.780.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100 Persen		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19 Paket	12.350.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	17.650.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Jenis	4.800.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat Jumlah snack rapat Jumlah perjalanan dinas	30 Laporan 350 Dos 350 Dos 135 kali	112.700.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 Persen		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	26.500.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	26.500.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	4 Laporan	84.500.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	48.150.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	13 unit	7.500.000	
			PROGRAM PENELITIAN DAN	persentase hasil kelitbangan	2 Dokumen	837.599.810	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan		
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	100.000.000	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Dokumen		
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	150.000.000	
			Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	150.000.000	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan	2 Dokumen		
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	100.000.000	
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	100.000.000	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi yang ditetapkan	100 Persen		
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	100.000.000	
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi jumlah peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis 50 orang Inovasi Daerah	1 Laporan	28.187.500	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	jumlah Inputan Data Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 kegiatan 1 Laporan	14.412.310	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	50.000.000	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Persentase inovasi dan teknologi yang difasilitasi	1 Laporan 30 Persen	45.000.000	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
URUSAN INSPEKTORAT DAERAH							
Inspektorat						9.858.850.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan pembangunan Daerah	100%	6.568.486.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	4 Dokumen		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	56.917.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.392.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	13 Dokumen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	4.796.315.000	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	327.340.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.492.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian	2 Jenis		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	84.630.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	491.521.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Operasional Administrasi yang Disediakan	7 Jenis		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.901.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	3.920.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	41.528.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.184.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	86.310.000	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	14 Laporan	28.864.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan 12 Laporan	234.218.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	26 Unit		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 Unit	121.769.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang Tersedia	2 Jaringan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	103.487.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Jenis		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	56.710.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	57.013.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	29.975.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal/Eksternal) Setiap Tahun Berkenaan Persentase Unit Kerja yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan/Aset yang Material	79 % 90%	2.877.694.000	
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	7 Jenis		
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	272.278.000	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	309.122.000	
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	129.373.000	
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 Laporan	576.673.000	
			Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	642.321.000	
			Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	57.750.000	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	18.608.000	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	7 Jenis		
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	52 Laporan	871.569.000	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks RB pada Komponen Penguatan Pengawasan Pesentase pemenuhan MC pada Penguatan APIP	6% 74 %	412.670.000	
			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Assessment RB, Monev PPK dan Hasil	3 Laporan SPI		
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan 54 perangkat Daerah	15.221.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 perangkat Daerah	142.916.000	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 Kegiatan	254.533.000	
III	UNSUR KEWILAYAHAN						
1	URUSAN KECAMATAN						
1	Kecamatan Bontomarannu					13.450.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	4.400.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.500.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi Pengadaan BMD	100 %		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	50.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	200.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Umum yang diselenggarakan	2 Kegiatan		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000	
				Jumlah Kegiatan Jasa Pelayanan umum yang terlaksana	12 kegiatan		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	1 Unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	50.000.000	
				Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dan pembayaran pajak yang terlaksana	3 kegiatan		

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	50.000.000	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	50.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase status desa dan kelurahan cepat berkembang	100 %	50.000.000	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase koordinasi pelaksanaan pendampingan desa di wilayah kecamatan	100%		
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	50.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			9.000.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %		
			Kelurahan Romanglompoa				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	4 kegiatan	1.000.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	2.000.000.000	
			Kelurahan Borongloe				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	4 kegiatan	1.000.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	2.000.000.000	
			Kelurahan Bontomanai				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	4 kegiatan	1.000.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	2.000.000.000	
2	Kecamatan Tompobulu					7.567.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.567.500.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.000.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			27.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.500.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.500.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.500.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			14.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	40.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			300.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5.000.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
			Kelurahan Malakaji				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.500.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.000.000.000	
			Kelurahan Cikoro				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.500.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.000.000.000	
3	Kecamatan Pallangga					9.690.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.590.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase kegiatan administrasi keuangan yang 100 persen terlaksana			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah asn yang menerima gaji dan tunjangan	45 orang	4.000.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi pengadaan BMD	100 persen		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	4 unit	50.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kegiatan pelayanan umum yang diselenggarakan	2 kegiatan		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah kegiatan pelayanan umum yang didisenggarakan	4 kegiatan	500.000.000	
				persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	40.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 persen	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	2 laporan		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah laporan koordinasi/perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	2 laporan	50.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase status desa dan kelurahan cepat berkembang	100 persen	50.000.000	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase koordinasi pelaksanaan pendampingan desa di wilayahnya	100 persen		
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 laporan	50.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 persen	5.000.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 persen		
			Kelurahan Mangalli				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 kegiatan	500.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 pokmas/ormas	750.000.000	
			Kelurahan Pangkabinanga				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 kegiatan	500.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 pokmas/ormas	750.000.000	
			Kelurahan Parangbanoa				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 kegiatan	500.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 pokmas/ormas	750.000.000	
			Kelurahan Tetebatu				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 kegiatan	500.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 pokmas/ormas	750.000.000	
4	Kecamatan Bajeng					8.135.829.986	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase KinerjaProgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 % 100 %	5.441.287.102	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase KinerjaProgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	460 orang/bulan	4.557.408.260	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	5.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.500.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase KinerjaProgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta AtributJumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	42.120.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.214.769	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.354.757	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.110.862	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	330.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	100.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	255.416.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	64.344.454	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	14.818.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	10.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%	2.694.542.884	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%		
			Kelurahan Kalebajeng				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	150.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	523.635.721	
			Kelurahan Limbung				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	150.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	523.635.721	
			Kelurahan Mataallo				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	150.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	523.635.721	
			Kelurahan Tubajeng				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	150.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	523.635.721	
5	Kecamatan Biringbulu					3.973.322.905	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Umum Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 100 %	2.461.476.581	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PPersentase laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana tepat waktu	100%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	6.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Adnistrasi Keuangan yang terlaksana	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia	14 Bulan	1.818.520.212	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegwaian yang terlaksana	100%		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	17.160.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	1.844.892	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.500.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	1.745.431	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	9.289.951	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/material yang disediakan	8 Paket	4.644.975	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya Makan Minum Rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan Dinas 100 Kali	150 Orang	26.452.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.500.000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2.750.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.500.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Mesin WIFI kantor yang disediakan	1 Unit	7.919.116	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium PPK dan Kepala Lingkungan	12 Bulan	187.560.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.893.364	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah LCD Proyektor Laptop yang disediakan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 1 Unit	6.500.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Rumah Jabatan Dinas Kecamatan yang 1 Unit direhabilitasi		250.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18 Unit yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.696.640	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelesaian pelayanan publik	100%	8.940.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi penyelenggaraab kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	8.940.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100% 100 %	1.462.773.370	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	"Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa"	120 Orang	8.280.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase yang terlaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	703.274.730	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	694.218.640	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyakatan Tingkat Kecamatan	100%		
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	"Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan"	3 Lembaga	10.000.000	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	"Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan"	3 Unit	15.000.000	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	"Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat"	12 Laporan	10.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	"Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan"	100%		
			Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	22.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian program urusan pemerintahan umum	100%	-	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah kegiatan Forum Koodinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	12 Dokumen 3 Kali	-	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100%	40.132.954	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100%		
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	12.000.000	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	18.394.624	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	9.738.330	
6	Kecamatan Barombong					4.206.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.789.500.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang dibayarkan gaji dan tunjangan	14 Bulan	2.200.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	10.500.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	32.000.000	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			35.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jaringan	20.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	190.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	35.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.417.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
			Kelurahan Lembang parang				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia di Kelurahan	1 Kelurahan	150.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan	12 Bulan	562.000.000	
			Kelurahan Benteng Somba Opu				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia di Kelurahan	3 Unit	155.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	550.000.000	
7	Kecamatan Bajeng Barat					2.675.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	2.048.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang Diproses Pencairannya	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.800.000.000	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			6.000.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			40.000.000	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			7.000.000	
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			60.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian yang Terlaksana	100 %		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			30.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			60.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%	15.000.000	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana	100%		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			15.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			52.000.000	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			52.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 %	560.000.000	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pendampingan Desa	100 %		
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			560.000.000	
8	Kecamatan Parangloe					8.805.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	2.805.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	26 Orang	2.500.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100 Persen		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan"	13 Paket	10.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan atau pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	75 Persen		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	45.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	100%	6.000.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang terlaksana	90 persen		
			Kelurahan Lanna				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	1.000.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	2.000.000.000	
			Kelurahan Bontoparang				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	1.000.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	2.000.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Kecamatan Bontonompo Selatan					3.545.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	2.565.500.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Adm,Keuangan yang terlaksana	100 Persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.200.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adm.umum perangkat daerah yang terlaksana	100 Persen		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	9.500.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	2.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	140.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		8.500.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang di terpelihara dan terbayarkan pajak tahunannya	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			980.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 persen		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	180.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	800.000.000	
10	Kecamatan Parigi					2.380.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.380.000.000	
				Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	2.000.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 %		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	50.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi Pengadaan BMD	100%		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	2 unit	50.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Umum yang diselenggarakan	3 Jenis		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 kegiatan	150.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	1 Unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	50.000.000	
11	Kecamatan Somba Opu					20.514.100.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 &	8.597.600.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	1		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	7.500.000.000	
				Jumlah gaji dan tunjangan yang diproses pencairannya	8 jenis		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	1		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	9.600.000	
				Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	16 stel		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum	100%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.500.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	850.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	35.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelesaian pelayanan publik	100%	16.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang terlaksana	100%		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	4 Laporan	16.500.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%	11.900.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	100%		
			Kelurahan Sungguminasa				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000	
			Kelurahan Bonto-Bontoa				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000	
			Kelurahan Batangkaluku				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000	
			Kelurahan Tompobalang				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000	
			Kelurahan Katangka				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000	
			Kelurahan Pandang-Pandang				

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000		
			Kelurahan Tombolo					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000		
			Kelurahan Kalegowa					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000		
			Kelurahan Samata					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000		
			Kelurahan Romangpolong					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000		
			Kelurahan Paccinongang					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000		
			Kelurahan Tamarunang					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000		
			Kelurahan Bontoramba					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kelurahan Mawang				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000	
12	Kecamatan Pattallassang					1.772.100.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.672.100.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	8 Kegiatan		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	1.400.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100 Persen		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	15.400.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	1.500.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	3.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	4 unit	15.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item ATK yang diadakan	12 item	10.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 Persen		
			Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang diadakan	4 Unit	25.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	40.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	21.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.200.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang gedung yang dipelihara	2 Ruang	10.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelesaian Pelayanan Publik	100 Persen	50.000.000	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi pemerintahan dikecamatan	38 Persen		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	2 Laporan	50.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 Persen	50.000.000	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pendampingan desa di wilayah kecamatan	1 kegiatan		
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 Laporan	50.000.000	
13	Kecamatan Bontolempangan					1.757.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	1.757.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	1.500.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas	14 Orang		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 paket	10.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 %		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	6.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	60.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	20.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi Pengadaan BMD	100 %		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	20.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Umum yang diselenggarakan	4 Jenis		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Laporan	13.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	60.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	1 Unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	60.000.000	
14	Kecamatan Tinggimoncong					11.625.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.525.000.000	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
				Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bln	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	3.500.000.000	0
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang menerima honorarium	20 Orang/Bln		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	800.000.000	
				Jumlah Kegiatan Penunjang Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Kegiatan		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	2 Unit		0
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			7.100.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormasyang melaksanakan Keg. Pemberdayaan asyarakat Kelurahan	4 Pokmas/Ormas		
			Kelurahan Bulutana				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Jenis	400.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	800.000.000	
			Kelurahan Pattapang				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	400.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	800.000.000	
			Kelurahan Malino				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Item	300.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	800.000.000	
			Kelurahan Gantarang				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	400.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	800.000.000	
			Kelurahan Bontolerung				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	400.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	800.000.000	
			Kelurahan Garassi				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	400.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	800.000.000	
15	Kecamatan Bungaya					3.722.480.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.259.200.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD yang terlaksana	1 Kegiatan	2.400.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	8 Kegiatan	2.000.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan	2.400.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	1 Kegiatan	7.200.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Peralatan Listrik yang tersedia	1 Kegiatan	2.400.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7.200.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi yang terlaksana	12 Bulan	127.200.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	2 Jenis	15.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik	2 Jaringan	5.400.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terealisasi	12 Bulan	60.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara dan Terbayarkan Pajaknya	3 Unit	24.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang Terpelihara	2 Unit	6.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%	1.463.280.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana			
			Kelurahan Sapaya				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	1 Kelurahan	250.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan	1 Kelurahan	491.640.000	
			Kelurahan Jenebatu				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	1 Kelurahan	250.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan	1 Kelurahan	471.640.000	
16	Kecamatan Manuju					3.229.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	3.229.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	100 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	3.000.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas	15 Orang		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	12.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 %		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	15.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	35.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi Pengadaan BMD	100 %		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Umum yang diselenggarakan	2 Jenis		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	6.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	1 Unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.000.000	
17	Kecamatan Tombolopao					7.019.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen 100 Persen	3.235.750.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	100 Persen		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16 Orang/bulan	2.640.750.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah asn yang mendapatkan pakaian dinas	18 Orang		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	22.500.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 Persen		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.500.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Umum yang diselenggarakan	13 Jenis		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.500.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	450.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	7 Unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	45.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 Persen	1.250.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 Persen		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	450.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	800.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.000.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			27.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.500.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.500.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.500.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			14.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	40.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			300.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.500.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.000.000.000	
18	Kecamatan Bontonompo					7.880.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	3.680.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan yang diproses pencairannya	8 Jenis		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	3.080.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adm Kepegawaian yang terlaksana	100 %		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	35.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adm. Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100 Persen		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	85.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Daerah	100 %		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	16.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	50.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	45.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	235.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	75.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	9.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%	4.200.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana	100%		
			Kelurahan Bontonompo				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	500.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	900.000.000	
			Kelurahan Tamallayang				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	500.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	900.000.000	
			Kelurahan Kalase"rena				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	500.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	900.000.000	
IV	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					3.611.200.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.863.200.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	1.500.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	19 Laporan	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	16.500.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35 Laporan	2.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	150.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	80.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	1		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			70.000.000	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjangan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase orang yang mengikuti rapat koordinasi 100 % dan pelatihan bela negara	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	70.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.570.000.000	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah permohonan bantuan keuangan yang diverifikasi	10 Dokumen		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 Orang	1.570.000.000	
				Jumlah partai yang mengikuti rapat koordinasi	10 lembaga		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			32.000.000	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang difasilitasi pendaftarannya	100%		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	32.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			32.000.000	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang difasilitasi pendaftarannya	100 %		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	32.000.000	
				Jumlah ormas yang diawasi Jumlah ormas yang dibina	30 lembaga 30 lembaga		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang ditindalanjuti	100 %	44.000.000	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah laporan potensi konflik antar golongan	4 Laporan		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi	50 Orang	44.000.000	

Sungguminasa, Juni 2022

Pt. Kepala Bappeda Kab. Gowa



Drs. H. Alimuddin Hakim, MM.

NIP. 196504091994031009

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat uraian Indikator Kinerja Bidang Urusan sesuai dengan Rakortekrenbang Tahun 2022
4. Kolom ini memuat nomenklatur Program/Kegiatan/sub kegiatan (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023);

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

5. Kolom ini memuat indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2023 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023);
6. Kolom ini memuat besaran target dan satuan indikator program/kegiatan/ sub kegiatan pada tahun 2023 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023);
7. Kolom ini memuat besaran pagu program/kegiatan/subkegiatan (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023); dan
8. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

**REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL**

KABUPATEN GOWA

NO.	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2023				
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2023)	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pendidikan									
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	127.004.500	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%		
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	85%		
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			481.270.680	
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	6 Paket	274.754.000	
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11557 Peserta	8.922.000.000	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	271 Satuan Pendidikan	47.175.000	
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru berprestasi di tingkat Provinsi dan	87 % Nasional		
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik yang Profesional	1703 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	413 Dokumen	2.427.080.725	
								12.279.284.905	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan									
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persen		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	110.000.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100 Persen		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	906 Orang/bulan	70.316.283.287	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	69.372.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	60.994.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.392.103	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.000.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.500.000	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	145.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	149.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	1 laporan	350.000.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	28.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
						Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100 Persen		
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
						Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
						Persentase layanan pemenuhan UKP dan UKM	100 Persen		
						Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 Persen		
						Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
						Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
						Persentase warga negara terduga TBC yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
						Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
						Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
						Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1 : 273.91 Rasio		
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP yang terlaksana	100 Persen		
					Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	10.000.000	
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1.000.000.000	
					Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	8.200.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	16.500.000.000	
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	2.050.000.000	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	710.000.000	
					Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	101.000.000	
					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	68.320.000	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12932 Orang	35.000.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12221 Orang	55.000.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12205 Orang	15.000.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42311 Orang	12.500.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39922 Orang	7.500.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	260307 Orang	5.500.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39444 orang	10.000.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52086 Orang	12.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8631 Orang	5.500.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1120 Orang	15.000.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6230 Orang	10.000.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12173 Orang	5.500.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	15.000.000	
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	33.000.000	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	66.586.000.000	
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	20.011.500.000	
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	203.700.000	
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	550.000.000	
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100 Persen		
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	10.000.000	
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	48,3 :		
						Rasio tenaga medis (dokter, gigi) per satuan penduduk	73,7:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dokter spesialis, dan dokter per satuan penduduk	100.000 Rasio		
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	100 Persen		
					Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	12.500.000	
					Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	20 Persen		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan Kompetensinya	20 Persen		
					Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000	
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%		
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT yang dilakukan tindak lanjut pengawasan	90 Persen		
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	39.750.000	
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	4 Kegiatan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	45.500.000	
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan inpres	45 Persen		
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	25.000.000	
								187.926.811.390	
PERANGKAT DAERAH : RSUD Syekh Yusuf									
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	457 Orang/Bulan	35.634.389.335	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.150.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.700.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	138.600.000	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	220.500.000	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	633.150.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	12.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	264.600.000	
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	100 persen		
						Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 Persen		
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tata kelola yang meningkat	100 Persen		
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5 Dokumen	89.250.000	
					Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen	89.250.000	
								37.120.589.335	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan pelaporan yang disusun	12 Dok		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kegiatan investigasi keciptakaryaan	1 Dokumen	400.000.000	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Database Ke PU-an	1 Dokume		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas PUPR	18 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Perenc Perangkat Daerah	20 Dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	100.000.000	
						Dokumen Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan dari Pelaksanaan Musrembang	1 Dokumen		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	85.000.000	
						Telaksananya Penyusunan DPA SKPD	2 Dokumen	-	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	120.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai ASN yang tercatat	111 Orang		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	126 Paket	250.000.000	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	20.000.000	
						Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk Pegawai	1 Kegiatan		
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	89.97 %		
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun / dipelihara	3.8 KM		
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan Drainase Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	200.000.000	
					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	3250 M	2.150.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan atau Pedestrian serta Ruang terbuka hijau yang Lingkungannya Tertata	4 Km		
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan dikawasan permukiman ,pedestrian serta Ruang Terbuka Hijau yang tertata	3.5 KM		
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
					Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	484 Kawasan	2.000.000.000	
						Panjang Jalan Lingkungan yang Dibangun	4.84 KM		
					PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	91.25 %		
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	78 KM		
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah Dokumen Perencanaan / DED Jalan dan Jembatan	4 Dokuemn 4 Dokumen	1.500.000.000	
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	1 Dokumen 1 Dokumen	60.000.000	
					Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan Panjang Jalan yang Dibangun	20 Km 21,94 Km 132,73 Km 174,67 Km	300.000.000.000	
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang terpelihara/ direhabilitasi Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	30 Ruas 30 Km	800.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun	5 Unit 5 M	10.000.000.000	
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5 Unit 5 M	200.000.000	
					Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah Kegiatan Pemantauan Kegiatan	1 Dokumen 1 Kegiatan	70.000.000	
					Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2.100.000.000	
								320.205.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	100%		
					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	14 unit	20.300.000	
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %		
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	2.102.800	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 laporan	4.162.193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
					Penerbitan Izin pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %		
					Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	3.903.186	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	2.750.000	
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani			
					Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	18.750.000	
					Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	75.250.000	
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase meningkatnya rumah layak huni	75.70 %		
					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Rutilahu yang Tertangani			
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 unit	1.060.342.075	
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Kawasan Permukiman yang dikembangkan			
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	12.970.463	
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 %		
					Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Ganti Kerugian Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Umum	100%		
					Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	3.075.918.714	
						Jumlah bidang lahan Pemda yang dibebaskan	3 Bidang		
					PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				
					Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Rekomendasi Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	100%		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	13.168.506	
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aset Lahan Pemda yang tersertifikasi	150 Bidang		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	270.410.436	
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Serta Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22.841.250	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100 %		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	31 Bulan/orang/bulan	2.935.909.022	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Serta Peningkatan Kapasitas ASN	100 %		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan"	48 Paket	23.760.000	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	16.000.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan Bangunan Kantor	17 buah	1.906.200	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.320.000	
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	8.250.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	232.532.400	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi skpd	936 kali	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jenis Barang Milik Daerah Untuk Penunjang Kerja	100 %		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	38.500.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	12 unit	0	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	12 unit	65.570.190	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jenis Jasa Untuk Penunjang Kerja	100%		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	63.956.560	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kegiatan pendukung penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 kegiatan	0	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	1 laporan	305.168.601	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jenis Jasa Untuk Penunjang Kerja	100%		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	82.250.580	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	15 Unit	12.410.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	4.400.000	
								8.377.803.176	
PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja									
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen 100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 Persen		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	32.728.500	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 Persen		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	3.797.908.481	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	62.674.800	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket	75.000.000	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian"	5 Dokumen	15.237.900	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum	100 Persen		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	3 Paket	16.124.175	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket Kantor yang Disediakan	-	37.789.350	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.200.000	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.949.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	742.399.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	0		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	108.715.530	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	205.209.920	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	233.928.828	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	8.690.000	
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	Persentase Persentase warga negara yang memperoleh	90 %		
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen		
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	50 Kasus	7.777.080.000	
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	178.530.000	
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaa Jumlah Aparat yang bekerjasama dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	176.400.000	
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7 Laporan	12.873.100	
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	7 Laporan	15.926.700	
								13.590.365.284	
PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh ayanan informasi rawan bencana	100%		
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	250 Penduduk		
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 orang	26.000.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10 Desa/Kel		
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	12 Orang	50.000.000	
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah penduduk	2224 Penduduk		
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 orang	150.000.000	
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	100 Persen		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20 Orang/Bulan	200.000.000	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	150.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	20 Persen		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	120.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Telpon, Listrik dan Air	100 Persen		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah	100 Persen		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	150.000.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	50.000.000	
								26.945.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemadam Kebakaran									
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrai Keuangan	100 %		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang	1.600.000.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan	2 laporan	2.000.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	10 paket	50.000.000	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	5 Paket	70.000.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket barang logistik kantor yang disediakan	5 paket	20.000.000	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang tersedia	4 Paket	25.000.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan yang disediakan	2 Dokumen	2.400.000	
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 Laporan	3.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	139 Laporan	100.000.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		
					Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	35.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	50.000.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berfungsi dengan baik	85%		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	50.000.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	400.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	62%		
					Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Cakupan Area pelayanan	96 Persen		
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan	1.800.000.000	
					Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	10.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 unit	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	20 Orang	100.000.000	
					Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	5.000.000	
					Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan Bangunan/Lingkungan Wajib Proteksi	87 Persen		
					Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	700 Dokumen	25.000.000	
					Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase operasi pencarian dan pertolongan yang berhasil dilaksanakan	80 Persen		
					Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10 Laporan	25.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3 Unit	15.000.000	
						Jumlah Laporan Hasil			
					Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Membahayakan	1 Laporan	5.000.000	
								4.867.400.000	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %		
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	43 %		
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	42.000.000	
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	100 % 54 %		
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	39 %		
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	200.000 keluarga	280.000.000	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggar dan Evaluasi Kinerja	100%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan /pemeliharaan barang milik daerah	100%		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	27.373.600	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	6 Laporan		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	9.000.000	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	32 %		
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) 20 % yang aktif			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	105.200.000	
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		
						Persentase jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%		
						Persentase jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%		
						Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Difabel Yang Mendapatkan Alat Bantu	50 orang		
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	809.541.250	
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	737.000.000	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	41.837.500	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20.000.000	
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	27.000.000	
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	28.300.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%		
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%		
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	10 Makam	122.197.588	
								2.261.449.938	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen 1 Laporan	7.000.000	
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan	48 % Pelatihan		
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan		
					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Pembinaan Peningkatan Kecil Produktivitas Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan kecil 20 Perusahaan	20.000.000	
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK Swasta yang terakreditasi	38 Persen		
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Jumlah LPK Swasta yang mendapatkan pembinaan	13 Lembaga 13 LPK	20.000.000	
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	66 %		
					Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga yang mendapatkan Pembinaan	27 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	20 Orang 20 Orang	25.000.000	
								78.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	60 persen	10.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	60 persen		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.438.023.722	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	40.000.000	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah gedung BMD SKPD yang di inventaris	60 gedung		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	60 persen		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.000.000	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	30.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	80.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 persen		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000	
					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG	60%		-
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah yang telah dilatih PUG	60 persen		
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Perangkat daerah	50.000.000	
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatanyang mendapatkan pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	60 persen		
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	18 organisasi	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarnisasi	60 persen		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	50.000.000	
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Yang Terstandarnisasi	60%		
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan	50 Kasus		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Layanan	200.000.000	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarnisasi	8 Kecamatan		
					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Penyediaan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	60%		
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang di edukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga di tingkat kecamatan	150 Keluarga		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	50.000.000	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menyediakan Layanan Pembelajaran Keluarga yang Terstandarnisasi	18 Kecamatan		
						Persentase Keluarga yang di Edukasi oleh Lembaga Layanan Pembelajaran Keluarga di Tingkat Kecamatan	18 Kecamatan		
						Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang terstandarnisasi	60 Persen		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kota Layak Anak	65%		
					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan, kelurahan dan desa yang difasilitasi PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang dibina	60 persen		
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	50.000.000	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak yang terstandarnisasi	60 persen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyediaan Layanan Anak Korban Kekerasan Yang Terstandarnisasi	60 persen		
					Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan pencegahan kekerasan terhadap anak	60 persen		
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Perangkat Daerah	50.000.000	
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terstandarnisasi	60 persen	50.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Layanan	50.000.000	
								2.678.023.722	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan									
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	79%		
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ifrastruktur yang Direalisasikan	79%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	4 Unit	272.967.114	
					Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	4 Unit	61.800.000	
					Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	4 Unit	185.400.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	55.238.550	
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase terpenuhinya diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat	14 Persen 77 %		
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Stok Pasokan dan harga Pangan sesuai Kebutuhan Kabupaten	81%		
					Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25 Laporan	30.600.000	
					Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 Laporan	20.200.000	
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	7 Laporan	23.041.450	
					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	3 Dokumen	21.000.000	
					Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	7 Unit	21.000.000	
					Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 Unit	150.000.000	
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Stok Cadangan Pangan	100%		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	21.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	94.500.000	
					Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	0 Ton	26.653.021	
					Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase Komoditas Pangan Lokal yang Ditetapkan Harganya	100%		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	3 Laporan	30.900.000	
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Jumlah dokumen Angka ketersediaan energi (Kilo kalori perkapita per Tahun)	86 Persen		
					Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	35.350.000	
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	200.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi PerKapita Per Tahun	6 Laporan	25.250.000	
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rawan pangan	46%		
					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%		
					Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	35.350.000	
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan Yang Dilakukan	100%		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.250.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	600.000.000	
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase Kecamatan yang Menjadi Target Pengawasan dalam Setahun	100%		
					Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	2 Dokumen	25.750.000	
					Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	20.600.000	
					Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	15.450.000	
					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.750.000	
					Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	20.600.000	
					Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	15.450.000	
					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.750.000	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36.050.000	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketyersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.350.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.250.000	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.250.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	100 %		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.867.410.993	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	151.500.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.250.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	91 %		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Pelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	26.512.500	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layann Administrasi Umum Perangkat Daerah	86%		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15.150.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	25.250.000	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.575.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.535.000	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	130 Laporan	7.575.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	252.500.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	86 %		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	106.050.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.250.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86 %		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	12.120.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10.000.000	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Laporan	15.150.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	7.575.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	87 %		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.500.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.100.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	35.350.000	
								5.818.103.628	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup									
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Daerah	100 % 100 %		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen 3 Dokumen	24.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	6 Laporan 6 Dokumen	24.000.000	
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup CAKUPAN PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	80 % 100 %		
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Laporan Kualitas Lingkungan Hidup	3 Laporan		
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Penyediaan Laporan Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Kualitas Lahan	12 Dokumen 3 Laporan	40.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Penyediaan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan	15.000.000	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KAB KOTA	10 % 49,28 %		
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap dan PUU LH berdasarkan Berita kegiatan Acara Pengawasan	27 Usaha		
					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Dinilai Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100 % 100 %	16.500.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT KABUPATEN	80 % 72.00 %		
					Pengelolaan Sampah	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	100%		
					Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jalur yang mendapat penyapuan sampah secara rutin Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	32 Jalur 12.128 Ton	6.744.720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank Sampah yang aktif Sampah Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	110 Bank 10 Kelompok	102.500.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Kendaraan Operasional Penanganan Sampah Yang Beroperasi baik	0 Dokumen 46 Kendaraan	728.088.250	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah Tempat Pembuangan Sementara 122 TPS Sampah		70.000.000	
								1.026.832.970	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 100 %		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	4 Kegiatan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 Paket	117.000.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	38.700.000	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 Paket	54.900.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6750 Paket	379.500.000	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	10.035.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	10.035.000	
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	150 Laporan	95.850.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	534.750.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	12 Unit		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10 Unit	38.400.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	52.500.000	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	78.000.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	144.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	135.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	95.100.000	
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Pendaftaran Penduduk	100%		
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	90.3 Nilai		
					Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	18 Dokumen	18.000.000	
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	18 Dokumen	18.000.000	
					Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	938.700.000	
					Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	18 Dokumen	18.000.000	
					Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kenaikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Kependudukan	0.55 Nilai		
					Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90 Laporan	534.900.000	
					Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	6 Laporan	237.300.000	
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pegawai pendaftaran penduduk yang profesional	76.3 %		
					Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Laporan	237.300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	100%		
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah Penduduk yang dilayani pada pelayanan pencatatan sipil	70.2 %		
					Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	24.000.000	
								3.809.970.000	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	18.778.960	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	41.834.480	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	2.016.021.056	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.200.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.150.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	18.006.872	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	50.611.007	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	37.558.950	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	35.020.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	10.300.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	35.020.000	
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	69.685.577	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	5.150.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284 Laporan	255.028.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	44.780.074	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang 2 Unit Disediakan	-	27.356.800	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	412.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.170.750	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	3.707.176	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	15.550.631	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5.150.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	10.453.264	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 5 Unit Lainnya yang Dipelihara	-	1.931.250	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6.967.023	
					PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa Yang Dibina	100 %		
					Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa Yang Terfasilitasi	100 %		
					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	121 Dokumen	10.300.000	
					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	121 Dokumen	10.300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	18.591.500.000	
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan Desa	100 %		
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	100 %		
					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	121 Dokumen	25.750.000	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	121 Dokumen	35.000.000	
					Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	121 Orang	373.890.000	
					Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	121 Dokumen	111.774.107	
					Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	54 Laporan	5.400.000.000	
					Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	121 Dokumen	30.900.000	
					Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	121 Dokumen	124.630.000	
					Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD Yang Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	121 Orang 0 Orang	249.260.000	
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	167 Dokumen	246.542.860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	100%		
					Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	167 Dokumen	1.001.160.000	
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1457 Lembaga	1.176.260.000	
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36 Dokumen	45.812.958	
					Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20 Laporan	92.700.000	
					Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	121 Laporan	100.142.574	
					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100 Dokumen	103.000.000	
								30.918.354.369	
PERANGKAT DAERAH : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 25.68 % (MKJP)	22,04 nilai 9,34 % 59,9% 25,68%		
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
					Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP dan Program Bangga Kencana yang mendapatkan pembinaan	1179 orang	950.000.000	
					Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10 Unit	800.000.000	
					Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	950.000.000	
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	997 Orang	950.000.000	
								3.650.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.500.000.000	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			95.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			25.000.000	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			25.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	22.250.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	595.968.240	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	153.950.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	25.300.000	
					PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas 66 persen dan Angkutan yang memadai	66% 66 %		
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan Perlengkapan Jalan	53.09 persen		
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	450 Unit	855.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelayanan Uji Berkala	100 Persen		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	465.000.000	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang	85.000.000	
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	250 Dokumen	215.000.000	
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100 Unit	75.000.000	
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit Keselamatan	3.05 Persen		
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			50.000.000	
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	50 Laporan	35.000.000	
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai	66 Persen		
					Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	100 Persen	50.000.000	
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	100.000.000	
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin trayek	100 Persen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000	
					Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai	66 Persen		
					Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	35.000.000	
					Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000	
								30.695.218.240	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian									
		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	100%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.208.787.038	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.908.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan	7.340.000	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	6.753.000	
								3.292.788.038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERANGKAT DAERAH : Dinas Koperasi ,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah									
		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	100 %		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.607.438.261	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	114.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.600.000	
								1.727.038.261	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 100 %		
22					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	20.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	5.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	35.000.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.995.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	20.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku investasi Investasi Persentase kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan	50 Pelaku sektor unggulan 100 %		
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan	3 Kegiatan		
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	15 Dokumen	170.889.590	
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang diterbitkan Persentase izin yang diterbitkan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100% 100 % 100 %		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	13000 dokumen 20 aduan		
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Usaha Pelayanan Perizinan Berusaha	13650 Pelaku	117.000.000	
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	13000 Kegiatan Usaha	55.000.000	
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	90.828.758	
								3.908.718.348	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemuda dan Olahraga									
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 %		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2.720.911.681	
								2.720.911.681	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Warisan budaya yang tersertifikasi	2 Unit		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	10 kegiatan		
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pengembangan WBTB yang dilaksanakan	1 Objek	15.000.000	
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan yang dibina	40 Orang	70.000.000	
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	2 Unit		
					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	0.25 persen		
					Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	35.000.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Museum Daerah Yang dikelola	1 Unit		
					Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Museum Daerah yang dikelola	100 persen		
					Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	224.000.000	
					Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	364.000.000	
					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	112.000.000	
								820.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perikanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	50.000.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000	
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket	15.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 Laporan	95.000.000	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen	30.000.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	50 %		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	60.000.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	30.000.000	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	78.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	120.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	280.000.000	
								1.063.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perikanan									
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	1301 Ton		
					Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Laut	194.6 Ton		
					Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	16.019.741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3 Kelompok	10.000.000	
					Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	4 Unit Usaha	145.000.000	
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	15%		
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nelayan Mematuhi Penggunaan Alat tangkap Ramah Lingkungan	30 RTP		
					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.657.231	
								184.676.972	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Peternakan dan Perkebunan									
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN	100 %		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 orang/bulan	5.576.000.256	
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dilaksanakan	100%		
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan kegiatan penyuluhan pertanian	100 persen		
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian dikecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	100 unit	14.479.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								5.590.479.256	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura									
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Dihasilkan Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen 100 Persen		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	18.145.418	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	18.615.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	18.998.469	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.846.800	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 %		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	42.997.500	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	55.072.500	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	17.365.071	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	12.600.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	18.375.000	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.255.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 Kali	387.543.082	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Daerah	100 % Milik		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	78.991.500	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100% 100 %		
					Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Dokumen		
					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B, dan Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan / LCP2B	1 Dokumen	13.797.000	
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Prasarana Pertanian yang Dibangun	34 Unit		
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	6 Unit	997.500.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang dibangun,direhabilitasi dan dipelihara	6 Unit	630.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Km	4.497.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	378.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	378.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	220.500.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	378.000.000	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	295.000.000	
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75%		
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas areal bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	600 Ha		
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	300 Ha	276.125.000	
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	300 Ha	63.150.000	
								8.836.877.340	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perdagangan dan Perindustrian									
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun	100 persen		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19.767.500	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	43.151.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.827.090	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	100 persen		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.742.869.600	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59.305.500	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.868.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8.092.000	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100 persen		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	38.422.125	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	100 persen		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.031.000	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	33.800.500	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 persen		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.500.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.201.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	19.845.000	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	18.257.400	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	561.276.082	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 persen		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113.276.500	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	315.671.000	
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan dan STP / lanjutan Waralaba)	100%		
					Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan izin Usaha Toko Swalayan	1 Sub Kegiatan		
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pas	1 Dokumen	80.720.000	
					Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1 Sub Kegiatan		
					Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	24.979.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STPW) untuk penerima Waralaba dan Waralaba dalam Negeri	1 Sub Kegiatan		
					Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	74.349.000	
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase terbangunnya Pasar Rakyat yang representatif	61.29 %		
					Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Sub Kegiatan		
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	10.066.455.920	
					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	260.000.000	
					Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	2 Sub Kegiatan		
					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan	12 Dokumen	142.623.722	
					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan	12 Dokumen	742.015.046	
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kesesuaian harga jual pedagang dan ketetapan Pemerintah	1.001 % HET		
					Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Sub Kegiatan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	53.770.000	
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1 Sub Kegiatan		
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	59.350.000	
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Sub Kegiatan		
					Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	42.070.000	
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor bersih perdagangan	1699237.22 \$		
					Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Penyelenggaraan Promosi	4 Sub Kegiatan		
					Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10 Pelaku Usaha	50.000.000	
					Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha	305.000.000	
					Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha	66.799.900	
					Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	80 Pelaku	80.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0.056 %		
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	3 Sub Kegiatan		
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3600 Unit	77.700.000	
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	280 orang	39.900.000	
					Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	10 Unit	8.400.000	
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang dihasilkan IKM dan dipasarkan setiap tahun	46 Produk		
					Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Sub Kegiatan		
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120 UMKM	120.000.000	
					Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan 50 UMKM Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		55.000.000	
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam 120 UMKM Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		120.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan 50 UMKM Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		55.000.000	
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah 82.66 % di Kabupaten/Kota			
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3 Sub Kegiatan		
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	99.300.000	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	282.197.500	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	488.500.000	
								18.473.291.385	
PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah									
		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			SEKRETARIAT DAERAH				
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	100%		
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Pemantauan Kebijakan sumber daya alam	100 persen		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang terfasilitasi	1 Kali	800.000.000	
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			SEKRETARIAT DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan 100 persen kebijakan Perekonomian Daerah			
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan pengelolaan BUMD dan BLUD yang tersusun.	2 Dokumen	35.000.000	
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Kegiatan pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	100.000.000	
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan 100 persen kebijakan Pembangunan Daerah			
					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pembangunan yang tersusun.	2 Dokumen	1.500.000.000	
								2.435.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Sekertariat DPRD									
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			SEKRETARIAT DPRD				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 %		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan	24.959.648.934	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.000.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 %		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	218 Paket	350.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	250.000.000	
					Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase publikasi di media	100 %		
					Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	330.400.000	
					Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 Persen		
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	17.800.000.000	
								44.690.048.934	
PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			PERENCANAAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 Persen		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	289.036.620	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	27.000.000	
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan (3 pembangunan daerah yang Bidang) dilaksanakan	100%		
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Sasaran RPJMD, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, tercapai atau melebihi target tahunan	100%		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	4 Dokumen	47.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	18.000.000	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator sasaran RJMD bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tercapai atau melebihi target tahunan	100%		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	17.000.000	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	10.000.000	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	22.000.000	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase indikator sasaran RJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan tercapai atau melebihi target tahunan	100%		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	17.000.000	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 laporan	15.000.000	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	9.000.000	
								471.036.620	
PERANGKAT DAERAH :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah									
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			KEUANGAN				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang	100 %		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	81.200.000	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	1 Orang	12.500.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas	30 Unit	127.341.600	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	13 Unit	23.696.960	
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah (BMD)	100%		
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang diselesaikan	100 Persen		
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	118.827.800	
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	101.327.900	
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	33.378.400	
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	217.352.300	
								715.624.960	
		PERANGKAT DAERAH : Badan Pendapatan Daerah							
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			KEUANGAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	60.000.000	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	10.000.000.000	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	370.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	85.486.042	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	30.250.000	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	5.000.000	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	60.000.000	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	25.000.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.750.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan	1 buah	-	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.955.144	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	140.000.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	150.512.730	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	53 unit	65.333.100	
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud, yang Dipelihara	5 Uni	250.000.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	94.68 %		
						Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Pajak Daerah	12,20 % 100 % Potensi		
						Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	96.72 %		
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	20%		
						Persentase Penyelenggaraan Penagihan k Daerah Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	20 % Paja 100 % potensi		
						Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	20 % Paja		
					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Dokumen	69.430.585	
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	68.487.071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	81.521.063	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	529 unit	750.000.000	
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	400.000.000	
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	87.105.911	
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1089 Dokumen	131.937.887	
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 Layanan	3.813.950	
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	3.686.562	
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	863.965.386	
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	99.890.093	
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8 Dokumen	99.720.544	
								14.223.846.068	
PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM									
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KEPEGAWAIAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 persen		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	80.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	80.000.000	
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40%		
					Mutasi dan Promosi ASN	persentase mutasi dan promosi asn yang terlaksana	100 persen		
					Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	100.000.000	
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	110.000.000	
					Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	250.000.000	
					Pengembangan Kompetensi ASN	persentase peningkatan kompetensi ASN	100 persen		
					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 orang	52.572.000	
					Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	50.000.000	
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	50.000.000	
					Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	30 orang	30.000.000	
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	20.000.000	
					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	300 orang	45.000.000	
					Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan 1 Orang Kedisiplinan		48.733.750	
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			40.000.000	
					Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	100.000.000	
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
					Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	30 persen		
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 orang	150.000.000	
								1.226.305.750	
PERANGKAT DAERAH : Badan Penelitian dan Pengembangan									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.284.960	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.100.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.548.632.438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.550.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6.780.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100 Persen		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19 Paket	12.350.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	17.650.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Jenis	4.800.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat Jumlah snack rapat Jumlah perjalanan dinas	30 Laporan 350 Dos 350 Dos 135 kali	112.700.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 Persen		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	26.500.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.500.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	84.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil kelitbangan Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Persentase inovasi yang diimplementasikan	2 Dokumen 100 % 100 %		
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	100.000.000	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Dokumen		
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	150.000.000	
					Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	150.000.000	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi yang ditetapkan	100 Persen		
					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	100.000.000	
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi jumlah peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis 50 orang Inovasi Daerah	1 Laporan	28.187.500	
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	jumlah Inputan Data Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 kegiatan 1 Laporan	14.412.310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	50.000.000	
								2.453.947.208	
PERANGKAT DAERAH : Inspektorat									
		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			INSPEKTORAT DAERAH				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	13 Dokumen		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	4.796.315.000	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	327.340.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.492.000	
								5.135.147.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bontomarannu									
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			KECAMATAN				
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %		
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	50.000.000	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase status desa dan kelurahan cepat berkembang	100 %		
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase koordinasi pelaksanaan pendampingan desa di wilayah kecamatan	100%		
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	50.000.000	
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	100%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.500.000.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi Pengadaan BMD	100 %		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	50.000.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	200.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Umum yang diselenggarakan	2 Kegiatan		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Kegiatan Jasa Pelayanan umum yang terlaksana	12 kegiatan		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	1 Unit		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	50.000.000	
						Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dan pembayaran pajak yang terlaksana	3 kegiatan		
								4.400.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Tompobulu									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.000.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			27.000.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.500.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.500.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000.000	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.500.000	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu			14.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	40.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			300.000.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.000.000	
								#REF!	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pallangga									
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase kegiatan administrasi keuangan yang 100 persen terlaksana			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah asn yang menerima gaji dan tunjangan	45 orang	4.000.000.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	40.000.000	
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi pengadaan BMD	100 persen		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	4 unit	50.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kegiatan pelayanan umum yang diselenggarakan	2 kegiatan		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah kegiatan pelayanan umum yang diselenggarakan	4 kegiatan	500.000.000	
								550.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bajeng									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN				
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kegiatan	150.000.000	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	523.635.721	
								673.635.721	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Biringbulu									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Umum Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 100 %		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PPersentase laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana tepat waktu	100%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	6.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian yang terlaksana	100%		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	17.160.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	1.844.892	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.500.000	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	1.745.431	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	9.289.951	
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/material yang disediakan	8 Paket	4.644.975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya Makan Minum Rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan Dinas 100 Kali	150 Orang	26.452.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.500.000	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2.750.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.500.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Mesin WIFI kantor yang disediakan	1 Unit	7.919.116	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium PPK dan Kepala Lingkungan	12 Bulan	187.560.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.893.364	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah LCD Proyektor Laptop yang disediakan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 1 Unit	6.500.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Rumah Jabatan Dinas Kecamatan yang 1 Unit direhabilitasi		250.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18 Unit yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.696.640	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelesaian pelayanan publik	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi penyelenggaraab kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	8.940.000	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100% 100 %		
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	"Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa"	120 Orang	8.280.000	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase yang terlaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	703.274.730	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	694.218.640	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyakatan Tingkat Kecamatan	100%		
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	"Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan"	3 Lembaga	10.000.000	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	"Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan"	3 Unit	15.000.000	
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	"Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat"	12 Laporan	10.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	"Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan"	100%		
					Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	22.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian program urusan pemerintahan umum	100%		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	100%		
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	12 Dokumen 3 Kali		-
								2.114.669.739	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Barombong									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	32.000.000	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			35.000.000	
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang dibayarkan gaji dan tunjangan	14 Bulan	2.200.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	10.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jaringan	20.000.000	
								2.464.500.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bajeng Barat									
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN				
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%		
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana	100%		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			15.000.000	
								15.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Parangloe									
		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan			KECAMATAN				
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	100%		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang terlaksana	90 persen		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Kelurahan	1.000.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	2.000.000.000	
								3.000.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bontonompo Selatan									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		8.500.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang di terpelihara dan terbayarkan pajak tahunannya	100 Persen		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.000.000	
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adm.umum perangkat daerah yang terlaksana	100 Persen		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	9.500.000	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	2.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	140.000.000	
								365.500.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Parigi									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
						Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	100%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	2.000.000.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 %		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	50.000.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi Pengadaan BMD	100%		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	2 unit	50.000.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Umum yang diselenggarakan	3 Jenis		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 kegiatan	150.000.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	1 Unit		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	50.000.000	
								2.380.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Somba Opu									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN				
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	100%		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	200.000.000	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	650.000.000	
								850.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pattallassang									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN				
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 Persen		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pendampingan desa di wilayah kecamatan	1 kegiatan		
					Pembnagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			200.000.000	
					Pemberdayaan Masyarakat di Keulurahan	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	1 Laporan	650.000.000	
								850.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Botolempangan									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	100%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	1.500.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas	14 Orang		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14 paket	10.000.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi Pengadaan BMD	100 %		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	20.000.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Umum yang diselenggarakan	4 Jenis		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Laporan	13.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	60.000.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	1 Unit		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	60.000.000	
								1.663.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Tinggimoncong									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana			
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	1 Kelurahan	250.000.000	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan	1 Kelurahan	491.640.000	
								741.640.000	
PERANGKAT DAERAH : Manuju									
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	100 %		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	3.000.000.000	
								3.000.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Tombolo Pao									
		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan			KECAMATAN				
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 Persen		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 Persen		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	450.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	800.000.000	
								1.250.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bontonompo									
		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			KECAMATAN				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan yang diproses pencairannya	8 Jenis		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	3.080.000.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Adm. Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100 Persen		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.000.000	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Daerah	100 %		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	16.000.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000	
								3.146.000.000	
PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang difasilitasi pendaftarannya	100%		
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	32.000.000	
								50.000.000	

Sungguminasa, Juni 2022

Plt. Kepala Bappeda Kab. Gowa



Drs. H. Alimuddin Hakim, MM.
NIP. 196504091994031009

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat keterangan kode yang dicantumkan, PN untuk Prioritas Nasional dan PP untuk Program Prioritas;
3. Kolom ini memuat Prioritas Nasional dan Program Prioritas tahun 2023 yang terdapat pada RPJMN 2020-2024;
4. Kolom ini memuat Indikator Program Prioritas tahun 2023 yang terdapat pada RPJMN 2020-2024;
5. Kolom ini memuat Target indikator Program Prioritas tahun 2023;
6. Kolom ini memuat nomenklatur Program/Kegiatan/Sub kegiatan (lihat BAB VI RKPD provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD kabupaten/kota Tahun 2023);
7. Kolom ini memuat indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (lihat BAB VI RKPD provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD kabupaten/kota Tahun 2023);
8. Kolom ini memuat target dan satuan indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (lihat BAB VI RKPD provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD kabupaten/kota Tahun 2023);
9. Kolom ini memuat Pagu (lihat BAB VI RKPD provinsi Tahun 2023/ BAB V RKPD kabupaten/kota Tahun 2023); dan